



PROFESIONALISASI BK UNTUK MAHASISWA 2025



PENULIS :

RENATHA ERNAWATI
BIMBINGAN DAN KONSELING

PROFESIONALISASI BK UNTUK MAHASISWA

Penulis:

Renatha Ernawati



UKI PRESS

Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2025

PROFESIONALISASI BK UNTUK MAHASISWA

Penulis:

Renatha Ernawati

Editor:

Eustalia Wigunawati, S.Psi., M.A.

ISBN: 978-623-8737-69-7

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta - 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “Profesionalisasi BK Mahasiswa” ini dapat disusun dan disajikan kepada para pembaca, serta semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan profesi konselor di Indonesia.

Buku ini disusun sebagai wujud kontribusi dalam menjawab tantangan kebutuhan akan profesionalisme di bidang Bimbingan dan Konseling (BK). Di tengah dinamika perkembangan dunia pendidikan, eksistensi konselor sebagai tenaga profesional menjadi sangat krusial dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Oleh karena itu, upaya profesionalisasi BK bagi mahasiswa bukanlah sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan yang harus diupayakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Isi buku ini membahas berbagai aspek penting yang menunjang proses profesionalisasi BK, mulai dari pengertian profesi dan ciri-ciri profesionalitas, kompetensi yang harus dimiliki oleh calon konselor, hingga tantangan serta peluang yang dihadapi dalam praktik layanan BK di berbagai konteks. Penyusunan materi dalam buku ini juga merujuk pada regulasi nasional dan landasan teoretis yang relevan, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang dapat dipercaya dan aplikatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan

manfaat, memperkaya khasanah literatur di bidang BK, dan menjadi pendorong semangat profesionalisme di kalangan mahasiswa sebagai calon konselor masa depan.

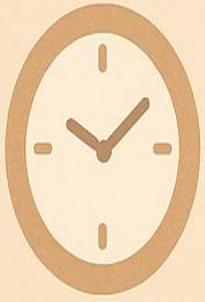
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini.

Renatha Ernawati,

1 Juli 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I DEFINISI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING.....	1
BAB II KOMPETENSI KEPERIBADIAN KONSELOR DAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU BK.....	87
BAB III SIKAP PERSONAL KEGURUAN	115
BAB IV LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH.....	159
BAB V TANTANGAN DAN PELUANG KONSELOR ABAD-21	191
BAB VI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING.....	239
BAB VII IMPLIKASI PROFESIONALISASI BK DI SEKOLAH.....	263
BAB VIII KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING.....	285



RUANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING



BAB I

DEFINISI PROFESI

BIMBINGAN DAN KONSELING

❖ Pengertian Profesi

Secara etimologis, istilah "profesi" berasal dari kata *profession* dalam bahasa Inggris, yang berakar dari bahasa Latin *profesus*, yang berarti "mampu" atau "ahli" dalam suatu bidang pekerjaan. Profesi dapat diartikan sebagai suatu jenis pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan tertentu. Selain itu, profesi juga mensyaratkan kualifikasi tertentu, serta mengandung tanggung jawab dan berpegang pada kode etik yang berlaku (Khadijah, 2022).

Pekerjaan yang bersifat profesional memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya, karena pelaksanaannya memerlukan kemampuan dan keahlian khusus. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus, yang diperoleh melalui proses pendidikan akademis yang intensif. Dengan demikian, profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut tingkat keahlian tertentu. Artinya, tidak setiap orang dapat menjalankan profesi tersebut; diperlukan persiapan yang matang melalui pendidikan dan pelatihan khusus.

Terdapat empat istilah yang berkaitan dengan konsep profesi, yaitu sebagai berikut:

- ✚ **Professional**, merujuk pada keahlian atau kemampuan seseorang dalam bidang yang dipilihnya.

- 1) **Profesionalisme**, menggambarkan sikap seseorang yang memiliki profesi dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kemampuannya serta mengembangkan strategi-strategi yang diterapkan dalam profesinya.
- 2) **Profesionalitas**, menunjukkan sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan profesi atau bidang pekerjaan yang dipilih.
- 3) **Profesionalisasi**, mengacu pada proses pengembangan keprofesionalan seseorang, yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan lainnya.

Ciri-Ciri Profesi

Beberapa ciri yang melekat pada suatu profesi antara lain sebagai berikut:

- a) Pertama, profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial, karena pelaksanaannya didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain, pengakuan dari masyarakat menjadi syarat mutlak bagi suatu profesi, bahkan lebih penting dibandingkan pengakuan dari pemerintah.
- b) Kedua, profesi menuntut keterampilan khusus yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang, intensif, serta dilaksanakan di lembaga-lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial (*accountable*). Proses perolehan keterampilan tersebut tidak bersifat rutin semata, melainkan melibatkan kemampuan pemecahan masalah. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesi diperlukan

kemampuan penilaian yang mandiri (*independent judgment*) dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar menjalankan tugas secara mekanis.

- c) Ketiga, profesi didukung oleh disiplin ilmu yang sistematis (*a systematic body of knowledge*), bukan sekadar kumpulan pengetahuan acak atau berbasis pada akal sehat umum (*commonsense*).
- d) Keempat, terdapat kode etik yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh anggota profesi, disertai dengan sanksi yang tegas dan jelas bagi mereka yang melanggar. Penegakan kode etik ini diawasi oleh organisasi profesi terkait.
- e) Kelima, sebagai konsekuensi atas layanan yang diberikan kepada masyarakat, para anggota profesi, baik secara individu maupun kelompok, berhak memperoleh imbalan, baik dalam bentuk finansial maupun materiil.

Persyaratan Profesi

Agar sebuah pekerjaan bisa diakui sebagai profesi, dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Menurut Dr. Wirawan, MSL, SP. A. (Sahaka, 2019), syarat utama dari sebuah profesi adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Penuh

Suatu profesi merupakan pekerjaan penuh, yang berarti pekerjaan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat atau individu. Tanpa adanya profesi ini, masyarakat akan menghadapi berbagai kesulitan. Sebagai contoh, tanpa keberadaan pengawas, banyak guru yang mungkin mengajar tanpa standar yang memadai, atau kepala sekolah/kepala madrasah yang

cenderung bersikap otoriter. Profesi merupakan pekerjaan yang meliputi tugas, fungsi, kebutuhan, serta aspek atau bidang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan anggota masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, profesi guru secara khusus mencakup aspek pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah. Sementara itu, profesi pengawas meliputi fungsi penilaian dan pembinaan yang ditujukan kepada guru, kepala sekolah/madrasah, siswa, serta seluruh staf sekolah.

Ilmu Pengetahuan

Untuk melaksanakan suatu profesi, diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan atau sains tertentu. Tanpa landasan ilmu tersebut, profesi tidak dapat dijalankan secara optimal. Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan profesi terdiri atas cabang ilmu utama dan cabang ilmu pendukung. Cabang ilmu utama merupakan bidang ilmu yang menentukan esensi dari suatu profesi. Sebagai contoh, dalam profesi pengawas pendidikan, cabang ilmu utamanya adalah supervisi atau pengawasan pendidikan. Dalam profesi guru, cabang ilmu utamanya adalah ilmu pendidikan, sementara cabang ilmu pendukungnya antara lain psikologi.

Hal ini berbeda dengan jenis pekerjaan tertentu yang tidak tergolong profesi, seperti sopir, petugas pengisian bahan bakar, atau tukang ledeng. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak memerlukan penguasaan cabang ilmu pengetahuan tertentu, melainkan lebih menitikberatkan pada keterampilan praktis dan ketahanan fisik. Oleh karena itu, untuk menjalankan pekerjaan semacam itu, tidak diperlukan pendidikan di perguruan tinggi; cukup dengan lulus tes dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi kerja atau oleh standar pekerjaan tersebut.

Aplikasi Ilmu Pengetahuan

Pada dasarnya, ilmu pengetahuan memiliki dua aspek utama, yaitu aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi merupakan penerapan teori-teori ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan sesuatu atau memecahkan permasalahan yang dihadapi. Profesi, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan, menyelesaikan, atau menghasilkan suatu karya atau layanan tertentu. Oleh karena itu, seorang profesional dituntut tidak hanya menguasai teori ilmu pengetahuan yang relevan, tetapi juga memiliki keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara efektif dalam praktik.

Lembaga Pendidikan Profesi

Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang profesional dalam melaksanakan profesinya harus diperoleh melalui pendidikan di lembaga pendidikan tinggi yang secara khusus berperan dalam mengajarkan, menerapkan, meneliti, serta mengembangkan bidang ilmu tersebut. Kompetensi lembaga pendidikan tinggi dalam memberikan pengajaran kepada calon profesional telah dievaluasi dan diakui oleh lembaga akreditasi yang berwenang. Seorang profesional diwajibkan menempuh pendidikan formal, lulus ujian yang ditetapkan, serta memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan tinggi di bidang ilmu yang relevan dengan profesinya.

Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah perilaku yang memenuhi standar dan persyaratan tertentu, bukan semata-mata cerminan sifat atau kebiasaan pribadi. Perilaku ini harus ditunjukkan

oleh seorang profesional dalam menjalankan tugas-tugas profesinya.

Salah satu aspek penting dalam perilaku profesional adalah otonomi, atau kemandirian, dalam pelaksanaan profesi. Seorang profesional diharapkan mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta menjaga independensinya dari pengaruh eksternal, termasuk kepentingan pribadi. Meskipun demikian, prinsip kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait tetap diperlukan, guna mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas profesi yang dijalani.

Standar Profesi

Standar profesi merupakan seperangkat prosedur, norma, dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan profesi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa output, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tetap tinggi, sehingga kebutuhan individu maupun masyarakat dapat terpenuhi secara optimal pada saat diperlukan.

Kode Etik Profesi

Suatu profesi dijalankan oleh seorang profesional dengan menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma etika profesi. Etika merupakan sistem nilai yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Etika berkaitan erat dengan prinsip kebenaran, kebaikan, serta kewajiban atau keharusan dalam suatu tindakan. Secara langsung, etika mempertanyakan jenis tindakan apa yang benar atau salah, baik atau buruk, serta layak atau tidak layak dilakukan. Dalam konteks profesi, kode

etik merupakan sekumpulan norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

❖ **Profesi Keguruan**

Profesi keguruan adalah profesi yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keguruan serta memiliki keahlian dalam proses pengajaran. Seorang guru juga mengabdikan diri kepada masyarakat dengan menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Djamarah (dalam Prasetya et al., 2021) menjelaskan berbagai tugas yang diemban oleh seorang guru sebagai pendidik, atau siapapun yang memilih untuk menjadi guru. Semua tugas guru dijelaskan sebagai berikut:

1) Korektor

Guru berperan sebagai korektor yang memahami permasalahan pendidikan. Ia harus mampu membedakan nilai yang baik dan buruk yang mungkin telah dimiliki peserta didik sebelum masuk sekolah. Guru bertugas mempertahankan nilai positif dan menghapuskan nilai negatif dari jiwa serta karakter siswa, dengan merumuskan tindakan yang tepat.

2) Inspirator

Sebagai inspirator, guru menjadi sumber inspirasi bagi siswa dalam proses belajar. Guru diharapkan menjadi role model yang memberikan petunjuk tentang cara belajar yang efektif, dengan kemampuan

menghubungkan teori dan praktik agar pembelajaran lebih bermakna.

3) Informan

Guru berperan sebagai informan yang menyampaikan informasi terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bahan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Penyampaian informasi yang akurat dan efektif sangat penting untuk mendukung pemahaman siswa.

4) Organisator

Dalam peran sebagai organisator, guru mengelola seluruh proses pembelajaran. Tugasnya meliputi perencanaan akademik, penyusunan tata tertib kelas/sekolah, pengaturan kalender akademik, serta pengorganisasian kegiatan agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal.

5) Motivator

Sebagai motivator, guru mendorong siswa untuk tetap semangat dan aktif dalam belajar. Guru perlu menganalisis berbagai motif yang menyebabkan siswa kehilangan motivasi atau mengalami penurunan prestasi, sehingga dapat merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi mereka.

6) Inisiator

Guru sebagai inisiator berperan dalam menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru yang mendorong kemajuan pendidikan. Inisiatif ini mencakup pengembangan strategi pembelajaran dan pembentukan iklim belajar yang kondusif di lingkungan sekolah.

- **Syarat-syarat Profesi Guru**

Seorang guru profesional harus memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni "*Tut wuri handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa.*" Artinya, seorang guru tidak hanya cukup menguasai materi pembelajaran, melainkan juga harus mampu membimbing, menjadi teladan bagi peserta didik, serta terus mendorong mereka untuk berkembang dan maju.

Untuk menjadi pendidik profesional, seorang guru harus menguasai kompetensi keguruan. Kompetensi tersebut mencakup seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru dan dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Dalam pandangan kebijakan nasional, pemerintah telah menetapkan empat tipe kompetensi guru sebagai berikut:

- 1) **Kompetensi Pedagogik**

Merupakan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini mencakup pemahaman karakteristik peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik agar mereka mampu mengaktualisasikan kemampuan yang dimilikinya.

- 2) **Kompetensi Kepribadian**

Mengacu pada kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan senantiasa menjunjung tinggi akhlak mulia.

3) **Kompetensi Profesional**

Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Penguasaan ini memungkinkan guru untuk membimbing peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

4) **Kompetensi Sosial**

Merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, serta masyarakat di lingkungan sekitar.

❖ **Bimbingan dan Konseling**

Dalam literatur asing, istilah *guidance* kerap disamakan maknanya dengan istilah *helping*. Oleh karena itu, secara harfiah bimbingan dapat diartikan sebagai suatu tindakan menolong atau memberikan bantuan. Namun, penting untuk dipahami bahwa bentuk bantuan yang dimaksud dalam konteks bimbingan bukanlah bantuan langsung yang bersifat memenuhi kebutuhan fisik secara instan—seperti memberikan makanan kepada individu yang kelaparan, atau membantu seorang anak menyeberang jalan.

Sebaliknya, bantuan dalam bimbingan lebih bersifat memberdayakan individu agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri. Kebutuhan yang dimaksud di sini sangat beragam, mencakup antara lain: kebutuhan untuk berteman, berprestasi, mengaktualisasi diri, memperoleh penghargaan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan berbagai kebutuhan perkembangan lainnya.

Agar individu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara efektif, mereka perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Dalam konteks inilah bimbingan berperan sebagai suatu proses pemberdayaan, di mana individu diberikan bekal berupa pengetahuan, pembelajaran tentang nilai-nilai, sikap positif, serta keterampilan hidup yang relevan. Dengan demikian, bimbingan dapat dipandang sebagai suatu upaya sistematis yang bertujuan untuk membekali individu agar mampu mengelola kehidupannya secara mandiri, bertanggung jawab, dan adaptif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Salah satu definisi klasik mengenai bimbingan menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh individu yang telah terlatih secara profesional, memiliki kepribadian yang matang, serta latar belakang pendidikan yang memadai. Bantuan ini ditujukan kepada individu dari berbagai kelompok usia, dengan tujuan agar mereka mampu mengelola kehidupannya secara mandiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, mengambil keputusan secara sadar, serta bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap pilihan atau keputusan yang diambil dalam hidup mereka.

Dalam konteks penerapannya di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah, bimbingan dipahami sebagai suatu sistem komprehensif yang mencakup fungsi-fungsi, pelayanan, dan program-program pendidikan yang dirancang untuk mendukung perkembangan pribadi serta meningkatkan kompetensi psikologis peserta didik. Definisi ini menegaskan bahwa bimbingan memiliki kedudukan yang integral dalam sistem pendidikan, bukan sekadar aktivitas tambahan.

Sebagai bagian dari komponen pendidikan, layanan bimbingan mencakup penerapan berbagai strategi dan pendekatan yang secara sistematis dirancang untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal, baik dalam aspek kepribadian, sosial, akademik, maupun karier. Dengan demikian, bimbingan sebagai suatu bentuk pelayanan pendidikan memiliki peran yang sejajar dengan proses pengajaran (instruksional), di mana kedua layanan ini berkontribusi secara sinergis terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Seperti halnya pengajaran, bimbingan melibatkan serangkaian fungsi dan intervensi yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mendukung proses belajar dan pengembangan diri mereka secara berkelanjutan.

Istilah konseling, yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *counseling*, mengacu pada suatu bentuk pendekatan dalam pelayanan atau intervensi psikologis. Konseling melibatkan suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang telah terlatih secara khusus dan seorang klien yang membutuhkan bantuan. Hubungan ini bersifat antarpribadi (*person-to-person*), meskipun dalam praktiknya, dapat melibatkan lebih dari dua orang dalam situasi tertentu.

Tujuan utama dari hubungan ini adalah untuk membantu klien memahami dirinya sendiri, memperoleh insight tentang kehidupannya, serta belajar meraih tujuan-tujuan pribadi yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang valid serta mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah emosional dan interpersonal yang dihadapinya.

Definisi tersebut menegaskan bahwa konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat profesional sekaligus personal antara konselor dan klien. Hubungan ini

dirancang untuk mendorong perkembangan pribadi klien dan membantu mereka dalam menghadapi serta mengatasi permasalahan yang tengah dialami. Dalam konteks ini, konselor adalah seorang profesional yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memberikan layanan konseling, sedangkan klien adalah individu yang menerima bantuan dalam proses tersebut.

Permasalahan yang ditangani dalam proses konseling sangat bervariasi, meliputi isu-isu pribadi, emosional, sosial, hingga relasional, dan dapat bersifat preventif (pencegahan) maupun kuratif (penyembuhan atau pemecahan masalah).

Selain konselor, terdapat pula profesi lain yang memiliki kewenangan untuk memberikan layanan konseling, asalkan memenuhi persyaratan yang meliputi pendidikan formal dan pengalaman profesional yang relevan, seperti psikoterapis, psikolog, atau pekerja sosial. Hal ini menegaskan bahwa konseling adalah suatu layanan profesional yang berlandaskan pada kompetensi khusus, dengan tujuan utama memberdayakan individu dalam menghadapi tantangan kehidupannya.

- **Bidang Pelayanan Bimbingan dan Konseling**

Terdapat empat bidang perkembangan utama yang menjadi sasaran khusus dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu: bidang akademik, bidang karier, bidang pribadi, dan bidang sosial. Keempat bidang ini dirancang untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal secara holistik. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing bidang:

1) Bidang Akademik

Pelayanan bimbingan dan konseling dalam bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi akademik, memahami gaya belajar yang sesuai, mengelola waktu belajar secara efektif, serta mengatasi berbagai hambatan belajar yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat mencapai prestasi akademik yang optimal sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

2) Bidang Karier

Fokus pelayanan dalam bidang ini adalah membantu peserta didik merencanakan masa depan kariernya secara realistis dan bertanggung jawab. Layanan bimbingan dan konseling membantu siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat, memahami berbagai pilihan karier, serta mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3) Bidang Pribadi

Dalam bidang ini, pelayanan bimbingan dan konseling berperan dalam membantu peserta didik memahami dan menerima dirinya sendiri secara positif. Siswa dibimbing untuk mengembangkan kematangan emosional, ketahanan diri, serta keterampilan pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, layanan ini juga membantu siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan pribadi yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.

4) Bidang Sosial

Pelayanan bimbingan dan konseling pada bidang sosial bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan interpersonal yang baik, kemampuan berkomunikasi secara efektif, serta kemampuan menjalin hubungan sosial yang positif di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, layanan ini juga membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial dan mengelola konflik antarpribadi secara konstruktif.

- **Fungsi Bimbingan dan Konseling**

Berbagai ahli telah mengemukakan beragam pandangan mengenai fungsi bimbingan dan konseling (BK), sehingga terdapat sejumlah fungsi yang dapat dirumuskan berdasarkan berbagai perspektif tersebut. Secara umum, fungsi-fungsi BK dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Fungsi Pemahaman (*Understanding Function*)**

BK membantu peserta didik, guru, orang tua, dan pihak terkait untuk memahami berbagai aspek diri peserta didik (kemampuan, minat, kepribadian, potensi, dan kondisi lingkungan). Pemahaman ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi perkembangan peserta didik.

- **Fungsi Pencegahan (*Preventive Function*)**

BK berperan dalam mencegah timbulnya permasalahan yang dapat menghambat perkembangan peserta didik, baik dalam aspek pribadi, sosial, akademik, maupun karier. Melalui layanan informasi, bimbingan kelompok, atau pengembangan keterampilan, peserta

didik dibekali dengan wawasan dan kemampuan untuk menghindari masalah.

- **Fungsi Pengembangan (*Developmental Function*)**

BK tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam membantu peserta didik mengembangkan potensi positif yang dimiliki. Fungsi ini dilakukan melalui berbagai layanan pengembangan diri, pelatihan keterampilan hidup, penguatan karakter, dan pengembangan karier.

- **Fungsi Penyaluran (*Placement Function*)**

BK membantu peserta didik dalam memilih jalur pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, bidang studi, atau karier yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Fungsi ini bertujuan agar peserta didik memperoleh tempat atau posisi yang tepat untuk berkembang secara optimal.

- **Fungsi Penyembuhan (*Remedial Function*)**

BK memberikan bantuan bagi peserta didik yang menghadapi masalah pribadi, sosial, akademik, atau karier yang menghambat perkembangannya. Layanan konseling individu atau kelompok difokuskan untuk membantu peserta didik mengatasi masalah tersebut sehingga dapat kembali berfungsi secara optimal.

- **Fungsi Penyesuaian (*Adjustment Function*)**

BK membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, akademik, dan lingkungan kehidupan lainnya. Melalui layanan ini, peserta didik belajar cara beradaptasi secara sehat, membangun hubungan positif, serta mengelola perubahan dan tantangan hidup.

- **Fungsi Evaluasi (*Evaluative Function*)**

BK melibatkan proses evaluasi terhadap efektivitas program layanan BK yang telah dilaksanakan, serta terhadap perkembangan dan kemajuan peserta didik setelah menerima layanan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program BK selanjutnya.

- ❖ **Profesi Bimbingan dan Konseling**

Guru memiliki tanggung jawab untuk mengamati dan memahami berbagai situasi yang terjadi di dalam kelas guna mendukung proses perkembangan peserta didik. Dalam perannya sebagai pengarah dan pendorong, guru diharapkan mampu membantu siswa dalam membangun dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik serta kedisiplinan dalam kegiatan belajar-mengajar. Sebagai pemimpin bagi peserta didiknya, guru harus menjadi teladan yang berada di garis terdepan dalam memberikan motivasi dan dorongan (Putri et al., 2024).

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan unsur utama dalam pelaksanaan layanan bimbingan di lingkungan sekolah. Guru BK memiliki tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta hak penuh dalam merancang dan melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling bagi peserta didik.

Peran seorang guru BK sebagai konselor tidak hanya terbatas pada pemberian layanan bimbingan, melainkan juga mencakup upaya membantu siswa dalam memahami potensi dan kemampuan diri mereka secara lebih mendalam. Melalui proses konseling yang dilakukan, guru BK mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah,

meningkatkan kepercayaan diri, serta menghadapi berbagai tantangan pribadi maupun akademik secara mandiri. Dengan demikian, guru BK berperan penting dalam mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier peserta didik secara optimal.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) menjalankan tugas sebagai seorang profesional. Hal ini berarti bahwa secara formal mereka telah dipersiapkan melalui pendidikan khusus di lembaga yang berwenang, guna menguasai seperangkat kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang bimbingan dan konseling. Melalui proses pendidikan dan pelatihan yang sistematis, guru BK dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang diperlukan untuk melaksanakan layanan bimbingan secara efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru BK memang secara sengaja dibentuk dan disiapkan untuk menjadi tenaga profesional yang kompeten dalam bidang bimbingan dan konseling, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi perkembangan peserta didik di sekolah.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) diharapkan memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik.

- ✚ **Kompetensi kepribadian** mencakup kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Guru BK harus memiliki integritas pribadi yang tinggi, menjadi teladan bagi peserta didik, serta mampu menjaga etika dan moral dalam menjalankan profesinya. Kepribadian yang kuat ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dan rasa hormat dari peserta didik serta lingkungan sekolah.

- ✚ **Kompetensi profesional** berkaitan dengan penguasaan yang mendalam terhadap bidang bimbingan dan konseling. Guru BK harus memiliki keahlian profesional untuk memberikan layanan bimbingan yang berkualitas, membantu peserta didik dalam memahami dirinya, memecahkan masalah, serta mengembangkan potensi mereka secara optimal.
- ✚ **Kompetensi sosial** mencerminkan kemampuan guru dalam membangun hubungan yang harmonis, luwes, dan efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, serta masyarakat. Kemampuan ini sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bimbingan yang suportif dan kondusif.
- ✚ **Kompetensi pedagogik** meliputi kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran yang mendukung pengembangan peserta didik. Guru BK dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip pendidikan dan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, guna menunjang proses bimbingan yang komprehensif.

Melalui sesi konseling, guru Bimbingan dan Konseling (BK) membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan coping yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan hidup. Keterampilan ini memungkinkan siswa untuk memberikan respons yang positif terhadap situasi sulit, sehingga mampu mengubah kondisi yang kurang menguntungkan menjadi peluang yang lebih baik.

Selain bekerja langsung dengan siswa, guru BK juga berkolaborasi secara aktif dengan guru mata pelajaran dan staf

sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, ramah, dan mendukung bagi seluruh peserta didik. Kolaborasi ini meliputi pemberian pelatihan kepada guru mengenai berbagai pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, khususnya bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

Kehadiran guru BK di suatu institusi pendidikan berperan penting dalam menciptakan iklim sekolah yang mendukung pengembangan holistik peserta didik. Melalui pendekatan yang berpusat pada siswa serta kerja sama yang erat antara guru, orang tua, dan pihak sekolah, setiap peserta didik diharapkan dapat berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik, emosional, maupun sosial.

Selain itu, kemampuan guru BK dalam memahami, memaknai, serta mengembangkan program-program layanan bimbingan yang telah dirancang, menjadi faktor penting yang menentukan kualitas perkembangan peserta didik. Implementasi program bimbingan yang efektif akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pribadi, sosial, dan akademik siswa.

Konseling sebagai profesi penolong (*helping profession*) merupakan konsep yang menjadi dasar peran dan fungsi konselor dalam masyarakat masa kini. Profesi penolong adalah suatu profesi di mana para anggotanya telah mendapatkan pelatihan khusus serta memiliki lisensi atau sertifikat yang sah untuk memberikan layanan tertentu yang unik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, mereka menjadi penyedia profesional utama — bahkan seringkali satu-satunya — yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk memberikan layanan tersebut.

Bimbingan dan Konseling (BK) termasuk dalam kategori profesi penolong. Namun demikian, di Indonesia profesi penolong tidak hanya terbatas pada bidang BK saja. Profesi lain yang juga tergolong sebagai profesi penolong meliputi psikologi, kedokteran, pendidikan (guru), pekerjaan sosial, bidang hukum (pengacara, jaksa), serta berbagai bidang lain yang berfokus pada pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok masyarakat.

Dengan demikian, peran konselor sebagai bagian dari profesi penolong sangat strategis dalam membantu peserta didik maupun masyarakat secara umum untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, serta dalam mendukung proses perkembangan pribadi, sosial, akademik, maupun karier.

Profesi Bimbingan dan Konseling merupakan suatu bentuk keahlian dalam memberikan layanan yang berfokus pada pengembangan pribadi dan pemecahan masalah, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan para pengguna layanan (Nursalim, 2022). Pelayanan ini disesuaikan dengan martabat, nilai-nilai, potensi, serta keunikan individu, yang dilakukan berdasarkan kajian ilmiah serta penerapan teknologi dalam bidang pendidikan dan psikologi. Proses penerapan tersebut dikemas dalam praktik konseling yang memperhatikan latar belakang budaya dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, paradigma dasar Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan bantuan psiko-pendidikan yang disajikan dalam bingkai budaya.

Sebagai sebuah disiplin ilmu sekaligus profesi, Bimbingan dan Konseling memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan nasional, serta bagi kehidupan masyarakat dan bangsa secara umum. Dari

perspektif profesi penolong (*helping profession*), layanan Bimbingan dan Konseling diabdikan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan, melalui upaya memfasilitasi perkembangan individu maupun kelompok sesuai dengan kekuatan, potensi, dan peluang yang mereka miliki. Selain itu, layanan ini juga membantu individu mengatasi berbagai kelemahan, hambatan, serta tantangan yang dapat mengganggu proses perkembangannya.

Pandangan yang digunakan dalam Bimbingan dan Konseling menekankan pada potensi positif yang dimiliki setiap individu. Ciri ini menjadi pembeda mendasar antara layanan Bimbingan dan Konseling dalam konteks pendidikan dengan layanan medis atau klinis yang cenderung berorientasi pada penanganan sisi patologis. Dengan demikian, Bimbingan dan Konseling berperan sebagai layanan yang bersifat promotif dan preventif, yang bertujuan untuk memberdayakan individu dalam mencapai perkembangan optimal.

Bimbingan dan Konseling kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sekumpulan teknik atau prosedur, melainkan telah berkembang menjadi suatu kerangka berpikir dan bertindak yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap keunikan setiap individu. Pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keindividuan ini menjadi semakin relevan dalam era masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), di mana orientasi terhadap kemanusiaan serta pembelajaran sepanjang hayat menjadi ciri sentral kehidupan masyarakat masa kini dan masa depan.

Proses Bimbingan dan Konseling tidak bersifat parsial atau terbatas pada aspek tertentu saja, melainkan merupakan sebuah proses yang holistik, yang mencakup persiapan

individu dalam menghadapi berbagai dimensi kehidupan, termasuk dunia kerja. Persiapan tersebut mencakup seluruh ranah pembelajaran, yang memadukan unsur pengetahuan, nilai-nilai, kompetensi, serta keterampilan yang dibutuhkan individu untuk berkembang secara optimal.

Dalam perspektif ini, Bimbingan dan Konseling memegang peran strategis dalam membantu masyarakat memenuhi tuntutan kebutuhan belajar yang baru serta memberdayakan individu agar mampu mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi, pembelajaran, dan pekerjaan. Layanan Bimbingan dan Konseling dipandang sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini bersifat holistik dan adaptif, serta mampu menyediakan layanan dalam spektrum yang luas dan beragam sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, kerangka pelayanan Bimbingan dan Konseling yang bersifat holistik menyatukan berbagai aspek, yaitu hakikat kemanusiaan, wawasan keilmuan, keterampilan praktis, nilai-nilai moral, serta sikap profesional. Semua unsur tersebut berpadu dalam upaya memberikan layanan yang bermakna dan berkontribusi terhadap pengembangan individu secara utuh.

Pada awalnya, istilah konselor kerap dilekatkan pada individu yang dianggap memiliki kemampuan serta peran penting dalam memberikan bantuan atau nasihat kepada orang lain, seperti penasihat, ustaz, pendakwah, pastor, dan tokoh masyarakat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, makna profesi konselor pun mengalami perluasan, mencakup berbagai profesi yang memiliki tugas pokok untuk membantu orang lain, seperti dokter, perawat, dan guru.

Namun, dengan semakin pesatnya arus industrialisasi yang mendorong proliferasi, yakni pertumbuhan dan peningkatan pesat, peran dalam berbagai bidang pekerjaan, profesi konselor tidak lagi dipandang sebagai tugas tambahan yang disematkan pada profesi lain. Muncul tuntutan baru dari masyarakat pengguna layanan bimbingan, yakni bahwa seorang konselor profesional harus memiliki rekam jejak pendidikan akademik serta pelatihan profesional khusus di bidang Bimbingan dan Konseling.

Saat ini, tugas-tugas inti dalam layanan Bimbingan dan Konseling tidak lagi dibebankan kepada guru bidang studi di sekolah, yang pada dasarnya telah memiliki tanggung jawab pengajaran di bidang keilmuannya masing-masing. Sejalan dengan perkembangan ini, klasifikasi pendidik dalam dunia pendidikan juga semakin diperluas. Selain guru bidang studi dan wali kelas yang kadang berperan sebagai pembimbing, kini diperkenalkan profesi guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan.

Pengakuan terhadap eksistensi profesi Bimbingan dan Konseling ini secara resmi tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dengan landasan regulasi tersebut, profesi konselor diakui sebagai profesi yang berdiri sendiri dan memiliki standar kompetensi yang jelas, sejajar dengan profesi pendidik lainnya.

Tuntutan yang dihadapi oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) dewasa ini semakin kompleks dan beragam. Sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem

pendidikan, layanan Bimbingan dan Konseling memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang bersifat menyeluruh. Tujuan utama dari layanan ini di lingkungan sekolah adalah memberikan dukungan yang komprehensif bagi pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, serta mendorong terbentuknya kematangan karier peserta didik, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif di masa depan.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran profesi Bimbingan dan Konseling diproyeksikan tidak hanya terbatas pada pelayanan di dalam setting persekolahan, tetapi juga akan semakin meluas ke ranah komunitas dan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan profesi di masa mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satu langkah penting adalah munculnya gerakan profesionalisasi layanan Bimbingan dan Konseling di Indonesia. Upaya profesionalisasi ini dipandang sebagai strategi untuk:

- a. Memperkuat dan memajukan identitas, kelaikan, serta akuntabilitas profesi Bimbingan dan Konseling di tingkat nasional maupun internasional;
- b. Menegaskan identitas profesi yang memenuhi standar kualitas dan kompetensi yang telah ditetapkan;
- c. Memantapkan kerja sama antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan organisasi profesi, dalam rangka mendidik dan menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional;

- d. Mendorong perkembangan profesi Bimbingan dan Konseling agar responsif terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat;
- e. Memberikan perlindungan yang memadai, baik bagi profesi Bimbingan dan Konseling itu sendiri maupun bagi para pengguna layanan, guna menjamin kualitas serta integritas layanan yang diberikan.

Dengan demikian, gerakan profesionalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas profesi Bimbingan dan Konseling, sekaligus memperluas jangkauan perannya di tengah masyarakat yang terus berkembang.

❖ KESIMPULAN

Profesi Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan peserta didik secara holistik, mencakup aspek pribadi, sosial, akademik, dan karier. Sebagai profesi, BK ditopang oleh landasan keilmuan yang kuat, etika profesional, serta standar kompetensi yang jelas. Profesi ini dijalankan oleh guru BK yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus, serta memiliki kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial yang memadai.

Secara konseptual, BK berfungsi tidak hanya sebagai layanan reaktif terhadap permasalahan, tetapi juga sebagai upaya proaktif dalam memberdayakan individu untuk mencapai perkembangan optimal. Layanan BK berperan dalam membantu peserta didik memahami dirinya, mencegah permasalahan, mengembangkan potensi, menyalurkan bakat

dan minat, membantu penyesuaian diri, serta menyediakan layanan penyembuhan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam era masyarakat berbasis pengetahuan yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat, BK telah berkembang menjadi sebuah kerangka berpikir dan bertindak yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keunikan individu, dan penguatan potensi positif. Hal ini menjadikan BK bukan sekadar aktivitas tambahan dalam pendidikan, melainkan bagian esensial dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang menyeluruh.

Profesionalisasi dalam bidang BK terus didorong melalui peningkatan kompetensi tenaga BK, kerja sama antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan organisasi profesi, serta penguatan identitas profesi di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini penting untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam dunia pendidikan dan masyarakat modern.

Dengan demikian, BK berperan sebagai profesi penolong (*helping profession*) yang tidak hanya melayani kebutuhan peserta didik di lingkungan sekolah, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan masyarakat secara lebih luas. Melalui penguatan peran, kompetensi, dan profesionalitasnya, BK diharapkan terus menjadi pilar penting dalam menciptakan individu-individu yang berkualitas, berdaya saing, dan berkepribadian tangguh di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Khadijah, I. (2022). *Definisi Dan Etika Profesi Guru*.
<https://thesiscommons.org/rf4k2/download?format=pdf>
- Nursalim, M. (2022). *2022-03-21_Buku 2_Moch Nursalim.pdf*.
- Pekerjaan, P. D. A. N. (2019). *Profesi, profesional dan pekerjaan*. 2, 61–69.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2575110>
- Prasetya, M. N. W. F., Fiddin, Y. A., Abrori, M. S., & Dzakiyyah, A. (2021). *Syarat-syarat Menjadi Guru Profesional*.
- Putri, W. A., Hasibuan, U. M., & Rezeki, S. (2024). Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Masalah Psikologis Siswa. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1247–1254.

A. Profesi Bimbingan Konseling dan Supervisi Klinis

Bimbingan dan konseling (BK) adalah bagian integral dari teori dan praktik pendidikan. Dalam konteks pendidikan, bimbingan dan konseling di sekolah berada dalam wilayah ilmu normatif, dengan fokus kajian utama bagaimana memfasilitasi dan membawa manusia berkembang dari kondisi apa adanya kepada bagaimana seharusnya. BK adalah layanan psikopedagogis, dalam setting persekolahan maupun luar sekolah, dalam konteks kultur, nilai, dan religi yang diyakini klien dan konselor. Karena sifat normatif pedagogis ini maka fokus orientasi bimbingan dan konseling adalah pengembangan perilaku yang seharusnya dikuasai oleh individu untuk jangka panjang, menyangkut ragam proses perilaku pendidikan, karir, pribadi, keluarga, dan proses pengambilan keputusan.

Karena posisi keilmuan dan filosofi itulah konselor diposisikan sebagai salah satu komponen pendidik, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, karena nomenklatur konselor tidak ada dalam sistem aturan kepegawaian, maka sebutan konselor disesuaikan dengan sistem yang ada dan hingga kini disebut guru BK/konselor. Perlu digarisbawahi, walaupun masih diberi label guru, namun, tugas konselor bukan mengajar BK seperti halnya guru Matematika, guru Sejarah dsb., karena bimbingan dan konseling bukan sebuah mata pelajaran, melainkan suatu layanan pemberian bantuan psikopedagogis kepada semua peserta didik untuk mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek-aspek belajar, karir, sosial dan pribadi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan landasan legal itu, sudah tegas bahwa konselor adalah pendidik, dan layanan

profesional yang dilakukan oleh konselor adalah bimbingan dan konseling. Kini saatnya untuk meletakkan prinsip kebijaksanaan itu secara benar!

B. Bimbingan konseling sebagai profesi

Sebagai suatu profesi, bimbingan dan konseling di sekolah, sebagaimana kelajiman profesi secara universal, memiliki empat ciri utamanya, yaitu:

1. Adanya bidang layanan keahlian yang unik, yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah
2. Adanya standar pendidikan yang secara sistematis disiapkan untuk menguasai bidang keilmuan (the Scientific Basis of the Arts) untuk praktik profesi yang unik itu
3. Adanya latihan praktik profesional yang sistematis dan tersupervisi secara efektif untuk menjamin penguasaan dan pemeliharaan kompetensi dan integritas pribadi sehingga menjadi praktisi yang aman
4. Imbalan yang layak, yang diikuti dengan tanggung jawabk meningkatkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Dengan berlandaskan pada pasal 1 ayat (6), UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemdikbud RI telah melahirkan dua regulasi penting, yaitu :

1. Permendiknas no 27 tahun 2008 tentang Kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi Konselor di Indonesia sebagai landasan legal tentang standar kompetensi dan pendidikan akademik dan pendidikan profesi konselor di Indonesia

2. Permendikbud no 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilengkapi dengan Pedoman Operasional Bimbingan dan Konseling di Pendidikan dasar dan Menengah (SMA dan SMK). Sesungguhnya, walaupun regulasi ini belum secara komprehensif melandasi penyelenggaraan pendidikan dan layanan profesional bimbingan dan konseling, namun jika diimplementasikan secara konsisten dan

Berkeadilan sudah dapat diandalkan menjadi payung hukum bagi kebijakan dan praktik bimbingan dan konseling di sekolah.

Dalam implementasi, kebijakan dan praktik bimbingan dan konseling di sekolah dari periode ke periode pergantian aparat terkait, selalu mengalami pasang surut karena pemahaman yang tidak tepat, kebijakan dan pengaturan yang tidak konsisten bahkan tidak berkeadilan baik di tingkat kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah.

Prinsip Bimbingan Dan Konseling

Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan konseling. Prinsip – prinsip ini berasal dari konsep – konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan atau bimbingan, baik di sekolah/ maupun diluar sekolah.

Prinsip–prinsip tersebut yaitu bimbingan dan konseling:

1. Diperuntukkan bagi semua konseling. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang tidak bermasalah, maupun yang

bermasalah , baik pria maupun wanita, baik anak – anak, remaja, maupun dewasa. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan diri pada penyembuhan (kuratif), dan lebih diutamakan teknik kelompok dari pada perseorangan individual

2. Sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik (berbeda satu sama lainnya), dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok
3. Menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut, bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang untuk berkembang
4. Merupakan Usaha Bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala Sekolah/Madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Mereka bekerja sebagai teamwork.
5. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan

dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarah-kan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan.

Asas Bimbingan Dan Konseling

Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas berikut, yaitu:

Pertama, Asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Kedua, Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli (konseli) mengikuti/menjalani pelayanan/kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Ketiga, Asas

keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseli (konseli). Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan. Agar konseli dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Keempat, Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan/kegiatan bimbingan. Dalam hal ini guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Kelima, Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni: konseli (konseli) sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian konseli. Keenam, Asas Kekinian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli (konseli) dalam kondisinya sekarang.

Pelayanan yang berkenaan dengan “masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak dan/atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Ketujuh, Asas Kedinamisan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan (konseli) yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Kedelapan, Asas Keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan. Kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini kerja sama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan.

Aspek Yuridis Eksistensi Konselor

Keberadaan konselor dalam sistem pen nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidikan yang sejajar dengan kualifikasi Dosen, Pamong dan Tutor berdasarkan Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 1 a Pengakuan secara eksplisit dan kusejajarkan antara kualifikasi tenaga pendidikan satu yang lainnya mengandung arti bahwa tenaga pendidik, termasuk Konselor, m keunikan konteks dalam tugas, eksp kinerja, dan setting layanan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional²² tahun 2006, tidak secara eksplisit memposisikan bimbingan dan konseling dalam struktur program pendidikan. Ketidak jelasan konteks dalam tugas dan ekspektasi kinerja konselor bimbingan dan konseling melalui proses pembelajaran yang berpayung pada

standar isi. Muncul gejala “Intervasi” profesi sejenis (sebut psikologi sekolah) ke dalam konteks tugas dan kinerja konselor Penegasan Eksistensi Profesi.

Secara Yuridis berbagai peraturan yang ada menguatkan kenyataan bahwa konteks tugas dan Ekspektasi kinerja yang telah dispesifikasikan secara tegas dan eksplisit adalah konteks tugas. Dan ekspektasi kinerja guru sebagai agen pembelajaran, yang menggunakan bidang studi sebagai konteks layanan, dan tidak mengandung konteks tugas dan Ekspektasi kinerja konselor.

Permasalahan Profesi Bimbingan Dan Konseling

Bimbingan dan konseling sebagai profesi di tanah air menghadapi sejumlah masalah dalam praktik profesi Di sekolah-sekolah. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi yaitu: (1) belum semua Konselor/ guru bimbingan dan konseling berkualifikasi akademik S-1 bimbingan dan konseling yang Berdampak pada penguasaan kompetensi bimbingan dan konseling; (2) masih ada anggapan bahwa guru Bimbingan dan konseling bisa diampu oleh guru apa saja, tidak harus berkualifikasi akademik S-1 Bimbingan dan konseling, apalagi untuk membantu guru mata pelajaran yang tidak bisa memperoleh jam Mengajar 24 jam/minggu, mereka bisa ditugasi oleh kepala sekolah sebagai guru bimbingan dan konseling; (3) adanya anggapan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah tidak penting, yang Penting pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik; (4) fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah-sekolah belum mencukupi, namun bila saat akreditasi fasilitas itu perlu terpenuhi, seakan-akan Pelayanan bimbingan dan konseling didukung oleh fasilitas yang

memadai; (5) rasio 1 konselor/guru Bimbingan dan konseling mengampu 150 peserta didik/konseli berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 belum bisa dipenuhi oleh setiap sekolah, yang mengakibatkan kesulitan bagi guru bimbingan Dan konseling dalam memberikan pelayanan klasikal masuk kelas sesuai dengan amanat Permendikbud Tersebut, karena kekurangan tenaga; (6) belum semua kualitas perguruan tinggi penyelenggara program Studi S-1 bimbingan dan konseling cukup memadai, yang berpengaruh pada rendahnya kompetensi lulusan; (7) peraturan perundang-undangan dalam bidang bimbingan dan konseling tidak konsisten; dan (8) belum Membudaya jiwa profesi di kalangan pengampu pelayanan bimbingan dan konseling

Menjadikan Bimbingan Dan Konseling Sebagai Profesi Yang Bermartabat

Bermartabat artinya mempunyai martabat, sedangkan kata dasar martabat berarti tingkat harkat Kemanusiaan, harga diri (<http://kbbi.wed.id/martabat>). Berdasarkan arti harfiah martabat tersebut maka Bimbingan dan konseling sebagai profesi yang bermartabat artinya profesi bimbingan dan konseling di Tengah masyarakat memiliki tingkat harkat dan harga diri yang tinggi dalam memberikan pelayanan Kemanusiaan kepada konseli pada setting pendidikan formal dan setting community, dengan menjunjung Tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, tolong menolong/saling membantu, toleransi, kesopanan, Dan tenggang rasa. Konselor/guru bimbingan dan konseling sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan Dan konseling yang berhasil memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli biasanya Menunjukkan sikap humanistik, seperti

tulus, jujur, hangat, penuh penerimaan, selaras pikirannya, perasaan, Dan perbuatannya (Hartono dan Boy Soedarmadji, 2014).Kemartabatan profesi bimbingan dan konseling ditunjukkan oleh dua ciri, yaitu (1) dipercaya Masyarakat (public trust), dan dibutuhkan masyarakat (needed community). Agar dapat dipercaya dan Dibutuhkan oleh masyarakat, pelayanan bimbingan dan konseling harus bermutu, dikelola dengan baik Yang didukung oleh fasilitas yang memadai, dijamin, dikembangkan, dan demokratis. Untuk mewujudkan Kondisi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu yaitu konselor/guru bimbingan dan Konseling yang menguasai kompetensi bimbingan dan konseling dalam tingkat tinggi, sehingga memiliki Daya competitiveness yaitu kemampuan bersaing secara positif dengan profesi lain yang ditunjukkan oleh Kinerja tinggi bagi pengampu profesi bimbingan dan konseling di tengah kehidupan masyarakat global. Bagaimana cara menjadikan profesi bimbingan dan konseling bisa bermartabat?, strategi apa yang Kita praksiskan dalam era MEA mendatang, hal ini sangat dipengaruhi oleh warga ABKIN (konselor/guru bimbingan dan konseling, pendidik calon konselor/calon guru bimbingan dan konseling, peranan ABKIN Dan divisi-divisinya), dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan profesi pendidik. Konselor/guru bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional yang lazimnya mampu Meningkatkan profesionalitas dalam bidang bimbingan dan konseling sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 7 antara lain yaitu: (1) Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu Pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang Pendidikan

sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang Tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memiliki kesempatan untuk Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; dan (7) memiliki Organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas Keprofesionalannya. Dalam meningkatkan profesionalitas, konselor/guru bimbingan dan konseling Melakukan pengembangan diri yang dapat dilakukan melalui studi lanjut (S2 dan S3 yang relevan dengan Bidang tugasnya), terlibat aktif dalam seminar/workshop/ pelatihan sebagai peserta atau pemakalah, Melakukan penelitian, dan menulis karya ilmiah pada jurnal atau bentuk publikasi lain yang menunjang Profesi bimbingan dan konseling (Hartono, 2015a). ABKIN dan divisi-divisinya berwenang untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan Dengan tugas keprofesionalan konselor/guru bimbingan dan konseling. Peran ABKIN sebagai organisasi Profesi sangat urgen dalam memajukan profesi bimbingan dan konseling. ABKIN diharapkan mampu Sebagai regulator untuk mengembangkan dan memberlakukan norma-norma profesi seperti kode etik, Standar kompetensi, model pengembangan profesi melalui pendidikan profesi yang bermutu, melakukan Audit profesi dan supervisi secara profesional, memberikan izin praktik dan membangun sistem pengawasan Praktik profesi, melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah tentang berbagai hal yang terkait dengan Eksistensi, kewenangan, kewajiban dan hak profesi, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah yang Diikuti oleh anggotanya secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai Demokratis, tidak diskriminatif, nilai keagamaan, dan nilai kultural

kebangsaan. Peran pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian riset, Teknologi dan pendidikan tinggi juga sangat menentukan kemajuan profesi bimbingan dan konseling. Sebagai regulator yang melaksanakan produk politik Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dibutuhkan konsistensi dalam Menerapkan kebijakan pemerintah yang mendukung profesi pendidik untuk tumbuh dan berkembang dalam Upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang Memiliki daya saing tinggi (nations competitiveness). Pendidikan nasional sebagai fasilitasi lingkungan yang disebut faktor ajar harus menjadikan daya Konvergensi setelah berinteraksi dengan faktor dasar atau faktor kodrat manusia yaitu segala keadaan lahir Dan batin yang bersifat hereditas (Ki Hadjar Dewantara, 2013a), sehingga menghasilkan lulusan yang Berkompeten dan berbudi pekerti luhur. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara (2013b) berbudi pekerti Luhur atau keluhuran budi sebagai sifat adab (keadaban manusia) menghasilkan buah-buah yang dinamakan Budaya.

Peran Penting Seorang Psikolog Dan Konselor Dalam Proses Konseling

Psikolog dan konselor berupaya membantu klien di bidang bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan konseling memiliki tujuan umum dan khusus, yakni Membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan Bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta terpecahkan masalah-masalah yang Dihadapi individu (klien) sebagai tujuan umum. Tujuan umum bimbingan dan

Konseling, meliputi: membantu individu agar dapat mandiri dengan ciri-ciri mampu Memahami dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya, membuat keputusan dan Rencana yang realistis, mengarahkan diri sendiri dengan keputusan dan rencananya itu Serta pada akhirnya mewujudkan diri sendiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah Langsung mengarah pada perkembangan klien dan masalah-masalah yang dihadapi (Prayitno & Amti, 2013). Konselor berperan aktif di dalam proses konseling, artinya proses bantuan yang Diberikan kepada klien dalam hubungan terapeutik antara konselor dan klien agar klien Dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penyesuaian diri, atau berperilaku baru Sehingga klien memperoleh kebahagiaan (Saam, 2014). Menurut George dan Cristiani (1990) terdapat lima asumsi penting dalam konseling yang seorang konselor harus dapat Memahaminya, yaitu:

1. Klien tidak dianggap orang yang sakit mental, tetapi memiliki kemampuan untuk memilih tujuan, membuat keputusan, dan menerima tanggung jawab
2. Konseling difokuskan pada saat ini dan yang akan datang, bukan pada Pengalaman masa depan.
3. Konselor bukan pemegang otoritas, tetapi adalah partner klien dalam membahas Dan merumuskan tujuan konseling
4. Konselor memiliki nilai, perasaan, dan standar untuk dirinya, serta secara moral Tidak netral. Oleh karenanya, nilai, perasaan dan standar dapat dikomunikasikan Kepada klien.
5. Konselor memfokuskan pada perubahan tingkah laku klien, bukan hanya Membuat klien menjadi sadar, yang penting juga adalah adanya tindakan (action).

Kelima asumsi dalam konseling yang dikemukakan oleh George dan Cristiani (1990) belumlah dianggap cukup dalam memenuhi pemahaman peran konselor. Saam (2014) kemudian menambahkan dua asumsi lagi, yakni:

6. Hakikat klien adalah fitrah (suci). Keoptimisan konselor dapat melaksanakan Konseling agar klien merasa nyaman karena keluhannya terselesaikan.
7. Klien adakalanya belum memahami dirinya sehingga berbuat salah, melanggar Atau menyimpang dari norma.

Hartono dan Soedarmadji (2012) mengungkapkan bahwa terdapat kondisi Psikologis yang akan memengaruhi proses dan hasil konseling. Konselor yang berhasil Dalam membina hubungan konseling biasanya memiliki sikap humanistik, seperti tulus, Jujur, hangat, penuh penerimaan, selaras pikirannya, perasaan, dan perbuatannya Sehingga konselor mampu berempati dengan konseli (Hartono, 2006). Menurut Surya (2003) menjelaskan beberapa kebutuhan psikologis yang terkait Dengan proses konseling, yakni: memberi dan menerima kasih sayang, kebebasan, Memiliki kesenangan, perasaan mencapai prestasi, memiliki harapan, dan memiliki Ketenangan. Kebutuhan psikologis ini harus diperhatikan konselor dalam membina Hubungan konseling. Konselor profesional selalu menciptakan kondisi tersebut sebagai Faktor yang menunjang proses konseling.

Konsep Etika Dalam Konseling

Kata “etika” berasal dari kata Yunani “ethos”, yang berarti “karakter” atau “kebiasaan”, dan “ethics”, yang berarti “kesopanan” (Hambali & Dkk, 2021). Etika adalah seperangkat ide dan cita-cita yang berkaitan dengan moralitas atau itu adalah ilmu yang mempelajari apa yang baik dan apa

yang salah, serta hak dan moral. Either way, etika sering disebut sebagai studi tentang hak dan moral (Jamil, 2022). Menurut pengertian di atas, etika dihubungkan dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menentukan sikap dan perilaku manusia. Dalam konteks bidang keilmuan, bimbingan dan konseling dianggap sebagai salah satu jenis proses terapeutik. Proses ini akan selalu dilakukan dengan landasan teori konseling yang dibangun berdasarkan berbagai pemahaman yang berbeda terkait dengan fitrah manusia. Setiap konselor dan profesional bimbingan dan konseling memiliki tanggung jawab untuk menegakkan standar etika dan nilai-nilai yang mendasari profesi konseling (Faiz et al., 2018); (Prayitno. 2021); (Kurniawati, & Sa'adah. 2022); (Maharani, Aziz, Puryanti, Tusa'ada, Khasanah, Rasimin, & Yusra. 2022).

Dalam bidang yang berfokus pada membantu orang lain, nilai dan etika adalah yang paling penting. Bidang bimbingan dan konseling berpedoman pada seperangkat nilai inti, yaitu sebagai berikut: 1) membina perkembangan manusia pada semua tahapan kehidupan; 2) menghormati keragaman dan berwawasan multikultural untuk menjunjung tinggi nilai, harkat, potensi, dan keunikan setiap manusia dalam lingkungan sosial dan budaya masing-masing; 3) mempromosikan keadilan sosial melalui advokasi pelayanan; 4) menjunjung tinggi integritas pribadi dalam hubungan konselor-klien; dan 5) memberikan layanan bimbingan dan konseling secara profesional dan berpengetahuan (ABKIN, 2018); (Sona. 2021); (Fitri, Mappiare-AT, & Triyono. 2020); (Masruri. 2016); (Hotmauli. 2021).

Dalam hal bimbingan dan konseling, menjunjung tinggi standar etika atau prinsip moral selalu menjadi prioritas utama. Misalnya penerapan prinsip kerahasiaan dalam

layanan bimbingan dan konseling. Ketika dipraktikkan, ada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses konseling atau segala sesuatu yang dibicarakan selama proses itu tidak boleh dikomunikasikan kepada orang lain, terutama mereka yang tidak tertarik untuk mendengarnya (Sukitman, 2015). Dalam hal ini, klien pun akan merasa terjaga segala rahasia yang dimilikinya dan merasa aman untuk memberikan banyak informasi kepada seorang konselor guna membantu penanganan masalahnya (Raminah, 2018). Dengan itu, konselor atau guru BK hendaknya menjaga semua informasi dan semua data tentang klien atau peserta didik. Prinsip kerahasiaan ini sangat penting dalam praktik bimbingan dan konseling, sebagaimana banyak nilai dan etika lain yang tertanam di dalamnya. Jika prinsip ini dilaksanakan dengan benar dan benar, maka tingkat kepercayaan masyarakat yang ditempatkan pada petugas bimbingan dan konseling akan tinggi, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat (Sukitman, 2015); (Diana. 2022); (Ferdiansyah, & Noverina. 2019); (Marjo. 2022). Menurut pandangan John McLeod dalam (Faiz et al., 2018), terdapat empat etika yang penting dalam bimbingan dan konseling, ialah: 1) professional responsibility yaitu persyaratan bahwa, selama proses konseling, seorang konselor bertanggung jawab untuk kliennya dan dirinya sendiri, dengan cara seperti memberikan perhatian penuh kepada kliennya dan mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan klien sambil juga memastikan bahwa dia memimpin kehidupan yang sehat. Hidup untuk dirinya sendiri, 2) confidentiality, Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, konselor berkewajiban untuk merahasiakan semua informasi klien sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang mendasari layanan bimbingan dan konseling, 3) conveying relevant information to the person in

counselling ketika klien memiliki hak untuk mengetahui tentang proses konseling dan kualifikasi konselor, biasanya selama tahap peralihan dalam layanan bimbingan dan konseling, 4) the counselor influence Konselor memiliki pengaruh besar dalam konseling, oleh karena itu ada berbagai hal yang harus diperhatikan agar tetap efektif. Ini melibatkan kebutuhan pribadi seorang konselor. Konselor dengan masalah seksualitas yang belum terselesaikan tentang transferensi, moral, atau nilai-nilai agama akan mengubah persepsi mereka tentang konseli yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Etika Konselor Profesional

UU no. 14 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 4 mendefinisikan profesional sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencari nafkah dan memerlukan pengalaman, bakat, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu dan pendidikan profesi. Konselor dengan gelar sarjana dan pendidikan konselor profesional dapat dianggap profesional dengan banyak kompetensi (Prayitno, 2021).

Konselor membantu konseli. Konselor beroperasi sebagai fasilitator klien, penasihat, instruktur, konsultan, dan pembantu untuk membantu klien tumbuh dan mengelola kehidupan. Sehari-hari mereka (Namora, 2011). Konselor juga merupakan seorang ahli yang memiliki kewenangan profesional untuk memberikan layanan. Dalam prosesnya konselor harus turut aktif mengembangkan proses konseling dengan pendekatan dan metode yang ada (Sulistiyono, 2022).

Pada sub sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya bidang pelayanan BK sudah berisi tentang ketentuan dan

makna mengenai etika seperti asas kerahasiaan yang harus diterapkan oleh seorang konselor profesional. Selain itu, Prayitno menjelaskan dalam. *Bukunya Landasan dan Arah Konseling Profesional* Konseling Adalah Pendidikan bahwa seorang tenaga profesional harus memiliki beberapa ciri, dalam ini yang berkaitan dengan etika ialah mengenai komunikasi konselor. Komunikasi konselor yaitu materi keprofesioan konseling yang hanya dapat dikomunikasikan kepada pihak terkait, satu hal yang tidak boleh dikomunikasikan kepada pihak lain dan harus dijaga sepenuhnya oleh konselor adalah kerahasiaan sasaran pelayanan atau klien (Prayitno, 2021): (Setiawan. 2022): (Basit, Pratama, Jannah, Nurleni, & Oktaviana. 2022); (Damayanti, Maturidi, Asmadin, & Yani. 2022).

Kepribadian konselor menentukan kesuksesan dan etika. Konselor membutuhkan spontanitas, fleksibilitas, fokus, keterbukaan, kestabilan emosi, kepercayaan diri, dan pengetahuan. Penjelasan:

1. Spontanitas-kapasitas konselor untuk bereaksi terhadap peristiwa atau situasi dalam hubungan konseling. Pengalaman luas konselor akan membantu mereka mengantisipasi balasan.
2. Fleksibilitas, konselor harus mampu mengubah, mengubah, dan menentukan cara sesuai kebutuhan. Ini menolak asumsi bahwa masalah pelanggan tidak memiliki solusi tunggal.
3. Konsentrasi-konselor memperlihatkan kepedulian dengan berfokus pada klien.
4. Keterbukaan bukan berarti konselor tidak akan menghakimi, melainkan ia akan Berusaha memahami dan menerima perasaan dan pikiran klien.

5. Kestabilan emosi konselor harus stabil secara mental. Konselor dapat memodifikasi.
6. Seorang konselor harus selalu percaya bahwa klien dapat berubah dan membentuk kehidupan sehari-hari yang efektif.
7. Komitmen terhadap kemanusiaan sebagai makhluk sosial, konselor harus peka dan mau membantu klien. Kemanusiaan dan pengabdian konselor mendorong proses konseling.
8. Konselor harus terus belajar tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Konselor yang memahami masalah klien akan lebih mampu membantu mereka.

Berdasarkan hasil rumusan kepribadian diatas, maka semua praktisi bimbingan dan konselor yaitu konselor dalam pelaksanaan tugasnya harus diiringi etika dan nilai khusus. Etika dalam profesi konseling itu telah disusun secara sistematis sehingga akan lebih mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor. Etika yang harus di laksanakan konselor dalam pelayanannya harus melibatkan kesadaran serta berkomitmen untuk menjaga dan memelihara tanggungjawab melindungi kepercayaan dan informasi yang diberikan klien (Sujadi, 2018). Pada pemaparan diatas juga dapat dipahami bahwa konselor tidak hanya dituntut untuk memahami secara teoritis ilmu tetapi dari segala aspek kepribadian yang mengarah ke hal positif, yang maan itu mendukung untuk menerapkan kode etik atau etika dalam proses pelayanan kepada klien. Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan banyak kerugian bagi konselor itu sendiri serta sasaran pelayanan.

Bagaimana Tujuan, Frekuensi, dan Durasi Terapi Ditentukan

Secara umum, tujuan psikoterapi adalah untuk membicarakan masalah kesehatan mental dan membantu klien pulih, tumbuh, dan bergerak menuju kehidupan yang lebih produktif dan sehat secara psikologis. Terapi yang baik berorientasi pada klien, dan tujuan spesifik untuk terapi akan ditentukan oleh Anda dan terapis Anda.

Sesi psikoterapi individu biasanya berlangsung antara 45 dan 50 menit. Frekuensi dan durasi terapi akan sangat bergantung pada kebutuhan, tujuan pengobatan, dan kemajuan Anda. Banyak masalah yang dapat diatasi dengan terapi jangka pendek, dan masalah kronis atau yang lebih kompleks lainnya memerlukan komitmen jangka panjang sebelum perbaikan dapat terwujud. Penelitian telah menunjukkan bahwa psikoterapi menghasilkan lebih sedikit ke kambuhan kondisi umum seperti depresi dan kecemasan sedang, dan bahwa efek positif dari terapi yang baik jauh melampaui pengobatan. Bahkan, banyak klien melaporkan kondisi yang membaik dalam waktu lama setelah terapi berakhir. Secara umum, psikoterapi sering kali lebih efektif daripada obat-obatan psikotropika atau perawatan medis saja, yang dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Selain itu, banyak modalitas terapi berdasarkan bukti, yang berarti telah menjadi subjek studi penelitian dan observasi klinis, dan telah dianalisis efektivitasnya.

Kendala Perkembangan Profesi BK

Dalam tataran teoritis, teori-teori bimbingan dan konseling hingga saat ini boleh dikatakan sudah berkembang, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya dan bahkan

relatif mendahului teori-teori yang dikembangkan dalam pembelajaran untuk mata pelajaran mata pelajaran di sekolah. Di sisi lain, teori-teori bimbingan dan konseling yang dihasilkan melalui penelitian oleh para praktisi di sekolah-sekolah tampaknya belum berkembang sepenuhnya sehingga kurang memberikan kontribusi bagi perkembangan profesi bimbingan dan konseling.

Kendala terbesar yang dihadapi untuk mewujudkan bimbingan dan konseling sebagai profesi yang handal dan bisa sejajar dengan profesi-profesi lain yang sudah mapan justru terjadi dalam tataran praktis.

Manfaat bimbingan dan konseling sepertinya masih belum dirasakan oleh masyarakat, karena penyelenggaraannya dan pengelolaannya tidak jelas. Kesan lama, konseling sebagai “polisi sekolah ”pun hingga kini masih melekat kuat pada sebagian masyarakat, khususnya di kalangan siswa. Terdapat beberapa faktor dominan yang diduga menghambat terhadap laju perkembangan profesi konseling di Indonesia, yaitu:

1. Kelangkaan Tenaga Konselor

Tenaga konselor yang berlatar bimbingan dan konseling memang masih belum memenuhi kebutuhan di lapangan. Selama ini masih banyak sekolah yang menyelenggarakan Bimbingan dan Konseling tanpa didukung oleh tenaga konselor profesional dalam jumlah yang memadai. Sehingga, tenaga konseling terpaksa banyak direkrut dari non-konseling, yang mungkin hanya dibekali

Pengetahuan dan keterampilan tentang bimbingan dan konseling yang minimal atau bahkan sama sekali tanpa dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang konseling, yang tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja

bimbingan dan konseling itu sendiri, baik secara personal maupun lembaga.

Kelangkaan ini diduga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara demand dan supply. Tingkat produktivitas dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan penghasil tenaga konselor tampaknya relatif masih terbatas jumlahnya dan belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Demikian pula dalam distribusinya relatif tidak merata. Contoh kasus, di beberapa daerah ketika melakukan rekrutment untuk tenaga konselor dalam testing Calon Pegawai Negeri Sipil ternyata tidak terisi, bukan dikarenakan tidak ada peminatnya, tetapi memang tidak ada orangnya! Boleh jadi ini merupakan dampak langsung dari otonomi daerah, dimana kewenangan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada daerah, dan tidak semua daerah mampu menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya kebutuhan tenaga konselor di daerahnya.

Oleh karena itu, ke depannya perlu dipikirkan bagaimana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan pencetak tenaga konselor untuk dapat memproduksi lulusannya, dengan memperhitungkan segi kuantitas, kualitas dan distribusinya., sehingga kelangkaan tenaga konselor dapat segera diatasi.

2. Kurang Optimalnya Fungsi BK di Sekolah

Dominasi kegiatan guru BK hanya pada penanganan siswa yang bermasalah menunjukkan belum optimalnya peran dan tanggung jawab guru BK di sekolah. Fenomena lain berupa belum dimanfaat-kannya berbagai instrumen dalam upaya pengumpulan data guna menyusun rancangan kegiatan

untuk pengembangan diri serta sesuai kebutuhan siswa, membuktikan bahwa guru BK belum mengfungsikan dirinya secara optimal. Hal ini berakibat pada kesalahan persepsi tentang fungsi BK oleh pihak-pihak lain (Kepala Sekolah, guru bidang studi, siswa).

3. Kebijakan Pemerintah yang kurang berpihak terhadap Profesi Konseling

Banyak terjadi kejanggalan dan ketidak jelasan kebijakan dari pemerintah pusat tentang profesi bimbingan dan konseling. Ketidak jelasan semakin dirasakan justru pada saat kita sedang berupaya mereformasi pendidikan kita. Contoh kasus terbaru, ketika digulirkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hingga saat Ini sama sekali belum memberikan kejelasan tentang bagaimana bimbingan dan konseling seharusnya dilaksanakan. Dalam dokumen KTSP, kita hanya menemukan secuil informasi yang membingungkan tentang bimbingan dan konseling yaitu berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Diri.

Begitu juga, dalam kebijakan sertifikasi guru, banyak konselor dan pengawas satuan pendidikan yang kebingungan untuk memahami tentang penilaian perencanaan dan pelaksanaan konseling, karena format penilaian yang disediakan tidak sepenuhnya cocok untuk digunakan dalam penilaian perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Tentunya masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan di lapangan, baik yang bersifat konseptual-fundamental maupun teknis operasionalnya.

Ketidak jelasan kebijakan tentang profesi bimbingan dan konseling pada tataran pusat ini akhirnya mengimbas pula pada kebijakan pada tataran di bawahnya (meso dan mikro), termasuk pada tataran operasional yang dilaksanakan oleh

para konselor di sekolah. Jadi, kalau ada pertanyaan mengapa Bimbingan dan Konseling di sekolah kurang optimal, maka kita bisa melihat sumber permasalahannya, yang salah satunya adalah ketidak jelasan dalam kebijakan pemerintah terhadap profesi bimbingan dan konseling.

Jika ke depannya, bimbingan dan konseling masih tetap akan dipertahankan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, kiranya perlu ada komitmen dan good will dari pemerintah untuk secepatnya menata profesi konseling, salah satunya dengan berupaya melibatkan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) selaku wadah yang menaungi para konselor dan para pakar konseling untuk duduk bersama merumuskan bagaimana sebaiknya kebijakan konseling untuk hari ini dan ke depannya. Walaupun dalam hal ini mungkin akan terjadi tawar-menawar yang cukup alot di dalamnya, tetapi keputusan yang terbaik demi kemajuan profesi bimbingan dan konseling tetap harus segera diambil.

Dengan teratasinya kelangkaan tenaga konselor dan keberhasilan upaya pemerintah dalam menata profesi bimbingan dan konseling, niscaya pada gilirannya akan memberikan dampak bagi perkembangan konseling ke depannya, sehingga profesi konseling bisa tumbuh dan berkembang menjadi sebuah profesi yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan negeri ini. Jika tidak, maka profesi bimbingan dan konseling tetap saja dalam posisi termarginalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://berita.upi.edu/profesi-bimbingan-konseling-dan-supervisi-klinis/>
- <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/download/40/37/#:~:text=Kajian%20Literatur%20Pengertian%20Bimbingan%20dan,karier%20melalui%20berbagai%20jenis%20layanan>
- <https://karyailmiah.unipasby.ac.id/hociniq/2023/04/ARTIKE L-3.pdf>
- <https://media.neliti.com/media/publications/352021-peran-psikolog-dan-konselor-96f42f56.pdf>
- [https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor/article/download/19409/3314/40225#:~:text=2022\)%20;%20\(Sari%2C%20Sukma,berat%20\(Prayitno%2C%202018\).](https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor/article/download/19409/3314/40225#:~:text=2022)%20;%20(Sari%2C%20Sukma,berat%20(Prayitno%2C%202018).)
- https://www-csuci-edu.translate.google/caps/individual-counseling.htm? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id & x tr_pto=rq#:~:text=Counseling%20allows%20individuals%20to%20explore,and%20work%20toward%20desired%20change
- https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19737/9/B OOK_Tritjahjo%20Danny_Dasar-dasar%20konseling_Bab%209.pdf

IMPLIKASI PROFESIONALISASI BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Memahami Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan berbagai kalangan baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa untuk banyak pihak. Dengan pendidikan individu lebih memahami apa yang ada disekitarnya. Pentingnya pendidikan diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik lebih aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan agama.

Dari undang-undang ini dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat sebuah usaha dari pendidikan untuk yang dididiknya dan merencanakan seperti apa bentuk pendidikan yang akan diberikan kepada para peserta didiknya. Dalam undang-undang pendidik juga disebutkan bahwa konselor adalah pendidik. Dia mengajarkan kliennya untuk menguasai kemampuan tertentu. Konselor berusaha agar klien mengalami perubahan dalam perilaku dan mencapai kehidupan yang efektif setiap hari. Pengajar Bimbingan dan Konseling diharapkan untuk bersikap profesional dalam memberikan layanan konseling kepada kliennya.

Memahami Istilah Profesi Dan Profesionalisme

Istilah profesi menurut Supriadi(2005:220) adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*experise*) dari para anggotanya. Artinya ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/latihan pra-jabatan) maupun setelah menjalanni suatu profesi (*in-service training*). Selanjutnya istilah profesionalisme berasal dari bahasa inggris *profession*. Dalam kamus inggris indonesia disebutkan bahwa *profession* memiliki arti pekerjaan(Echols & Shadili, 1996 :449). Kata “profesional” berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain (Usman, 2016:15). Secara sederhana, pekerjaan profesional adalah jenis pekerjaan yang hanya dijalankan oleh individu yang secara khusus dipersiapkan untuk itu, bukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Hal ini dilihat dari perspektif pendidikan dan pelatihan. Namun, dalam konteks pekerjaan profesional, fokusnya lebih kepada pendidikan dibandingkan hanya dengan pelatihan. Makin tinggi tingkat pendidikan yang harus dipenuhi, makin tinggi pula derajat profesi yang di sandangkannya (Christine, 2009:7)

Untuk mewujudkan kinerja guru profesional dalam reformasi pendidikan, secara ideal ada beberapa karakteristik citra guru yang diharapkan, (Aqib, 2010:147) yaitu :

1. Guru memiliki semangat juang yang tinggi disertai dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik,
2. Guru yang mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan anak,
3. Guru yang mempunyai kualitas kompetensi pribadi dan profesional yang memadai disertai atas kerja yang kuat, Guru yang memiliki kualitas kesejahteraan yang memadai, dan
4. Guru yang mandiri, kreatif dan berwawasan masa depan.

Memahami Guru Bimbingan Dan Konseling

Guru bimbingan konseling atau konselor adalah guru yang memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan hak penuh dalam menjalankan program bimbingan dan konseling di sekolah. program ini merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan di sekolah. Ada beberapa alasan mengapa layanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah. Pertama adalah keberagaman antar individu. Setiap siswa memiliki perbedaan satu sama lain, selain ada kesamaan. Perbedaan ini mencakup aspek: kemampuan intelektual, keterampilan, motivasi, cara pandang, sikap, potensi, minat, dan sebagainya. Kedua, siswa sering menghadapi berbagai masalah dalam pendidikan. Masalah-masalah tersebut bisa bersifat pribadi, berkaitan dengan hubungan sosial (dengan guru atau teman), kesulitan dalam belajar, dan lainnya. Dalam

menghadapinya, sering kali siswa tidak dapat menyelesaikannya sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari orang lain untuk berdiskusi. Orang lain di sini adalah mereka yang bersedia memahami diri siswa dan mengetahui jalan keluar dari masalah yang dihadapi.

Dalam lingkungan sekolah, konselor adalah pihak yang diharapkan dapat memberikan bantuan tersebut. Ketiga, masalah dalam belajar. Siswa datang ke sekolah dengan harapan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Berbagai tantangan bisa muncul, seperti tekanan dari tugas-tugas, kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan, keinginan untuk melakukan yang terbaik tetapi tidak mampu, kerinduan kepada keluarga, persaingan dengan teman-teman, kekurangan dalam kemampuan intelektual dasar, serta motivasi belajar yang rendah. Masalah-masalah ini tidak selalu dapat diatasi dalam proses belajar di kelas, tetapi memerlukan pelayanan khusus dari guru bimbingan konseling atau konselor.

Tidak akan memiliki makna kompetensi pedagogik jika tidak sejalan dengan kompetensi lainnya. Namun, setiap guru perlu memiliki keempat kompetensi ini agar dapat berfungsi dengan baik di lapangan. Begitu pula, guru bimbingan konseling harus memiliki kompetensi tersebut dalam diri mereka.

Seorang guru bimbingan dan konseling yang mampu menguasai keempat kompetensi ini akan dapat melaksanakan layanan bimbingan konseling secara professional. Ia memiliki pendidikan yang relevan dengan bidangnya, dapat bersosialisasi dengan baik, dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang tepat. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling perlu menerapkan kompetensi ini

kepada klien dan orang-orang di sekitarnya agar profesionalisme bimbingan konselingnya dapat terlihat.

Keempat kompetensi ini saling berkaitan untuk membentuk profesionalitas seorang konselor di mata klien, masyarakat, serta lingkungan sekitarnya. Tidak mungkin hanya satu kompetensi yang ditekankan. Kompetensi pedagogik tidak akan berarti jika kompetensi profesional tidak dimiliki. Sementara itu, kompetensi kepribadian juga tidak akan sempurna tanpa adanya kompetensi lainnya. Oleh sebab itu, guru bimbingan dan konseling berusaha agar kompetensi ini tertanam dalam diri mereka sehingga profesionalisme guru tersebut dapat dirasakan oleh klien atau siswa di sekolah tersebut.

Definisi Bimbingan Dan Konseling

Awal gerakan bimbingan dan konseling (BK) digiatkan oleh tokoh-tokoh yang peduli terhadap pengembangan pelayanan BK, khusus dalam bidang pendidikan. Gerakan Bimbingan dan konseling terus berkembang menjadi gerakan yang semakin jelas corak dan isinya, yang kegiatan terintegrasi dengan program sekolah. Saat ini, peran bimbingan dan konseling semakin tampak sebagai suatu profesi yang dapat berfungsi baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata Guidance dalam bahasa Inggris yang berarti to direct, pilot, manager, onsteer yang artinya menunjukkan, mengarahkan, menentukan mengemudikan (Shetzer, 1976:3). Bimbingan dan konseling adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia, dan oleh manusia (Arsini, 2017). Bimbingan merupakan terjemahan

dari kata *guidance* dalam bahasa Inggris yang berarti pertolongan yang diberikan untuk menuntun individu atau kelompok guna mencapai hidup yang lebih sejahtera (Batubara, 2018). Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapatkan latihan khusus untuk itu, dengan tujuan agar individu dapat memahami dirinya,

lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat (Shalahuddin, 2010: 16). Dari penjelasan ini, kita memahami bahwa konseling bertujuan untuk membantu individu meraih kemandirian dalam hidupnya. Dengan kemandirian, mereka dapat mengatasi masalah secara mandiri. Kemandirian memberikan kekuatan pada klien untuk menerima tantangan dan mengelola diri saat menghadapi masalah tersebut.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 menyebutkan ada tiga jenis guru yaitu;

- a. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta pendidikan agama,

- b. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah,
- c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik (peraturan bersama menteri pendidikan nasional dan kepala bkn tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka.

Yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru bimbingan dan konseling itu sendiri. Menne dalam Annas menyatakan bahwa seorang konselor perlu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- ✓ Memahami dan melaksanakan etika profesional.
- ✓ Mempunyai rasa kesadaran dirimengenai kompetensi, nilai-nilai dan sikap.
- ✓ Memeiliki karakteristik diri, yakni respek terhadap orang lain, kematangan pribadi, memiliki kemampuan intuitif, fleksibel dalam pandangan dan emosional stabil.
- ✓ Kemampuan dan kesabaran untuk mendengarkan orang lain, kemampuan berkomunikasi (Shalahuddin, 2010:194).

Rogers mendefenisikan bahwa aspek kepribadian konselor yang penting dalam hubungan konseling adalah: empati, respek, menerima, menghargai, memahami dan jujur. Bahkan Rogers menyatakan bahwa kepribadian lebih besar perannya dibandingkan teknik. Jadi, seorang guru bimbingan

konseling harus memiliki keterampilan profesional dalam dirinya sehingga ia akan menjiwai proses konseling dengan sebaik-baiknya. Pandai menempatkan diri, dan tidak mencampur adukkan.

Perkembangan profesional di mulai melalui lima tahap atau periode besar. Berikut adalah periode-periode tersebut (Prayitno, 2018:3)

Tahap pertama, sebagai rintisan berlangsung sampai dihasilkannya lulusan jurusan bimbingan dan penyuluhan yang pertama di IKIP Bandung tahun 1965.

Tahap kedua, masuknya gerakan BP di sekolah sampai dengan diberlakukannya kurikulum 1975 di seluruh tanah air yang di dalamnya memuat BP. Disisi lain terbentuknya organisasi profesi Ikatan petugas Bimbingan Indonesia (IPBI).

Tahap ketiga, pada tahapan ini istilah BP disempitkan artinya menjadi bimbingan karier.

Tahap keempat, pada periode ini berkembang teori, praksis dan praktek pelayanan konseling dengan konsep yang lebih terarah, yaitu dengan diubahnya secara resmi “bimbingan penyuluh” menjadi “bimbingan Konseling dan diaplikasikannya BK pola 17 plus. Pada periode ini juga pada tahun 1999 dibuka program Pendidikan Profesi Konselor di Universitas Negeri Padang.

Tahap kelima, pada tahap ini dibukalah PPK ke-2 di Universitas negeri Semarang. Maka untuk meningkatkan Konseling bermartabat didoronglah kampus lain untuk mendirikan program Profesi Konselor. Dan pada tahap ini juga dibentuk organisasi profesi yaitu Ikatan Konselor Indonesia (IKI).

Keberadaan Program Profesi Konselor bertujuan untuk menghasilkan lulusan BK yang benar-benar ahli di bidangnya. Dengan tingkat keahlian yang tinggi, para guru BK di sekolah dapat memberikan layanan BK dengan cara yang profesional. Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan, termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinyayang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil (Willis, 2009: 79).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi dan peraturan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat profesi pendidikan Tinggi bahwa tanda kelulusan program pendidikan profesi ada tiga yaitu:

Ijazah, sebagai tanda tamat menjalani program pendidikan dengan gelar profesi dilengkapi dengan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

Sertifikat kompetensi, sebagai tanda penguasaan kompetensi profesi.

Sertifikat profesi, sebagai tanda kewenangan melaksanakan layanan praktik profesi.

Bagi para lulusan jurusan konseling, mereka memiliki izin untuk memberikan layanan bimbingan konseling secara profesional. Layanan konseling yang dilakukan secara profesional akan membuat bimbingan konseling lebih dihargai oleh masyarakat. Konseling profesional yang dilakukan oleh guru BK yang kompeten akan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam sesi konseling.

Layanan yang berkualitas dari guru BK hanya dapat terwujud jika guru tersebut telah menguasai empat kompetensi dasar. Seorang guru BK harus memiliki

pengetahuan yang mendalam tentang bidang yang akan dia jalankan. Guru BK juga perlu memiliki kemampuan sosial yang baik untuk bisa berinteraksi dan mengembangkan bimbingan konseling di masyarakat. Selain itu, guru BK harus memiliki kepribadian yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita, dan diharapkan kepribadian guru BK sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila tersebut. Terakhir, guru BK perlu menunjukkan profesionalisme dalam memberikan layanan yang berlangsung di bidang bimbingan konseling.

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Gordon (dalam Mulyasa, 2002) adalah; pengetahuan(skill), nilai (value), sikap (attitude), dan minat (interest). Aspek- aspek tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

Pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru BK mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik.

Pemahaman (understanding); yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru BK yang akan melaksanakan layanan bimbingan konseling harus memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan layanan secara efektif dan efisien.

Kemampuan (skill) merupakan sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru BK dalam memilih dan melatih konten cara belajar efektif untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik.

ASPEK PROFESIONALISASI

Konselor adalah seorang profesional yang memenuhi syarat dan terakreditasi di bidang bimbingan dan konseling. Tugas konselor berbeda dari tugas psikoterapis. Fokus utama konselor adalah melakukan kegiatan konseling, seperti konseling individu, kelompok, keluarga, karir, pendidikan, serta konsultasi dengan guru dan orang tua, dan juga melakukan penilaian terhadap layanan bimbingan dan konseling, serta memfasilitasi rujukan ke institusi atau ahli di luar sekolah. Dari sudut pandang perkembangan, peran konselor di sekolah memiliki ciri khas di setiap tingkatan, tetapi semuanya berorientasi pada hubungan antarpribadi dan intrapribadi.

Guru bimbingan dan konseling, yang kini dikenal sebagai konselor, adalah pendidik yang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling untuk siswa-siswinya. Hal ini sesuai dengan peraturan bersama menteri pendidikan nasional dan

kepala badan kepegawaian negara nomor 03/v/pb/2010 dan nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pasal 1 yang menyebutkan bahwa “guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik. Sukardi dan Kusmawati (2008) menjelaskan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologi dan kemanusiaan secara ilmiah dan professional sehingga seorang guru bimbingan dan konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik dalam menghadapi masalah dan tantangan

hidup. Konselor tersebut bertugas secara profesional yaitu memang benar-benar telah dipersiapkan serta dididik secara khusus untuk menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling baik dalam pengetahuan. Pengalaman, dan pribadinya dalam bimbingan dan konseling.

Guru bimbingan konseling yang berfungsi sebagai pendidik profesional memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat jika mampu menunjukkan bahwa dirinya pantas dijadikan teladan oleh orang-orang di sekitarnya. Masyarakat akan memperhatikan bagaimana sikap dan tindakan guru tersebut dalam kehidupan sehari-hari, apakah terdapat sifat yang bisa dicontoh atau tidak. Cara guru dalam meningkatkan pelayanan, memperdalam pengetahuannya, memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa, serta cara berpakaian, berbicara, dan berinteraksi dengan siswa, rekan-rekan, serta anggota komunitas, sering menjadi fokus perhatian masyarakat. Meskipun banyak aspek perilaku guru yang diamati oleh masyarakat, tulisan ini akan membahas khususnya perilaku guru yang terkait dengan profesinya.

Lembaga pendidikan menuntut pendidik yang mampu menangani berbagai situasi dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan siswa, orang tua (dan kadang-kadang staf sekolah lainnya), bahkan mereka yang berada dalam posisi otoritas di dalam lembaga. Mereka harus mampu mengenali situasi mana yang paling sesuai untuk ditangani dengan metode tertentu (melalui konseling, konsultasi, dan lain-lain).

Konselor yang bertugas di lembaga pendidikan perlu memiliki sikap fleksibel dan kemampuan dalam berinteraksi dengan anak-anak, orang tua, serta staf sekolah lainnya yang sering datang dari berbagai latar belakang dan pandangan yang berbeda. Mereka perlu mengetahui situasi yang

sebaiknya ditangani dengan metode yang tepat (seperti konseling, konsultasi, dan lain- lain).

Sebagai pendidik yang profesional, konselor melaksanakan layanan konseling sebagai suatu bentuk pendidikan untuk mendukung individu dalam mengembangkan diri secara maksimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan kebutuhan lingkungan di sekitar mereka. Konseling berfungsi untuk membantu individu mencapai potensi diri secara optimal dalam aspek-aspek seperti kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan kinestetik, sehingga dapat menjadi individu yang mandiri (mahluk individu), berkolaborasi dalam sistem sosial yang saling mendukung (mahluk sosial), serta menjadi pemimpin yang berkontribusi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dunia ini (mahluk Tuhan). Sebagai sebuah profesi yang berorientasi pada bantuan (helping profession), konseling menjadi dasar bagi peran dan fungsi konselor. Profesi konselor yang berfokus pada bantuan adalah mereka yang dilatih secara khusus dan memiliki lisensi atau sertifikat untuk menawarkan layanan unik yang sangat dibutuhkan masyarakat, yaitu konseling. Konselor menjalankan proses konseling untuk menyokong individu yang sedang mengalami pertumbuhan sesuai dengan fase perkembangan mereka, sehingga dapat mencapai kemandirian dan kebahagiaan dalam menjalani berbagai aspek kehidupan.

Dalam kapasitas sebagai profesi yang menolong, konselor memiliki tanggung jawab untuk membantu individu mencapai tahap perkembangan yang lebih tinggi atau optimal, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pendidikan agar peserta didik dapat secara aktif menggali potensi mereka dalam hal spiritual, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, moralitas, hingga keterampilan yang dibutuhkan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, serta negara. Teori dan konsep konseling yang dikuasai oleh konselor didasarkan pada sistem sosial dan budaya tertentu, yang mungkin tidak berlaku bagi sistem sosial dan budaya lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang tujuan konseling serta kehidupan individu yang dilayani sangat diperlukan.

Kita perlu menyadari bahwa disiplin yang paling kuat terkait dengan profesi konselor adalah psikologi. Namun, penting juga untuk mengakui dampak signifikan dari ilmu-ilmu lain terhadap profesi konseling. Misalnya, sosiologi membantu dalam memahami kelompok manusia dan dampak dari perubahan sosial. Antropologi memberikan wawasan mengenai budaya manusia dan menjadi panduan dalam berinteraksi dengan anggotanya. Biologi berkontribusi dalam pemahaman mengenai organisme manusia dan keunikannya. Sementara itu, profesi kesehatan mengingatkan kita akan pentingnya kesehatan serta upaya pencegahan terhadap penyakit.

IMPLIKASI PROFESIONALISASI

Keberadaan layanan konseling di sekolah masih menjadi perdebatan di kalangan tertentu. Ada yang meremehkan peran guru bimbingan konseling dalam hal ini. Masih terdapat pemahaman yang keliru mengenai fungsi bimbingan konseling. Kesalahpahaman tersebut membuat kehadiran bimbingan dan konseling sebagai salah satu komponen layanan pendidikan belum menunjukkan eksistensinya sebagai layanan pendidikan yang sangat strategis untuk mencapai tujuan pendidikan (Ardimen, 2018).

Sementara dari hasil penelitian Ong Didik Cahyo menyimpulkan masih banyak siswa dan guru yang belum memahami peran dan fungsi bimbingan dan konseling, dan ada yang menafsirkan bimbingan dan konseling dengan image negatif. Bahkan ada yang mengatakan bahwa guru bimbingan dan konseling pemarah, galak dan kurang ramah (Kartiko,dkk, 2014). Dari persepsi ini bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling itu sendiri.

Beberapa Kesalahfahaman yang terjadi dalam bimbingan konseling(Prayitno, 2004:120-129):

Bimbingan dan Konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Anggapan ini menyatakan bahwa bimbingan konseling memang tidak digabungkan sama sekali dengan pendidikan atau memang betul terpisah dari pendidikan karena dilaksanakan oleh orang yang ahli. Jawaban untuk kesalahfahaman ini sebenarnya sudah ada dimana sekolah hendaknya memang memasukkan unsur bimbingan konseling dalam pembelajarannya. Sehingga bimbingan dan konseling yang memang dasarnya sebagai pendidikan bisa menampakkan eksistensinya. Dan bimbingan dan konseling juga bukan hal mewah yang pelaksanaannya sangat susah dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli. Padahal guru bimbingan dan konseling yang paling diutamakan adalah keterampilan dan keahliannya dalam memandu bimbingan dan konseling di sekolah tersebut.

Konselor di sekolah diperankan sebagai “polisi sekolah”. Anggapan ini juga sebenarnya keliru. Konselor dianggap sebagai penanggung jawab kedisiplinan sekolah. Konselor dianggap sebagai orang yang ditakuti karena setiap bermasalah diminta ke ruangan guru bimbingan dan konseling. Hal ini tentu menciptakan image negatif bahwa

kalau bertingkah laku yang salah maka akan dihadapkan pada konselor. Sehingga terkesan kalau siswa yang melanggar aturan akan diserahkan pada polisi sekolah.

Bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasehat. Nasehat adalah jurus jitu yang sering diberikan kepada siswa ketika ia bermasalah. Nasehat adalah salah satu sebagian kecil yang ada di konseling. Guru bimbingan dan konseling sebenarnya melakukan upaya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya.

Bimbingan dan Konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang bersifat insidental. Sebenarnya konseling itu menjangkau dimensi waktu yang lebih luas, yaitu lalu, sekarang dan yang akan datang. Konselor tidak hanya menunggu saja klien datang dan mengemukakan masalahnya.

Bimbingan dan Konseling dibatasi hanya untuk peserta didik tertentu saja. Bimbingan konseling ditujukan pada siswa yang bermasalah saja. Jikapun ada pada penggolongan maka itu hanya kepada penggolongan masalah saja, bukan atas dasar kondisi pribadi klien. Semua siswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan bimbingan konseling.

Bimbingan dan Konseling melayani “orang sakit” dan/atau “kurang/tidak normal”. Guru bimbingan dan konseling yang memiliki kemampuan tinggi akan dengan mudah mendeteksi dan mempertimbangkan lebih jauh tentang mantap atau kurang mantapnya fungsi-fungsi yang ada pada kloiennya sehingga klien tersebut perlu dikirim ke dokter atau psikiater atau tidak. Penanganan masalah oleh ahlinya secara

tepat akan memberikan jasmani yang kuat bagi keberhasilan pelayanan.

Bimbingan dan Konseling bekerja sendiri, padahal sebenarnya guru bimbingan dan konseling harus bekerja sama dengan personil sekolah lainnya dalam melaksanakan bimbingan konseling. Bayangkan apabila guru bimbingan dan konseling sudah bisa merubah fikrian siswa yang malas untuk bisa hadir tepat waktu dikelas. Akan tetapi guru mata pelajaran malah memberikan sebuah cemoohan kepada siswa tersebut “tumben kamu tidak terlambat, tumben kamu rajin, mimpi apa semalam makanya kamu hadir tepat waktu” dan masih banyak kata ejekan yang bisa mematikan proses konseling yang sudah dibina oleh guru bimbingan dan konseling.

Konselor harus aktif, sedangkan pihak lain pasif, sesuai dengan asas kegiatan disamping konselor yang bertindak sebagai pusat penggerak bimbingan dan konseling, pihak lainpun terutama klien, harus secara langsung aktif terlibat dalam proses tersebut. Pada dasarnya bimbingan konseling adalah usaha bersama yang beban kegiatannya tidak semata-mata ditimpakan hanya kepada konselor saja.

Menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Salah satu ciri keprofesionalan bimbingan dan konseling adalah pelayanan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Keahliannya itu diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang cukup lama di perguruan tinggi.

Pelayanan bimbingan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Pada umumnya memang diawali dengan melihat gejala-gejala keluhan awal yang disampaikan klien. Dan ternyata apabila maalah tersebut lebih dialami maka ini akan

lebih luas lagi masalah yang sebenarnya dialami klien. Guru bimbingan dan konseling hendaknya tidak tertuju pada masalah pertama yang disampaikan klien saja. Hendaknya keluhan itu didalami dan akan nampaklah seperti apa masalahnya.

Menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Bimbingan konseling tidaklah persis sama dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Bagi bimbingan konseling yang dihadapi adalah orang sehat yang sedang mengalami masalah. Maka penyelesaian masalah ini bisa diupayakan untuk disembuhkan dengan cara memakai teknik-teknik dan pendekatan tertentu sesuai dengan masalah yang dihadapinya.

Menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling segera dilihat. Tuntutan yang cukup tinggi untuk bimbingan dan konseling adalah setelah siswa berhadapan dengan. Guru bimbingan dan konseling maka ia akan langsung berubah. Padahal ini tentu memiliki proses yang harus dilewati klien tersebut.

Menyamarkan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Padahal sebenarnya masalah yang tampaknya sama belum tentu cara penyelesaiannya juga sama. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh individu dan masalah yang ia hadapi tersebut.

Memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi bimbingan dan konseling. Sebenarnya penggunaan instrumen sebagai alat bantu untuk pelaksanaan bimbingan konseling. Tidak adanya instrumen ini bukan berarti bimbingan konseling tidak diadakan sama sekali. Namun adanya instrumentasi memang sebagai

pembantu bagi guru bimbingan dan konseling untuk memudahkan dalam pemberian bimbingan konseling.

Bimbingan dan konseling dibatasi hanya menangani masalah yang ringan saja. Menetapkan masalah itu ringan atau berat bukanlah hal yang mudah. Terkadang bagi sebagian orang masalah ini berat tapi tidak untuk sebagian lainnya. Namun fokus bimbingan konseling adalah untuk menanganinya dengan cermat dan tuntas.

Konselor dalam peran pendidik dan sebagai profesi di lihat sebagai elemen atau bagian dari sebuah sistem sosial. "Sistem sosial" di sini dimaksudkan sebagai sekumpulan individu yang saling hidup berdampingan dan berinteraksi. Jalinan relasi antara elemen-elemen dalam sistem sosial ini membentuk suatu tatanan sosial yang terstruktur dengan baik; di dalamnya terdapat berbagai posisi. Setiap posisi dapat dibedakan dari yang lainnya berdasarkan fungsi yang ditetapkan oleh kelompok, dan setiap posisi memiliki hak serta kewajiban yang spesifik. Setiap fungsi selalu disertai dengan peran tertentu. Secara umum, peran merujuk pada hak dan tanggung jawab yang diakui secara normatif sebagai pola perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Dalam praktiknya, setiap orang menjalani berbagai posisi, sehingga otomatis mengemban banyak peran. Ketika seorang konselor melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di sekolah, dapat dikatakan bahwa ia telah menjalani perannya. Peran konselor dapat diartikan sebagai harapan dan panduan untuk berperilaku sesuai dengan posisinya. Oleh karena itu, ia menjadi semacam "rencana" bagi perilaku seorang konselor.

Idealnya, tugas konselor dalam menyediakan layanan bimbingan dan konseling seharusnya bisa dilakukan dengan baik. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaannya di sekolah

masih jauh dari yang diharapkan karena berbagai hambatan, antara lain:

Pemahaman kepala sekolah mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling masih terbatas.

Banyak konselor sekolah yang tidak dapat melaksanakan bimbingan dan konseling karena tidak memiliki waktu khusus untuk berinteraksi dengan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, meskipun aturan telah menetapkan waktu dua jam pelajaran untuk kegiatan tersebut.

Fasilitas dan sarana untuk kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah belum memadai dan tidak memenuhi standar pelayanan yang ditentukan.

Banyak konselor mengalami konflik peran, di mana adanya tugas tambahan memaksa mereka untuk menjalankan fungsi yang bertentangan.

Beberapa konselor terlibat dalam kegiatan lain yang tidak berkaitan langsung dengan peran profesional mereka sebagai konselor.

Peran konselor di sekolah tidak memberi dukungan yang memadai untuk menjadi agen perubahan yang efektif.

Masih banyak konselor sekolah yang tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai identitas jabatan mereka, ada yang lebih cenderung dianggap sebagai psikolog atau administrator, padahal konselor seharusnya memiliki identitas yang spesifik sebagai konselor.

Ada konselor sekolah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bimbingan dan konseling.

Konselor sekolah kurang berkolaborasi dengan semua staf sekolah, sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan kinerja mereka secara profesional.

Sebagai individu yang memiliki harapan, konselor tidak berperan sebagai pihak yang pasif; ia berinteraksi secara sosial dengan orang lain yang mengamati dan meresponsnya. Ketika suatu kelompok sosial berfungsi dengan baik, individu lain akan mengharapkan perilaku tertentu dari konselor. Peran konselor berbeda dari peran guru mata pelajaran, kepala sekolah, petugas administrasi, dan juga peran siswa di sekolah. Peran yang dijalani oleh konselor menciptakan ciri tersendiri dalam pola perilakunya. Konflik peran konselor terjadi akibat harapan-harapan yang tidak sejalan. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapi konselor dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dapat menimbulkan konflik peran. Beberapa penyebab konselor mengalami konflik peran antara lain:

- Konselor ditugasi tugas yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya
- Harapan konselor bertentangan dengan aturan yang ada
- Lingkungan sosial memberikan peran yang berbeda
- Tugas ganda yang memaksa konselor untuk menjalankan dua peran sekaligus.

PERAN KONSELOR

Guru bimbingan konseling/konselor secara yuridis dalam system pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan guru, dosen, pamong, dan tutor sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 butir 6. Seperti halnya guru dan tenaga pendidik professional lainnya yang diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi, guru bimbingan dan konseling/konselor juga diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan kompetensi professional yang kemudian secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional.

Kompetensi profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 mencakup seorang guru bimbingan dan konseling yang menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif; menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Adapun penjabaran kompetensi professional secara lebih rinci dalam lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor 27 tahun 2008 yaitu

- ❖ Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Aspek ini adapun indikator seorang guru BK mampu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk

memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli adalah sebagai berikut:

- ✓ Menguasai hakikat asesmen,
 - ✓ Memilih teknik asesmen,
 - ✓ Sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling,
- ❖ Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling,
 - ❖ Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli,
 - ❖ Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli.
 - ❖ Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan,
 - ❖ Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling,
 - ❖ Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat,
 - ❖ Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.
 - ❖ Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling

Aspek teoritik bimbingan dan konseling merupakan hal yang paling mendasar dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Namun penguasaan pada aspek teoritik ini tidak akan fungsi dan manfaatnya apabila tidak diaplikasikan. Berikut indikator yang termasuk dalam aspek penguasaan

kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

- ❖ Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling,
- ❖ Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling,
- ❖ Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling,
- ❖ Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja,

Mengaplikasikan pendekatan/model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling,

Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.

Merancang program Bimbingan dan Konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya program yang dibuat oleh guru BK. Dengan adanya program bimbingan dan konseling maka kegiatan yang dilakukan oleh guru BK akan terarah. Oleh karena pentingnya adanya program bimbingan dan konseling, seorang guru BK harus mampu merancang program bimbingan dan konseling. Adapun indikator seorang guru BK dapat merancang program bimbingan dan konseling dengan baik adalah sebagai berikut:

- Menganalisis kebutuhan konseli,

- Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan,
- Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling,
- Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.
- Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif Rancangan program bimbingan dan konseling tidak akan ada artinya jika tidak ada implementasinya.

Demikian indikator seorang guru BK yang dapat dikatakan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif adalah :

- Melaksanakan program bimbingan dan konseling, Melaksanakan pendekatan
- kolaboratif dalam pelayanan bimbingan konseling,
- Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli,
- Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling
- Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling

Penilaian adalah suatu kegiatan yang memiliki tahapan tertentu (berproses: mekanisme, prosedur, dan instrumen yang digunakan), dengan mengetengahkan pengumpulan dan pengolahan akan berbagai informasi. Kegiatan penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling pada hakikatnya bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh

gambaran bersifat informasi akurat tentang keefektifan dan efisiensi sesuatu yang telah dilaksanakan. Informasi berkenaan dengan keefektifan dan keefisienan ini selanjutnya akan melahirkan suatu keputusan tertentu. Selain itu penilaian dilakukan sebagai perbaikan, pengendalian proses dan mutu pelayanan bimbingan dan konseling. Berikut indikator dalam penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling yaitu:

- Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling,
- Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling,
- Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait,
- Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.
- Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional

Guru BK/konselor merupakan sebuah profesi professional. Sebagai sebuah profesi, guru BK memiliki sebuah etika profesi. “Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli (Supriatna, 2011)

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal tersebut menunjukkan

bahwa kompetensi harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan melekat dalam diri pribadi dan melekat dalam satu kesatuan (Mulyasa, 2002).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Sedangkan Depdiknas menjelaskan kompetensi bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut.

Ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Kompetensi ini untuk melambangkan keprofesionalan seorang guru bimbingan dan konseling disekolah. Kompetensi tersebut adalah (prayitno, 2009:67):

 Kompetensi pedagogik

- ✓ Menguasai teori danpraksis pendidikan
- ✓ Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli
- ✓ Menguasai esensi pelayanan bimbingan konseling dalam jalur, jenis dan satuan pendidikanb.

 Kompetensi kepribadian

- ✓ Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- ✓ Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih
- ✓ Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat-Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

Kompetensi sosial

- ✓ Mengimplementasikan kolaborasi interen di tempat bekerja
- ✓ Berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling
- ✓ Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi .

Kompetensi profesional

- ✓ Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli-Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan konseling
- ✓ Merancang program bimbingan dan konseling
- ✓ Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif
- ✓ Menilai profesi dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling
- ✓ Memiliki kedadaran dan komitmen terhadap etika profesional
- ✓ Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Keutuhan kompetensi ini tidak dipisahkan dan harus saling bersinergi dan saling berkaitan (Lestari, dkk, 2013) Tidak akan memiliki makna kompetensi pedagogik jika tidak

sejalan dengan kompetensi lainnya. Namun, setiap guru perlu memiliki keempat kompetensi ini agar dapat berfungsi dengan baik di lapangan. Begitu pula, guru bimbingan konseling harus memiliki kompetensi tersebut dalam diri mereka.

Seorang guru bimbingan dan konseling yang mampu menguasai keempat kompetensi ini akan dapat melaksanakan layanan bimbingan konseling secara professional. Ia memiliki pendidikan yang relevan dengan bidangnya, dapat bersosialisasi dengan baik, dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang tepat. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling perlu menerapkan kompetensi ini kepada klien dan orang-orang di sekitarnya agar profesionalisme bimbingan konselingnya dapat terlihat.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Pentingnya pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pada upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses belajar mengajar. Konselor merupakan pendidik yang mendidik klien untuk menguasai kemampuan tertentu dan mengupayakan perubahan perilaku. Profesionalisme dalam pendidikan ditonjolkan dengan fokus pada jenjang pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk profesi tertentu.

Guru bimbingan dan konseling diharapkan memiliki karakteristik seperti semangat juang yang tinggi, realisasi diri, kompetensi personal dan profesional, kesejahteraan, dan kemandirian. Mereka memegang peranan penting dalam mengatasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang

dihadapi siswa dalam pendidikan. Konselor bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam menghadapi tantangan personal, sosial, dan pembelajaran, yang membutuhkan kompetensi khusus dalam pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesionalisme.

Gerakan bimbingan dan konseling telah berkembang menjadi sebuah profesi yang terintegrasi dalam program sekolah. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu dalam memahami dirinya, lingkungannya, dan mengembangkan potensinya secara optimal. Konselor diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi, sosiologi, antropologi, dan biologi untuk memberikan layanan yang efektif. Profesionalisasi konselor melibatkan kualifikasi akademik, standar kompetensi, dan kepatuhan terhadap etika profesional.

Kesalahpahaman tentang peran guru bimbingan dan konseling masih terjadi, yang mengarah pada kesalahpahaman tentang fungsi dan citra mereka. Beberapa orang menganggap konselor sebagai polisi sekolah atau hanya berfokus pada masalah kecil. Namun, konselor memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan, konseling, dan dukungan kepada siswa, orang tua, dan staf sekolah. Mereka harus berkolaborasi dengan profesional lain dan mematuhi etika profesional untuk memastikan pemberian layanan yang efektif.

Kompetensi yang dibutuhkan untuk guru bimbingan dan konseling meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi ini saling terkait dan penting

untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling secara profesional. Penguasaan asesmen, kerangka teori, desain program, implementasi, evaluasi, dan standar etika sangat penting bagi konselor untuk memberikan dukungan yang efektif kepada klien. Integritas kompetensi ini diperlukan untuk profesionalisme guru bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah , F., Ramadhana, M., Mutiara, T., & urnamasari, N. (2022). Implementasi Bimbingan dan konseling. 1-92.
- Ernawati. M.Pd., Kons, R. (2020). BUKU MATERI PEMBELAJARAN PROFESIONALISASI BK. 1-323.
- Khairiah Sari, A., Prayitno, & Karneli, Y. (2021). Pelayanan Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Meminimalisir Kesalahpahaman Tentang Bimbingan KonselingDi Sekolah. 36-49.
- Taher , Y., Aditama, M., & Syam, S. (2021). PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN KONSELING. 92-99.



BAB II

KOMPETENSI KEPRIBADIAN KONSELOR DAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU BK

KONSEP DASAR KOMPETENSI KEPRIBADIAN

Pengertian Kompetensi Kepribadian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah suatu gabungan atau kumpulan dari pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang wajib dimiliki, dipahami secara mendalam, dan dikuasai secara menyeluruh oleh seorang guru maupun dosen dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya secara profesional. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa setiap guru harus memiliki dan mengembangkan empat jenis kompetensi utama sebagai bagian dari standar profesionalisme, yaitu:

- ❖ Kompetensi pedagogis yang berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola pembelajaran dan memahami peserta didik
- ❖ Kompetensi kepribadian yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, bijaksana, dan berwibawa
- ❖ Kompetensi sosial yang mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, dan masyarakat

- ❖ Kompetensi profesional yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran secara mendalam serta kemampuan mengembangkan materi tersebut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta didik (Zola & Mudjiran, 2020).

Menurut (Zola & Mudjiran, 2020), salah satu dari empat jenis kompetensi profesional yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian, diketahui memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas seorang guru secara menyeluruh. Hal ini diperkuat oleh hasil berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Roqib dan Nurfuadi (2020) serta Wardoyo (2015), yang secara jelas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kompetensi kepribadian yang dimiliki guru dengan kualitas kinerja dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas. Lebih lanjut, temuan yang diperoleh dari penelitian oleh Hakim (2015) juga memberikan bukti tambahan bahwa kompetensi kepribadian guru bukan hanya sekadar aspek pelengkap, melainkan memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan berbagai aspek penting dalam proses pembelajaran. Aspek-aspek tersebut antara lain mencakup kemampuan guru dalam menguasai dan mengendalikan materi pelajaran, kecakapannya dalam mengelola dan melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, serta tingkat komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional yang berorientasi pada kualitas pembelajaran.

Secara umum, menurut Karim (2020), kepribadian dapat dipahami sebagai suatu susunan yang bersifat dinamis antara aspek psikologis dan fisik dalam diri setiap individu, yang secara keseluruhan membentuk cara unik seseorang

dalam beradaptasi dan merespons berbagai situasi atau kondisi di lingkungannya (Thalita et al., 2023).

Menurut Freud, sebagaimana dikutip oleh Ja'far (2016) dalam (Thalita et al., 2023), kepribadian seseorang dapat dipahami sebagai suatu pola perilaku yang menjadi ciri khas atau karakteristik individu secara menyeluruh dan mendalam. Pola tersebut tidak hanya terbatas pada perilaku lahiriah, tetapi mencakup cara seseorang berpikir, merasakan, serta dorongan atau motivasi internal yang dimilikinya dalam menanggapi berbagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Freud juga menjelaskan bahwa struktur kepribadian manusia tersusun atas tiga komponen utama yang saling berinteraksi dan berperan penting dalam menentukan perilaku, yaitu id, ego, dan superego. Ketiganya memiliki fungsi dan peran masing-masing yang khas, di mana id mewakili dorongan naluri dan kebutuhan dasar, ego berfungsi sebagai pengatur atau penengah yang rasional antara tuntutan id dan realitas, sementara superego merupakan sistem nilai moral yang dipelajari dari lingkungan sosial. Freud menekankan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu merupakan hasil dari proses interaksi dinamis dan upaya pencapaian keseimbangan antara ketiga unsur kepribadian tersebut, sehingga menghasilkan respons yang sesuai dengan konteks situasi yang dihadapi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian merupakan salah satu dari empat kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh guru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi ini mencerminkan karakter kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, bijaksana, dan berwibawa, yang sangat penting dalam

menunjang profesionalisme guru. Berdasarkan berbagai hasil penelitian, kompetensi kepribadian terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan kinerja guru, termasuk dalam penguasaan materi ajar, pengelolaan pembelajaran, serta komitmen terhadap tugasnya sebagai pendidik. Dengan demikian, kompetensi kepribadian bukan hanya aspek pendukung, melainkan fondasi penting dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan berkualitas.

Pentingnya Kompetensi Kepribadian dalam Profesi Pendidikan

Kompetensi kepribadian dapat dipahami sebagai salah satu unsur mendasar yang berperan dalam membentuk karakter individu, khususnya dalam konteks profesi pendidikan. Kepribadian yang kuat dan positif pada dasarnya akan tercermin dalam perilaku yang ditunjukkan oleh individu tersebut, termasuk dalam interaksinya di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan menunjukkan sikap, tindakan, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab profesi yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Munawaroh (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi kepribadian memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku profesional yang ditampilkan oleh seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dunia pendidikan, baik dalam hubungannya dengan peserta didik, rekan sejawat, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan (Hinda Syah et al., 2024).

Sehubungan dengan peran kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru dalam kaitannya dengan proses kegiatan belajar mengajar, Larasati dan Ghofur (2018)

menyatakan bahwa keberhasilan proses pembelajaran serta capaian hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sekolah, susunan struktur pendidikan, maupun isi dari kurikulum yang diterapkan. Lebih dari itu, mereka menekankan bahwa aspek yang memegang peran dominan dan sangat menentukan dalam keberhasilan tersebut justru terletak pada kualitas kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Dengan kata lain, karakter, sikap, dan stabilitas emosi yang ditunjukkan oleh guru dalam proses pembelajaran memiliki pengaruh besar terhadap motivasi, kenyamanan, dan perkembangan belajar siswa secara menyeluruh (Hinda Syah et al., 2024).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, kompetensi kepribadian memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter dan perilaku profesional seorang guru. Kepribadian yang kuat, stabil, dan positif tidak hanya mencerminkan nilai moral dan etika, tetapi juga secara langsung memengaruhi kualitas interaksi guru dengan peserta didik, rekan kerja, dan lingkungan sekolah. Lebih lanjut, kompetensi kepribadian guru terbukti berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses pembelajaran serta pencapaian hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada struktur kurikulum atau lingkungan fisik sekolah, melainkan sangat ditentukan oleh karakter dan kepribadian guru sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan.

KOMPETENSI KEPERIBADIAN KONSELOR

Definisi Konselor dalam Konteks Pendidikan

Dalam terminologi bahasa Inggris, istilah konselor dikenal dengan sebutan counselor atau helper, yang merujuk pada seorang individu yang memiliki peran khusus dan telah memperoleh kualifikasi tertentu dalam bidang konseling. Seorang konselor bukan sekadar petugas biasa, melainkan merupakan tenaga ahli yang telah melalui proses pendidikan dan pelatihan profesional sehingga memiliki kemampuan dan kompetensi khusus dalam memberikan layanan konseling kepada individu atau kelompok yang membutuhkan (Isra, 2020). Dengan demikian, konselor diposisikan sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab besar dalam membantu klien mengatasi permasalahan pribadi, sosial, emosional, maupun pendidikan yang sedang mereka hadapi, melalui pendekatan yang sistematis, terarah, dan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan di bidang konseling.

Menurut (Isra, 2020), berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Buku Standar Kompetensi Konselor Indonesia (2005), dinyatakan bahwa konselor merupakan seorang tenaga profesional di bidang bimbingan dan konseling yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan konseling yang bersifat profesional kepada masyarakat. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut secara sah dan berstandar, seorang konselor diwajibkan memiliki sertifikasi dan lisensi resmi sebagai bentuk legalitas serta pengakuan atas kompetensinya dalam praktik konseling. Tenaga profesional ini tidak muncul begitu saja, melainkan disiapkan secara sistematis melalui jalur pendidikan formal, yakni melalui program studi bimbingan dan konseling pada jenjang Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2), dan Strata 3 (S-3), yang juga mencakup

proses pendidikan profesi sebagai bagian dari pembentukan keahlian dan etika profesi konselor. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Hartono (2013), yang menyatakan bahwa proses pendidikan konselor dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan guna menghasilkan tenaga profesional yang benar-benar kompeten dan mampu menjalankan layanan konseling dengan kualitas tinggi sesuai kebutuhan masyarakat.

Prof. Sofyan S. Willis (2009: 79–85) menjelaskan secara mendalam mengenai berbagai aspek yang membentuk kualifikasi seorang konselor yang ideal. Menurut beliau, kualitas konselor mencakup seluruh kriteria keunggulan yang harus dimiliki oleh seorang individu yang menjalankan profesi di bidang konseling. Kriteria tersebut meliputi berbagai unsur penting seperti kepribadian yang matang dan positif, penguasaan pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang konseling, luasnya wawasan dalam memahami dinamika individu dan sosial, keterampilan teknis dalam melaksanakan layanan konseling, serta nilai-nilai etis dan profesional yang dijunjung tinggi. Semua unsur tersebut bekerja secara terpadu untuk mempermudah konselor dalam menjalankan proses konseling dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan konseling dapat tercapai secara optimal. Di antara seluruh aspek tersebut, Prof. Willis secara khusus menekankan bahwa kualitas pribadi dari seorang konselor merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses konseling, karena kepribadian yang kuat, empatik, stabil, dan bijaksana akan sangat berpengaruh terhadap hubungan konseling yang terjalin antara konselor dan konseli (Isra, 2020).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam dunia pendidikan, konselor adalah tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang bimbingan dan konseling serta bertugas memberikan layanan konseling secara sistematis, terarah, dan berdasarkan prinsip keilmuan kepada individu maupun kelompok. Konselor tidak hanya sekadar pendamping, tetapi juga bertanggung jawab membantu klien menghadapi berbagai permasalahan pribadi, sosial, emosional, dan pendidikan. Untuk dapat menjalankan tugasnya secara sah dan profesional, seorang konselor harus memiliki sertifikasi dan lisensi resmi, serta melalui pendidikan formal di bidang bimbingan dan konseling pada jenjang S-1, S-2, S-3, termasuk pendidikan profesi. Oleh karena itu, konselor dalam konteks pendidikan merupakan sosok yang berperan penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh dan berkualitas.

Ciri-ciri Kepribadian Konselor yang Efektif

Dalam proses pelaksanaan layanan konseling, keberadaan dan peran seorang konselor memegang posisi yang sangat penting dan menentukan terhadap keberhasilan jalannya konseling itu sendiri. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya karakteristik-karakteristik khusus yang idealnya dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan profesi sebagai konselor. Karakteristik tersebut menjadi landasan utama yang menunjang efektivitas peran konselor dalam memahami, membimbing, serta membantu klien mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Tanpa adanya kualitas atau ciri-ciri kepribadian yang sesuai, proses konseling dapat berjalan kurang optimal, sehingga penting

bagi seorang konselor untuk memiliki kualitas pribadi, keterampilan interpersonal, dan sikap profesional yang sesuai dengan tuntutan profesinya (Setiawan, Danu, 2024).

Menurut Carl Rogers (1971) yang dikutip dalam karya Jeanette (2006), terdapat tiga ciri utama yang dianggap sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang konselor agar dapat menjalankan perannya secara efektif. Ketiga karakteristik ini menjadi fondasi dalam membangun hubungan konseling yang produktif dan bermakna antara konselor dan konseli yakni (Setiawan, Danu, 2024):

Congruence (genuineness, authenticity): Makna dari kongruensi dalam konteks konseling merujuk pada kemampuan seorang konselor yang efektif untuk menjadi pribadi yang apa adanya dan selaras antara pikiran, perasaan, dan perilakunya. Konselor yang kongruen mampu mengenali dengan jelas siapa dirinya yang sebenarnya, mampu menyampaikan dengan jujur apa yang ia rasakan dan pikirkan, serta menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan emosi terdalam yang sedang ia alami. Artinya, tidak ada perbedaan antara apa yang dirasakan di dalam hati dan apa yang ditunjukkan kepada orang lain. Konselor yang memiliki karakteristik ini juga dapat menerima perasaan-perasaannya sendiri secara terbuka dan tidak berpura-pura, sehingga orang lain, terutama konseli, dapat memahami posisi dan sikapnya dengan jelas. Hal ini menciptakan hubungan konseling yang tulus dan penuh kepercayaan.

Unconditional positive regard (acceptance): Seorang konselor harus mampu menunjukkan sikap penerimaan tanpa syarat atau penghargaan yang tulus terhadap klien yang dibimbingnya, tanpa memandang latar belakang, kondisi, atau pandangan pribadi konseli tersebut. Artinya, dalam proses

konseling, konselor dituntut untuk benar-benar memahami dan menghargai keberadaan klien sebagai individu yang unik, dengan segala nilai-nilai kehidupan, pandangan, kebutuhan, dan pengalaman yang mungkin sangat berbeda dari milik konselor itu sendiri. Konselor tidak diperkenankan menghakimi atau memaksakan perspektif pribadinya kepada konseli, melainkan harus membuka diri untuk menerima konseli apa adanya, serta membangun hubungan yang dilandasi oleh rasa hormat, empati, dan pengertian yang mendalam. Sikap ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan suasana konseling yang aman, nyaman, dan penuh kepercayaan, sehingga konseli dapat merasa diterima sepenuhnya dan lebih terbuka dalam mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi.

Empathy: Empati merupakan suatu kemampuan penting yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain, seolah-olah ia berada dalam posisi atau situasi yang sama dengan individu tersebut. Secara sederhana, empati dapat dijelaskan sebagai kapasitas untuk menempatkan diri sendiri dalam perspektif orang lain, sehingga mampu memahami perasaan, keinginan, pemikiran, serta tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut secara mendalam dan menyeluruh. Dalam konteks konseling, empati menjadi landasan utama yang mendasari seluruh proses hubungan antara konselor dan konseli. Seorang konselor profesional bekerja dengan menjadikan empati sebagai pendekatan dasar dalam berinteraksi dengan konseli, yang berarti ia tidak hanya mendengarkan secara pasif, tetapi juga ikut merasakan dan memahami keadaan emosional yang sedang dialami oleh konseli. Selama proses konseling berlangsung, baik konselor

maupun konseli secara psikologis saling terhubung dan mengalami keterlibatan emosional yang mendalam, seolah keduanya menyatu dalam suatu kesatuan psikis yang harmonis. Dengan demikian, empati bukan hanya menjadi alat bantu komunikasi, tetapi juga jembatan yang memperkuat hubungan dan kepercayaan antara konselor dan konseli dalam upaya mencapai tujuan konseling yang diharapkan.

Para ahli lain, seperti Eisenberg dan Delancy (1997), juga menyampaikan pandangannya mengenai kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang konselor yang efektif. Dalam penjelasannya, mereka mengidentifikasi sebelas karakteristik utama yang menjadi indikator penting dari efektivitas pribadi seorang konselor yakni (Setiawan, Danu, 2024):

Konselor yang efektif memiliki kemampuan yang tinggi dalam mendorong dan menciptakan suasana yang memungkinkan konseli merasa nyaman untuk terbuka dan membagikan pikiran, perasaan, serta pengalaman pribadinya secara jujur.

Konselor yang efektif mampu menumbuhkan rasa percaya diri, membangun citra diri yang dapat dipercaya (kredibilitas), serta menanamkan keyakinan yang kuat pada individu-individu yang mereka dampingi, sehingga konseli merasa didukung dan yakin terhadap kemampuan diri mereka sendiri dalam menghadapi permasalahan.

Konselor yang efektif memiliki kemampuan untuk memperluas pandangan dan pemahaman mereka terhadap berbagai situasi atau permasalahan, sama halnya seperti mereka terampil dalam mendorong keterbukaan dari pihak yang mereka bantu.

Berkomunikasi dengan penuh kehati-hatian dan menunjukkan sikap hormat serta penghargaan yang tulus

kepada setiap individu yang mereka berusaha bantu dalam proses pendampingan atau konseling.

Mereka memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri dan tidak memanfaatkan individu yang sedang mereka bantu sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan atau keinginan pribadi mereka.

Mereka memiliki keahlian khusus di sejumlah bidang tertentu yang relevan dan bermanfaat bagi individu-individu yang mereka dampingi atau bantu dalam proses konseling.

Konselor yang efektif berupaya untuk memahami perilaku individu yang mereka bantu, tanpa bersikap menghakimi atau memberikan penilaian negatif terhadap tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh konseli.

Memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran secara terstruktur dan mampu berpikir menggunakan pola atau kerangka sistematis.

Memiliki pandangan yang up-to-date serta wawasan yang luas mengenai berbagai kejadian dan fenomena yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia.

Memiliki kemampuan untuk mengenali pola perilaku yang merugikan diri sendiri (*self-defeating*) serta membantu individu lain melakukan perubahan dari perilaku tersebut menuju pola perilaku yang lebih positif dan memberikan kepuasan secara pribadi.

Memiliki keterampilan tinggi dalam membantu orang lain untuk mengenal diri mereka sendiri dengan lebih baik dan mampu merespons pertanyaan “siapakah saya?” tanpa sikap defensif atau penolakan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa, konselor yang efektif adalah seorang

profesional yang memiliki karakteristik pribadi, keterampilan, dan sikap yang mendukung kelancaran proses konseling. Konselor efektif harus menunjukkan kongruensi atau keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku sehingga dapat tampil apa adanya dan jujur dalam hubungan dengan konseli. Selain itu, konselor harus mampu memberikan penerimaan tanpa syarat kepada konseli, menghargai perbedaan nilai dan kebutuhan konseli tanpa menghakimi, serta mengedepankan empati yang mendalam untuk memahami kondisi emosional dan pengalaman konseli secara menyeluruh.

konselor efektif juga ditandai oleh kemampuan menciptakan suasana nyaman yang memudahkan konseli untuk terbuka, membangun rasa percaya diri dan kredibilitas, serta memiliki wawasan luas yang relevan dengan kehidupan manusia. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan hati-hati dan penuh penghormatan, menghargai diri sendiri tanpa menyalahgunakan klien, serta memiliki keahlian khusus yang berguna dalam praktik konseling. Konselor juga harus mampu berpikir sistematis, mengenali pola perilaku yang merugikan diri sendiri, membantu konseli mengubah pola tersebut, dan membantu konseli mengenali diri mereka sendiri dengan cara yang terbuka dan tidak defensif.

Keseluruhan karakteristik ini memastikan bahwa konselor dapat menjalankan perannya secara profesional, efektif, dan berorientasi pada pencapaian hasil konseling yang bermakna dan bermanfaat bagi konseli.

Tantangan dan Pengembangan Kompetensi Konselor

Isu mengenai urgensi peningkatan kualitas dan kompetensi guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang

berperan sebagai konselor di lingkungan sekolah saat ini menjadi semakin penting dan tidak dapat diabaikan. Tuntutan tersebut muncul sebagai respons terhadap dinamika perkembangan zaman dan tantangan global yang terus bergerak maju dan semakin kompleks. Menurut pandangan Dahlan (2019), kondisi global yang mengalami perubahan pesat menuntut adanya kesiapan yang menyeluruh, baik dari segi pemahaman, keterampilan, maupun strategi yang efektif agar para guru BK/konselor dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Kesiapan ini sangat diperlukan karena peran guru BK/konselor tidak hanya bersifat tersirat atau implisit, yakni mendukung pertumbuhan dan perkembangan pribadi siswa secara umum, melainkan juga mencakup peran yang nyata dan eksplisit, yaitu membantu peserta didik dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan, tekanan, dan tantangan yang mereka alami dalam kehidupan akademik, sosial, maupun emosional sehari-hari. Dengan demikian, peningkatan kapasitas profesional guru BK/konselor menjadi hal yang krusial dalam menghadapi tuntutan zaman dan memenuhi kebutuhan siswa secara menyeluruh (Silmy, 2024).

Peran serta kontribusi konselor dalam upaya membentuk karakter bangsa memiliki arti yang sangat penting dan nyata dalam konteks pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahmawati dan Bibi (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh seorang konselor memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah. Efektivitas layanan tersebut tidak hanya berdampak pada perkembangan pribadi peserta didik, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan nilai-nilai karakter yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan kata lain,

semakin tinggi tingkat kompetensi seorang konselor, maka semakin besar pula pengaruh positifnya dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif, pembinaan moral peserta didik, serta pengembangan potensi diri siswa secara optimal. Oleh karena itu, konselor memegang peran strategis dalam menciptakan generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter dan integritas (Silmy, 2024).

Perkembangan dan transformasi teknologi yang terjadi secara pesat di era modern saat ini membawa dampak yang cukup besar dan menjadi tantangan yang signifikan bagi profesi konselor dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, para konselor dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi, terutama dalam hal metode, media, serta pendekatan layanan bimbingan dan konseling. Menurut pendapat Nurkholis (2020), kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memberikan tantangan, tetapi juga menghadirkan peluang baru yang membuka akses yang jauh lebih luas dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Artinya, dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, konselor dapat menjangkau lebih banyak individu, memberikan layanan yang lebih fleksibel dan inovatif, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses konseling dalam berbagai konteks, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat secara umum (Silmy, 2024).

Selain itu, berbagai tantangan yang bersifat sosial maupun mental yang dihadapi oleh masyarakat di era modern saat ini menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dinamika kehidupan yang semakin kompleks, tekanan

sosial yang tinggi, serta berbagai permasalahan psikologis yang muncul sebagai akibat dari perubahan zaman, menuntut adanya penanganan yang tepat dan efektif. Dalam konteks ini, para konselor dituntut untuk tidak hanya memahami persoalan-persoalan tersebut secara mendalam, tetapi juga mampu merancang serta menerapkan solusi-solusi yang inovatif dan kreatif. Solusi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan konteks sosial yang terus berkembang, agar dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam membantu masyarakat mengatasi tekanan mental dan problematika sosial yang mereka alami (Silmy, 2024).

Menurut Nurkholis (2020) dalam (Silmy, 2024), pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara berkelanjutan memainkan peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas profesi konselor. Melalui proses pelatihan yang terstruktur dan pengembangan kapasitas yang dilakukan secara konsisten, para konselor memiliki kesempatan yang luas untuk terus memperbarui serta memperdalam wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka miliki. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan pengembangan menjadi landasan penting bagi konselor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan efektif.

Menurut (Silmy, 2024) dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesional, pelatihan dipandang sebagai salah satu metode yang paling efektif dan strategis. Nurkholis (2020) menegaskan bahwa melalui pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan, para konselor

tidak hanya memperoleh pembaruan pengetahuan mengenai teori-teori dan pendekatan terkini dalam bidang bimbingan dan konseling, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, pelatihan yang terarah memungkinkan konselor untuk mengasah serta memperluas keterampilan-keterampilan baru yang relevan dan dibutuhkan dalam menghadapi tantangan profesi di era modern. Di samping pelatihan formal, keterlibatan langsung dalam pengalaman lapangan juga memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat kompetensi konselor, karena melalui pengalaman nyata, mereka dapat mengembangkan sensitivitas profesional, kemampuan adaptasi, serta kepercayaan diri dalam menangani berbagai situasi yang kompleks dalam proses konseling.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, tantangan yang dihadapi oleh konselor di era modern semakin kompleks dan beragam, baik yang bersumber dari perkembangan global, kemajuan teknologi, maupun dinamika sosial dan mental masyarakat. Tuntutan terhadap kualitas dan kompetensi guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai konselor di sekolah menjadi semakin mendesak seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan siswa yang semakin spesifik. Konselor dituntut tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kepekaan sosial, keterampilan emosional, dan kapasitas profesional yang tinggi agar mampu menjalankan peran secara optimal, baik dalam mendampingi siswa menghadapi masalah pribadi maupun dalam membentuk karakter bangsa melalui layanan konseling.

Transformasi teknologi memberikan peluang sekaligus tantangan, di mana konselor perlu menyesuaikan diri dengan pendekatan layanan yang lebih inovatif dan berbasis digital. Selain itu, semakin meningkatnya permasalahan sosial dan psikologis menuntut konselor untuk menghadirkan solusi kreatif dan responsif yang kontekstual. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, pengembangan kompetensi menjadi suatu keharusan. Pelatihan yang berkelanjutan dan pengalaman lapangan yang mendalam merupakan dua komponen penting yang saling melengkapi dalam meningkatkan kapasitas konselor agar tetap adaptif, profesional, dan efektif dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya strategis dan sistematis dalam meningkatkan kompetensi konselor harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan.

KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)

Peran dan Tanggung Jawab Guru BK

Layanan Konseling memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mendukung keseluruhan proses pendidikan, karena melalui layanan ini peserta didik memperoleh bantuan, bimbingan, serta dukungan yang dibutuhkan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek pribadi, sosial, maupun perencanaan karier mereka di masa depan. Dalam konteks ini, Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam menyelenggarakan layanan tersebut, serta memainkan peran sentral dalam memastikan tercapainya keberhasilan belajar dan terjaminnya kesejahteraan emosional

maupun psikologis peserta didik selama menempuh pendidikan (Rahim et al., 2024).

(Rahim et al., 2024) menyatakan bahwa, peran serta tanggung jawab yang diemban oleh Guru Bimbingan dan Konseling (BK) mencakup berbagai aspek penting, salah satunya adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dengan tujuan utama membantu mereka dalam menggali, mengembangkan, serta mengaktualisasikan seluruh potensi diri yang dimiliki agar dapat mencapai kemampuan maksimal dalam berbagai bidang kehidupannya (Mulyadi, 2016). Dalam menjalankan tugas tersebut, Guru BK tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai inisiator yang memulai proses konseling, menyusun rencana atau strategi layanan yang tepat, dan selanjutnya memimpin jalannya sesi konseling secara terstruktur dan profesional. Lebih lanjut, sebagaimana disampaikan oleh Bu'ulolo dan rekan-rekannya (2022), pelaksanaan program bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah turut memberikan kontribusi besar dalam menciptakan suasana sekolah yang inklusif, ramah, serta mampu memberikan dukungan positif bagi seluruh peserta didik, tanpa terkecuali.

Berikut ini merupakan sejumlah tanggung jawab yang perlu dipenuhi atau dilaksanakan saat menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik (Rahim et al., 2024):

Dalam merancang serta melaksanakan suatu program, sangat dibutuhkan adanya pendekatan yang menyeluruh, terpadu, dan mendalam, yang mempertimbangkan berbagai aspek penting secara komprehensif. Selain itu, pendekatan tersebut juga harus dilakukan secara profesional, artinya dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja

yang tinggi, agar program yang disusun dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya peserta didik.

Agar tanggung jawab tersebut dapat terpenuhi secara optimal, diperlukan adanya kerja sama yang erat, harmonis, dan berkesinambungan antara pihak sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi ini mencakup peran aktif dari berbagai elemen, seperti guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta institusi atau organisasi di luar sekolah yang peduli terhadap pendidikan dan perkembangan peserta didik. Dengan membangun sinergi yang kuat antara lingkungan sekolah dan masyarakat, maka upaya dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan layanan yang dibutuhkan oleh peserta didik dapat terlaksana dengan lebih efektif, terarah, dan berdaya guna dalam jangka panjang.

Seorang Guru Bimbingan dan Konseling (BK), dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dalam pelaksanaan layanan konseling di sekolah, memiliki tanggung jawab yang setara dengan kepala sekolah, khususnya dalam hal pengembangan dan implementasi program bimbingan dan konseling yang terstruktur dan efektif. Tanggung jawab tersebut mencakup penyusunan dan penawaran berbagai strategi yang relevan, perumusan prosedur kerja yang sistematis, serta penetapan hasil yang ingin dicapai. Seluruh komponen tersebut strategi, prosedur, dan hasil yang dirancang harus dapat diselaraskan dan diintegrasikan dengan rancangan program awal yang telah disusun sebelumnya. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terukur, keseluruhan program diharapkan dapat direalisasikan secara optimal dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, peran dan tanggung jawab Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam lingkungan pendidikan sangatlah penting dan bersifat luas. Guru BK tidak hanya bertugas memberikan layanan konseling kepada peserta didik, tetapi juga menjadi inisiator, perencana, sekaligus pemimpin dalam merancang dan melaksanakan program bimbingan yang komprehensif. Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk membantu peserta didik mengenali, mengembangkan, dan mengaktualisasikan potensi diri mereka agar dapat mencapai keberhasilan secara akademik, sosial, emosional, dan karier. Untuk mencapai tujuan tersebut, Guru BK harus mengedepankan pendekatan profesional yang sistematis dan terstruktur, serta menjalin kerja sama erat dengan seluruh elemen sekolah dan masyarakat. Dengan dukungan yang menyeluruh dan kolaboratif, layanan bimbingan dan konseling dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, ramah, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh dalam jangka panjang.

Standar Kompetensi Kepribadian Guru BK

Menurut (Thalita et al., 2023), berikut merupakan standar kompetensi kepribadian guru BK:

Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mencerminkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa tercermin melalui sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam setiap aktivitas pemberian layanan. Hal ini meliputi komitmen Guru BK untuk senantiasa bertindak dan bersikap sesuai dengan norma-norma serta ajaran agama yang dianut, terutama saat menjalankan tugas profesionalnya. Selain itu, Guru BK juga diharapkan mampu menunjukkan rasa hormat

dan penghargaan yang tinggi terhadap peserta didik sebagai individu yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai kehidupan yang beragam. Sebagai wujud nyata dari nilai-nilai spiritual yang dianut, Guru BK secara konsisten memberikan salam baik sebelum memulai maupun setelah menyelesaikan sesi layanan, serta selalu memanjatkan doa sebelum dan sesudah melaksanakan proses bimbingan atau konseling, sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan dan harapan akan keberkahan serta kelancaran dalam memberikan layanan yang bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik.

Menghargai dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kemanusiaan: Karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam hal menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tercermin dalam sikap dan tindakannya yang selalu dilandasi oleh rasa empati, kepedulian, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Dalam menjalankan tugasnya, Guru BK menyadari bahwa setiap peserta didik adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat serta makhluk bermoral yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, Guru BK senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Guru BK juga menunjukkan sikap positif dan penuh pengertian terhadap peserta didik, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, dengan tetap menghargai keberadaan dan potensi yang dimiliki siswa tersebut. Selain itu, Guru BK menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang atau kondisi pribadi masing-masing, serta berusaha memahami secara mendalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Dalam proses konseling, Guru BK memberikan perhatian

penuh dengan mendengarkan secara aktif setiap keluhan dan cerita yang disampaikan oleh siswa. Seluruh aspek tersebut merupakan cerminan dari karakteristik kepribadian yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik, karena memberikan rasa aman, diterima, dan dipahami dalam upaya mereka mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pribadi, sosial, maupun akademik.

Menunjukkan Integritas dan Stabilitas Kepribadian yang Kuat: Karakteristik kepribadian yang mencerminkan integritas dan stabilitas emosional yang kuat merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam menjalankan peran profesionalnya di lingkungan sekolah. Hal ini ditunjukkan melalui kemampuan Guru BK dalam membawa diri secara baik dan terhormat di lingkungan sekolah, yang tercermin dari sikap santun, ramah, dan sopan kepada seluruh warga sekolah tanpa memandang status atau peran mereka. Guru BK juga dikenal memiliki kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi atau pendapat, menyampaikan sesuatu secara apa adanya tanpa menutupi fakta maupun memperkeruh situasi. Dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik, Guru BK menunjukkan kesabaran dan ketenangan, serta mampu mengelola emosinya dengan baik, sehingga tidak mudah terbawa amarah atau reaksi negatif ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Selain itu, Guru BK memiliki integritas tinggi dalam menjaga kepercayaan peserta didik, khususnya dalam hal kerahasiaan informasi yang disampaikan dalam sesi konseling. Kepekaan terhadap situasi dan kondisi emosional maupun psikologis peserta didik juga menjadi bagian penting dari karakteristik kepribadian ini. Guru BK mampu merespons secara empatik dan penuh pengertian

terhadap siswa yang mengalami tekanan, stres, atau masalah pribadi lainnya, serta menunjukkan sikap memaklumi dan tidak menghakimi keadaan mereka. Semua karakteristik tersebut sangat dibutuhkan oleh peserta didik, karena menciptakan rasa aman, nyaman, dan percaya untuk membuka diri, serta memudahkan terjalinnya hubungan konseling yang efektif dan bermakna.

Menampilkan Kinerja yang Berkualitas Tinggi: Karakteristik kepribadian seorang Guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang mencerminkan kinerja berkualitas tinggi ditunjukkan melalui serangkaian sikap, kemampuan, dan kebiasaan profesional yang mendukung efektivitas dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Guru BK yang memiliki kinerja unggul mampu menunjukkan kecerdasan dalam mengidentifikasi dan menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh siswa secara tepat dan mendalam, serta memiliki pendekatan atau metode tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan individu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Guru BK juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugasnya, terlihat dari kesigapan dalam memberikan layanan tanpa menunda-nunda, serta semangat dan antusiasme yang konsisten dalam membantu peserta didik mengatasi berbagai kesulitan yang mereka alami. Selain itu, Guru BK dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab, antara lain dengan selalu menepati janji dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, serta memastikan bahwa setiap masalah yang dihadapi peserta didik ditangani hingga tuntas. Penampilannya yang sederhana mencerminkan sikap rendah hati dan profesional, sementara kepribadiannya yang menyenangkan membuat peserta didik merasa nyaman dan tidak segan untuk berinteraksi. Dalam

berkomunikasi, Guru BK selalu menggunakan bahasa yang santun, sopan, dan mudah dipahami, serta mampu menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis. Seluruh karakteristik ini menunjukkan kualitas kinerja yang tinggi dan sangat dibutuhkan untuk menciptakan hubungan konseling yang efektif, suportif, dan berdampak positif bagi perkembangan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hinda Syah, S., Sakti Cahyaningtyas, O., Astuti, D., & Suwarni. (2024). Analisis Kompetensi Kepribadian Guru. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 96–103. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8281/6094/14239>
- Isra, F. (2020). Keterampilan Konselor Dalam Mengembangkan Manajemen Bimbingan Konseling Di Sekolah. *IJoCE : Indonesian Journal of Counseling and Education*, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.32923/ijoce.v1i2.1966>
- Rahim, A., Rahayu, A., Reva, G., Huiyyatul, N., & Syifa, S. (2024). ANALISIS PERAN GURU BK DALAM SESI KONSELING: BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB DAN DUKUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK. 7(4), 1–23. <https://doi.org/10.22460/fokus.v7i4.23228>
- Setiawan, Danu, G. (2024). KEPRIBADIAN KONSELOR YANG Mendukung Proses Konseling Yang Efektif Dan Berpusat Pada Siswa. 11(1), 105–124.
- Silmy, R. A. (2024). Menguk Tantangan dan Persiapan Konselor dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(2), 210–220. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i2.2406>
- Thalita, F. H. I., Soesilo, T. D., & Irawan, S. (2023). Karakteristik Kepribadian Guru Bimbingan Dan Konseling. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*,

8(01), 132–144.
<https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.4755>

Zola, N., & Mudjiran, M. (2020). Analisis Urgensi Kompetensi Kepribadian Guru. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(2), 90.
<https://doi.org/10.29210/120202701%0Ahttps://jurnal.icitet.org/index.php/jppi%0AAnalisis>



BAB III

SIKAP PERSONAL KEGURUAN

Sikap Profesionalisasi Keguruan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Di dalamnya, guru memainkan peran sentral sebagai ujung tombak yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan penanaman nilai-nilai kehidupan. Sebagai sosok yang memiliki peran strategis, guru dituntut tidak hanya mampu mengajar secara efektif, tetapi juga menjalankan profesinya dengan sikap profesional yang tinggi.

Profesionalisme dalam dunia keguruan mencerminkan kesungguhan dan integritas seorang guru dalam melaksanakannya. Ia tidak sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencakup keteladanan, tanggung jawab moral, serta kemampuan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Guru yang profesional akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, bermakna, dan inspiratif bagi peserta didik.

Dalam kerangka sistem pendidikan yang semakin kompleks, peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) menjadi semakin penting. Guru BK tidak hanya membantu siswa dalam menyelesaikan masalah pribadi atau akademik, tetapi juga membantu mereka dalam mengenali jati diri, mengambil keputusan karir, serta mengembangkan ketahanan mental dan emosional. Tugas yang mulia ini menuntut sikap profesional yang kuat, termasuk dalam menjaga kerahasiaan,

kedamaian empatik, serta mampu menjalin hubungan yang mendukung pertumbuhan peserta didik.

Pendahuluan ini menjadi pijakan untuk membahas secara lebih luas mengenai sikap profesional dalam profesi keguruan, baik dari segi kompetensi, tantangan, maupun relevansinya dalam konteks layanan bimbingan dan konseling. Melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap makna profesionalisme, diharapkan guru—khususnya guru BK—dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan lebih bermakna dan berdampak.

Dalam dunia pendidikan, guru memiliki posisi sentral sebagai penggerak utama dalam proses belajar mengajar. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, kelengkapan fasilitas, atau kurikulum yang berubah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas pribadi dan profesionalisme guru itu sendiri. Oleh karena itu, sikap profesional keguruan menjadi sangat relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam.

Sikap profesional dalam konteks keguruan mencerminkan komitmen, integritas, dan kompetensi seorang guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Guru bukan sekedar penyampai materi pelajaran, melainkan figur yang diteladani dalam hal nilai, perilaku, dan moral. Guru adalah pemimpin, penginspirasi, sekaligus fasilitator yang mampu membentuk pribadi peserta didik yang utuh.

Di era pendidikan modern, guru dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks. Mereka tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menyampaikan komunikasi yang efektif, menyusun perencanaan pembelajaran yang adaptif, serta mengembangkan strategi evaluasi yang objektif dan membangun. Guru juga ditantang

untuk melek teknologi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi generasi digital yang memiliki karakteristik belajar yang berbeda.

Lebih dari itu, penting juga memahami bagaimana sikap profesional ini diterapkan secara khusus oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK). Sebagai konselor di lingkungan sekolah, guru BK memiliki posisi yang unik: mereka harus menjaga kerahasiaan, menyampaikan netral dalam konflik, mendampingi siswa dalam proses pengambilan keputusan, dan mampu memberikan layanan konseling dengan pendekatan yang manusiawi, empatik, serta berbasis kebutuhan siswa.

sikap profesional keguruan, karakteristik guru profesional, kompetensi yang harus dimiliki, serta relevansinya dalam konteks tugas dan peran guru BK. Dengan merujuk pada berbagai literatur, jurnal, serta kebijakan pendidikan nasional, diharapkan materi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus menjadi referensi praktis bagi para calon pendidik, khususnya di bidang bimbingan dan konseling.

Hak Profesi Keguruan

Profesi merupakan suatu bentuk pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pendidikan formal, serta memiliki kode etik dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, keguruan menempati posisi sebagai salah satu profesi yang paling mendasar dan mulia. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, melatih, dan melibatkan peserta didik dalam segala aspek perkembangan: kognitif, afektif, maupun psikomotorik..

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan meminta peserta didik pada jalur pendidikan formal.” Hal ini menegaskan bahwa guru bukan sekedar pekerja pendidikan, namun figur yang mempunyai amanah profesional yang kuat, legal, dan bersifat multidimensional.

Karakteristik Profesi Keguruan

Keguruan sebagai profesi memiliki beberapa ciri, antara lain:

1. Membutuhkan Pendidikan Formal – Seorang guru harus menempuh pendidikan tinggi, minimal strata satu (S1), dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikasi pendidik.
2. Memunyai Kompetensi Khusus – Guru dituntut memiliki empat kompetensi dasar: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
3. Mengabdikan kepada Kepentingan Publik – Tugas guru adalah membentuk generasi masa depan. Oleh karena itu, profesi ini menuntut dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi.
4. Memiliki Kode Etik – Guru terikat pada kode etik profesi yang mengatur hubungan dengan peserta didik, rekan sejawat, institusi, dan masyarakat.

Guru BK dalam Bingkai Profesi Keguruan

Dalam lingkup bimbingan dan konseling, guru BK memiliki peran yang sangat spesifik namun tidak kalah

pentingnya. Mereka berperan sebagai konselor yang membantu peserta didik mengenali potensi diri, mengatasi hambatan pribadi, serta merencanakan masa depan pendidikan dan kariernya. Sikap profesional guru BK harus tercermin dalam kemampuannya menjaga kerahasiaan konseling, tidak memihak, dan mampu membangun hubungan empatik dengan siswa.

Guru BK juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip dasar konseling, termasuk dalam menangani kasus-kasus khusus seperti bullying, kekerasan dalam rumah tangga, krisis identitas, serta gangguan kecemasan atau depresi pada peserta didik. Di sinilah letak hakikat profesi keguruan dalam bidang BK: tidak hanya bekerja pada aspek akademik, tetapi juga dalam aspek sosial-emosional dan pengembangan karakter siswa.

Dengan memahami hakikat profesi keguruan, seorang guru—terutama guru BK—akan menyadari bahwa tugas yang diemban bukan sekadar pekerjaan teknis, tetapi merupakan panggilan moral untuk membentuk pribadi-pribadi unggul yang kelak menjadi penentu arah masa depan bangsa.

Ciri dan Karakteristik Guru Profesional

Menjadi guru profesional bukan hanya soal kelulusan akademik atau sertifikat profesi, melainkan mencerminkan kesatuan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Guru profesional adalah sosok yang menunjukkan kompetensi tinggi, integritas moral, serta etika kerja yang konsisten dalam mendidik dan membimbing peserta didik di berbagai situasi dan tantangan pendidikan.

Karakteristik Umum Guru Profesional

Berdasarkan kajian Munawir dkk. (2023), guru profesional memiliki sejumlah ciri utama yang membedakannya dari guru biasa, antara lain:

1. **Memiliki Komitmen Terhadap Tugas Pendidikan**
Guru profesional selalu berorientasi pada keberhasilan proses belajar peserta didik dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan belajar.
2. **Menunjukkan Tanggung Jawab Sosial dan Etik**
Ia sadar bahwa penerapannya tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk pribadi anak. Oleh karena itu, ia menjaga tutur kata, sikap, dan tindakan, baik di dalam maupun di luar sekolah.
3. **Menguasai Kompetensi Dasar Guru**
Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional menjadi pilar utama dalam mendukung kinerja seorang guru.
4. **Mampu Menjadi Teladan**
Guru profesional digugu lan ditiru, yakni patut dipercaya (digugu) dan layak diteladani (ditiru) dalam kehidupan sehari-hari. Siswa meniru lebih dari sekedar ucapan guru, tetapi juga sikap dan gaya hidup.
5. **Mampu Menyesuaikan Diri dengan Perkembangan Zaman**
Guru profesional tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi, kebijakan pendidikan, dan dinamika sosial masyarakat. Ia selalu belajar dan meningkatkan kompetensinya.

6. Memelihara Hubungan Baik dengan Lingkungan

Guru profesional menjalin hubungan baik dengan peserta didik, kolega, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar.

Ciri Khas Guru BK yang Profesional

Dalam konteks bimbingan dan konseling, guru BK yang profesional menunjukkan ciri-ciri berikut:

Empatik dan Penuh Kepedulian

Guru BK mampu menempatkan dirinya pada peserta didik yang sedang mengalami kesulitan, dan memberikan bimbingan tanpa menghakimi.

Menjaga Kerahasiaan Konseling

Guru BK wajib menjaga privasi siswa, terutama dalam sesi konseling pribadi. Ini adalah bentuk tanggung jawab profesional dan etika.

Netral dan Tidak Memihak

Dalam kasus konflik antar siswa, guru BK harus tetap obyektif, tidak berpihak, dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak.

Kreatif dalam Merancang Layanan

Guru BK yang profesional mampu menyusun program layanan bimbingan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik dan sesuai dengan konteks budaya sekolah.

Berlandaskan Kode Etik dan Nilai Kemanusiaan

Guru BK mengedepankan nilai-nilai dasar seperti kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan diberikan terhadap martabat setiap individu.

Karakteristik guru profesional, termasuk guru BK, bukan hanya atribut yang melekat karena status atau gelar. Ia terbentuk melalui kesadaran, latihan, refleksi, dan pengabdian yang konsisten. Guru profesional adalah mereka yang selalu belajar, selalu peduli, dan selalu ingin berkontribusi secara nyata bagi kehidupan peserta didiknya.

Kompetensi Inti Guru Profesional

Guru yang profesional tidak hanya ditandai dengan kehadirannya di ruang kelas atau interaksinya dengan peserta didik, tetapi juga oleh kompetensi yang melekat pada dirinya dalam menjalankan tugas pendidikannya. Kompetensi ini menjadi fondasi utama yang membentuk integritas dan efektivitas seorang guru dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembelajaran dan pembentuk karakter peserta didik.

Kompetensi inti guru merupakan kumpulan kemampuan yang harus dikuasai oleh setiap pendidik. Dalam konteks kebijakan nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa seorang guru wajib memiliki empat jenis kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan saling menguatkan. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan menyebarkan pembelajaran secara efektif serta memahami karakteristik peserta didik. Guru yang

memiliki kompetensi pedagogik yang baik mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa, sekaligus mampu menyesuaikan metode mengajarnya dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda.

Sementara itu, kompetensi mencerminkan kepribadian kematangan sikap dan stabilitas emosi seorang guru. Seorang guru yang baik adalah pribadi yang sabar, adil, bijaksana, dan mampu menjadi teladan. Ia memiliki integritas moral dan etika kerja yang tinggi, serta mampu menunjukkan keteladanan melalui perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru dengan kepribadian yang kuat akan mampu menghadapi berbagai tekanan di lingkungan kerja dengan cara yang dewasa dan positif.

Kompetensi sosial tekanan kemampuan guru dalam menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan berbagai pihak di lingkungan pendidikan. Guru harus mampu bekerja sama dengan rekan sejawat, memahami dinamika sosial peserta didik, serta membangun kolaborasi yang konstruktif dengan orang tua dan masyarakat. Lingkungan yang harmonis antara guru dan pihak-pihak terkait akan memperkuat proses pendidikan dan mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran.

Sedangkan kompetensi profesional berkaitan langsung dengan penguasaan materi pelajaran dan keilmuan secara mendalam. Guru harus memahami secara luas dan akurat isi dari mata pelajaran yang diajarkan, serta mampu mengembangkan materi tersebut secara kreatif dan aplikatif. Kompetensi ini menjadi krusial karena akan berdampak langsung pada kualitas transfer pengetahuan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik.

Dalam lingkup bimbingan dan konseling, keempat kompetensi tersebut tetap menjadi dasar utama, tetapi ada kekhasan yang perlu disadari. Guru BK dituntut memiliki pemahaman mendalam terhadap psikologi perkembangan, teknik-teknik konseling, serta dinamika pribadi peserta didik. Mereka harus mampu mengelola layanan bimbingan yang bersifat preventif, kuratif, dan pengembangan mandiri. Dalam prosesnya, guru BK dituntut untuk peka terhadap perubahan sikap peserta didik, mampu membangun hubungan konseling yang hangat dan terbuka, serta mengarahkan siswa menuju pengambilan keputusan yang mandiri dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, kompetensi inti guru profesional tidak hanya dimaknai sebagai keterampilan teknis semata, melainkan juga sebagai cerminan dari kualitas pribadi dan profesional yang dibangun melalui pendidikan, pengalaman, dan refleksi berkelanjutan. Seorang guru yang benar-benar profesional tidak pernah berhenti belajar dan terus mengasah kompetensinya demi kemajuan peserta didik dan dunia pendidikan secara keseluruhan.

Sikap Profesional dalam Praktik Keguruan

Sikap profesional dalam dunia keguruan adalah cerminan dari kematangan pribadi, tanggung jawab moral, serta kesadaran etis seorang guru dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik. Ia bukan sekadar sebuah konsep, melainkan menjadi perilaku nyata yang tercermin dalam keseharian guru—baik saat berada di kelas, di lingkungan sekolah, maupun dalam hubungan sosial dengan masyarakat luas. Guru yang profesional bukan hanya diukur dari apa yang ia ketahui, tetapi juga dari seberapa ia berkomitmen.

Dalam praktik sehari-hari, sikap profesional seorang guru tampak dari cara ia merencanakan pembelajaran, hadir tepat waktu, berpakaian sopan, serta berinteraksi dengan peserta didik secara sopan dan menghargai. Ia menjunjung tinggi integritas akademik, tidak memanipulasi nilai, dan selalu berusaha adil dalam memperlakukan siswa tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, gender, maupun tingkat kemampuan siswa. Sikap profesional juga ditunjukkan melalui kesediaannya menerima kritik dan melakukan refleksi atas praktik pembelajaran yang telah dijalankan.

Seorang guru yang profesional tidak menjadikan menjalankan rutinitas administratif, melainkan menjalaninya dengan semangat pengabdian. Ia selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Ia mengembangkan diri secara berkelanjutan, mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan mencari strategi terbaik untuk mengatasi hambatan pembelajaran. Dalam dirinya terkandung keinginan untuk terus menjadi lebih baik demi peserta didik yang lebih maju.

Sikap profesional juga menuntut guru untuk mampu menjaga komunikasi yang sehat dan terbuka dengan orang tua siswa. Guru yang profesional tidak defensif saat menerima keluhan, tetapi melihatnya sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Ia memandang orang tua sebagai mitra dalam mendidik anak dan berusaha membangun kepercayaan dengan mewujudkan komunikasi yang jujur dan solutif.

Dalam ranah guru Bimbingan dan Konseling, sikap profesional memiliki tuntutan tambahan yang sangat khas. Guru BK dituntut untuk mampu menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan siswa dalam sesi konseling. Ia

harus menghindari segala bentuk pembicaraan yang dapat melanggar privasi siswa, termasuk dalam percakapan santai bersama guru lain. Sikap netral dalam menangani kasus, empati terhadap masalah siswa, serta kesabaran dalam membimbing mereka melalui proses yang panjang adalah bagian yang tak terpisahkan dari profesionalisme guru BK.

Selain itu, guru BK juga harus mampu menyeimbangkan antara peran konselor dan pendidik. Ia tidak hanya menjadi tempat curhat, tetapi juga menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengenali potensi, menetapkan tujuan hidup, dan mengambil keputusan secara bijak. Guru BK yang profesional tidak terburu-buru dalam memberikan solusi, tetapi membangun ruang dialog yang mendalam dan mendidik siswa agar mampu berpikir reflektif.

Pada akhirnya, sikap profesional dalam praktik keguruan adalah keselarasan antara hati, pikiran, dan tindakan. Ia menuntut kesadaran diri yang tinggi, kematangan emosi, dan kemauan untuk terus belajar serta mengabdikan. Di tangan guru yang memiliki sikap profesional, pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu, tetapi juga proses membentuk manusia utuh—yang cerdas secara intelektual, tangguh secara emosional, dan luhur dalam moral.

Profesionalisme Guru BK – Keunikan dan Tantangan

Guru Bimbingan dan Konseling atau guru BK memiliki kedudukan yang unik dalam sistem pendidikan di sekolah. Ia tidak terlibat secara langsung dalam pembelajaran mata pelajaran seperti guru pada umumnya, tetapi memegang peranan penting dalam mendampingi peserta didik secara personal, sosial, akademik, hingga karir. Keunikan peran inilah yang menjadikan profesionalisme guru BK memiliki

tuntutan dan tantangan tersendiri, yang sering kali tidak ringan dan memerlukan keahlian khusus yang mendalam.

Dalam menjelaskannya, guru BK berhadapan langsung dengan dinamika psikologis dan emosional siswa. Ia menangani masalah yang berkaitan dengan kecemasan, konflik keluarga, kekerasan, perundungan, kebingungan dalam memilih jurusan, hingga gangguan emosi dan motivasi belajar. Tugas ini menuntut guru BK memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perubahan sikap siswa dan kepekaan terhadap sinyal-sinyal yang tidak selalu disampaikan secara verbal. Guru BK yang profesional tidak boleh terburu-buru dalam menilai, tetapi harus memiliki kesabaran dan ketelitian dalam mengamati serta menyusun pendekatan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Keunikan lainnya terletak pada hubungan yang dibangun guru BK dengan siswa. Relasi ini didasarkan pada kepercayaan dan rasa aman. Tidak seperti guru lain yang fokus pada pencapaian akademik, guru BK berusaha menciptakan ruang aman psikologis, tempat di mana siswa bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut dinilai atau dipermalukan. Oleh karena itu, integritas dan etika menjadi landasan utama dalam profesionalisme guru BK. Ia tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pendamping yang tidak menggurui, sebagai fasilitator yang tidak mendikte, dan sebagai pengarah yang tidak memaksa.

Namun, dibalik peran yang mulia itu, guru BK juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dari pihak sekolah maupun orang tua tentang fungsi bimbingan dan konseling itu sendiri. Tidak sedikit yang masih menganggap guru BK sebagai “penegak disiplin” atau hanya dipanggil ketika ada masalah.

Stigma ini menetapkan esensi dari konseling yang sebenarnya bersifat preventif dan pengembangan, bukan hanya reaktif.

Tantangan lain muncul dari beban kerja yang sering kali tidak proporsional. Guru BK harus melayani ratusan siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda, menyusun program layanan, membuat laporan, melakukan asesmen, hingga menjalin kerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua. Dalam situasi tersebut, guru BK yang tidak memiliki komitmen profesional yang kuat akan mudah merasa lelah dan terjebak dalam rutinitas administrasi semata.

Di era digital, tantangan guru BK semakin bertambah. Mereka harus mampu beradaptasi dengan teknologi, memahami dunia digital siswa, dan menghadapi isu-isu kontemporer seperti Kecanduan media sosial, cyberbullying, krisis identitas, hingga tekanan mental yang semakin kompleks. Profesionalisme guru BK kini tidak lagi cukup dengan kemampuan dasar konseling, tetapi juga harus mencakup literasi digital, pemahaman terhadap budaya remaja modern, serta kemampuan kolaboratif lintas bidang.

Dalam menghadapi semua itu, guru BK yang profesional harus terus memperbarui diri, mengikuti pelatihan, membaca literatur terbaru, dan berjejaring dengan sesama konselor pendidikan. Ia harus memiliki semangat belajar yang tinggi dan tidak pernah berhenti menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan siswa.

Dengan segala keunikan dan tantangan itu, profesionalisme guru BK bukan hanya soal menjalankan peran dengan benar, tetapi juga soal keberanian untuk hadir secara utuh sebagai pendamping kehidupan peserta didik. Dalam diamnya, ia menjadi penyelamat banyak jiwa muda

yang rapuh. Dalam senyumnya, ia menjadi cahaya yang memberi harapan kepada mereka yang sedang mencari arah.

Sikap Profesional Guru BK dalam Layanan Bimbingan

Dalam dunia pendidikan, guru Bimbingan dan Konseling memainkan peran yang sangat vital dalam membantu peserta didik menjalani proses perkembangan secara optimal. Melalui layanan yang bersifat preventif, kuratif, dan pengembangan, guru BK hadir untuk mendampingi siswa mengelola emosi, mengatasi masalah pribadi, memahami potensi diri, dan membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka. Dalam menjalankan semua itu, sikap profesional bukan hanya penting, tetapi menjadi fondasi utama yang tidak bisa ditawar.

Sikap profesional guru BK tercermin dari kesungguhannya dalam menyusun, melaksanakan, dan menyediakan program layanan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ia tidak sekedar menjalankan tugas karena kewajiban, tetapi karena panggilan hati untuk benar-benar membantu siswa bertumbuh dan berkembang. Dalam menyusun program, guru BK melakukan penilaian yang objektif terhadap kondisi psikologis dan peserta sosial didik, lalu merancang kegiatan yang bersifat responsif dan relevan. Ia memperhatikan karakteristik setiap siswa, latar belakang budaya, serta dinamika lingkungan sekolah secara menyeluruh.

Ketika memberikan layanan, baik secara klasikal, kelompok, maupun individu, guru BK harus mampu menunjukkan sikap empatik, sabar, dan rendah hati. Ia menjadi pendengar yang aktif, tidak menghakimi, dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Dalam setiap interaksi, ia

menjaga bahasa tubuh, intonasi, dan pilihan kata agar tetap menunjukkan rasa hormat kepada peserta didik. Ia tidak memaksakan pandangan pribadi, melainkan mendorong siswa untuk mengenali sendiri nilai-nilai yang diyakininya dan bertanggung jawab atas pilihannya.

Sikap profesional juga tampak dalam komitmen guru BK terhadap kerahasiaan informasi. Apapun yang disampaikan oleh peserta didik di ruang konseling harus dijaga dengan serius, kecuali dalam kondisi yang membahayakan keselamatan siswa atau orang lain. Kepercayaan adalah dasar utama dalam hubungan konseling, dan sikap profesional yang mengharuskan guru BK untuk tidak membuka isi konseling kepada pihak lain tanpa izin atau pertimbangan etis yang tepat.

Guru BK juga menuntut profesional dalam mendokumentasikan layanan yang diberikan. Ia mencatat perkembangan siswa, menyusun laporan dengan cermat, dan menjaga data dengan kerahasiaan tinggi. Semua itu bukan hanya bentuk akuntabilitas, tetapi juga bagian dari upaya untuk merencanakan intervensi lanjutan yang lebih tepat sasaran. Profesionalisme dalam hal ini mencakup kemampuan mengelola informasi dengan bijak, serta menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif.

Dalam menghadapi siswa yang mengalami krisis, misalnya depresi, konservasi zat, atau konflik keluarga, guru BK tidak boleh panik atau bertindak semaunya. Ia perlu menjaga keseimbangan antara empati dan ketegasan, dan jika perlu, melakukan kolaborasi dengan psikolog, wali kelas, kepala sekolah, atau lembaga lain yang lebih kompeten. Guru BK yang profesional tahu kapan ia harus bertindak, kapan

harus mendengar, dan kapan harus Merujuk kasus pada pihak lain.

Selain itu, profesionalisme guru BK juga terlihat dari kemauannya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ia tidak merasa cukup dengan ilmu-ilmu yang diperoleh saat kuliah, melainkan aktif mencari pelatihan, membaca jurnal, dan mengikuti perkembangan isu-isu psikologis yang sedang relevan di kalangan remaja. Dunia siswa terus berubah, dan guru BK yang profesional adalah mereka yang bersedia berubah bersamanya—tanpa kehilangan arah, nilai, dan prinsip kerja yang menjunjung tinggi martabat peserta didik.

Melalui sikap profesional yang konsisten, guru BK tidak hanya memberikan layanan yang berkualitas, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan peserta didik. Dalam hubungan itu, siswa merasa dihargai, dipahami, dan dihargai. Itulah kekuatan sejati dari profesionalisme dalam layanan bimbingan: menjadi ruang aman tempat siswa bertumbuh, dan menjadi manusia seutuhnya.

Profesionalisme dan Kode Etik Guru

Profesionalisme dalam dunia pendidikan tidak bisa lepas dari keberadaan kode etik guru. Kode etik adalah kumpulan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi guru dalam menjalankannya, baik sebagai pendidik, rekan kerja, maupun sebagai anggota masyarakat. Ia bukan sekadar aturan tertulis, tetapi cerminan dari nilai-nilai luhur yang harus dipegang teguh oleh setiap guru agar dapat berperilaku bertanggung jawab, berpura-pura, dan berorientasi pada kemaslahatan peserta didik.

Seorang guru yang profesional memahami bahwa yang dijelaskan bukan sekadar mengajar atau menyampaikan materi, tetapi juga menjaga sikap, perkataan, dan keputusan agar tetap berada dalam batasan etika profesi. Ia sadar bahwa perilaku yang ditampilkan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, akan menjadi sorotan dan bahkan panutan bagi peserta didik. Oleh karena itu, ia menjaga dirinya dari tindakan yang tidak pantas, membangun hubungan yang sehat dengan semua pihak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab.

Dalam konteks kode etik, guru dituntut untuk berlaku adil kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang ekonomi, agama, ras, suku, atau kondisi fisik dan psikologis. Ia memberikan layanan pendidikan dengan niat tulus, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan berusaha memahami keunikan setiap siswa. Guru yang menjunjung etika tidak akan melarang muridnya, tidak memaksanya, dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi atau mempermalukan. Ia juga tidak akan menjadikan peserta didik sebagai alat pencapaian ambisi pribadi.

Selain itu, guru yang profesional menghormati hak-hak rekan sejawat. Ia tidak menjatuhkan guru lain, tidak menyebarkan gosip yang merusak nama baik, dan tidak bersaing secara tidak sehat. Sebaliknya, ia mewujudkan kerja sama, berbagi ilmu, dan saling mendukung untuk menciptakan iklim sekolah yang sehat dan produktif. Kode etik mengajarkan bahwa profesionalisme bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga soal komitmen terhadap keharmonisan sosial dan solidaritas antarsesama pendidik.

Guru juga wajib menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Ia berkomunikasi secara

terbuka dan sopan, menyampaikan informasi dengan cara yang bijaksana, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Dalam berinteraksi, ia tidak memihak, tidak menahan diri, dan tidak melibatkan emosi pribadi secara berlebihan. Ia berpikir sebagai mitra yang tulus dalam mendidik anak, bukan sebagai sosok yang merasa paling tahu dan tidak bisa dikritik.

Dalam konteks guru Bimbingan dan Konseling, kode etik menjadi semakin penting dan kompleks. Guru BK harus mampu menjaga kerahasiaan isi konseling, tidak menyebarkan informasi sensitif, dan menjunjung tinggi privasi peserta didik. Ia juga harus menghindari hubungan pribadi yang tidak proporsional dengan siswa, baik secara emosional maupun sosial. Dalam menangani kasus-kasus yang berat, seperti kekerasan seksual, percobaan bunuh diri, atau konflik keluarga yang dalam, guru BK harus bijak mengambil langkah—berpijak pada etika, hukum, dan keselamatan peserta didik sebagai prioritas utama.

Kode etik juga mengatur tentang keanggotaan dalam organisasi profesi, partisipasi dalam kegiatan pengembangan diri, serta tanggung jawab dalam menjaga citra profesi guru secara keseluruhan. Guru yang profesional tidak akan mencoreng profesinya dengan perilaku yang tidak pantas, melainkan berusaha mengangkat martabat guru melalui kerja nyata dan keteladanan.

Dengan menjadikan kode etik sebagai pedoman hidup dalam menjalankan profesinya, seorang guru tidak hanya akan dihormati oleh murid dan masyarakat, tetapi juga akan merasa damai dalam dirinya sendiri. Ia bekerja bukan karena kewajiban semata, tetapi karena kesadaran akan makna luhur dari profesinya. Dalam dunia pendidikan yang kompleks dan

penuh dinamika, etika adalah jangkar yang menjaga guru tetap teguh di tengah perubahan arus. Itulah wajah sejati dari profesionalisme yang abadi.

Profesionalisme di Era Digital dan Tantangan Zaman

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Era digital membawa transformasi besar dalam cara guru mengajar, berinteraksi dengan peserta didik, menyusun materi pembelajaran, hingga dalam hal bagaimana peserta didik belajar dan merespons lingkungan. Dalam konteks ini, sikap profesional guru diuji lebih dari sebelumnya. Guru dituntut bukan hanya mampu mengajar, tetapi juga melek teknologi, adaptif terhadap perubahan, dan inovatif dalam menciptakan pengalaman belajar yang relevan.

Guru profesional di era digital tidak boleh ketinggalan teknologi. Ia tidak bisa lagi mengandalkan sepenuhnya pada metode ceramah konvensional atau bahan terbuka cetak. Sebaliknya, ia dituntut untuk mampu mengakses, memanfaatkan, dan memodifikasi sumber daya digital dalam menyampaikan materi. Platform pembelajaran berani, aplikasi kuis interaktif, media sosial, serta forum diskusi virtual menjadi bagian dari kehidupan kelas yang baru. Guru yang profesional tidak menolak kehadiran teknologi, tetapi menjadikannya sebagai alat untuk memperkaya proses pembelajaran.

Namun demikian, tantangan di era ini tidak berhenti pada masalah teknis. Kehadiran dunia digital juga membawa dampak pada cara berpikir dan perilaku peserta didik. Generasi digital atau generasi Z dikenal dengan karakteristiknya yang cepat bosan, lebih menyukai visual,

kritis terhadap otoritas, dan lebih nyaman dengan komunikasi digital dibandingkan tatap muka. Dalam menghadapi mereka, guru dituntut untuk lebih fleksibel, kreatif, dan memahami pola pikir serta kebutuhan psikososial siswa masa kini. Sikap profesional yang ditunjukkan bukan dengan mempertahankan metode lama secara kaku, tetapi dengan berani berpikir dan memperbarui pendekatan yang digunakan.

Guru BK di era digital menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Masalah-masalah psikologis yang dialami peserta didik kini sering kali bersumber dari ruang-ruang digital. Kecanduan gawai, tekanan dari media sosial, cyberbullying, isolasi sosial, hingga gangguan citra diri karena paparan media menjadi isu yang harus ditangani secara cermat. Guru BK harus memahami konteks digital yang melatarbelakangi kehidupan siswa dan menyusun strategi konseling yang relevan dengan kenyataan tersebut. Profesionalisme guru BK terletak pada kemampuannya menjembatani dunia nyata dan dunia maya dalam memahami persoalan peserta didik.

Di sisi lain, digitalisasi juga menuntut guru untuk mampu menjaga etika profesional di dunia maya. Guru profesional tidak sembarangan membagikan informasi siswa di media sosial, tidak menyalahgunakan platform digital untuk kepentingan pribadi, serta tetap menjaga batasan komunikasi antara guru dan siswa dalam ruang bold. Ia paham bahwa meskipun medium berubah, nilai-nilai dasar profesi tetap harus ditegakkan.

Selain itu, tantangan zaman juga hadir dalam bentuk perubahan kebijakan pendidikan yang dinamis, meningkatnya tekanan administratif, serta ekspektasi yang semakin tinggi dari masyarakat. Guru harus bisa menavigasi berbagai perubahan tersebut dengan sikap yang bijak dan terbuka.

Profesionalisme dalam hal ini berarti tidak mudah mengeluh, tetapi mampu membaca situasi, menyesuaikan diri, dan tetap menjaga kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Di tengah laju percepatan zaman, guru profesional adalah mereka yang tidak kehilangan arah. Mereka tetap berpegang pada nilai-nilai pendidikan yang luhur, sambil membuka diri terhadap inovasi dan perubahan. Mereka tidak hanya menjadi pengajar di kelas, tetapi juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam dunia yang serba digital dan cepat berubah, guru profesional adalah sosok yang tetap berpijak kuat, namun lentur dalam langkah.

Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru bukanlah sesuatu yang hadir secara otomatis begitu seseorang menyelesaikan pendidikan formalnya. Ia adalah sebuah proses yang terus-menerus dibentuk, dirawat, dan ditumbuhkan melalui berbagai usaha yang disadari dan terarah. Dalam dunia pendidikan yang dinamis, peningkatan profesionalisme guru menjadi sebuah kebutuhan yang tak bisa ditunda. Tanpa komitmen untuk berkembang, seorang guru akan mudah tertinggal dan kesulitan menjawab tantangan zaman yang terus bergerak maju.

Peningkatan profesionalisme guru dapat dimulai dari kesadaran diri bahwa menjadi guru bukan sekedar profesi, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan sosial. Kesadaran ini mendorong guru untuk terus belajar, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan administratif, tetapi karena adanya dorongan batin untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Guru yang profesional akan selalu menyalakan

praktiknya sendiri, menerima umpan balik dengan terbuka, dan menjadikan setiap pengalaman sebagai sumber pembelajaran.

Salah satu cara paling strategis untuk meningkatkan profesionalisme adalah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Program pelatihan yang terstruktur, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun komunitas profesi, merupakan sarana penting untuk memperbarui wawasan dan keterampilan guru. Dalam pelatihan tersebut, guru dapat mempelajari pendekatan pembelajaran terbaru, diferensiasi strategi, penggunaan teknologi, penguatan literasi numerasi, hingga teknik konseling modern. Bagi guru BK, semacam pelatihan ini penting untuk memperkaya alat bantu konseling, memperdalam pemahaman psikologi perkembangan, dan mengasah keterampilan dalam menghadapi dinamika psikososial peserta didik.

Selain pelatihan formal, upaya peningkatan profesionalisme juga dapat dilakukan melalui praktik refleksi. Guru yang memikirkan proses mengajarnya, menganalisis keberhasilan maupun kegagalannya, lalu menyusun langkah-langkah perbaikan secara sadar, telah melakukan bentuk pengembangan diri yang sangat bermakna. Refleksi seperti ini bisa dilakukan secara pribadi maupun bersama rekan sejawat dalam forum diskusi, kelompok kerja guru, atau komunitas belajar. Di ruang-ruang tersebut, guru saling berbagi praktik dengan baik, berdiskusi tentang masalah nyata di kelas, serta membangun jejaring yang saling memperkuat.

Partisipasi aktif dalam organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga menjadi wadah penting untuk mendukung peningkatan

profesionalisme. Organisasi ini tidak hanya sebagai tempat berhimpun, tetapi juga sebagai ruang advokasi, kapasitas pengembangan, dan pertukaran pengalaman antarguru dari berbagai daerah. Melalui forum semacam ini, guru dapat memperluas kemampuan berpikir, mendapatkan dukungan emosional dan profesional, serta terlibat dalam gerakan peningkatan kualitas pendidikan secara kolektif.

Upaya peningkatan profesionalisme juga mencakup literasi digital. Guru tidak bisa lagi bersikap pasif terhadap teknologi. Ia harus mampu mengakses sumber belajar digital, memanfaatkan platform pembelajaran yang berani, dan mengintegrasikan teknologi secara bermakna dalam proses pengajaran. Guru BK misalnya, perlu memahami bagaimana menggunakan media digital untuk melakukan asesmen minat dan kepribadian, menyusun modul bimbingan interaktif, atau bahkan melakukan konseling jarak jauh secara etis dan efektif.

Tidak kalah pentingnya, peningkatan profesionalisme juga harus menyentuh aspek spiritual dan karakter. Guru yang berkarakter kuat akan lebih tahan terhadap tekanan, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip etika profesi. Dalam dunia yang penuh gangguan dan tuntutan materi, guru profesional adalah mereka yang tetap setia pada tugas pengabdian: mendidik dengan hati, melayani dengan integritas, dan membimbing dengan kasih.

Upaya meningkatkan profesionalisme bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan panjang yang harus ditempuh sepanjang karier seorang guru. Ia adalah jalan hidup seorang pendidik sejati. Dan selama guru masih mau belajar, berkembang, dan membuka diri terhadap perubahan, maka profesionalismenya akan terus tumbuh, seiring dengan

tumbuhnya harapan dan masa depan peserta didik yang ia dampingi.

Hubungan Profesionalisme dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, pendidikan tidak akan pernah mencapai kualitas yang diharapkan jika para pelaku utamanya, yaitu guru, tidak memiliki profesionalisme yang memadai. Profesionalisme guru adalah inti dari proses pendidikan yang efektif, dan kualitas pendidikan sangat erat bergantung pada sejauh mana guru mampu menjalankan keahlian, tanggung jawab, dan integritas.

Guru yang profesional tidak hanya mampu mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter peserta didik, membimbing mereka dalam memahami realitas kehidupan, dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Ketika guru menunjukkan sikap profesional dalam pembelajaran—misalnya dengan persiapan yang matang, pendekatan yang tepat, dan evaluasi yang adil—maka peserta didik akan merasakan lingkungan belajar yang positif. Suasana inilah yang menjadi kunci terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan bermakna.

Kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas guru di ruang kelas. Sekolah dengan fasilitas lengkap dan kurikulum modern pun akan kehilangan maknanya apabila tidak diisi oleh guru yang memiliki dedikasi dan kompetensi. Sebaliknya, bahkan dalam kondisi yang terbatas, guru yang profesional tetap dapat menciptakan proses pembelajaran yang inspiratif. Hal ini karena profesionalisme guru tidak hanya mencakup penguasaan materi, tetapi juga mencakup

kepekaan terhadap kondisi peserta didik, keterampilan dalam membangun hubungan yang sehat, serta kecakapan dalam mengelola kelas secara humanis.

Guru BK memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kualitas pendidikan secara holistik. Jika guru mata pelajaran fokus pada aspek kognitif, maka guru BK berperan memperkuat aspek afektif dan sosial-emosional peserta didik. Kehadiran guru BK yang profesional memungkinkan siswa mendapatkan pendampingan yang utuh, terutama dalam hal penyesuaian diri, pengambilan keputusan karir, dan pengelolaan stres. Semua itu sangat mempengaruhi kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan berpartisipasi aktif di sekolah.

Hubungan antara profesionalisme dan kualitas pendidikan juga tampak dari dampak jangka panjang terhadap hasil belajar siswa. Guru yang profesional cenderung menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang tangguh, etika yang baik, dan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka tumbuh menjadi individu yang tidak hanya tahu, namun juga mampu menggunakan pengetahuannya secara bijak dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, kurangnya profesionalisme guru dapat menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan. Guru yang tidak disiplin, tidak memahami karakter siswa, atau enggan memperbarui kompetensinya, akan menciptakan suasana belajar yang kaku dan tidak produktif. Peserta didik akan merasa tidak dihargai, kurang termotivasi, dan bahkan bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, meningkatkan profesionalisme guru

berarti juga membangun landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Secara lebih luas, profesionalisme guru juga berdampak pada citra sekolah di mata masyarakat. Sekolah yang diisi oleh guru-guru profesional biasanya memiliki iklim akademik yang sehat, kepemimpinan yang kuat, serta kepercayaan dari orang tua dan masyarakat. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi kolaborasi antara sekolah dan lingkungan, yang pada akhirnya akan memfasilitasi proses pendidikan dan memperkuat jejaring dukungan bagi peserta didik.

Dari berbagai kenyataan tersebut, menjadi jelas bahwa profesionalisme guru bukanlah aspek pelengkap, melainkan faktor penentu utama dalam upaya menciptakan pendidikan yang bermutu. Dengan membangun dan merawat profesionalisme, guru tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga turut memajukan peradaban melalui generasi yang ia bentuk. Itulah kontribusi terbesar seorang guru profesional dalam sejarah pendidikan.

Implikasi Sikap Profesional Terhadap Peserta Didik

Sikap profesional yang dimiliki oleh seorang guru memberikan dampak langsung dan mendalam terhadap peserta didik. Dalam keseharian di ruang kelas maupun di lingkungan sekolah, peserta didik secara sadar maupun tidak sadar mengamati, meniru, dan bereaksi terhadap perilaku gurunya. Guru yang profesional bukan hanya menjadi penyampai ilmu, melainkan menjadi figur yang menghadirkan rasa aman, motivasi, dan inspirasi bagi proses tumbuh-kembang siswa secara menyeluruh.

Ketika guru menunjukkan sikap-sikap profesional, seperti konsistensi dalam bertindak adil, ketepatan waktu,

kesiapan yang matang dalam mengajar, serta komunikasi yang terbuka, maka peserta didik merasakan bahwa mereka dihargai dan diperlakukan secara manusiawi. Hal ini menciptakan iklim belajar yang positif dan kondusif. Dalam suasana seperti itu, siswa merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan, mengungkapkan pendapat, atau bahkan menyampaikan kesulitan yang mereka alami. Kepercayaan inilah yang menjadi dasar bagi proses pembelajaran yang efektif dan bermakna.

Guru yang profesional juga menjadi teladan dalam hal etika dan sikap hidup. Ketika guru menampilkan kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan empati dalam berinteraksi, maka nilai-nilai tersebut secara perlahan ditangkap dan ditanamkan dalam diri peserta didik. Proses ini membentuk karakter siswa tidak melalui ceramah atau perintah, melainkan melalui keteladanan yang nyata. Dalam jangka panjang, karakter pendidikan yang tumbuh dari keteladanan guru akan menjadi bekal moral yang penting bagi siswa dalam kehidupan mereka di masa depan.

Kehadiran guru yang profesional juga membantu peserta didik membangun rasa percaya diri. Guru yang mampu menghargai setiap potensi dan perbedaan dalam diri siswa akan memberikan ruang bagi setiap anak untuk merasa diterima dan diakui. Ini sangat penting terutama bagi peserta didik yang merasa tertinggal, kurang percaya diri, atau memiliki latar belakang keluarga yang penuh tekanan. Sikap guru yang inklusif dan empatik dapat menjadi penyembuh yang secara perlahan mengangkat harga diri siswa, membangun harapan, dan menguatkan semangat belajar mereka.

Dalam konteks guru Bimbingan dan Konseling, penerapan sikap profesional bahkan bisa lebih dalam. Guru BK yang menunjukkan sikap mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaan, dan memberi bimbingan dengan pendekatan yang hangat, dapat menjadi sosok penting yang membentuk kesejahteraan psikologis siswa. Banyak peserta didik yang merasa tidak punya tempat untuk bercerita atau mendengarkan di rumah. Kehadiran guru BK yang profesional menjadi ruang aman yang mereka perlukan untuk menyusun kembali kekuatan diri, menata emosi, dan menyusun arah hidup yang lebih jelas.

Lebih jauh lagi, profesionalisme guru mempengaruhi cara siswa memandang pendidikan secara keseluruhan. Jika mereka tumbuh bersama guru-guru yang peduli, cakap, dan konsisten, maka mereka akan memiliki keyakinan bahwa pendidikan adalah tempat yang berarti, tempat yang memberi mereka masa depan. Sebaliknya, jika mereka mengalami ketidakadilan, perlakuan buruk, atau sikap tidak peduli dari gurunya, mereka bisa merasa bahwa sekolah adalah tempat yang dingin, asing, dan bahkan menakutkan. Pandangan ini sangat menentukan motivasi, keterlibatan, dan keberhasilan belajar siswa.

Implikasi dari sikap profesional guru juga tidak berhenti di ruang kelas. Ia menjalar ke rumah, lingkungan sosial, dan komunitas yang lebih luas. Siswa yang diperlakukan dengan baik dan dididik oleh guru yang profesional, akan membawa nilai-nilai tersebut ke luar sekolah—dalam interaksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Dalam jangka panjang, sikap profesional seorang guru dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Oleh karena itu, sikap profesional bukan hanya penting bagi guru sebagai individu pekerja, tetapi menjadi landasan bagi terbentuknya peserta didik yang utuh. Dalam setiap kata, keputusan, dan tindakan yang dilandasi oleh profesionalisme, guru sedang membangun masa depan peserta didik—dengan cara yang tidak selalu tampak saat ini, tetapi akan nyata di tahun-tahun yang akan datang.

Peran Guru Sebagai Pemimpin dan Inspirator

Guru, dalam hakekatnya, bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang pemimpin dan inspirator dalam dunia pendidikan. Peran ini bukan sesuatu yang diberikan secara formal melalui jabatan atau struktur organisasi, melainkan hadir secara alamiah melalui interaksi, teladan, dan pengaruh yang dibawa seorang guru ke dalam kehidupan peserta didiknya. Seorang guru profesional memahami bahwa dalam dirinya melekat tanggung jawab moral untuk memimpin siswa menuju pengenalan diri, kedewasaan berpikir, dan arah hidup yang bermakna.

Sebagai pemimpin, guru berperan dalam mengarahkan proses belajar tidak hanya agar siswa menguasai materi, tetapi juga agar mereka dapat mengembangkan potensi dan menemukan identitas diri mereka. Guru memimpin dengan memberikan arahan yang jelas, membangun disiplin yang sehat, serta menanamkan nilai-nilai yang menjadi kompas dalam kehidupan siswa. Dalam kepemimpinan yang bijak, guru tidak bersikap otoriter, melainkan menciptakan hubungan yang setara namun tetap tegas dan penuh integritas.

Pemimpin yang baik tidak hanya menyuruh, tetapi memberi contoh. Guru yang datang tepat waktu, menunjukkan kesungguhan dalam mengajar, dan menghargai perbedaan

pendapat, secara tidak langsung sedang membentuk karakter siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Kepemimpinan seperti ini tidak dibangun dari kata-kata, tetapi dari konsistensi sikap dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain sebagai pemimpin, guru juga merupakan inspirator yang mampu membangkitkan harapan dan semangat dalam diri peserta didik. Dalam dunia yang penuh tekanan, kompetisi, dan kecemasan, banyak siswa yang kehilangan arah dan keyakinan pada dirinya sendiri. Di sini guru hadir bukan sekedar memberi informasi, tetapi juga membangkitkan motivasi. Ia membisikkan kepada siswa bahwa mereka berharga, mampu, dan pantas bermimpi besar. Ia menjadi suara yang tenang sekaligus dorongan yang meneguhkan.

Peran inspiratif ini muncul ketika guru mampu melihat lebih dari sekedar nilai akademik. Ia mengenali bakat tersembunyi siswa, menghargai usaha kecil mereka, dan memberikan penguatan atas setiap kemajuan yang dicapai. Guru yang inspiratif juga tidak takut untuk berbagi cerita—tentang perjuangannya, kegagalannya, dan nilai-nilai hidup yang ia pegang. Kisah-kisah itu, meski sederhana, sering kali menjadi pelita yang menyalakan semangat dalam hati siswa yang sedang padam.

Guru BK memiliki peran yang sangat kuat sebagai pemimpin dan inspirator dalam konteks yang lebih personal. Dalam sesi konseling, guru BK membimbing siswa untuk mengenali kekuatan sendiri, mengelola emosinya, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ia tidak memberikan jawaban instan, tetapi mengarahkan siswa untuk menemukan jawabannya sendiri. Kepemimpinan dalam

konseling bersifat kolaboratif, mendorong siswa menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Dalam proses itulah guru BK menjadi inspirasi—bukan karena nasihatnya yang panjang, tetapi karena kehadirannya yang tulus, sabar, dan bisa dipercaya.

Di tengah tantangan pendidikan yang kian kompleks, peran guru sebagai pemimpin dan inspirator menjadi sangat penting. Dunia cepat berubah, namun nilai-nilai seperti keteladanan, ketegasan yang bijak, dan semangat untuk menumbuhkan harapan tetap menjadi kebutuhan yang paling mendasar dalam diri setiap anak. Guru yang memimpin dan menginspirasi tidak hanya mengubah kelas, tetapi juga mengubah arah hidup seorang manusia muda.

Dalam senyum guru yang tulus, dalam kesediaannya mendengarkan, dalam kepercayaan yang ia berikan—tersimpan kekuatan yang mampu mengubah ragu menjadi percaya, cemas menjadi tenang, dan putus asa menjadi semangat baru. Itulah kekuatan seorang guru yang sejatinya bukan hanya mendidik, tetapi juga memimpin dan menginspirasi.

Profesionalisme dalam Perspektif UU Guru dan Dosen

Profesionalisme guru di Indonesia secara resmi diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini tidak hanya menjadi dasar hukum keberadaan profesi guru, tetapi juga menjadi pedoman dalam menetapkan hak, kewajiban, dan standar profesionalisme yang harus dimiliki oleh setiap pendidik di tanah air. Dalam perspektif regulasi ini, guru tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan biasa, melainkan sebagai

profesi terhormat yang menuntut kompetensi, tanggung jawab, serta pengabdian yang tinggi.

Menurut undang-undang tersebut, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mendengarkan peserta didik. Rumusan ini menunjukkan bahwa tugas guru sangat luas dan mencakup seluruh proses perkembangan peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Profesionalisme guru bukan hanya tentang kemampuan menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga kemampuan membentuk pribadi peserta didik secara utuh.

Salah satu poin penting dari undang-undang ini adalah pengakuan terhadap empat kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana seorang guru menjalankan profesinya secara profesional. Dalam implementasinya, guru yang belum memiliki kompetensi tersebut diwajibkan mengikuti pendidikan profesi dan sertifikasi sebagai bentuk pengakuan dan legalitas atas kemampuannya.

Undang-undang ini juga mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban guru. Guru berhak memperoleh penghasilan yang layak, perlindungan hukum, kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, serta jaminan kesejahteraan. Di sisi lain, guru juga mempunyai kewajiban untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas, mengembangkan diri secara berkelanjutan, serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Imbangnya antara hak dan kewajiban mencerminkan bahwa

profesionalisme tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga mencakup sikap tanggung jawab dan dedikasi terhadap tugas.

Dalam konteks guru Bimbingan dan Konseling, undang-undang ini juga mencakup tugas dan tanggung jawab mereka sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Meskipun guru BK tidak mengajar mata pelajaran akademik, mereka tetap diwajibkan memenuhi empat kompetensi dasar yang sama. Guru BK juga wajib mengikuti sertifikasi pendidik dan menjadi anggota organisasi profesi, sebagai bentuk pengakuan bahwa peran mereka dalam membimbing dan mendampingi siswa memiliki nilai-nilai strategis yang tak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional.

Pengaturan dalam undang-undang ini menempatkan profesi guru pada posisi yang sangat penting dan strategis. Ia tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi sebagai profesi yang menuntut latar belakang akademik, pelatihan khusus, serta pengembangan kompetensi yang terus menerus. Hal ini menjadi bukti bahwa negara menginginkan mutu pendidikan yang tinggi dengan menempatkan guru sebagai subjek utama dalam perubahan dan pembangunan pendidikan.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan solidaritas, profesionalisme, dan martabat guru. Melalui organisasi seperti PGRI, guru dapat saling berbagi, belajar bersama, memperjuangkan aspirasi, serta meningkatkan kemampuan diri secara kolektif. Organisasi profesi menjadi pilar penting dalam menjaga standar etika, memberikan perlindungan, dan memperkuat posisi guru dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Guru dan Dosen, setiap guru diharapkan mampu menyadari pentingnya menjalankan tugas secara profesional. Lebih dari sekedar tuntutan administratif, profesionalisme menjadi bagian dari identitas guru moral sebagai pendidik yang terhormat. Undang-undang ini bukan hanya bentuk legalitas, tetapi juga merupakan pengingat bahwa tugas guru menyentuh ranah yang sangat mulia—membentuk manusia, membangun bangsa, dan mengubah masa depan.

Integrasi Nilai Religius dan Etika dalam Sikap Profesional

Dalam konteks pendidikan Indonesia yang kaya akan nilai-nilai moral dan budaya, sikap profesional seorang guru tidak hanya dibangun melalui pelatihan dan regulasi formal, tetapi juga melalui penghayatan nilai-nilai keagamaan dan etika kehidupan. Profesionalisme yang sejati bukan sekedar tentang keterampilan teknis atau kepatuhan terhadap standar administrasi, melainkan juga tentang keikhlasan dalam mengabdikan, kesungguhan dalam mendidik, dan komitmen pada nilai-nilai kebaikan yang lebih tinggi. Pentingnya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan etika dalam membentuk sikap profesional guru.

Nilai religius mengajarkan guru untuk bekerja semata-mata bukan karena kewajiban pekerjaan, tetapi sebagai bentuk ibadah dan pelayanan kepada sesama manusia. Dalam ajaran agama, mendidik adalah amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah guru tiada. Keyakinan ini menjadi sumber kekuatan batin yang mendorong guru untuk tetap sabar, tekun, dan jujur dalam berusaha, meskipun tantangan dan keterbatasan sering kali menghadang. Guru yang memaknai profesinya sebagai bentuk pengabdian kepada

Tuhan akan menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan keikhlasan dalam setiap interaksinya dengan siswa.

Etika, di sisi lain, menjadi kompas moral yang mengarahkan sikap dan tindakan guru dalam kesehariannya. Etika menuntut guru untuk menghargai martabat peserta didik, tidak bertindak diskriminatif, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan menjaga hubungan profesional yang sehat dengan semua pihak. Guru yang beretika akan menjaga ucapannya, berpura-pura sopan dalam berbicara, menghindari komentar yang menyakitkan, dan selalu berusaha menanamkan nilai melalui kebaikan keteladanan. Dalam etika profesi, guru tidak hanya diukur dari apa yang diajarkannya, tetapi juga dari bagaimana ia hidup di tengah murid dan lingkungan sekolahnya.

Integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan etika menjadi sangat penting dalam membentuk sikap profesional, karena keduanya memberikan landasan yang kuat dan mendalam untuk bertindak secara benar, meskipun tidak selalu membatasi. Guru yang memiliki integritas spiritual dan etis akan tetap jujur meski tidak dilihat, tetap adil meski tidak dipuji, dan tetap sabar meski tidak dihargai. Nilai-nilai ini menjadikan profesionalisme bukan hanya aturan luar, tetapi sebagai komitmen hati yang tulus dan mendalam.

Dalam praktiknya, guru yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dan etika akan terlihat dalam cara ia memandang siswa. Ia tidak memandang siswa hanya sebagai objek terbuka, tetapi sebagai manusia yang utuh dan bernilai. Ia tidak menganggap kesalahan siswa sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk membimbing dan memperbaiki. Ia tidak memperlakukan siswa hanya berdasarkan prestasi

akademik, tetapi juga memperhatikan aspek moral, emosi, dan spiritual mereka.

Guru BK, secara khusus, sangat berperan dalam penghayatan nilai-nilai religius dan etika ini. Dalam proses konseling, guru BK berhadapan langsung dengan sisi terdalam dari kehidupan siswa—kesedihan, keraguan, konflik, hingga krisis identitas. Dalam situasi ini, hanya guru yang memiliki hati yang terhubung dengan nilai-nilai kebaikanlah yang mampu mendampingi siswa dengan penuh empati, tanpa menghakimi, dan tetap menjaga kerahasiaannya. Ketulusan dalam mendengarkan, kesabaran dalam membimbing, dan kebijaksanaan dalam bereaksi tidak dapat diperoleh hanya dari pelatihan, tetapi dari hati yang penuh cinta dan penghormatan terhadap nilai-nilai kehidupan.

Integrasi ini juga terlihat dalam cara guru menyikapinya. Ia tidak mengeluh karena kekurangan fasilitas, tidak menyalahkan siswa atas kesulitan belajar, dan tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk tidak berkarya. Justru karena keyakinannya akan makna mendalam dari tugas mendidik, ia menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, dan penuh harapan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai religius dan etika ke dalam sikap profesional, seorang guru tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, tetapi juga yang bermoral. Ia menjadi sosok yang tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga dikagumi karena kemuliaan pribadinya. Inilah wajah guru yang tidak hanya mendidik otak, tetapi juga menyentuh hati dan menuntun jiwa.

Studi Kasus Guru BK dalam Penerapan Sikap Profesional

Untuk memahami secara lebih konkret bagaimana sikap profesional diwujudkan dalam praktik, penting untuk melihat contoh nyata dari kehidupan seorang guru Bimbingan dan Konseling (BK). Studi kasus berikut menggambarkan bagaimana guru BK menerapkan nilai-nilai profesionalisme dalam menangani situasi yang kompleks, serta menunjukkan betapa pentingnya empati, integritas, dan kompetensi dalam mendampingi peserta didik.

Di sebuah sekolah menengah atas, seorang siswa kelas XI mulai menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok. Ia menjadi pendiam, sering datang terlambat, dan beberapa kali tertangkap tidur di kelas. Salah satu guru mata pelajaran melaporkan hal tersebut kepada guru BK, yang kemudian mengundang siswa itu untuk melakukan konseling. Guru BK menyambut siswa dengan sikap terbuka, tenang, dan tanpa tekanan. Ia tidak langsung menginterogasi atau menghakimi, tetapi menciptakan suasana yang aman sehingga siswa merasa nyaman untuk berbicara.

Dalam sesi konseling, siswa akhirnya mengungkapkan bahwa dia sedang menghadapi masalah di rumah. Orang tuanya sedang dalam proses perceraian, dan ia merasa stres, bingung, serta kehilangan semangat belajar. Mendengar cerita tersebut, guru BK tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pendamping yang memahami. Ia menjaga rahasia informasi yang diberikan oleh siswa, tidak menyebarkan cerita itu kepada guru lain, apalagi ke teman-temannya. Sikap menjaga privasi ini merupakan salah satu bentuk profesionalisme yang sangat penting dalam dunia konseling.

Guru BK tersebut tidak berhenti pada sesi konseling satu kali. Ia menyusun rencana pendampingan lanjutan yang melibatkan konseling individu secara rutin. Ia juga melakukan koordinasi terbatas dan bijaksana dengan wali kelas serta pihak sekolah lainnya untuk memberikan dukungan akademik dan sosial kepada siswa tersebut, tanpa membuka terlalu banyak detail pribadi. Guru BK ini juga menyarankan agar orang tua siswa dilibatkan dalam proses pendampingan, dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan persetujuan siswa.

Selama proses tersebut, guru BK menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati. Ia tidak hanya memberikan pendekatan psikologis semata, tetapi juga memberikan ruang spiritual dan emosional bagi siswa untuk menemukan kembali harapannya. Melalui bimbingan yang konsisten, perlahan-lahan lahan siswa mulai pulih, semangat belajarnya meningkat, dan hubungannya dengan lingkungan sekolah membaik.

Studi kasus ini menampilkan bahwa profesionalisme guru BK terletak pada kemampuan membangun hubungan yang bermakna, menjaga kerahasiaan, dan menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan siswa. Guru tidak melampaui batas peran, tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan tidak menjadikan masalah siswa sebagai bahan pembicaraan informal. Semua keputusan diambil dengan pertimbangan etis dan berdasarkan prinsip-prinsip konseling yang tepat.

Studi lain menunjukkan bagaimana seorang guru BK menghadapi kasus kecemasan karir pada siswa kelas XII yang merasa bingung menentukan jurusan kuliah. Alih-alih langsung menyarankan jurusan tertentu, guru BK mengajak siswa untuk mengikuti asesmen minat dan bakat, berdiskusi

tentang nilai-nilai yang diyakini, serta mengeksplorasi berbagai pilihan dengan logistik dan realistis. Dalam proses itu, guru tidak memaksakan penampilan, tetapi menghormati proses berpikir mandiri siswa. Pendekatan ini mencerminkan sikap profesional dalam membantu siswa menemukan arah hidupnya sendiri dengan percaya diri.

Melalui dua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap profesional guru BK bukanlah sesuatu yang abstrak atau formalistik. Ia hidup dalam keputusan-keputusan kecil, dalam tuturan yang penuh pertimbangan, dan dalam kehadiran yang tidak menghakimi. Profesionalisme tidak hanya membentuk citra guru, tetapi menjadi jalan untuk menyentuh kehidupan siswa secara nyata.

Guru BK yang profesional adalah mereka yang hadir di saat paling sunyi siswa membutuhkan teman. Ia bukan hanya tenaga pendidik, tetapi penopang pengharapan. Ia bukan hanya fasilitator, namun pelita yang membimbing siswa menuju masa depan dengan kepala tegak dan hati yang kuat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Profesionalisme keguruan bukanlah sekedar status yang melekat karena gelar atau jabatan, melainkan merupakan perpaduan antara kompetensi, etika, dedikasi, dan tanggung jawab yang terwujud dalam sikap dan tindakan nyata seorang pendidik. Guru profesional adalah mereka yang menjadikan pengajaran bukan sekedar rutinitas, tetapi panggilan hati yang dijalani dengan penuh kesungguhan, kasih sayang, dan integritas. Dalam dunia pendidikan yang terus berubah, sikap profesional menjadi fondasi yang menjaga kualitas pembelajaran tetap hidup dan bermakna.

Selama enam belas halaman sebelumnya telah dibahas secara menyeluruh mengenai bagaimana sikap profesional tercermin dalam karakter, kompetensi inti, interaksi guru dengan peserta didik, dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai moral serta regulasi pendidikan nasional. Guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga pemimpin, teladan, dan inspirator yang membentuk bukan hanya kecerdasan intelektual siswa, melainkan juga nilai hidup dan keberanian untuk menghadapi masa depan. Sikap profesional juga terbukti memiliki dampak yang besar terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Secara khusus, peran guru Bimbingan dan Konseling menuntut profesionalisme yang mendalam dan berlapis. Guru BK berada di garis terdepan dalam menjaga kesehatan psikologis peserta didik, mendampingi mereka dalam mengenali jati diri, dan menyusun masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, profesionalisme guru BK tampak dari kepekaan, keteguhan etika, kemampuan mendengar secara aktif, serta kemampuan menjaga kerahasiaan dan menghargai proses perkembangan individu.

Dalam menghadapi era digital dan kompleksitas kehidupan modern, guru dituntut untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme tidak boleh berhenti. Guru harus aktif mengikuti pelatihan, menjalin komunitas pembelajar, memperkuat etika, serta mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam menjalankannya. Guru yang profesional juga harus mampu memimpin dengan hati, menginspirasi dengan tindakan, dan menciptakan ruang aman bagi peserta didik untuk tumbuh.

Berdasarkan keseluruhan uraiannya, berikut beberapa rekomendasi sebagai penutup:

Pertama, lembaga pendidikan perlu memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan profesional guru melalui pelatihan, supervisi yang membangun, serta penyediaan fasilitas belajar yang mendukung. Profesionalisme tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi memerlukan ruang dan dukungan yang sistematis.

Kedua, para guru—termasuk guru BK—perlu menjadikan refleksi diri sebagai bagian dari budaya kerja. Dengan merefleksikan pengalaman sehari-hari, guru akan mampu menemukan kekuatan, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun strategi peningkatan diri yang otentik dan relevan.

Ketiga, integrasi antara kompetensi teknis, nilai keagamaan, dan etika harus terus dikembangkan. Guru bukan hanya mendidik dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan peradaban. Profesionalisme tanpa nilai-nilai luhur akan menjadi kosong, dan nilai-nilai tanpa profesionalisme tidak akan efektif.

Keempat, peserta didik harus dilibatkan sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan. Guru profesional tidak memosisikan siswa sebagai objek pasif, tetapi sebagai mitra belajar yang memiliki potensi dan suara untuk didengar. Profesionalisme yang sejati melibatkan kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai setiap individu yang dididik.

Sebagai penutup, menjadi guru adalah suatu kehormatan. Menjadi guru yang profesional adalah sebuah komitmen yang terus diperjuangkan. Di tangan guru profesional masa depan bangsa ini diletakkan—bukan sekadar lewat kurikulum atau teknologi, tetapi melalui hati

yang tulus, pikiran yang tajam, dan tindakan yang penuh kasih. Dalam diamnya, guru membentuk generasi. Dalam ketekunannya, guru membangun peradaban. Dan dalam sikap profesionalnya, guru mewariskan cahaya yang tak akan padam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniasih, A., & Sani, B. (2022). Etika profesi keguruan dalam membentuk guru profesional. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Kediri. Diambil dari <https://ojs.iainkediri.ac.id/index.php/edureligia/article/view/1108>
- Rezaldi, PAK (2021). Profesionalisme guru cerminan kualitas pendidikan. Seri Publikasi Pembelajaran: Profesi Keguruan , 1(2), 1–9. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Diambil dari <https://ejurnal.fkip.ulm.ac.id/index.php/spp/article/view/1000>
- Susanto, H. (2020). Profesi keguruan . Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat

BAB IV

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

IMPLIKASI PROFESIONALISASI BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Definisi Layanan Bimbingan dan Konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat diperlukan karena setiap siswa di sekolah dapat dipastikan memiliki masalah, baik masalah pribadi maupun masalah dalam belajarnya, dan setiap masalah yang dihadapi masing-masing siswa sudah pasti berbeda. Dalam pengaplikasian layanan bimbingan dan konseling di sekolah, seorang guru BK/ konselor perlu merancang strategi secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan para peserta didik dengan melakukan pengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam satuan Pendidikan. Menurut Juntika Nurihsan (2019) mengatakan bahwa Bimbingan dan konseling hadir dalam dunia Pendidikan guna untuk memberikan penyuluhan/bantuan/pertolongan yang diberikan untuk mengatasi kesulitan dalam belajar peserta didik. Bimbingan dan Konseling, sebagai upaya pendidikan, diartikan sebagai proses bantuan untuk mencapai tingkat perkembangan peserta didik secara optimal di dalam navigasi hidupnya secara mandiri. Bantuan dalam arti bimbingan yaitu memfasilitasi individu untuk mengembangkan kemampuan individu untuk memperbaiki diri (self-improvement) agar siswa menjadi pribadi yang berfungsi penuh di dalam lingkungannya dan dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, serta mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dasar diberikannya layanan bimbingan dan konseling di sekolah merujuk pada pemberian pendekatan yang dirancang untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pendekatan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, akan tetapi mencakup pendekatan dalam perkembangan sosial, emosional, dan karir setiap peserta didik. Salah satu aspek penting dari strategi layanan BK disekolah diberikannya pendekatan sistematis dan terencana dalam memberikan layanan, pendekatan layanan BK disekolah juga mencakup berbagai metode, strategi, dan Teknik yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa.

Dalam permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada satuan Pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu Konselor/Guru BK. Guru BK/Konselor merupakan seseorang yang berkualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Konselor bimbingan dan konseling. Selain itu, Guru BK/ Konselor adalah seorang guru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan konseling terhadap peserta didik disekolah. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya yang dilakukan untuk mendukung siswa dalam mengembangkan aspek kehidupan mereka baik dalam pribadi, sosial, bimbingan belajar, serta pengembangan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang berdasarkan norma-norma yang berlaku. Layanan bimbingan dan konseling disekolah adalah kegiatan Guru

Bimbingan dan Konseling atau Konselor dalam menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi. Menurut Muzzaiyana (2024) mengatakan bahwa strategi layanan bimbingan dan konseling adalah sebuah rencana terorganisir yang digunakan oleh para professional BK untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan pribadi. Strategi ini melibatkan berbagai pendekatan dan Teknik yang dirancang untuk memahami, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling disekolah.

Tujuan Layanan bimbingan dan Konseling Disekolah

Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik baik individu atau kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, bimbingan belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas norma norma yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan konsep bimbingan dan konseling, secara Umum tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah Untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal, sedangkan secara khusus tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik, dapat: (1) mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin; (2) mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri; (3) mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial-ekonomi, dan kebudayaan; (4) mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi

dan memecahkan masalahnya; (5) mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Menurut Syamsu Yusuf L.N (2019) mengatakan bahwa tujuan layanan bimbingan dan konseling disekolah adalah agar siswa dapat:

- ✓ Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa akan datang
- ✓ Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal
- ✓ Menyesuaikan diri dengan lingkungan Pendidikan, Masyarakat, serta lingkungan kerja, mengatasi Hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Untuk mencapai tujuan layanan tersebut, maka peserta didik harus mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan memahami potensi yang dimiliki, mengenal dan memahami peluang yang ada dilingkungannya, menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta pencapaian tujuan tersebut, memahami dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi, menggunakan kemampuan untuk kepentingan pribadi, Masyarakat maupun lingkungan kerja, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan yang ada serta mengembangkan segala potensi dan kekuatannya yang dimilikinya secara tepat dan teratur secara optimal. Berdasarkan tujuan layanan bimbingan dan konseling diatas maka disimpulkan bahwa tujuan utama dilakukannya layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah memberikan dukungan pencapaian kematangan kepribadian, ketrampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir

individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Prayitno dan Erman Amti (2019) Layanan bimbingan dan konseling khususnya disekolah dan madrasah memiliki beberapa fungsi yaitu: Fungsi Pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, perbaikan (mediasi), advokasi.

Fungsi pencegahan

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya serta dapat mengatasinya.

Fungsi Pemahaman

Pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien (peserta didik) beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh pihak-pihak yang dapat membantunya.

Fungsi Pengentasan

Apabila peserta didik mengalami masalah dan tidak dapat memecahkannya sendiri, maka mereka dapat pergi ke guru BK atau konselor. maka hal yang diharapkan oleh siswa adalah dapat teratasinya masalah yang dihadapinya. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu

kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan melalui pelayanan bimbingan dan konseling, pada hakikatnya merupakan upaya pengentasan.

Fungsi pemeliharaan

Berarti memelihara segala sesuatu yang baik (positif) yang ada pada diri individu (siswa), baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini fungsi Penyaluran. Setiap siswa memiliki kehendak dalam memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Bentuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan fungsi ini yaitu: siswa memiliki kehendak dalam pemilihan sekolah lanjutan, memperoleh jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, penyesuaian program belajar yang tepat, pengembangan kemampuan diri dan perencanaan karir dimasa depan.

Fungsi Penyesuaian

Melalui fungsi ini, layanan bimbingan dan konseling yang diberikan guru bk/ konselor dapat membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya. Dengan kata lain, layanan bimbingan dan konseling dapat membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya terutama lingkungan sekolah. Beberapa layanan yang bisa dilakukan berkenaan dengan fungsi ini yaitu: orientasi terhadap sekolah dan madrasah untuk

memperoleh pemahaman tentang berbagai hal, seperti fasilitas sekolah dan madrasah, kurikulum, cara belajar, ketentuan akademik, aturan-aturan dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan kelompok untuk memperoleh penyesuaian sosial yang baik, pengumpulan data siswa untuk memperoleh pemahaman diri yang lebih baik sehingga siswa mampu menyesuaikan dirinya secara baik pula.

Fungsi Pengembangan

Melalui fungsi ini, layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada para siswa untuk dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan dalam diri mereka sesuai dengan potensinya secara lebih terarah.

Fungsi Perbaikan

Melalui fungsi ini, layanan bimbingan dan konseling disekolah diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Bantuan yang diberikan tergantung kepada masalah yang dihadapi siswa. Program layanan bimbingan dan konseling berdasarkan fungsi ini harus dirumuskan berdasarkan masalah yang terjadi pada siswa sehingga masalah yang dialami saat ini tidak dapat terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Fungsi Advokasi

Layanan bimbingan dan konseling melalui fungsi ini adalah membantu peserta didik dalam memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Sedangkan layanan Bimbingan dan Konseling bagi Konseli pada satuan pendidikan memiliki fungsi: Pemahaman diri dan

lingkungan, Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, Penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan, Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir, Pencegahan timbulnya masalah, Perbaikan dan penyembuhan;, Pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri peserta didik, Pengembangan potensi optimal, Advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif dan Membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang.

Komponen Dalam Bidang Layanan BK di sekolah

Komponen dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah tidak terlepas dari ruang lingkup BK komprehensif dimana didalam BK komprehensif meliputi 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling komprehensif merupakan bimbingan dan konseling perkembangan (karena menggarap semua aspek kehidupan peserta didik) merupakan orientasi baru dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang didasari fungsi perkembangan dan prinsip. Terdapat empat komponen besar dalam layanan bimbingan dan konseling yang meliputi: bidang layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsive, layanan dukungan system.

- ✚ Layanan dasar: layanan bk yang ditunjukkan bagi semua peserta didik bersifat reventive dan developmental. Implementasinya dapat dilaksanakan secara klasikal dalam kelas besar atau diluar kelas secara terbuka dengan alat bantu atau media tertentu, dilakukan secara berkelompok 4 sampai 8 orang peserta didik dengan membahas topik-topik aktual.

- ✚ layanan peminatan dan perencanaan individual: layanan bk yang dapat dilakukan secara klasikal baik melalui bentuk bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan secara pribadi meliputi konseling individual, dan layanan konsultasi. Secara umum, layanan ini dilakukan oleh masing-masing guru bk/konselor dengan melakukan kolaborasi dengan tim kurikulum sekolah, wali kelas, guru mata Pelajaran, bahkan para orangtua peserta didik dengan tujuan untuk mendiskusikan tentang arah dan pilihan minat peserta didik dan anaknya.
- ✚ Layanan responsive. dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memerlukan penanganan mendesak dan segera diselesaikan masalahnya disaat itu juga. Layanan responsif diberikan dengan tujuan menuntaskan masalah yang dialami peserta didik. Layanan ini dapat dilakukan melalui bentuk konseling individual, konseling kelompok dan konseling krisis yang sewaktu-waktu dapat di dukung oleh tindakan reveral ahli, atau mediasi yang berkolaborasi dengan orangtua.
- ✚ Layanan dukungan system merupakan jenis layanan yang terkait dengan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan profesioalisme guru bk atau konselor secara berkelanjutan dalam mendukung proses memberikan bantuan kepada peserta didik.

Jenis dan Bidang perkembangan Layanan Bimbingan dan Konseling Disekolah

“BK Pola 17” merupakan produk mutahir ahli BK dalam menjawab persoalan yang selama ini mengelilingi proses BK terutama di sekolah. Pola ini terdiri dari empat bidang bimbingan dan saat ini telah dikembangkan menjadi enam bidang bimbingan yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, karier, kehidupan berkeluarga dan kehidupan beragama. Selanjutnya keenam bidang bimbingan itu dilaksanakan melalui tujuh jenis layanan (saat ini telah dikembangkan menjadi sepuluh jenis layanan) yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan/penyaluran, layanan pembelajaran/konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan, layanan mediasi, layanan konsultasi dan layanan advokasi .Selain sepuluh jenis layanan itu ada enam jenis kegiatan pendukung yaitu : aplikasi instrumentasi, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, alih tangan dan tampilan kepustakaan. Karena meliputi tujuh belas unsur dan saat ini telah dikembangkan menjadi dua puluh tiga unsur maka pola ini dikenal dengan “BK Pola 17 Plus”

Menurut Dr. Ahmad Susanto, M. P. (2020) mengatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling disekolah terkait bk pola 17+ yang terdiri dari 10 jenis layanan dan 6 bidang perkembangan layanan Bk. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling diantaranya:

Layanan Orientasi

merupakan Layanan BK yang diberikan untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengenal lingkungan baru. Adapun hasil yang diharapkan dari layanan

ini adalah siswa mendapatkan kemudahan dalam penyesuaian diri terutama pada pola kehidupan di lingkungan yang baru dimasuki.

Layanan Informasi

Secara umum, layanan BK yang diberikan kepada peserta didik dalam upaya untuk membantu memperoleh dan memahami informasi diri, sosial, belajar, karir, serta pendidikan lanjutan secara terarah, objektif dan bijak. Ada beberapa alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan yaitu

Membekali siswa dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya,

Memungkinkan siswa dapat menentukan arah hidupnya. Dengan adanya layanan informasi yang diberikan itu dapat membuat siswa diharapkan dapat membuat rencana-rencana dan keputusan tentang masa depannya serta bertanggungjawab atas rencana dan keputusan yang dibuatnya.

kebutuhan yang tinggi tingkatannya, lebih-lebih apabila diingat bahwa masa depan adalah abad informasi, maka ia akan tertinggal dan akan kehilangan masa depan

Layanan penempatan dan penyaluran

adalah layanan BK yang membantu peserta didik memperoleh menempatkan atau penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, minat, di dalam kelas, kelompok belajar, peminatan/ lintas minat/pendalaman minat, program

latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif dan bijak. Layanan ini memberi kemungkinan kepada siswa berada pada posisi dan pilihan yang tepat sesuai dengan potensi bakat dan minat siswa.

Layanan pembelajaran (penguasaan konten)

adalah layanan BK yang diberikan layanan yang memungkinkan peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya dan membantu peserta didik menguasai konten pembelajaran tertentu dengan sikap belajar yang baik, terutama kompetensi dan atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Layanan konseling individual. Layanan BK yang diberikan untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah pribadinya dengan mendapatkan layanan langsung tatap muka guru bk. Layanan bk ini merupakan upaya layanan yang paling utama dalam pengentasan masalah siswa.

Layanan bimbingan kelompok

Layanan bk yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, dan pengambilan keputusan, serta melakukan tertentu kelompok melalui dinamika kelompok. Dalam layanan ini para siswa yang terlibat dalam kegiatan kelompok dapat diajak untuk bersama-sama membicarakan topik penting yang diharapkan berguna bagi pengembangan siswa. pelaksanaan pelayanan bimbingan kelompok ada

empat tahap yaitu Tahap pembentukan, peralihan, kegiatan dan tahap penutup (pengakhiran).

Layanan Konseling kelompok

merupakan layanan yang membantu peserta didik dalam pengentasan masalah yg sedang dialami dan penyelesaiannya melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas dalam layanan konseling kelompok adalah masalah siswa (pribadi siswa) yang terlibat dalam kegiatan itu.

Layanan konsultasi

Adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan antara seorang guru bk/konselor dalam membantu peserta didik dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani masalah peserta didik.

Layanan mediasi

Layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor dalam membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain. Layanan bertujuan agar dapat membantu konseli

Layanan Advokasi

Yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan/atau mendapat perlakuan yang salah sesuai.

Sedangkan bidang perkembangan layanan bimbingan konseling disekolah terdiri dari enam bidang (Dr. Ahmad Susanto, M. P., 2020) yaitu antara lain:

- ❖ Bidang perkembangan pribadi. Bidang layanan yang dilakukan guru bk/konselor Untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan setiap peserta didik dalam menangani masalah dirinya yang mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik kepribadian dan kebutuhan pribadinya secara realistis.
- ❖ Bidang pengembangan sosial merupakan bidang yang berkaitan erat dengan bagaimana individu berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Melalui hubungan sosial yang dihadapi individu, misalnya masalah pergaulan.
- ❖ Bidang perkembangan belajar. Bidang layanan bk yang mencakup pada permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan belajar setiap siswa
- ❖ Bidang pengembangan karir yaitu berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap dunia kerja, pengembangan karir yang sesuai kemampuan minat, bakat,petensi, dan penyesuaian pekerjaan dengan keadaan dirinya.
- ❖ Bidang perkembangan kehidupan berkeluarga Bahwa untuk membantu individu dalam mencari, menetapkan serta mengambil keputusan berkenaan dengan rencana perkawinan atau kehidupan keluarga yang akan dijalannya dimasa depan.
- ❖ Bidang pengembangan kehidupan beragama. Bidang yg membantu siswa dalam memantapkan diri berkaitan dengan perilaku keberagaman menurut agama dan keyakinan yang dijalannya.

Kegiatan Pendukung Layanan BK Disekolah

Pelaksanaan berbagai jenis layanan kegiatan memerlukan sejumlah kegiatan pendukung. Diantara kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling disekolah (Aqib, Z., 2020) ialah:

1. Aplikasi instrument BK: merupakan suatu kegiatan pendukung yang dilakukan oleh guru BK/Konselor saat memberikan suatu layanan BK kepada peserta didik. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data tentang diri setiap peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes.
2. Himpunan Data yaitu: kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik. Kegiatan layanan ini diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, terpadu, dan bersifat rahasia.
3. Konferensi Kasus: merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru BK/ konselor untuk membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak pihak yang kemudahan dapat dan memberikan data, komitmen terentaskannya masalah peserta bagi didik melalui pertemuan, yang bersifat terbatas dan tertutup. Adapun tujuan dilaksanakannya konferensi kasus yaitu: Diperolehnya gambaran yang jelas, mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan siswa, Terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan itu lebih efektif dan efisien dan terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan,

sehingga penanganan masalah itu menjadi lebih mudah dan tuntas.

4. Kunjungan Rumah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru BK/Konselor untuk memperoleh data, kemudahan dan komitmen dalam menyelesaikan masalah peserta didik melalui pertemuan guru maple, wali kelas, bahkan dengan orang tua. Tiga tujuan utama dalam kegiatan ini yaitu: Memperoleh data tambahan tentang permasalahan siswa, khususnya yang bersangkutan paut dengan keadaan rumah/orang tua, Menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya, Membangun komitmen orang tua terhadap permasalahan anaknya.
5. Tampilan Kepustakaan yaitu Kegiatan Pendukung Tampilan Kepustakaan (PTK) merupakan “plus” dari “BK Pola 17”. Tampilan kepustakaan ini dimaksudkan membantu permasalahan klien dengan cara memanfaatkan permasalahan klien dengan cara memanfaatkan Pustaka. Kegiatan layanan yang menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir/ jabatan. Semua yang ada pada pustaka dapat memperkuat dan memantapkan atau menjadi bahan perbandingan serta menambahkan wawasan klien serta mempertajam analisis terhadap permasalahan klien (siswa).
6. Alih Tangan Kasus yaitu kegiatan layanan yang dapat dilakukan oleh guru bk/konselor Ketika tidak dapat menyelesaikan kasus peserta didik, dimana konselor/guru bk dapat memindahkan penanganan

masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud.

Karakteristik Pelaksanaan Layanan BK di sekolah

Karakteristik dari pelaksanaan kolaborasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling disekolah menurut Young (Ramdani et al., 2020) yaitu:

- a. Partisipasi tidak terbatas atau hirarki
- b. Peserta bertanggungjawab dalam memastikan keberhasilan Adanya tujuan yang wajar dan pasti Adanya definisi masalah Orang-orang yang terlibat dalam mendidik atau mengajar satu sama lain; Mengidentifikasi dan menguji opsi yang berbeda Implementasi solusi didistribusikan diantara pemangku kepentingan Peserta selalu mengetahui perkembangan situasi.

Berdasarkan kedelapan karakteristik di atas dapat dilaksanakan oleh guru BK untuk dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dengan upaya mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan pendidikan dan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Masing-masing pihak setara dan beritikad baik untuk membimbing siswa agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Guru BK juga berupaya untuk dapat memastikan pencapaian dari program yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan melakukan berbagai monitoring dan evaluasi.

Program Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Layanan Bimbingan dan Konseling seharusnya dilaksanakan secara terus menerus, mulai dari jenjang pendidikan terendah (taman kanak kanak) sampai jenjang

pendidikan teringgi (perguruan tinggi). secara ideal kegiatan tersebut seharusnya berkesinambungan. Meskipun demi layanan bimbingan tersebut mempunyai penekanan penekanan yang berbeda untuk setiap jenjang Pendidikan. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling disekolah dapat mencapai hasil yang efektif bila mana disusun dimulai dari adanya program dengan baik. Baik Program bimbingan berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian pelayanan bimbingan dan konseling, hal ini dijelaskan bahwa program bimbingan merupakan suatu rangkaian Kegiatan terencana, terorganisasi, dan terorganisasi selama periode waktu tertentu.

Program Tahunan

Merupakan program layanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu tahun ajaran untuk masing-masing kelas disekolah. Program ini mengumpulkan seluruh kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas. Program tahunan dipecah menjadi program semesteran dan program semesteran dipecah menjadi program bulanan.

Program Semesteran

Program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu semester dan merupakan jabaran program tahunan.

Program Bulanan

Yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Program ini mengumpulkan

seluruh kegiatan selama satu bulan untuk kurun bulan yang sama dalam tahun-tahun sebelumnya dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa.

Program Mingguan

yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu minggu merupakan jabaran program bulanan.

Program Harian

yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk Satuan Layanan atau Rencana Program Layanan dan/atau Satuan Kegiatan Pendukung atau Rencana Kegiatan Pendukung pelayanan bimbingan dan konseling. Program ini dibuat secara tertulis pada satuan layanan (Satlan) dan atau kegiatan pendukung (satkung) bimbingan dan konseling.

Berdasarkan pemaparan program diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis program layanan BK di sekolah saling terkait satu sama lainnya yaitu: Program tahunan didalamnya meliputi program semester, program semester didalamnya meliputi program bulanan, program bulanan didalamnya meliputi program mingguan, dan program mingguan didalamnya meliputi program harian. Program harian disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan (RPL)/ satuan layanan (satlan) dan rencana kegiatan pendukung (RKP)/ satuan pendukung (satkung) pelayanan

BK, sebagai bentuk khusus rencana pelaksanaan pelayanan (RPP) dalam bidang BK.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Setelah disusun program layanan bimbingan dan konseling maka guru bk/konselor dapat membuat jadwal Pelaksanaan layanan BK. Dimana pelaksanaan layanan BK ini dapat dilaksanakan di dalam jam pelajaran sekolah dan di luar jam pelajaran sekolah.

Di dalam jam pelajaran sekolah

Pelaksanaan layanan BK disekolah dapat dilakukan dengan membuat kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi serta layanan/kegiatan lain dapat dilakukan di dalam kelas.

Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas perminggu dan dilaksanakan terjadwal.

Kegiatan tidak tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan kepustakaan dan alih tangan kasus. Sedangkan

Diluar jam pelajaran sekolah

Kegiatan layanan bk dapat dilakukan secara tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok dan mediasi serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas.

Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling di luar kelas/diluar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

Kegiatan pelayanan konseling di luar jam pembelajaran sekolah madrasah maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan konseling, diketahui dan dilaporkan kepada pembina sekolah/madrasah.

Problematika dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Layanan bimbingan konseling di sekolah masih banyak ditemukan berbagai masalah pada tataran praktisnya. Guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai konselor di sekolah masih mengalami kendala dan masalah yang beragam dan dari beberapa faktor sehingga tidak banyak sekolah yang mampu menjalankan layanan BK dengan baik. Sehingga problem ini harus segera disikapi secara positif agar rasa percaya diri guru BK bertambah dalam menjalankan tugasnya, karena dalam hal ini layanan bimbingan dan konseling semakin tumbuh dan berkembang dan guru BK perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk kinerja dan layanan yang berkualitas. Berikut akan dikemukakan beberapa problematika yang terjadi dalam layanan bimbingan dan konseling yaitu yang menyangkut ruang lingkup kerja dan peranan bimbingan dan konseling, pendekatan dan teknik penyelenggaraan konseling, pada tugas konselor serta pada hakikat pelayanan bimbingan dan konseling.

Problematika Pada Ruang Lingkup Kerja dan Peranan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja

Bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat incidental

Konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah

Bimbingan dan konseling disamakan saja dengan/atau terpisah sama sekali dari pendidikan.

Problematika Pada Pendekatan dan Teknik Penyelenggaraan Pelayanan

Pelayanan bimbingan dan konseling itu berpusat pada keluhan pertama saja

Pada umumnya usaha memberikan bantuan, masih banyak yang memberikan layanan yang berpusat pada keluhan pertama

Menyamarkan cara pemecahan masalah bagi semua klien

Menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat

Menanamkan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater

Bimbingan dan konseling harus bekerja cepat

Problematika Pada Tugas Konselor

Konselor harus aktif sedangkan pihak lain pasif

Bimbingan dan konseling bekerja sendiri

Bimbingan dan konseling menangani masalah masalah ringan saja dan masalah yang berat dialihkan kepada psikiater.

Problematika Pada Hakikat Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberi nasihat.

Bimbingan dan konseling melayani “orang sakit” dan atau tidak normal.

Selain itu, Permasalahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah dapat dikategorikan atas tiga, yaitu; pertama faktor pemahaman guru, siswa dan masyarakat mengenai bimbingan konseling; kedua faktor profesionalisme guru bimbingan dan konseling; dan ketiga manajemen sekolah dan sarana pendukung.

Pemahaman siswa, guru dan Masyarakat

Guru, siswa dan masyarakat hendaklah memiliki pemahaman yang sama mengenai bimbingan dan konseling. Dengan adanya pemahaman yang sama maka pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor dapat berjalan dengan baik. Namun dalam banyak penelitian ditemukan adanya kesalahan pemahaman terkait dengan peran konselor dan juga layanan bimbingan konseling di sekolah. Siswa disekolah memiliki persepsi negatif terhadap layanan bimbingan dan konseling disekolah. Pratiwi, J. R. E., & Muis, T. (2019) menyatakan persepsi yang salah dari siswa adalah guru Bimbingan konseling disebut polisi sekolah. Siswa beranggapan bahwa mereka dipanggil oleh guru Bimbingan dan konseling jika mereka “bermasalah” atau melanggar aturan sekolah, seperti cabut, sering terlambat, tawuran, berkelahi, merokok, dan lain sebagainya. Persepsi siswa muncul dari pengalaman yang telah mereka alami dari pengetahuan yang mereka peroleh secara pribadi atau juga belajar dari pengalaman orang lain dan lingkungan. Guru BK yang sering terlihat di sekolah melaksanakan tugasnya ketika menghadapi siswa yang melanggar aturan, dengan demikian guru BK akan dianggap oleh siswa sebagai polisi sekolah.

Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Mauliza et al (2019) menemukan bahwa pelayanan BK tidak optimal disebabkan karena siswa tidak datang secara sukarela. Siswa menemui guru BK ketika dipanggil oleh pihak sekolah untuk membahas dan mengkonsultasikan masalahnya dengan guru BK. Siswa juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran jika sudah dipanggil oleh guru BK, apalagi jika orang tua mereka juga ikut serta dipanggil oleh pihak sekolah. Kondisi ini menambah persepsi bahwa guru BK adalah polisi sekolah. Sedangkan persepsi guru mata pelajaran mengenai guru BK juga beragam. Berdasarkan temuan dari Kartika (2019) guru mata pelajaran berpandangan bahwa fungsi guru BK adalah untuk menyelesaikan masalah, memberi nasehat dan menertibkan siswa seperti layaknya polisi sekolah. Persepsi ini menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya guru mata pelajaran memahami peran dan fungsi dari guru BK. Pemahaman yang kurang tentang tugas dan fungsi BK mengakibatkan pelaksanaan kinerja untuk memberikan bimbingan pada siswa mendapat hambatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka Guru BK dan guru mata pelajaran bekerjasama dalam membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, baik masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun masalah di dalam keluarga serta teman sebaya. Serta masih banyak Masyarakat yang belum mengerti fungsi guru bk. Sekarang ini masih banyak ditemukan kendala dalam pemahaman mengenai fungsi dari BK dan kurangnya pemahaman ini akan berlanjut kepada kurangnya pemahaman dari pihak orang tua atau wali. Orang tua yang tidak paham akan fungsi guru BK akan memperoleh pengetahuan dari anaknya, yang juga mengalami masalah mispersepsi tentang peran BK. Hal ini menambah mempersulit guru BK dalam membantu siswa dalam memecahkan masalahnya.

Faktor profesionalisme guru bimbingan dan konseling

Problematika bagi pelaksanaan pelayanan dan bimbingan dan konseling muncul karena masalah profesionalisme guru BK. Putri menemukan bahwa layanan BK tidak dilaksanakan secara terprogram (Putri, Hastuti & Nurhuda, 2020) dan kurangnya kerjasama dengan guru mata pelajaran (Mauliza et al., 2019). Guru BK masih belum optimal dalam melakukan pelayanan disebabkan karena masalah kompetensi dan pengetahuan yang tidak update terutama penggunaan teknologi informasi, latar belakang keilmuan, dan masih kurangnya lulusan BK.

Pelayanan bimbingan dan konseling mengalami kendala di atas dan perlu mendapatkan solusi. Hal yang perlu dilakukan tidak cukup dari pihak sekolah akan tetapi juga pihak universitas, dan dinas pendidikan untuk terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan untuk selalu meningkatkan kompetensi dari para konselor. Masalah lain terkait dengan profesionalisme guru BK yang membuat terkendala pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu guru BK tidak berasal dari latar belakang ilmu bimbingan dan konseling. Menurut Nugroho et al (2021) mengatakan bahwa kondisi ini terjadi di beberapa sekolah di Indonesia, karena masih kurangnya jumlah lulusan sarjana bimbingan dan konseling yang tidak mencukupi untuk jumlah sekolah yang ada di Indonesia baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Masalah latar belakang keilmuan guru BK perlu mendapat perhatian besar dari banyak pihak, karena sekolah fungsi BK sangat penting dalam pendidikan, jika hal ini tidak dipedulikan maka akan berefek terhadap proses dan hasil dari pendidikan tersebut. Hal ini juga menunjukkan (1) masih

kurangnya guru BK, maka perlu adanya pendidikan guru BK disebar luaskan di berbagai universitas (2) Kurangnya pemahaman dan kepedulian pihak sekolah akan arti penting fungsi dari guru BK dalam dunia pendidikan.

Manajemen Sekolah dan Sarana pendukung

Dua hal yang diungkap yang dapat diungkapkan terkait problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu: pertama, tidak adanya alokasi waktu khusus bagi guru BK dalam melakukan pelayanan dan konseling dan kedua, kurangnya sarana yang memadai bagi guru BK untuk pelaksanaan pelayanan konseling. Problematika guru BK tidak memperoleh jam masuk kelas di setiap minggu dikemukakan oleh Pratiwi & Muis (2019). Guru BK tidak memperoleh jam untuk masuk kelas dalam memberikan bimbingan, sehingga pelayanan dan bimbingan konseling tidak dapat dilakukan secara maksimal. Bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh guru di luar jam pelajaran dan siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Guru BK membuat program-program yang dapat melibatkan siswa secara berkelompok untuk memberikan bimbingan.

Selain itu problem lainnya dalam layanan bimbingan konseling yaitu masalah sarana atau tidak adanya ruang khusus BK yang dapat digunakan oleh siswa dalam berkonsultasi dengan perasaan aman dan tidak khawatir kerahasiaan informasi terjaga. Konselor membutuhkan ruang khusus untuk menjadi ruang konsultasi dengan konsuli. Ruang khusus ini dapat terpenuhi jika kepala sekolah sebagai manajer sekolah memiliki pemahaman yang luas mengenai bimbingan dan konseling. Kepala sekolah dapat menyediakan anggaran supaya ruang khusus ini dapat terpenuhi. Manajemen pelayanan bimbingan konseling memiliki prinsip

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Salah satu strategi solusi untuk pelaksanaan program pelayanan konseling dengan baik yaitu dengan melakukan kolaborasi diantara banyak elemen, baik yang ada di dalam internal sekolah seperti guru mata pelajaran, guru BK, kepala sekolah dan pihak di luar sekolah seperti orang tua siswa atau wali dan stakeholder yang dapat mendukung terlaksananya program layanan bimbingan konseling.

Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling Disekolah

Strategi layanan ini diberikan dengan tujuan kemandirian peserta didik dan perkembangan optimal peserta didik. Dalam aktivitas penyusunan layanan ini konselor sekolah memegang beberapa prinsip layanan yang diselenggarakan. Layanan konseling yang dilakukan akan efektif ketika konselor mampu melakukan kolaborasi dengan sekolah, orangtua, pendidik, dan pihak lain dalam membangun iklim belajar yang akomodatif guna mencapai tujuan bimbingan dan konseling (Saputra et al., 2019). Dilingkungan sekolah strategi guru bimbingan konseling sangatlah besar pengaruhnya dalam proses pendidikan. Strategi guru bimbingan konseling disekolah sebagai berikut:

- Berusaha menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi siswa.
- Memahami siswa secara menyeluruh baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya.
- Pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang sebaik-baiknya.
- Membina hubungan antara sekolah, dengan orang tua siswa dan masyarakat.

Manfaat yang dapat diperoleh dari strategi layanan bimbingan dan konseling disekolah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan emosional siswa, meningkatkan sosial siswa, meningkatkan prestasi siswa, membantu pemilihan karir yang tepat, meningkatkan keterlibatan orangtua, meningkatkan pengembangan diri dan kemandirian, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan strategi layanan bimbingan dan konseling pada umumnya mengikuti empat langkah pokok, identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, dan penilaian kegiatan. Keempat rangkaian diatas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan (Wahyuni, 2020).

Strategi layanan bimbingan dan konseling dapat tercapai sesuai dengan tujuan apabila disusun secara sistematis dan dengan konsep yang jelas. Menurut Muhammad Ega M menyatakan bahwa: strategi layanan bimbingan dan konseling disekolah adalah taktik yang direncanakan untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling agar layanan bimbingan dan konseling disekolah dapat mencapai tujuannya, yaitu konseli atau peserta didik dapat mengenal, memahami dirinya, dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya yang pada akhirnya dapat mengaktualisasikan dirinya secara utuh (Setiyowati et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Z. (2020). *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Yrama Widya.
- Dr. Ahmad Susanto, M. P. (2020). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Konsep, Teori, dan Aplikasinya* (Y.Rendy (ed.); pertama). PRENADAMEDIA GROUP. J- Inovatif.
- Juntika Nurihsan, A. (2019). Strategi Layanan Bimbingan & Konseling. 224(11), 122–130.
- Kartika, I. D. (2019). Miskonsepsi Masyarakat Sekolah tentang Guru BK di SMP Swasta Tamoro 2 Tanjung Morawa. Medan: Universitas Islam Negeri Medan.
- Mauliza, R. & Martunis, M. (2019). Profil Guru BK Tersertifikasi dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 3(2), 50–57.
- Mutia, S. (2021). Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Ar-Rainy*, 1(1), 1–13.
- Muzzaiyana, dkk izzah. (2024). konsep dasar strategi bimbingan dan konseling di sekolah.
- Nugroho, D. A., Khasanah, D. N., Pangestuti, I. A. I., & Kholili, M. I. (2021). Problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA: A systematic literature review (SLR). *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(1), 87–96. <https://doi.org/10.26539/teraputik.51647>
- Nurul Islami Hayati. (2020). strategi guru BK dalam pelaksanaan layanan program bimbingan dan konseling

di madrasah Tsanawiyah Al-Jam'iyatul Washliyah Tembung. UNIVERSITAS ISLAN NEGERI SUMATERA UTARA.

- Pratiwi, J. R. E., & Muis, T. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di SMAN 1 Menganti, SMAN 1 Driyorejo, dan SMA Al Azhar Kabupaten Gresik. *Jurnal BK UNESA*, 3(1), 427-436.
- Prayitno, P., & Amti, E. (2019). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putri, R., Hastuti, T., & Nurhuda. (2018). Analisis Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (Studi Kasus pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS SMAN 1 Peranap Kabupaten Indragini Hulu). *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(131-37).
- Ramdani, R., Nasution, A. P., Ramanda, P., Sagita, D. D., & Yanizon, A. (2020). Strategi Kolaboratif Dalam Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 3(1), 1-7.
- Ramlah. (2019). Pentingnya layanan bimbingan konseling bagi peserta didik. *Jurnal Al-Mau'izhah*, 1(September), 71-72.
- Rimadiyah, Arisa, A., Ari Lestari, N. C., & Ngalimun, N. (2022). implementasi aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop* 2, 2.
- Saputra, bagus rachmad, Hasbi, M., Alhaikal, N., & Harir, riza ilmana. (2019). strategi layanan bimbingan dan konseling dalam menguatkan kesadaran disabilitas di sekolah inklusi. *Bikotetik*, 3, 40-45.

- Setiyowati, A., Irene, S., Astuti, & Ningrum, D. (2020). strategi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar untuk mengatasi perilaku bullying. 7, 191–192.
- Syamsu Yusuf L.N (2019). Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah,Bandung:Rizqi Press.
- Wahyuni, M. (2020). Strategi guru BK dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII YP AL-MAKSUM CINTA RAKYAT Percut Sei Tuan Deli Serdang. Al-Mursyid, 2, 164 165.
- Yane, W. T. (2019). Manajemen Layanan Bimbingan Dan Konseling Di SMA. Jurnal Administrasi Pendidikan, 25(1).
- Yuliana Nlisma, Dini Ardiyani, Aina Sabela, M. D. (2024). Dasar Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. INOVATIVE : Journal Of Soial Science Research, 4, 6319–6330.



COUNSELING

BAB V

TANTANGAN DAN PELUANG

KONSELOR ABAD-21

LATAR BELAKANG

Abad XXI merupakan suatu abad dimana globalisasi disampaikan, dengan demikian kebanyakan orang selalu mengatakan sebagai era globalisasi. Abad XXI atau era globalisasi ditandai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin canggihnya sistem komunikasi dan arus informasi, persaingan yang semakin ketat dalam standar pemenuhan pasar internasional, tidak hanya berupa produk, tetapi juga gagasan dan pikiran, tuntutan kerja yang semakin profesional.

Abad 21 juga ditandai dengan perubahan yang sangat besar dalam sistem perubahan manusia. Perubahan yang ada pada abad 21 terkait perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perubahan ini membawa dampak kedalam cara berfikir manusia dan berfikir. Konselor adalah profesi yang cukup berperan penting dalam dunia pendidikan atau bagi manusia. Dalam abad 21 tentunya berpengaruh terhadap profesi seorang konselor. Pada abad 21 teknologi semakin berperan penting dalam kehidupan manusia, ketika hal itu terjadi tentunya manusia juga menghadapi dampak psikologis dan emosional bagi individu dan masyarakat.

Dalam konteks permasalahan ini, profesi konselor menghadapi tantangan dan juga peluang yang signifikan sebagai fasilitator perkembangan pribadi, sosial, akademik dan karier. Pada abad 21 konselor akan menghadapi masalah terkait kesehatan mental, krisis identitas, tekanan akademik

karier dan juga masalah internal dan eksternal lainnya. Serta masalah yang paling sering muncul pada abad 21 yang nantinya dihapai oleh seorang konselor yaitu masalan terkait kecanduan teknologi.

Seorang konselor tentunya dituntut untuk selalu update dan mempelajari hal baru yang ada termasuk teknologi. Teknologi yang semakin canggih tentunya bisa mendukung dan membantu dalam proses konseling. Salah satunya yaitu dalam proses konseling bisa melakukan konseling secara daring. Selain itu juga, era digital membuka peluang besar bagi seorang konselor untuk memperluas jangkauan layanan dan juga lebih memudahkan dalam melakukan konseling.

Teknologi yang semakin canggih dan maju pada abad 21 juga tentunya bisa membantu menyuarakan terkait beberapa isu kepada masyarakat luas. Masyarakat saat pastinya menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari harinya. Sehingga demikian konselor bisa menyuarakan banyak hal yang bisa berdampak positif bagu manusia. Salah satunya menyuaraman kesehatan mental. Dalam abad 21 ini seorang konselor pastinya akan menghadapi tantangan dan juga pastinya memiliki peluang yang akan kira bahas bersama sama.

PEMBAHASAN

TANTANGAN DAN PELUANG KONSELOR ABAD-21

Deskripsi Singkat terkait Abad-21

Daniel Bell, Manuel Castells menyatakan bahwa abad ke-21 adalah peralihan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, yang berarti perubahan besar dalam cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Ini merupakan transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi karena perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam masyarakat ini, sektor jasa dan teknologi informasi berkembang pesat, sementara peran sektor industri menurun. Teknologi digital dan internet menjadi tulang punggung ekonomi dan komunikasi. Munculnya ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Perubahan pola kerja dan pendidikan menjadi lebih fleksibel dan terhubung secara global.

Abad XXI dikaitkan sebagai era globalisasi, Abad XXI atau era globalisasi yang telah kita masuki ditandai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anthony Giddens mengatakan bahwa Globalisasi adalah proses meningkatnya keterkaitan antar negara dalam berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Teori dari Anthony ini menyoroti beberapa hal diantaranya: Perdagangan internasional yang semakin bebas, Pertukaran budaya yang menciptakan hibridisasi identitas yang berarti identitas budaya kelompok yang tercampur pengaruh budaya lainnya secara lokal maupun global.

Revolusi Industri 4.0 merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh pemerintah Jerman untuk menamai suatu proyek teknologi canggih yang mengutamakan komputersasi pabrik. Sementara istilah *desruptive*, merupakan roh utama

dari revolusi industri 4.0. Era ini disebut juga era disrupsi, suatu era yang ditandai VOCA= volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Yaitu suatu perubahan yang cepat dan tidak stabil, sulit diprediksi secara tepat, kompleks dan ambigu. Satria, (2020). Sehubungan dengan munculnya revolusi industri 4.0, maka terjadi perubahan arah kehidupan. Menurut Satria (2020), ada lima (5) arah kehidupan pada era revolusi industry yaitu: perubahan teknologi yang berpengaruh pada perubahan pola pikir, perubahan pekerjaan dan profesi, perubahan peta kompetisi, perubahan perilaku dan pola hidup, perubahan skill baru.

Tantangan Abad-21

Banyak kekuatan yang mempengaruhi perubahan pada abad 21 ini menjadi tantangan bagi masyarakat saat ini. J.T Lobby loekmono (1997) mengungkapkan bahwa panelis para "Menteri Pendidikan SEAMEO" merangkum adanya 21 kekuatan yang mempengaruhi Asia sampai tahun 2035, dalam (Wicaksono, 2020) yaitu

- ❖ Pengembangan Indsitrusi
- ❖ Internasionalisasi
- ❖ Pembangunan EkonomiEkspansi Ekonomi PasarPencarian Stabilitas Politik dan HAM
- ❖ Kerusakan Lingkungan
- ❖ Pertumbuhan Penduduk
- ❖ Peningkatan Nasionalisme, perlindungan budaya dan pengembangan bahasa
- ❖ Jaringan Politik dan ekonomi antar kawasan
- ❖ Pentingnya pertumbuhan dalam beragama

- ❖ Bertambahnya peran serta partisipasi wanita
- ❖ Kemiskinan dan pengangguran
- ❖ Penekanan kembali nilai-nilai tradisional keluarga
- ❖ Mobilitas pekerjaan semakin tinggi

Semakin meningkatnya peranan dan pelayanan industri dan pendidikan kejuruan atau vokalis dan transportasi.

Sedangkan secara spesifik kondisi Indonesia sebagai masyarakat dunia yang berada dalam lingkaran globalisasi yang sedang dialami yaitu:

- ✓ Pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi serta industri yang saat ini sedang marak terjadi
- ✓ Ilmu pengetahuan terkhususnya kepada generasi emas yang harus dipersiapkan pendidikannya.
- ✓ Kerusakan alam yang semakin banyak terjadi dan juga sumber daya alam yang semakin rusak
- ✓ Semakin meningkatnya pencarian stabilitas politik
- ✓ Meningkatkan nasionalisme, budaya serta bahasa.
- ✓ Pertumbuhan penduduk yang semakin besar tetapi kondisi ekonomi yang semakin menurun

Telekomunikasi dan transportasi

Tantangan yang muncul di era RI 4.0 menurut Yahya (2018) dalam (Nursalim, 2020) yaitu

Keengganan untuk berubah

Masyarakat yang banyak memilih untuk tidak upgrade skill dan tetap pada kehidupan sebelumnya dan biasa saja. Banyak Masyarakat yang menolak dengan adanya perubahan

Kurangnya ketrampilan masyarakat yang memadai

Masyarakat yang tidak ingin berubah, karena keterbatasan ketrampilan Masyarakat

Hilangnya banyak pekerjaan

Dalam hal ini banyak masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan karena semua pekerjaan yang ada dikerjakan oleh mesin. Dengan demikian Masyarakat saat ini sulit mendapatkan pekerjaan.

Kendala dan stabilitas mesin produksi,

Mesin yang semakin sering digunakan juga pasti memiliki kendala dan stabilitas mesin produksi yang memiliki keterbatasan

Masalah keamanan teknologi informasi

Teknologi yang semakin canggih juga pasti memiliki keterbatasan sehingga seringkali data yang bocor dan juga Tingkat keamanan yang kurang.

KONSELOR ABAD 21

(Layanan et al., 2025) Dalam implementasi teknologi dalam layanan konseling, karakter konselor tetap menjadi penentu utama keberhasilan karena berkaitan dengan sikap etis, empati digital, dan kemampuan memahami kebutuhan klien secara holistik Demikian, kualitas karakter konselor secara langsung berdampak pada mutu layanan pendidikan secara menyeluruh, menjadikannya fokus utama dalam

kebijakan pelatihan dan pengembangan profesi konselor di era modern.

Karakter Konselor sebagai Fondasi Layanan yang Berkualitas

Seorang konselor bukan hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga harus memiliki karakter yang kuat, seperti empati, integritas, tanggung jawab, dan keteladanan. Karakter inilah yang menjadi pondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan efektif dengan konseli. Tanpa karakter yang baik, keterampilan teknis sekalipun tidak akan menghasilkan layanan konseling yang bermakna dan berdampak jangka panjang.

Dampak Langsung terhadap Mutu Pendidikan Secara Menyeluruh

Karakter konselor yang baik akan:

- menciptakan lingkungan sekolah yang aman secara psikologis,
- meningkatkan kepercayaan konseli terhadap layanan konseling.
- Mendorong peserta didik berkembang secara emosional, sosial, dan akademik.
- Menjadi teladan dalam pembentukan karakter siswa, karena konselor juga berperan dalam pendidikan nilai dan moral.
- Dengan demikian, kualitas karakter konselor akan berdampak pada mutu layanan pendidikan secara keseluruhan, bukan hanya dalam ruang konseling

Menjadi Fokus dalam Pengembangan Profesi Konselor Era Modern

Di era modern yang serba cepat dan kompleks, kebijakan pelatihan dan pengembangan profesi konselor harus berfokus tidak hanya pada aspek teknis dan pedagogis, tetapi juga pada penguatan karakter profesional. Kebijakan pengembangan profesi konselor perlu mencakup:

Pelatihan etika profesi dan integritas.

- Pengembangan empati, kepemimpinan, dan kesadaran diri.
- Peningkatan sensitivitas sosial dan multikultural.

(Bastomi et al., 2023) mengatakan bahwa Konselor masa depan merupakan konselor yang harus mempunyai karakteristik antara lain:

Konselor masa depan adalah konselor yang harus meningkatkan literasi global dimana konselor dituntut untuk bisa menemukan sebuah cara dimana bisa bekerja secara efektif dalam hal memberikana layanan konseling menggunakan teknologi.

Konselor masa depan adalah konselor yang dalam menjalankan profesi konseling dengan kreatif, inovatif, produktif dan menyenangkan.

Konselor masa depan tidak bisa lepas dari peran teknologi dalam praktik konseling daring, seorang konselor dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang relevan dengan layanan konseling digital saat ini.

Konselor di masa depan merupakan individu yang membentuk identitas profesionalnya melalui pendidikan khusus di bidang konseling, serta telah menguasai

pengetahuan teoretis dan keterampilan praktis dalam pelaksanaan layanan konseling. Konselor masa depan yang profesional juga tentunya telah mengikuti banyak pelatihan.

Konselor abad 21 dalam menjalankan profesi konseling harus didasarkan bukti sebagai akuntabilitas suatu profesi. Artinya, setiap layanan atau intervensi yang diberikan oleh konselor harus didasarkan pada hasil penelitian atau pendekatan yang telah terbukti efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses konseling benar-benar memberikan manfaat bagi klien, serta menunjukkan bahwa konselor bekerja secara profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik maupun institusi terkait.

Konselor abad 21 adalah sebagai Pemimpin Kolaborasi.

konselor tidak lagi bekerja secara individual, melainkan berperan aktif dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak seperti guru, orang tua, tenaga kesehatan, serta komunitas. Sebagai pemimpin kolaborasi, konselor mampu mengoordinasikan berbagai sumber daya untuk mendukung perkembangan peserta didik atau klien secara holistik. Konselor masa depan adalah Konselor Sekolah Sebagai Advokasi,

Konselor masa depan Harus Mampu Melakukan Koordinasi, Kolaborasi, dan Manajemen Sumber Daya.

TANTANGAN KONSELOR ABAD 21

(Nursalim, 2020) mengatakan bahwa Tantangan yang muncul di era revolusi 4.0, bagi konselor yaitu:

Keinginan konselor untuk untuk berubah dan kurangnya ketrampilan yang memadai dalam menghadapi

abad-21. Sebagai contohnya yaitu, kurangnya kemampuan menganalisis data yang tentunya bermanfaat untuk masa depan. Yang tentunya di era saat ini digunakan untuk mengelola aplikasi berbasis internet

Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan, software dan hardware komputer, dengan hal ini seorang konselor harus bisa memahami dan menjalankan aplikasi atau platform yang mendukung serta membantu dalam proses konseling. Oleh karena itu konselor dapat belajar di bidang platform.

Para konselor perlu meningkatkan kemampuan literasi yang meliputi, literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia. Di era digital dan informasi seperti sekarang, konselor dituntut untuk tidak hanya menguasai keterampilan dasar konseling, tetapi juga memiliki kemampuan literasi yang lebih luas agar dapat memberikan layanan yang efektif, relevan, dan adaptif. Tiga literasi penting yang perlu dikuasai adalah:

Literasi Data merupakan Kemampuan untuk mengumpulkan, memahami, menganalisis, dan menggunakan data secara bijak untuk mendukung pengambilan keputusan dalam layanan konseling. Literasi data penting untuk konselor dalam membantu mengidentifikasi pola perilaku dan kebutuhan konseli, Memudahkan dalam menyusun program bimbingan berdasarkan data factual, Menunjang evaluasi dan perbaikan layanan konseling secara berkala.

Contohnya yaitu: Menganalisis data kehadiran, nilai akademik, dan hasil angket psikologis untuk merancang intervensi yang tepat.

Literasi Teknologi merupakan Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan etis dalam

mendukung proses konseling. Literasi teknologi bermanfaat untuk konselor dalam melaksanakan konseling daring (online, mempermudah penyimpanan dan pengolahan data konseli secara digital. dan juga menggunakan aplikasi dan platform yang mendukung layanan psikologis modern.

Contoh yaitu: Menggunakan Google Forms untuk asesmen awal konseli, atau aplikasi video call untuk sesi konseling jarak jauh.

Literasi Manusia (Human Literacy) merupakan kemampuan dalam berempati, berkomunikasi, dan memahami manusia secara utuh, termasuk aspek emosional, sosial, dan budaya. dan penting bagi konselor untuk: meningkatkan kualitas hubungan konselor-konseli, memahami keberagaman latar belakang dan kebutuhan emosional tiap individu. dan menyesuaikan pendekatan konseling dengan nilai dan konteks pribadi konseli.

Contohnya yaitu: Menghadapi konseli dari latar belakang budaya berbeda dengan sikap terbuka dan tanpa prasangka.

Munculnya berbagai perubahan perilaku dan gaya hidup seperti Phubbing, fomo (fear of missing out), kecanduan game online, kecanduan atas pujian & pengakuan (likes, share, love), altruism, cyber romance, cyber bullying, bahkan turunnya moral akibat perkembangan teknologi perlu diantisipasi dan ditangani secara serius, karena akan berdampak pada rusaknya moral dan akhlak generasi muda (kemenristekdikti, 2018).

Fenomena Perilaku Baru yang Perlu Diantisipasi yaitu:

Phubbing (Phone Snubbing)

- Perilaku mengabaikan orang sekitar karena terlalu fokus pada ponsel.
- Menurunkan kualitas interaksi sosial dan empati.

FOMO (Fear of Missing Out)

- Ketakutan ketinggalan informasi, tren, atau momen di media sosial.
- Memicu kecemasan, stres, dan ketergantungan digital

Kecanduan game online

- Munculnya ketergantungan ekstrem terhadap permainan daring.
- Dapat mengganggu kesehatan mental, fisik, dan prestasi belajar.

Kecanduan Pujian dan Pengakuan (Likes, Share, Love)

- Keinginan kuat untuk diakui secara digital.
- Membentuk mentalitas pencari validasi eksternal, menurunkan kepercayaan diri sejati.

Altruism Digital

- Perilaku menolong orang lain secara daring (donasi, dukungan moral, dsb).
- Positif jika dilakukan dengan kesadaran, namun bisa juga dipengaruhi motif pencitraan.

Cyber Romance

- Hubungan asmara yang terjalin secara daring.
- Rentan terhadap penipuan, ilusi emosional, dan manipulasi.

Cyber Bullying

- Perundungan secara daring melalui media sosial, chat, atau forum.
- Dampaknya bisa lebih berat dibanding bullying biasa karena bisa terjadi 24 jam dan tersebar luas.

Turunnya Moral dan Akhlak

Paparan konten negatif, kebebasan tanpa kontrol, dan kurangnya bimbingan nilai menyebabkan penurunan standar moral di kalangan remaja.

Konselor dituntut untuk menjadi life long learner, kreatif dan inovatif, guru BK

penggerak, reflektif, kolaboratif, student/ conselee centered, serta mampu menerapkan

bimbingan dan konseling multikultural. Untuk menghadapi tantangan zaman, konselor tidak bisa bekerja secara konvensional. Mereka harus menjadi pembelajar aktif, kreatif, kolaboratif, reflektif, dan inklusif, serta memiliki semangat menjadi guru BK penggerak yang menginspirasi dan memberdayakan peserta didik dari berbagai latar belakang. Dengan sikap dan keterampilan ini, konselor dapat mewujudkan layanan bimbingan yang relevan, manusiawi, dan transformatif.

Lembaga pendidikan konselor (jurusan BK) harus mampu membentuk calon konseloryang memiliki kecakapan diantaranya, flexibility dan adaptability, productivity and accountability, social and cross-cultural skill, serta initiative and self-direction. Flexibility and Adaptability (Fleksibilitas dan Adaptabilitas) merupakan Kemampuan untuk beradaptasi

dengan cepat terhadap perubahan situasi, teknologi, dan karakter konseli, serta bersikap terbuka terhadap pendekatan-pendekatan baru. Dalam hal ini berperan penting dalam dunia pendidikan dan perilaku peserta didik cepat berubah. Konselor harus bisa menyesuaikan strategi dan metode pelayanan sesuai kebutuhan.

Productivity and Accountability (Produktivitas dan Akuntabilitas) merupakan Kemampuan konselor untuk bekerja secara efisien, menghasilkan layanan yang berkualitas, dan bertanggung jawab atas proses serta hasil kerjanya. Hal ini sangat penting untuk konselor yang produktif dapat mengelola banyak tugas tanpa mengorbankan kualitas. Akuntabilitas penting untuk menjaga kepercayaan siswa, orang tua, dan sekolah.

Social and Cross-Cultural Skills (Kecakapan Sosial dan Antarbudaya)

Merupakan Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang sehat, dan memahami keberagaman budaya, agama, dan latar belakang konseli. Hal ini penting untuk konselor akan menghadapi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Dibutuhkan empati, toleransi, dan keterampilan komunikasi lintas budaya.

Initiative and Self-Direction (Inisiatif dan Kemandirian) merupakan kemampuan untuk bertindak proaktif, mencari solusi, dan mengembangkan diri secara mandiri tanpa harus menunggu arahan terus-menerus. Hal ini cukup penting agar konselor yang inisiatif akan lebih tanggap terhadap kebutuhan konseli.

Lembaga pendidikan konselor memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak calon konselor yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki

kecakapan abad ke-21: fleksibel, adaptif, produktif, bertanggung jawab, toleran terhadap perbedaan, serta mampu bekerja mandiri dan proaktif.

Dengan membekali mereka secara menyeluruh, maka lulusan BK akan siap menjadi konselor profesional yang relevan dan berdaya saing tinggi.

Tantangan Konselor Abad-21 Menurut D. Hartini (2020) dalam (Silmy, 2024), perkembangan teknologi dalam era Revolusi Industri 4.0 menuntut adanya inovasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Era ini ditandai oleh integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, big data, dan internet of things (IoT) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan dan pelayanan psikologis. Oleh karena itu, para konselor tidak hanya dituntut untuk memahami teori dan praktik konseling secara konvensional, tetapi juga harus mampu mengadopsi dan memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian layanan.

Pengembangan Media Digital sebagai Sarana Konseling

Transformasi digital memungkinkan konseling dilakukan secara lebih fleksibel dan juga pastinya lebih mudah. Melalui berbagai platform, salah satunya yang digunakan adalah aplikasi konseling online. Media ini nantinya bisa membantu konselor dalam membantu klien secara lebih luas dan efisien, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, lokasi, atau kondisi khusus seperti disabilitas atau gangguan mental tertentu, serta membantu dalam melakukan konseling jarak jauh. Inovasi ini juga berpotensi meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan konseling melalui monitoring digital dan pastinya berkelanjutan.

Tantangan Sosial dan Mental di Masyarakat Modern

Masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan sosial dan psikologis, seperti kecemasan digital, stres akibat tekanan pekerjaan atau akademik, kesepian, hingga gangguan kesehatan mental yang kompleks dan semakin marak dialami oleh masyarakat saat ini. Tantangan ini menuntut pendekatan konseling yang lebih adaptif, kreatif, dan kontekstual. Konselor perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya berpusat pada masalah, tetapi juga berbasis pada kekuatan (*strength-based approach*), serta melibatkan aspek digital literasi untuk membantu klien menghadapi masalah yang dialami.

Dampak Teknologi terhadap Praktik Konseling

Teknologi telah mengubah cara konselor menjalankan profesinya. Saat ini, konselor tidak hanya berperan sebagai pendengar dan juga memberikan masukan atau sebagai pembimbing. Namun sebagai fasilitator digital. Dengan demikian seorang konselor dituntut untuk bisa mengembangkan kompetensi digital, menjaga etika profesi di ranah online, serta memastikan keamanan dan kerahasiaan data klien dalam platform digital. Ini merupakan tantangan sendiri bagi seorang konselor yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi, ditengah kemajuan teknologi saat ini. Dalam hal ini pentingnya kesiapan dan keterbukaan para konselor untuk bisa beradaptasi dengan era digital yang semakin maju ini.

PELUANG KONSELOR ABAD-21

(Nursalim, 2020) konselor perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap profesi dan bekerja keras untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan di era 4.0. berikut ini peluang yang dapat dimanfaatkan oleh profesi bk di era 4.0. diantaranya adalah:

Mengembangkan potensi dan keterampilan pribadi, serta segera menyesuaikan diri dengan era digital dan kemajuan teknologi informasi guna mendorong peningkatan dan profesionalisme dalam bidang bimbingan dan konseling. Hal Ini berarti bahwa seorang konselor harus terus meningkatkan kualitas dirinya, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi digital seperti platform konseling online, aplikasi pendukung psikologis menjadi alat yang cukup penting untuk memperluas jangkauan layanan serta menjawab kebutuhan klien yang semakin beragam di era modern.

Perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 telah membuka ruang baru bagi konselor untuk memperluas peran dan pengaruhnya di luar praktik konvensional. Konselor kini tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan tatap muka di sekolah atau lembaga, tetapi juga sebagai agen perubahan di dunia digital. Sebagai pembuat konten (content creator), konselor dapat memanfaatkan media sosial, blog, podcast, dan video edukatif untuk menyebarkan informasi seputar kesehatan mental, pengembangan diri, strategi belajar, manajemen emosi, dan topik penting lainnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Konten ini tidak hanya menjangkau siswa atau klien, tetapi juga masyarakat umum, sehingga peran konselor lebih dikenal dan dihargai secara luas.

Dalam peran sebagai influencer, konselor mampu membangun citra positif profesi BK serta menginspirasi perubahan perilaku sehat di masyarakat digital. Kolaborasi dengan tokoh-tokoh publik atau influencer lain yang memiliki audiens luas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konseling, sekaligus menjadikan layanan konseling lebih diterima secara sosial. Lebih jauh, dengan menjadi pengembang platform digital, konselor dapat menciptakan sistem layanan berbasis teknologi, seperti aplikasi konseling, website konsultasi, atau ruang diskusi virtual yang aman dan ramah pengguna. Peran ini tidak hanya menunjukkan penguasaan teknologi, tetapi juga memperkuat profesionalisme dan kemandirian konselor dalam menyediakan layanan yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Secara keseluruhan, kemampuan konselor untuk menjelajahi dan mengambil peran di berbagai bidang digital mencerminkan adaptasi yang progresif terhadap tantangan masa depan. Ini juga menunjukkan bahwa profesi bimbingan dan konseling tidak stagnan, melainkan terus berkembang dan bersinergi dengan dinamika sosial-teknologis yang ada.

Kemajuan teknologi dan perkembangan internet membuka peluang besar bagi layanan bimbingan dan konseling untuk lebih efektif dan efisien melalui media online. Berbagai aplikasi dan platform digital, seperti video call, chat, forum diskusi, serta aplikasi khusus konseling, dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara konselor dan klien. Dengan memanfaatkan media ini, proses bimbingan dan konseling dapat menjangkau lebih banyak orang tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan terciptanya

metode baru yang lebih inovatif dan menarik, sehingga membantu mencapai tujuan konseling dengan cara yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan klien di era digital saat ini.

Generasi Z memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya, seperti kecenderungan untuk belajar secara aktif, kepekaan terhadap kondisi sekitar, pola pikir yang bersifat global, serta preferensi terhadap informasi yang disajikan secara visual. Hal ini menjadi peluang besar bagi para konselor untuk menyesuaikan metode dan media layanan bimbingan dan konseling agar lebih efektif dan relevan. Dengan memahami dan memanfaatkan karakteristik ini, konselor dapat merancang program yang tidak hanya bersifat preventif untuk menghindari masalah, tetapi juga intervensi yang tepat guna membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh generasi Z. Pendekatan yang disesuaikan dengan gaya belajar dan cara pandang mereka akan meningkatkan keterlibatan serta hasil positif dalam proses konseling.

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan membuka peluang munculnya konselor buatan yang dapat mendukung pekerjaan konselor manusia. Dengan kemampuan melakukan asesmen, memberikan rekomendasi studi dan karir, serta mengambil keputusan berdasarkan data, teknologi ini akan membantu meningkatkan efektivitas layanan konseling. Selain itu, inovasi seperti konselor virtual berbentuk hologram berpotensi menghadirkan pengalaman baru yang lebih interaktif dan menarik bagi klien di masa depan.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang sangat cepat membawa dampak besar

dalam bidang bimbingan dan konseling. Teknologi ini memungkinkan munculnya konselor buatan, yaitu sistem atau mesin yang dapat membantu konselor manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Misalnya, konselor buatan dapat melakukan asesmen atau penilaian terhadap klien secara lebih cepat dan akurat, memberikan rekomendasi yang tepat terkait perencanaan studi dan karir berdasarkan data yang ada, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang informasional. Dengan bantuan teknologi ini, layanan konseling menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, inovasi seperti konselor virtual dalam bentuk hologram dapat menghadirkan pengalaman konseling yang lebih interaktif dan menarik, sehingga meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan klien selama proses konseling di masa depan.

Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi tatap muka, proses konseling harus beradaptasi dengan memanfaatkan media daring seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan platform sejenis. Hal ini memungkinkan layanan konseling tetap berjalan efektif meskipun siswa sedang menjalani pembelajaran dari rumah (Learning From Home/LFH). Selain sesi konseling langsung, konselor juga dapat memfasilitasi pembelajaran mandiri dengan menyediakan tutorial teknik-teknik konseling. Tutorial ini membantu siswa memahami dan menerapkan strategi coping atau pengembangan diri secara mandiri, sehingga dukungan psikologis tetap dapat diberikan secara berkelanjutan meskipun jarak fisik memisahkan. Pendekatan ini juga memperluas akses dan fleksibilitas layanan konseling sesuai dengan kebutuhan zaman.

KESIMPULAN

Memasuki abad ke-21, dunia mengalami transformasi besar yang dipicu oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Era ini sering disebut sebagai era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan disrupsi digital, kecanggihan komunikasi, konektivitas global, serta kemunculan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT). Perubahan-perubahan tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan pelayanan bimbingan serta konseling.

Dalam konteks ini, profesi konselor menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Konselor tidak lagi hanya berperan sebagai pendengar atau pembimbing dalam ruang kelas atau kantor sekolah. Mereka kini dituntut untuk menjadi fasilitator digital, pembelajar sepanjang hayat (life-long learner), serta individu yang mampu menavigasi dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan konseling. Tantangan utama yang dihadapi konselor abad-21 mencakup ketertinggalan dalam adopsi teknologi, kurangnya keterampilan literasi digital, serta rendahnya literasi data dan empati digital. Konselor juga harus menghadapi berbagai dampak sosial dari perkembangan teknologi, seperti kecanduan digital, cyberbullying, phubbing, FOMO (fear of missing out), serta kecanduan terhadap validasi sosial di media digital.

Selain tantangan, abad ke-21 juga menawarkan peluang besar bagi profesi konseling. Konselor dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan, seperti melalui konseling daring, media sosial, aplikasi bimbingan, atau platform edukasi psikologis. Peran konselor

juga semakin strategis sebagai content creator dan influencer edukatif yang dapat menyuarakan isu-isu penting seperti kesehatan mental, manajemen stres, pengembangan diri, dan pendidikan karakter melalui media digital. Bahkan, dengan berkembangnya teknologi AI, konselor dapat memanfaatkan bantuan sistem cerdas untuk mempercepat proses asesmen, memberikan rekomendasi berbasis data, dan meningkatkan akurasi dalam layanan konseling.

Karakteristik utama yang harus dimiliki konselor abad-21 meliputi keterampilan literasi digital, empati, integritas, akuntabilitas, serta kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, tenaga kesehatan, dan komunitas. Konselor harus memiliki fleksibilitas, adaptabilitas, serta sensitivitas multikultural untuk menghadapi keberagaman konseli dari berbagai latar belakang. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu berpikir kritis, reflektif, serta kreatif dalam mengembangkan strategi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan klien di era digital.

Lembaga pendidikan dan pelatihan profesi konseling memiliki peran sentral dalam mempersiapkan konselor masa depan. Mereka harus merancang kurikulum dan pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek teoritis dan teknis, tetapi juga pada penguatan karakter, literasi abad-21, dan keterampilan digital. Konselor masa depan diharapkan bukan hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga agen perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman serta memberdayakan individu dan masyarakat secara holistik. Dengan kesiapan, pengembangan diri yang berkelanjutan, serta komitmen terhadap etika profesi dan kemanusiaan, konselor abad-21 dapat bertransformasi menjadi sosok

profesional yang relevan, efektif, dan berdampak positif dalam menjawab tantangan zaman. Mereka akan menjadi aktor kunci dalam membentuk generasi yang sehat secara mental, tangguh secara emosional, dan cakap dalam menghadapi dinamika kehidupan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, H., Nuryatin, A., Sugiyo, & Sutoyo, A. (2023). Persepsi Guru BK Tentang Konselor Masa Depan. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (Prosnampas)*, 6(1), 361–368.
- disampaikan pada *Mimbar Ilmiah Universitas Negeri Surabaya*, 14 Februari 2020.
- Layanan, K., Di, B., Kajian, K. A. N., & Dan, K. (2025). *Journal of Teacher Well Being*. 01(01), 2018–2021.
- Nursalim, M. (2020). Peluang Dan Tantangan Globalisasi Profesi Bimbingan Dan Konseling di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 1(2), 31–40. <http://e-jurnal.ikipgrismg.ac.id/index.php/mediapenelitianpenidikan>
- Satria, Arif. (2020). Strategi Perguruan Tinggi Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Makalah*
- Silmy, R. A. (2024). Menguk Tantangan dan Persiapan Konselor dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(2), 210–220. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i2.2406>
- Wicaksono, L. (2020). Bimbingan Dan Konseling Menjawab Tantangan Abad Xxi. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.26418/jvip.v1i1.44>

“TANTANGAN DAN PELUANG KONSELOR ABAD 21”

PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-21, dunia mengalami perubahan yang begitu cepat dan kompleks di berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Era ini, yang sering kali disebut sebagai era Revolusi Industri 4.0, ditandai oleh masifnya kemajuan teknologi informasi, globalisasi, serta transformasi nilai-nilai sosial dan budaya. Kemajuan ini tidak hanya membawa dampak pada kehidupan ekonomi dan sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan dan peluang baru dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Pendidikan di abad ini menuntut peserta didik untuk tidak sekadar menguasai pengetahuan, melainkan juga memiliki kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang terintegrasi dengan keterampilan teknologi dan literasi digital.

Dalam konteks ini, peran guru, khususnya guru Bimbingan dan Konseling (BK), menjadi sangat strategis. Guru tidak lagi cukup hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi dituntut menjadi fasilitator, motivator, mediator, dan agen perubahan yang mampu merespon kebutuhan psikologis dan sosial peserta didik sesuai dengan dinamika zaman. Guru BK memiliki tanggung jawab yang semakin kompleks, tidak hanya mendampingi siswa dalam aspek akademik, tetapi juga dalam aspek pribadi, sosial, karir, bahkan penyesuaian dengan tuntutan era digital yang semakin menuntut kecakapan hidup dan keterampilan adaptif.

Tantangan utama bagi guru dan konselor di abad 21 adalah perubahan cepat dalam struktur masyarakat, pola pikir peserta didik, serta kompleksitas permasalahan remaja yang muncul akibat paparan teknologi, seperti cyberbullying,

kecanduan gawai, krisis identitas, hingga tekanan sosial dari media digital. Guru BK juga dihadapkan pada tuntutan untuk mampu menerapkan layanan konseling berbasis teknologi, mengembangkan program konseling yang inklusif dan diferensiatif, serta memiliki kecakapan multikultural dalam menghadapi latar belakang peserta didik yang beragam.

Namun demikian, di balik tantangan tersebut terbuka pula peluang besar bagi pengembangan profesi konselor sekolah. Transformasi pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar dan implementasi kurikulum baru memberikan ruang bagi guru BK untuk mengembangkan layanan yang lebih kreatif dan personal, seperti pembelajaran berdiferensiasi, konseling karier, dan pemberdayaan karakter peserta didik. Dalam kerangka ini, guru BK memiliki peluang untuk menguatkan peranannya sebagai mitra strategis sekolah dalam membentuk siswa yang resilien, fleksibel, dan kompeten menghadapi tantangan zaman.

Peran guru BK dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan abad 21 juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam memahami dan mengimplementasikan berbagai pendekatan baru dalam pembelajaran dan konseling. Guru BK yang profesional dituntut untuk selalu belajar, mengembangkan diri, dan memperkuat kompetensi dalam bidang teknologi, komunikasi, manajemen emosi, serta pengembangan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik masa kini.

Di sisi lain, pembelajaran abad 21 menuntut perubahan paradigma yang menekankan kolaborasi, partisipasi aktif siswa, serta integrasi teknologi dan inovasi dalam proses belajar-mengajar. Guru BK, dalam konteks ini, tidak hanya

menjadi pelaksana layanan individual atau kelompok, tetapi juga turut merancang strategi pembelajaran yang mendukung kebutuhan siswa secara holistik, termasuk melalui pemetaan potensi, pengembangan kepercayaan diri, serta fasilitasi eksplorasi karier.

Dengan demikian, urgensi akan transformasi peran guru dan konselor di abad ke-21 merupakan keniscayaan. Guru BK harus mampu menjembatani kesenjangan antara sistem pendidikan tradisional dan tuntutan zaman modern. Mereka bukan hanya ditantang untuk mengikuti perkembangan, tetapi juga diberikan peluang besar untuk menjadi pionir perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif

“ABAD 21: ERA TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN GLOBAL”

Memasuki abad ke-21, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Abad ini ditandai dengan tiga karakter utama: globalisasi, digitalisasi, dan revolusi industri 4.0. Ketiga elemen tersebut telah menggeser pola hidup manusia dari sistem tradisional menuju pola yang lebih dinamis, fleksibel, dan berbasis teknologi. Dunia pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak paling signifikan, karena dituntut untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi ketidakpastian zaman. Peserta didik tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik, namun juga harus memiliki keterampilan berpikir kritis, mampu bekerja sama dalam tim, kreatif dalam menyelesaikan masalah, dan mampu berkomunikasi secara efektif yang dikenal sebagai keterampilan 4C (Fadilah, 2024).

Pergeseran ini menuntut perubahan paradigma pendidikan yang dulunya berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan, kini bergeser kepada peserta didik sebagai pusat aktivitas belajar. Artinya, pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam mengonstruksi pengetahuan, mengembangkan potensi, serta membentuk karakter dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran yang relevan di abad 21 menekankan pentingnya pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan kolaboratif, dimana siswa tidak hanya belajar untuk mengetahui, tetapi juga belajar untuk menjadi dan hidup bersama orang lain.

Berdasarkan pemikiran Griffin & McGaw yang dikutip dalam penelitian Imawanty & Bakhtiar (2019), keterampilan abad 21 terbagi dalam empat pilar utama, yaitu: (1) cara berpikir (*way of thinking*), yang mencakup kreativitas, inovasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan; (2) cara bekerja (*way of working*), yang melibatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi; (3) alat kerja (*tools for working*), yaitu penguasaan terhadap teknologi informasi dan media digital; serta (4) hidup di dunia (*living in the world*), yang menekankan pada kesadaran sosial, budaya, serta kewarganegaraan global. Keempat pilar ini menjadi kerangka yang perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan agar dapat membekali siswa dengan kecakapan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Dampak dari transformasi ini terasa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu merancang ulang pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan penguasaan konten akademik, tetapi juga memperhatikan pengembangan literasi informasi, literasi

numerasi, literasi digital, serta keterampilan sosial dan emosional. Sebagaimana dinyatakan oleh Lalusu et al. (2024), kemampuan untuk menggunakan teknologi serta beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan merupakan syarat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, resilien, dan produktif di masa depan.

Selain faktor teknologi, perubahan sosial yang cepat, termasuk peristiwa besar seperti pandemi COVID-19, konflik global, dan krisis lingkungan, juga memberikan tantangan baru bagi sistem pendidikan. Kondisi ini mengharuskan pendidik dan siswa untuk memiliki fleksibilitas tinggi dalam belajar dan mengajar. Pendekatan pembelajaran harus dirancang ulang agar mampu menghadirkan pembelajaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Teknologi digital menjadi solusi utama untuk menjawab tantangan ini, karena memungkinkan terjadinya interaksi belajar-mengajar secara daring (online), berbasis jaringan, dan berbasis proyek (project-based learning).

Dalam buku "Profesi Kependidikan Abad 21" yang ditulis oleh Lalusu dkk. (2024), ditegaskan bahwa pendidik pada masa kini tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan pendidikan dengan tuntutan zaman. Guru dan tenaga kependidikan harus mampu menjadi fasilitator belajar yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif ke dalam proses pembelajaran. Kemampuan untuk merancang media digital, memanfaatkan platform pembelajaran daring, serta mengelola kelas virtual menjadi kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh pendidik di abad 21.

Dengan demikian, era abad 21 adalah masa di mana pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses mentransfer pengetahuan, tetapi sebagai sarana strategis untuk menciptakan generasi yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di panggung global. Pendidikan menjadi alat transformasi sosial yang mengarahkan peserta didik untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, berdaya saing tinggi, dan memiliki kepedulian terhadap tantangan global.

“TANTANGAN YANG DIHADAPI KONSELOR DI ABAD 21”

Tantangan yang dihadapi oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling pada abad ke-21 tidak lagi bersifat tunggal atau linier, melainkan sangat kompleks dan multidimensional. Kompleksitas ini muncul dari berbagai aspek baik internal maupun eksternal, mulai dari derasnya arus perkembangan teknologi, perubahan sosial-budaya, hingga dinamika kebijakan pendidikan yang terus berganti. Seiring berkembangnya zaman dan munculnya berbagai bentuk kebutuhan peserta didik yang semakin beragam, konselor dituntut untuk lebih adaptif, fleksibel, dan inovatif dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang relevan dan efektif.

Tantangan Teknologi dan Digitalisasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk cara peserta didik belajar, berinteraksi, dan menyelesaikan masalah. Era digital telah mengubah pola komunikasi menjadi serba instan, terbuka, dan lintas batas. Di sinilah tantangan muncul bagi konselor untuk menyesuaikan layanan konseling

dengan kebutuhan digital generasi masa kini. Konselor tidak hanya dituntut memahami perangkat teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara strategis dalam menyampaikan layanan konseling seperti konseling berbasis daring (online counseling), pemanfaatan media sosial secara edukatif, serta pembuatan konten digital seperti video motivasi, e-modul bimbingan, dan podcast edukatif.

Ashari dan Aswar (2024) menggarisbawahi bahwa penguasaan perangkat teknologi bukan lagi menjadi sebuah keunggulan tambahan bagi guru BK, tetapi sudah menjadi bagian fundamental dari profesi tersebut. Konselor harus memiliki kapasitas untuk menggunakan platform digital secara efektif dan menjaga kualitas komunikasi interpersonal meskipun dalam ruang virtual. Kegagalan dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan ini akan menyebabkan layanan konseling menjadi tertinggal dan kurang diminati oleh peserta didik yang sudah sangat familiar dengan dunia digital.

Tantangan Sosial dan Psikologis Peserta Didik

Perkembangan masyarakat modern yang sarat dengan tekanan sosial, kompetisi akademik, dan paparan terhadap media digital tanpa batas menciptakan tantangan psikososial yang baru bagi peserta didik. Fenomena seperti cyberbullying, gangguan identitas, kecanduan gawai dan media sosial, serta meningkatnya kecemasan dan depresi di kalangan remaja menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan profesional. Konselor tidak cukup hanya memiliki pengetahuan umum tentang psikologi, tetapi juga perlu menguasai pendekatan intervensi yang sesuai dengan kondisi dan latar belakang siswa.

Maharani et al. (2022) menjelaskan bahwa konselor harus memiliki kompetensi multikultural, yaitu kemampuan untuk memahami keberagaman budaya, nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh peserta didik dari berbagai latar belakang. Pendekatan humanistik juga sangat penting dalam membangun relasi yang empatik dan suportif antara konselor dan siswa. Tantangan sosial dan psikologis ini menuntut konselor untuk terus mengembangkan sensitivitas terhadap kondisi peserta didik serta memperkuat keterampilan diagnosis dini dan teknik konseling yang tepat sasaran.

Tantangan Regulasi dan Sistem Pendidikan

Dinamika kebijakan pendidikan yang terus berkembang, seperti penerapan Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga kewajiban sertifikasi profesional, menjadi tantangan administratif sekaligus pedagogis bagi para konselor. Konselor dituntut untuk mampu menyesuaikan layanan bimbingan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan perangkat evaluasi, serta melaporkan hasil layanan dalam bentuk yang sistematis dan terstandar.

Menurut Fadilah (2024), konselor memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Peran ini mengharuskan konselor memahami secara mendalam arah dan tujuan kebijakan pendidikan nasional, sekaligus berkontribusi aktif dalam perumusan strategi pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Namun dalam praktiknya, masih banyak konselor yang kesulitan memahami keterkaitan antara kebijakan makro dengan tindakan teknis di lapangan, sehingga layanan

konseling sering kali berjalan terpisah dari sistem pembelajaran utama.

Tantangan Profesionalisme dan Pengembangan Diri

Profesionalisme konselor menjadi faktor kunci dalam menjawab tantangan di abad 21. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru BK yang belum memiliki pemahaman menyeluruh tentang tugas, fungsi, dan pengembangan program konseling yang efektif dan kontekstual. Imawanty dan Bakhtiar (2019) menyebutkan bahwa kurangnya pelatihan berkelanjutan, minimnya supervisi yang konstruktif, serta belum adanya sistem evaluasi mutu layanan yang sistematis, menjadi hambatan utama dalam pengembangan profesi guru BK.

Di sisi lain, eksistensi guru BK juga sering kali kurang mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan sekolah, yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak dan inovasi. Padahal, pengembangan profesionalisme konselor sangat ditentukan oleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan, forum ilmiah, serta akses terhadap sumber literatur dan teknologi terbaru. Konselor perlu mengembangkan sikap sebagai pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*) agar tidak tertinggal oleh arus perubahan dan tetap mampu memberikan layanan yang relevan bagi peserta didik masa kini.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan di atas menggambarkan bahwa profesi konselor di abad 21 tidak bisa lagi dipandang secara konvensional. Konselor harus menjadi sosok yang reflektif, adaptif, dan berdaya saing, dengan dukungan sistem pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis transformasi digital serta kesejahteraan psikososial peserta didik.

“Peran Guru dalam Tantangan dan Peluang BK di Abad 21”

Guru sebagai elemen kunci dalam pendidikan juga turut berperan dalam mendukung keberhasilan layanan bimbingan dan konseling (BK). Peran guru dalam era abad ke-21 tidak lagi terbatas pada penyampaian materi pelajaran, namun juga mencakup peran sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan mitra dalam pengembangan karakter dan kesejahteraan psikologis peserta didik. Di tengah perubahan kurikulum, dinamika sosial, serta tantangan global yang semakin kompleks, guru harus bekerja sama secara sinergis dengan guru BK untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung pengembangan potensi setiap individu.

Menurut Azwarini (2024), guru di abad 21 dituntut untuk menjadi inovator, motivator, serta pemimpin pembelajaran yang tidak hanya fokus pada capaian akademik, melainkan juga penguatan karakter siswa, pengembangan sikap sosial, dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Kolaborasi antara guru mata pelajaran dengan guru BK sangat penting agar peserta didik mendapatkan perhatian yang menyeluruh, baik dalam aspek kognitif maupun emosional. Misalnya, ketika seorang guru mendeteksi adanya perubahan perilaku atau penurunan prestasi akademik pada siswa, guru tersebut dapat segera merujuk siswa ke layanan BK untuk ditindaklanjuti secara profesional.

Peran kolaboratif ini menjadi semakin strategis dalam kurikulum Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih jalur pembelajaran sesuai minat dan bakatnya. Dalam konteks ini, guru dan guru BK perlu bekerja sama dalam memberikan asesmen diagnostik, memfasilitasi pengambilan keputusan belajar siswa, serta

memantau perkembangan sosial-emosional mereka. Guru yang memahami peran konseling akan lebih responsif dalam mengarahkan siswa ke layanan bimbingan dan memfasilitasi keberhasilan pembelajaran diferensiasi.

Sonia (2023) menambahkan bahwa guru yang berkualitas di era Revolusi Industri 4.0 harus memiliki kompetensi berpikir kritis, literasi digital, serta kemampuan untuk membangun jejaring dan kolaborasi antar pihak, baik dalam lingkup sekolah maupun eksternal seperti psikolog, orang tua, dan komunitas pendidikan. Hal ini sangat relevan mengingat kebutuhan peserta didik tidak lagi dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Sebaliknya, diperlukan sistem pendukung yang terintegrasi, di mana guru dan guru BK menjadi bagian dari ekosistem layanan pendidikan yang responsif dan tanggap terhadap kebutuhan siswa.

Lebih lanjut, guru juga diharapkan mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin, yang merupakan bagian penting dari program layanan bimbingan dan konseling. Dalam banyak kasus, guru menjadi figur penting yang memengaruhi cara berpikir dan bersikap siswa, sehingga sikap empatik dan dukungan emosional dari guru akan memperkuat kepercayaan siswa terhadap sekolah sebagai tempat yang aman dan ramah. Maka dari itu, pelatihan tentang dasar-dasar konseling, keterampilan komunikasi efektif, dan penanganan awal masalah psikososial siswa perlu diberikan kepada semua guru sebagai bagian dari penguatan peran mereka dalam sistem pendidikan abad 21.

Oleh karena itu, peran guru dalam mendukung layanan BK bukan hanya bersifat tambahan, tetapi merupakan bagian integral dari proses pendidikan itu sendiri. Kolaborasi

antarpihak, khususnya antara guru dan guru BK, harus ditingkatkan melalui perencanaan layanan terpadu, forum diskusi rutin, serta sistem rujukan yang jelas dan cepat. Ini merupakan salah satu kunci dalam menjawab tantangan pendidikan abad 21 dan memanfaatkan berbagai peluang untuk mewujudkan lingkungan belajar yang holistik, manusiawi, dan adaptif.

“PELUANG KONSELOR DI ABAD 21”

Di balik berbagai tantangan yang dihadapi konselor di abad ke-21, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat eksistensi dan kontribusi mereka dalam sistem pendidikan maupun di masyarakat secara luas. Perubahan zaman justru membuka ruang baru bagi pengembangan profesi bimbingan dan konseling, baik dari sisi layanan, peran sosial, hingga penguatan kompetensi profesional. Peluang-peluang ini bersifat transformatif, artinya tidak hanya mendukung keberlangsungan peran guru BK, tetapi juga memberi kesempatan untuk mendefinisikan ulang tugas dan fungsi konselor dalam konteks yang lebih luas.

Peluang Inovasi Layanan Konseling Digital

Kemajuan teknologi digital telah menciptakan berbagai peluang baru dalam pengembangan layanan konseling yang inovatif, efisien, dan mudah diakses. Guru BK dapat memanfaatkan platform digital untuk merancang berbagai bentuk layanan seperti e-counseling, konseling berbasis video conference, chatbot psikologis, serta pelatihan dan webinar berbasis psikologi. Layanan ini tidak hanya meningkatkan jangkauan dan fleksibilitas waktu, tetapi juga memberikan

ruang bagi peserta didik yang enggan melakukan konseling tatap muka untuk tetap memperoleh layanan psikososial secara privat dan aman.

Pengembangan media digital memungkinkan konselor menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik peserta didik generasi digital native. Selain itu, layanan ini juga mendukung terciptanya data digital yang berguna untuk evaluasi layanan. Dengan demikian, guru BK tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai pengembang sistem dan teknologi edukatif yang berbasis pada kebutuhan nyata peserta didik.

Peluang Penguatan Peran dalam Pendidikan Karakter

Meningkatnya perhatian terhadap pentingnya pendidikan karakter, kesejahteraan psikologis, dan penguatan soft skills siswa membuka ruang bagi konselor untuk memainkan peran sentral di sekolah. Guru BK dapat menjadi penggerak utama dalam program anti-bullying, pengembangan kecerdasan emosional, dan pembentukan nilai-nilai karakter seperti integritas, empati, dan tanggung jawab. Peran ini memperluas jangkauan layanan konseling dari sekadar intervensi individual menjadi transformasi budaya sekolah secara menyeluruh.

Azwarini (2024) menekankan bahwa guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara emosional dan etis. Dalam konteks ini, guru BK menjadi pilar penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif, suportif, dan berfokus pada pengembangan karakter siswa. Ini merupakan peluang besar bagi konselor untuk memperkuat

legitimasi profesinya melalui kontribusi nyata terhadap kualitas pembelajaran dan kehidupan sosial siswa.

Peluang Profesionalisasi Melalui PPG dan Sertifikasi

Kehadiran berbagai program pengembangan profesi guru seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan berbasis teknologi, serta sertifikasi kompetensi merupakan bentuk dukungan struktural yang sangat berharga bagi konselor. Program-program ini membuka kesempatan bagi guru BK untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas wawasan, dan mendapatkan pengakuan resmi atas kompetensi yang dimilikinya. Profesionalisasi ini penting untuk memperkuat posisi guru BK sebagai tenaga profesional yang sejajar dengan guru mata pelajaran lainnya.

Srilesnawati et al. (2024) menjelaskan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk program pelatihan, sertifikasi, dan fasilitasi teknologi perlu dimanfaatkan secara optimal oleh guru BK untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Dalam jangka panjang, profesionalisasi ini akan membangun kepercayaan publik terhadap layanan bimbingan dan konseling serta memperluas peran konselor dalam berbagai level pendidikan dan sosial.

Ekspansi Peran di Masyarakat

Selain di lingkungan sekolah, peran konselor juga semakin dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Permasalahan sosial seperti disintegrasi keluarga, ketergantungan digital, tekanan pekerjaan, dan persoalan psikologis lainnya memerlukan peran profesional yang mampu memberikan dukungan psikososial secara konstruktif.

Di sinilah guru BK memiliki peluang untuk melebarkan peran sebagai konselor komunitas, fasilitator pelatihan di LSM, pembimbing rehabilitasi, atau bahkan sebagai konsultan keluarga dan sumber daya manusia di perusahaan.

Imawanty (2019) menegaskan bahwa guru BK masa kini perlu memperluas cakupan perannya agar tidak terbatas di ranah institusi pendidikan saja, melainkan juga memiliki kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak hanya membuka peluang kerja yang lebih luas, tetapi juga memperkuat posisi strategis konselor sebagai bagian dari solusi permasalahan sosial yang kompleks dan dinamis.

Secara keseluruhan, peluang-peluang ini menjadi modal penting bagi konselor untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas dampak positif dari profesi bimbingan dan konseling di era modern. Adaptasi, inovasi, dan kolaborasi menjadi kunci untuk merespons peluang tersebut secara efektif dan bermakna.

“Tantangan dan Peluang Pembelajaran di Abad 21”

Pembelajaran di abad ke-21 menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan era sebelumnya. Perubahan yang cepat dalam bidang teknologi, tuntutan keterampilan global, serta keragaman latar belakang peserta didik menuntut dunia pendidikan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya terfokus pada aspek penguasaan teknologi oleh guru dan siswa, tetapi juga mencakup dimensi kurikulum, metodologi pembelajaran, serta kesiapan dan kompetensi profesional pendidik dalam menyelenggarakan proses belajar yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21.

Sonia (2023) menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi guru adalah bagaimana mengubah pendekatan pembelajaran tradisional yang bersifat instruksional menuju pembelajaran yang lebih partisipatif, berbasis proyek (project-based learning), serta menekankan pada kolaborasi dan pemecahan masalah secara kreatif. Banyak guru masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan elemen-elemen keterampilan abad 21—seperti berpikir kritis, literasi digital, dan komunikasi efektif—ke dalam praktik mengajar harian mereka. Hal ini diperparah dengan keterbatasan pelatihan dan fasilitas yang belum merata di berbagai daerah, sehingga menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan.

Kurikulum yang diterapkan pun sering kali belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Guru memerlukan pemahaman mendalam tidak hanya terhadap konten akademik, tetapi juga bagaimana menyampaikan pembelajaran yang bermakna dan membangun keterlibatan siswa secara aktif. Tantangan ini menjadi semakin nyata ketika siswa menunjukkan karakteristik belajar yang beragam, baik dari segi gaya belajar, kecepatan menyerap informasi, hingga latar belakang sosial- budaya.

Di sisi lain, abad 21 juga memberikan peluang besar melalui pemanfaatan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran. Lalusu et al. (2024) menyoroti bahwa media digital seperti Learning Management System (LMS), video pembelajaran, aplikasi berbasis game (gamifikasi), serta teknologi Augmented Reality dan Virtual Reality (AR/VR) mampu menciptakan suasana belajar yang lebih hidup, personal, dan berbasis eksplorasi. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menyajikan materi secara lebih

variatif dan interaktif, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya masing-masing.

Inovasi pembelajaran berbasis teknologi juga memungkinkan terciptanya sistem pembelajaran hibrida (blended learning) dan pembelajaran mandiri yang mendorong kemandirian dan tanggung jawab siswa terhadap proses belajarnya. Guru diharapkan tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendampingi dan memfasilitasi siswa untuk menemukan dan mengembangkan potensinya secara optimal.

Lebih lanjut, implementasi Kurikulum Merdeka menjadi salah satu strategi besar pemerintah dalam merespon tuntutan pembelajaran abad 21. Kurikulum ini menekankan pada prinsip pembelajaran yang berpihak kepada siswa (student-centered learning), fleksibilitas dalam penyusunan modul ajar, serta penekanan pada penguatan karakter dan kompetensi berbasis konteks kehidupan nyata. Dalam konteks ini, peran guru bimbingan dan konseling menjadi sangat penting, karena guru BK memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan siswa dalam menentukan jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan perkembangan dirinya.

Fadilah (2024) menegaskan bahwa guru BK harus terlibat aktif dalam proses diagnosis kebutuhan belajar siswa, membantu guru dalam menerapkan pendekatan diferensiasi, serta mengevaluasi keberhasilan pembelajaran tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga dari aspek sosial dan emosional. Dengan peran ini, guru BK dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan sesuai dengan karakteristik uniknya.

Secara keseluruhan, tantangan dan peluang dalam pembelajaran abad 21 hendaknya tidak dipandang sebagai hambatan yang melemahkan semangat inovasi, tetapi sebagai dorongan untuk terus melakukan perubahan positif. Pembelajaran yang transformatif hanya dapat tercapai jika seluruh elemen pendidikan—guru, konselor, kepala sekolah, dan orang tua—bekerja sama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, kreatif, dan adaptif. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, sehat mental, dan siap menghadapi kompleksitas dunia global secara produktif dan bertanggung jawab.

“Model Supervisi dan Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling Abad 21”

Dalam menghadapi tantangan dan peluang profesi konselor di abad ke-21, dibutuhkan sistem supervisi dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling yang efektif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Supervisi dan evaluasi bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan administratif, tetapi lebih dari itu, menjadi mekanisme pembinaan profesional yang mendorong kualitas layanan konseling, pengembangan kapasitas konselor, serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan.

Model supervisi tradisional yang bersifat satu arah, otoritatif, dan berfokus pada pelaporan administratif sudah tidak relevan untuk digunakan sepenuhnya dalam konteks pendidikan modern. Di era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi pembelajaran, supervisi harus dilakukan dengan pendekatan yang kolaboratif, reflektif, dan berbasis penguatan kapasitas. Imawanty dan Bakhtiar (2019) menekankan bahwa banyak guru BK belum mendapatkan penguatan sistematis

melalui supervisi yang konstruktif dan terstandar, yang menyebabkan rendahnya efektivitas layanan konseling di sekolah.

Dalam konteks ini, model supervisi klinis dan reflektif menjadi pendekatan yang semakin dibutuhkan. Model supervisi klinis menekankan pada observasi langsung terhadap praktik konseling dan memberikan umpan balik yang spesifik, terukur, dan membangun. Sementara itu, supervisi reflektif mendorong konselor untuk melakukan introspeksi terhadap praktik kerjanya sendiri melalui diskusi, jurnal reflektif, atau kolaborasi kelompok sejawat (peer supervision). Kedua model ini bersifat pengembangan, bukan penghakiman, sehingga mampu membangun motivasi intrinsik konselor untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas layanan.

Supervisi juga perlu didukung oleh penggunaan teknologi digital yang sesuai dengan karakteristik abad 21. Penggunaan e-supervisi melalui platform video conference, formulir evaluasi daring, atau LMS (Learning Management System) memungkinkan proses supervisi yang fleksibel, terdokumentasi, dan efisien. Hal ini sangat penting terutama dalam situasi geografis Indonesia yang luas dan bervariasi. Dengan memanfaatkan teknologi, kepala sekolah atau pengawas BK dapat melakukan supervisi yang akurat tanpa terkendala ruang dan waktu.

Selain supervisi, sistem evaluasi layanan BK juga memegang peran sentral dalam menjamin mutu dan akuntabilitas layanan yang diberikan. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas pelaksanaan program (seperti jumlah sesi konseling atau kegiatan), tetapi juga harus menilai dampak layanan terhadap perubahan perilaku, kesejahteraan

psikologis, dan keberhasilan akademik peserta didik. Fadilah (2024) menyatakan bahwa dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru BK memiliki peran penting dalam mendampingi personalisasi pembelajaran, sehingga evaluasi terhadap efektivitas peran tersebut menjadi bagian penting dari pengembangan layanan.

Evaluasi yang ideal dalam layanan BK seharusnya menggunakan pendekatan formatif dan sumatif secara seimbang. Evaluasi formatif dilakukan selama proses layanan berjalan untuk memastikan ketercapaian tujuan jangka pendek dan umpan balik langsung. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah layanan berakhir untuk melihat perubahan jangka panjang dan mengukur keberhasilan strategi intervensi. Kedua pendekatan ini perlu dilengkapi dengan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel, seperti asesmen kebutuhan peserta didik, kuesioner kepuasan layanan, studi kasus, serta hasil observasi perilaku siswa.

Penting juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, termasuk siswa, orang tua, guru mata pelajaran, dan manajemen sekolah. Keterlibatan multi-pihak ini memungkinkan layanan konseling dinilai secara holistik, dan membuka peluang perbaikan berbasis data dan umpan balik nyata dari lingkungan peserta didik.

Dengan demikian, model supervisi dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling di abad 21 harus diarahkan untuk menciptakan sistem pembinaan yang transformatif dan kolaboratif. Tujuannya bukan semata-mata untuk menilai kinerja, tetapi untuk mendorong pengembangan profesional guru BK yang adaptif, reflektif, dan berdaya saing. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan dan

memanfaatkan peluang konselor di era global yang menuntut layanan bimbingan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan menghadapi transformasi besar yang ditandai oleh globalisasi, revolusi industri 4.0, serta percepatan perkembangan teknologi digital. Dalam konteks ini, peran konselor atau guru bimbingan dan konseling (BK) menjadi semakin strategis, tidak hanya sebagai pendamping psikologis peserta didik, tetapi juga sebagai agen perubahan, inovator layanan pendidikan, dan fasilitator pengembangan karakter.

Konselor dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensional, seperti kebutuhan untuk menguasai teknologi digital, menangani masalah psikososial yang kompleks seperti cyberbullying dan kecanduan digital, beradaptasi dengan perubahan regulasi pendidikan, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi. Meski demikian, tantangan tersebut juga membuka peluang baru yang dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti pengembangan layanan konseling digital, keterlibatan aktif dalam program pendidikan karakter, peluang peningkatan kompetensi melalui PPG dan sertifikasi, hingga perluasan peran di luar institusi pendidikan formal.

Selain itu, guru dan konselor memiliki peran penting dalam merespons tantangan dan peluang pembelajaran abad 21, khususnya dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Peran mereka dibutuhkan untuk menciptakan pembelajaran yang personal, adaptif, dan berbasis karakter, sekaligus membantu siswa menjadi pribadi yang tangguh secara akademik, sosial, dan emosional.

Dengan demikian, keberhasilan konselor dalam menjawab tantangan abad ke-21 sangat bergantung pada kemampuannya untuk terus belajar, berinovasi, membangun kolaborasi, dan mengintegrasikan pendekatan bimbingan dan konseling dengan perkembangan zaman. Transformasi peran ini harus dibarengi dengan dukungan dari lembaga pendidikan, kebijakan pemerintah, serta kesadaran kolektif akan pentingnya layanan konseling dalam mewujudkan pendidikan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, R., & Aswar, A. (2024). Peran Teknologi Digital dalam Transformasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 12(1), 55–68.
- Azwarini, T. (2024). Kompetensi Guru Abad 21 dalam Pendidikan Karakter dan Kesejahteraan Psikologis Siswa. *Jurnal Pendidikan Holistik*, 9(1), 22–35.
- Fadilah, A. (2024). Peran Guru BK dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangan Layanan Konseling di Era Digital. *Jurnal Bimbingan Konseling Inovatif*, 10(2), 45–59.
- Griffin, P., & McGaw, B. (dalam Imawanty & Bakhtiar, 2019). Model Kompetensi Abad 21 untuk Pendidikan Global. Dikutip dalam Imawanty, R., & Bakhtiar, B. (2019). *Supervisi Layanan Konseling Abad 21*. *Jurnal Konseling Aktual*, 8(1), 13–25.
- Imawanty, R., & Bakhtiar, B. (2019). *Supervisi Layanan Konseling Abad 21: Antara Harapan dan Realitas*. *Jurnal Konseling Aktual*, 8(1), 13–25.
- Lalusu, S., Usman, H., & Rahmawati, L. (2024). *Profesi Kependidikan Abad 21: Tuntutan, Tantangan, dan Inovasi*. Jakarta: Penerbit Edukasi Nusantara.
- Maharani, D., Setiawan, M., & Prasetyo, H. (2022). *Konseling Multikultural dalam Menghadapi Tantangan Psikososial Siswa di Era Digital*. *Jurnal Psikologi Konseling*, 14(3), 90–104.
- Sonia, M. (2023). *Transformasi Peran Guru dalam Pembelajaran Abad 21: Dari Pengajar ke Fasilitator*

Literasi Digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 11(2), 67–81.

Srilesnawati, E., Wulandari, R., & Rahayu, T. (2024). Profesionalisasi Guru BK melalui Sertifikasi dan Program Pengembangan Berkelanjutan. *Jurnal Profesi Pendidikan*, 7(1), 50–65.

BAB VI

PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, keberadaan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memegang peranan yang sangat strategis dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal secara menyeluruh. BK tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup perkembangan emosional, sosial, dan perencanaan karier siswa. Seiring dengan kompleksitas tantangan kehidupan yang semakin meningkat, kebutuhan akan layanan BK di sekolah menjadi semakin mendesak dan vital (Fратиwi dkk, 2025). Layanan ini memberikan dukungan bagi siswa untuk memahami diri, mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat, serta mengatasi berbagai persoalan pribadi maupun akademik dengan cara yang efektif dan terarah.

Program BK di sekolah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memenuhi kebutuhan siswa dan mendukung visi-misi pendidikan di sekolah. Penyusunan program ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan-tahapan manajemen yang meliputi asesmen kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Guru BK memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan mengelola program ini agar sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan sekolah (Aulia, Firman & Neviyerni, 2022). Dengan pendekatan yang terencana dan berbasis data hasil

asesmen, program BK dapat memberikan layanan yang tepat sasaran dan berkontribusi positif terhadap perkembangan peserta didik.

Lebih lanjut, program BK mencerminkan keseluruhan sistem organisasi layanan konseling di sekolah. Ini berarti bahwa program tersebut merupakan bagian dari perencanaan strategis yang menjadi fondasi pelaksanaan layanan BK secara menyeluruh. Dalam prosesnya, guru BK harus melakukan asesmen kebutuhan secara akurat sehingga intervensi yang diberikan, seperti bimbingan belajar dan pendampingan karier, dapat memberikan dampak yang maksimal. Dengan demikian, program BK tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada pencapaian tujuan yang jelas dan terukur (Aulia, Firman & Neviyerni, 2022).

Dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks, peran program BK menjadi semakin vital. Program ini membekali siswa dengan keterampilan membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Melalui layanan BK, siswa dibimbing untuk mengenali potensi diri, merencanakan masa depan secara realistis, dan mendapatkan dukungan ketika menghadapi masalah yang bersifat mendesak (Ulviani dkk, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa BK bukan sekadar layanan tambahan, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan yang berkontribusi pada keberhasilan dan kesejahteraan siswa.

Tujuan utama dari program BK di sekolah adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, memberikan bimbingan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pribadi, sosial,

akademik, dan karier, serta membekali siswa dengan keterampilan pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, program BK juga bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung perkembangan optimal bagi seluruh peserta didik. Dengan demikian, program BK menjadi elemen penting dalam menciptakan generasi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan masa depan (Fratiwi dkk, 2025).

Selain itu, keberhasilan program BK sangat bergantung pada penyusunan program yang matang dan sistematis, yang mencakup perencanaan semesteran hingga evaluasi berkelanjutan. Guru BK perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan siswa itu sendiri, guna menciptakan program yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan nyata siswa (Ulviani dkk, 2023). Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program menjadi kunci untuk meningkatkan mutu layanan, memastikan efektivitas, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program Bimbingan dan Konseling di sekolah terdiri dari empat komponen utama, yaitu layanan dasar, layanan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem (Departemen Pendidikan Nasional). Keempat komponen ini saling melengkapi dan bekerja secara terpadu untuk memberikan layanan yang komprehensif bagi peserta didik. Dengan demikian, program BK tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pendidikan, tetapi juga sebagai sistem yang membantu siswa menghadapi berbagai aspek kehidupan dengan lebih percaya diri, mandiri, dan terarah.

PEMBAHASAN

PROGRAM BK DI SEKOLAH

Bimbingan dan konseling adalah komponen penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi mendukung peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal, baik dalam aspek akademik, emosional, sosial, maupun karier. Seiring dengan semakin rumitnya tantangan hidup yang dihadapi, keberadaan layanan bimbingan dan konseling menjadi semakin dibutuhkan dalam proses pendidikan (Fратиwi dkk, 2025). Bimbingan dan konseling (BK) adalah bagian penting dari sistem pendidikan karena berperan membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal, baik dalam aspek akademik, emosional, sosial, maupun perencanaan karier. Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan hidup yang dihadapi oleh siswa, kebutuhan akan layanan BK menjadi semakin mendesak. BK membantu siswa memahami diri, membuat keputusan yang tepat, serta mengatasi berbagai persoalan kehidupan secara efektif.

Program adalah serangkaian kegiatan yang dirancang secara menyeluruh untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program Bimbingan dan Konseling (BK) dikembangkan oleh setiap guru BK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program sekolah. Program ini mencakup berbagai elemen yang sesuai dengan ketentuan pelaksanaan layanan BK, serta diarahkan untuk mencapai tujuan layanan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah. Pelaksanaan layanan BK dilakukan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Atas, hingga Perguruan Tinggi (Aulia, Firman & Neviyerni, 2022).

Penyusunan program BK merupakan bagian dari proses manajemen, di mana manajemen dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang terfokus pada pencapaian tujuan dengan memperhatikan mutu. Hasil yang berkualitas akan tercapai apabila seluruh proses pelaksanaan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam menyusun program BK perlu mengikuti tahapan- tahapan manajerial seperti asesmen kebutuhan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan layanan inti maupun penunjang, serta evaluasi (Aulia, Firman & Neviyerni, 2022).

Program BK mencerminkan keseluruhan struktur organisasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai bagian dari perencanaan strategis, program ini disusun oleh guru pembimbing sebagai elemen penting dalam sistem pendidikan sekolah (Aulia, Firman & Neviyerni, 2022). Maksudnya ialah bahwa program Bimbingan dan Konseling (BK) menggambarkan atau mewakili keseluruhan sistem dan susunan organisasi layanan BK di sekolah. Program ini merupakan bagian dari perencanaan strategis yang penting, di mana guru pembimbing bertanggung jawab menyusun program tersebut. Dengan demikian, program BK menjadi komponen krusial dalam mendukung sistem pendidikan di sekolah secara menyeluruh. Perancangan program juga harus didasarkan pada hasil asesmen kebutuhan yang tepat agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Asesmen yang akurat menjadi kunci dalam menentukan bentuk intervensi yang relevan, termasuk dalam bimbingan belajar, sehingga layanan yang diberikan benar-benar efektif dan tepat sasaran (Aulia, Firman & Neviyerni, 2022). Yang Dimana dalam merancang program Bimbingan dan Konseling (BK), guru BK harus terlebih dahulu melakukan asesmen

kebutuhan yang tepat dan akurat. Asesmen ini penting karena membantu memahami kondisi dan kebutuhan nyata siswa. Dengan informasi tersebut, guru BK dapat merancang bentuk intervensi atau layanan yang sesuai, khususnya dalam hal bimbingan belajar. Hal ini bertujuan agar layanan yang diberikan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa.

Program bimbingan dan konseling (BK) merupakan komponen esensial dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk mendukung peserta didik dalam mengembangkan potensi diri, menyelesaikan berbagai permasalahan pribadi, akademik, maupun karier, serta mencapai kesuksesan dalam kehidupannya (Bakhrudin dkk, 2024). Yang artinya Program Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan pribadi dan karier siswa. Melalui program BK, peserta didik dibantu untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, seperti kemampuan berpikir, keterampilan sosial, serta minat dan bakat.

Selain itu, program BK juga membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan diri sendiri (seperti kurang percaya diri, kecemasan), masalah belajar (seperti motivasi rendah, kesulitan memahami pelajaran), maupun persoalan yang berhubungan dengan pilihan karier. Tujuannya adalah agar siswa mampu tumbuh dan berkembang secara utuh, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang sukses dan bermakna, baik selama masa sekolah maupun setelah lulus.

Program Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan

untuk mendukung peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, menyelesaikan permasalahan pribadi, akademik, maupun karier, serta mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Di tengah tantangan kehidupan yang semakin kompleks, peran program BK semakin vital dalam membekali siswa dengan kemampuan membuat keputusan secara tepat (Ulviani dkk, 2023). Maksudnya ialah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks, program Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa. Program ini tidak hanya memberikan bimbingan dalam menyelesaikan masalah pribadi, sosial, akademik, atau karier, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan membuat keputusan yang tepat. Melalui layanan BK, siswa dibantu untuk memahami situasi yang mereka hadapi, mengevaluasi berbagai pilihan yang tersedia, serta mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang akan diambil. Dengan begitu, siswa dapat membuat keputusan secara bijaksana dan terarah, yang pada akhirnya akan membantu mereka menghadapi kehidupan dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab.

Setiap awal tahun pelajaran, guru BK atau konselor menyusun program kerja sebagai pedoman pelaksanaan layanan konseling bagi siswa. Sebelum menjalankan tugas ini, konselor sebaiknya melakukan asesmen kebutuhan terhadap peserta didik di kelas untuk mengidentifikasi masalah dan merancang layanan yang sesuai. Dari hasil asesmen ini, konselor dapat mengembangkan unit layanan yang tepat (Ulviani dkk, 2023).

Layanan BK tersusun dari serangkaian kegiatan yang dirancang dan dikelola secara terstruktur dalam waktu tertentu agar mencapai tujuan. Untuk memenuhi kebutuhan siswa,

guru BK perlu menyusun program secara sistematis, baik dalam bentuk program semester, bulanan, mingguan, maupun harian, dengan menggunakan instrumen yang telah distandarkan. Kualitas dan efektivitas kinerja guru BK sangat dipengaruhi oleh struktur dan isi program yang disusun (Ulviani dkk, 2023). Layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus direncanakan dan dikelola secara terstruktur dan sistematis. Guru BK perlu membuat program kerja yang terorganisir (misalnya program semesteran, bulanan, mingguan, atau harian) agar layanan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam menyusun program tersebut, guru BK harus menggunakan instrumen yang sudah distandarkan (seperti pedoman, alat ukur, atau format tertentu) agar hasilnya valid dan profesional.

Jika perencanaan program dilakukan secara kurang matang, maka pelaksanaan layanan BK di sekolah dapat menjadi tidak optimal, tidak profesional, dan berisiko menghasilkan output yang tidak maksimal. Maka dari itu, pemahaman guru BK terhadap program yang disusunnya menjadi sangat penting dalam menjamin ketertiban dan keberhasilan layanan (Ulviani dkk, 2023). Jadi, Perencanaan program BK yang kurang matang akan berdampak negatif pada pelaksanaan layanan, sehingga menjadi tidak optimal, kurang profesional, dan berpotensi menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Oleh karena itu, pemahaman yang baik dari guru BK terhadap program yang disusun sangat penting untuk memastikan kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan layanan BK di sekolah.

Dalam menyusun program BK, diperlukan langkah-langkah sistematis yang disesuaikan dengan kondisi sekolah

dan kebutuhan peserta didik. Pengembangan program berbasis asesmen kebutuhan yang tepat menjadi hal yang sangat krusial agar program benar-benar relevan. Hasil asesmen ini menjadi dasar dalam merancang intervensi yang sesuai, termasuk dalam layanan bimbingan belajar. Dengan berlandaskan pada kondisi aktual siswa, keberhasilan program akan lebih terjamin (Aulia dkk., 2022).

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang BK di Pendidikan Dasar dan Menengah, unsur yang harus termuat dalam program BK mencakup:

- ✓ rasional,
- ✓ visi dan misi,
- ✓ deskripsi kebutuhan,
- ✓ tujuan,
- ✓ komponen program,
- ✓ bidang layanan,
- ✓ rencana operasional (action plan),
- ✓ pengembangan tema/topik,
- ✓ evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut, serta anggaran.

Program BK sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara saling berkaitan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan program ini harus dilakukan secara terorganisir dan terkoordinasi (Ulviani dkk, 2023). Yang artinya bahwa program Bimbingan dan Konseling (BK) terdiri dari serangkaian kegiatan yang saling terkait dan dirancang untuk dijalankan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencapai target atau sasaran tertentu. Agar program berjalan dengan baik dan efektif, proses perencanaannya harus dilakukan secara sistematis, terstruktur,

dan melibatkan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait.

Menurut Aulia, Firman, dan Neviyerni (2022), terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh guru BK dalam menjalankan program, antara lain:

- ❖ menyusun rencana pelaksanaan program,
- ❖ menentukan strategi pencapaian tujuan program, dan
- ❖ merancang taktik atau langkah-langkah sistematis untuk pelaksanaan program.

Langkah-langkah ini bertujuan memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan, sehingga lebih mudah dalam mengukur keberhasilan program serta mengenali hambatan yang mungkin muncul. Pengawasan terhadap pelaksanaan program BK dilakukan oleh kepala sekolah, yang berperan sebagai supervisor dalam memberikan dukungan kepada seluruh staf, termasuk guru BK, agar mampu menjalankan tugas secara optimal. Yang artinya Pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling (BK) harus dilakukan melalui langkah-langkah terencana dan sistematis, yaitu penyusunan rencana program, penetapan strategi pencapaian tujuan, serta perancangan taktik pelaksanaan. Langkah-langkah ini membantu memberikan arah yang jelas, memudahkan evaluasi keberhasilan, dan mengidentifikasi hambatan. Selain itu, peran kepala sekolah sebagai supervisor sangat penting dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program agar berjalan secara optimal.

Agar program BK relevan dan sejalan dengan visi, misi, serta tujuan pendidikan sekolah, maka penyusunannya harus didasarkan pada data dan analisis kebutuhan siswa serta kebutuhan sekolah secara umum. Guru BK bertanggung jawab membuktikan bahwa program yang disusun benar-

benar sesuai, mendukung pencapaian tujuan sekolah, dan membawa dampak positif terhadap siswa. Setelah program selesai disusun, guru BK juga perlu melakukan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, dengan mengevaluasi keseluruhan komponen program serta dampaknya terhadap kegiatan di sekolah.

Evaluasi ini meliputi: (1) analisis terhadap isi dan proses penyusunan program, (2) pelaksanaan program, dan (3) hasil akhir serta dampaknya. Pelaksanaan program konseling menuntut adanya akuntabilitas dari guru BK sebagai bentuk tanggung jawab profesional.

Jenis – Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Terdapat beberapa jenis - jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu:

Layanan Orientasi

Layanan ini memberikan pengalaman awal bagi siswa baru atau orang tua siswa untuk mengenal lingkungan sekolah yang baru, sehingga siswa dapat beradaptasi dengan lebih mudah dan lancar.

Layanan Informasi

Layanan ini membantu siswa mendapatkan dan memahami berbagai informasi penting, seperti informasi pendidikan dan karier, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan ini bertujuan untuk menempatkan dan menyalurkan siswa ke kelas, kelompok belajar, jurusan, atau program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Layanan Pembelajaran

Layanan ini mendukung siswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, termasuk pengenalan masalah belajar, motivasi, keterampilan belajar, serta program pengayaan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan ini melibatkan beberapa siswa secara bersama-sama dalam kelompok untuk membahas topik tertentu yang bermanfaat bagi pengembangan diri mereka melalui interaksi kelompok.

Layanan Konseling Kelompok

Merupakan proses konseling yang dilakukan dalam kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok, di mana setiap anggota dapat mengungkapkan masalah pribadi yang kemudian dibahas bersama untuk mencari solusi.

Layanan Konseling Perorangan

Layanan ini memungkinkan siswa mendapatkan sesi tatap muka secara individu dengan konselor guna membahas dan mengatasi masalah pribadi yang dihadapi.

Layanan Konsultasi

Layanan ini diberikan oleh konselor kepada konsulti (klien) untuk memberikan wawasan, pemahaman, serta cara menangani kondisi atau masalah yang melibatkan pihak ketiga.

Layanan Mediasi

Layanan ini difokuskan pada penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih yang sedang mengalami ketidaksepakatan, dengan tujuan menghindari pertentangan yang berujung pada permusuhan atau kerusakan hubungan.

Layanan Advokasi

Layanan ini membantu siswa memperoleh kembali hak-hak mereka yang mungkin terabaikan atau disalahgunakan, sehingga mendukung perkembangan dan kelancaran pendidikan siswa sesuai dengan karakter cerdas dan terpuji yang diharapkan.

Jadi, Layanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup berbagai bentuk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa secara menyeluruh, mulai dari orientasi, penyediaan informasi, penempatan, pembelajaran, hingga layanan kelompok dan individu. Selain itu, terdapat juga layanan khusus seperti konsultasi, mediasi, dan advokasi yang berperan penting dalam membantu siswa mengatasi masalah pribadi, konflik, dan memperjuangkan hak-haknya. Dengan berbagai layanan ini, diharapkan siswa dapat berkembang secara optimal dalam aspek akademik, sosial, dan pribadi.

Strategi pengembangan program BK perlu menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Ada lima langkah strategis yang perlu dilakukan:

Identifikasi dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal ini bertujuan untuk memahami kebutuhan siswa melalui pengumpulan informasi terkait aspek sosial, emosional, akademik, serta tantangan yang mereka hadapi. Instrumen seperti angket, observasi, wawancara, DCM, AUM, dan sosiometri dapat digunakan.

Penyusunan Rencana Kerja

Guru BK menyusun rencana kerja yang sistematis, mencakup kegiatan, strategi, metode, sumber daya, tanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan yang terarah.

Kolaborasi dengan Stakeholder

Dalam menyusun program, guru BK perlu melibatkan pihak-pihak terkait, seperti guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan siswa. Kolaborasi ini memungkinkan tersedianya informasi yang lebih komprehensif, seperti catatan dan pengamatan siswa.

Pelaksanaan Kegiatan

Semua kegiatan dalam program BK harus dijalankan sesuai rencana. Guru BK bertanggung jawab atas pelaksanaan yang efektif dan tepat sasaran.

Evaluasi dan Pemantauan

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program. Data dari siswa, guru, dan pihak sekolah digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, observasi, atau alat evaluasi lainnya.

Dari penjelasan diatas, strategi pengembangan program Bimbingan dan Konseling (BK) harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu melalui lima langkah strategis utama, yaitu: identifikasi kebutuhan siswa, penyusunan rencana kerja yang sistematis, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, pelaksanaan kegiatan secara tepat sasaran, serta evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program BK yang disusun benar-benar relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan siswa secara optimal.

Tahapan dalam Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling

Selain itu juga Menurut (Bakhrudin dkk, 2024) terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling, yaitu:

Analisis Kebutuhan

Program bimbingan dan konseling dirancang berdasarkan data kebutuhan yang diperoleh dari peserta didik, sekolah, dan orang tua. Data ini dikumpulkan dan dianalisis untuk memperbarui tujuan serta rencana program. Pelaksanaan dan evaluasi program didasarkan pada prioritas kebutuhan yang telah diidentifikasi, dengan fokus pada

memenuhi kebutuhan dalam berbagai bidang layanan bimbingan dan konseling. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes, serta pengumpulan fakta melalui laporan diri, observasi, dan tes yang dilakukan oleh konselor, guru BK, atau pihak berwenang lainnya. Hasil identifikasi kemudian dianalisis untuk menentukan prioritas layanan yang harus diberikan.

Perencanaan

Perencanaan atau action plan dibuat sebagai respons terhadap kebutuhan yang telah diidentifikasi. Tahapan ini mencakup penetapan langkah-langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penunjukan pihak yang bertanggung jawab di setiap tahap, serta penyusunan jadwal pelaksanaan dalam program tahunan dan semesteran.

Pelaksanaan

Pelaksanaan program BK harus mempertimbangkan penggunaan data dan pengaturan waktu sesuai kalender akademik. Data yang dikumpulkan akan menjadi informasi penting untuk pelaksanaan dan evaluasi program, yang terbagi menjadi tiga kategori: data jangka pendek (setiap akhir kegiatan), data jangka menengah (kumpulan data dalam periode tertentu), dan data jangka panjang (hasil akhir dari keseluruhan rangkaian program, seperti evaluasi tahunan yang mencerminkan perkembangan siswa secara menyeluruh). Selain itu, alokasi waktu konselor sekitar 80-85% digunakan untuk layanan langsung kepada siswa, sementara 15-20% sisanya digunakan untuk kegiatan manajemen dan administrasi.

Evaluasi

Evaluasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai efisiensi, efektivitas, serta dampak program BK terhadap perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier peserta didik.

Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan program, bertujuan menjawab bagaimana perkembangan peserta didik sebagai hasil layanan BK. Laporan ini juga berfungsi sebagai bahan acuan untuk program lanjutan agar keberhasilan program dapat terjamin. Selain itu, laporan mendukung pengembangan profesional konselor atau guru BK.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan berdasarkan laporan hasil program dan pelaksanaan BK sebagai alat untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, mendukung peserta didik, menggunakan materi yang relevan, serta mendokumentasikan proses dan hasil secara mendetail. Tindak lanjut juga mencakup analisis efektivitas program untuk menentukan apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, hasil tindak lanjut dapat digunakan untuk mendorong perubahan dalam sistem sekolah dan meningkatkan kualitas program.

Penyusunan program bimbingan dan konseling melibatkan tahapan sistematis mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, hingga tindak

lanjut. Setiap tahap saling berkaitan dan bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif, sesuai kebutuhan peserta didik, serta mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier mereka secara optimal.

Layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu proses yang memerlukan evaluasi guna menilai sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi memiliki fungsi utama sebagai dasar penilaian atau pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, evaluasi berperan sebagai sarana untuk meninjau dan menganalisis pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dengan tujuan untuk memperbaiki serta mengembangkan program bimbingan secara khusus maupun sistem pendidikan secara menyeluruh (Hidayat, 2020).

Secara teknis, evaluasi program bimbingan dan konseling dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain:

- Melakukan peninjauan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
- Menilai sejauh mana efisiensi dan efektivitas program yang telah dijalankan.
- Mengidentifikasi jenis layanan yang telah dilaksanakan, belum terlaksana, atau perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
- Menilai tingkat partisipasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan program
- Memahami sejauh mana kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling (Hidayat, 2020).

Melalui evaluasi, dapat terlihat kinerja masing-masing individu yang berperan dalam pelaksanaan program, serta menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk

perbaiki program di masa mendatang. Hal ini menegaskan bahwa evaluasi memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan kualitas layanan bimbingan dan konseling (Hidayat, 2020).

Jadi, evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan program, meninjau pelaksanaan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi program sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Melalui evaluasi yang berkala dan menyeluruh, guru BK dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, memastikan akuntabilitas, serta menjamin mutu layanan yang mendukung perkembangan optimal peserta didik secara berkelanjutan.

Dalam buku *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan BK dalam Konseling Jalur Pendidikan Formal* (Departemen Pendidikan Nasional), dijelaskan bahwa program Bimbingan dan Konseling (BK) terdiri dari empat komponen layanan utama, yaitu:

Layanan Dasar

Layanan ini bertujuan memberikan bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan yang dirancang secara terstruktur dalam bentuk pembelajaran klasikal atau kelompok. Tujuan utamanya adalah membentuk perilaku positif jangka panjang yang sesuai dengan tahapan perkembangan serta tugas-tugas perkembangan individu. Layanan dasar ini mengacu pada standar kompetensi kemandirian untuk membantu konseli dalam mengembangkan

kemampuan mengambil keputusan dan menjalani kehidupan secara mandiri (Putri Ekasari, 2019)

Layanan Perencanaan Individual

Layanan ini berfokus pada pendampingan kepada konseli dalam merancang dan melaksanakan rencana masa depannya. Hal ini dilakukan berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap potensi, kekurangan diri, serta peluang yang tersedia di lingkungan sekitar, sehingga konseli dapat mengambil langkah yang tepat sesuai tujuan hidupnya

Layanan Responsif

Layanan responsif diberikan kepada konseli yang sedang mengalami permasalahan atau kebutuhan mendesak yang dapat menghambat pencapaian perkembangan jika tidak segera ditangani. Bentuk bantuan ini bisa berupa konseling individual, penanganan krisis, konsultasi dengan orang tua atau guru, hingga rujukan kepada tenaga ahli lain sesuai kebutuhan.

Dukungan Sistem

Komponen ini mencakup berbagai kegiatan manajerial, sistem kerja, sarana prasarana (seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi), serta pengembangan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Meskipun tidak langsung melibatkan konseli, dukungan sistem sangat penting dalam menunjang kelancaran layanan BK dan membantu konseli secara tidak langsung dalam proses perkembangannya.

Jadi secara garis besar, program Bimbingan dan Konseling (BK) mencakup empat komponen layanan utama yang saling mendukung untuk membantu perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Layanan dasar bertujuan membentuk perilaku positif dan kemandirian siswa. Layanan perencanaan individual membantu siswa merancang masa depan berdasarkan potensi diri. Layanan responsif menangani masalah mendesak yang dialami siswa agar tidak menghambat perkembangan mereka. Sementara itu, dukungan sistem menjadi landasan penting bagi kelancaran pelaksanaan layanan BK melalui pengelolaan manajemen, sarana, dan peningkatan profesionalisme konselor. Keempat komponen ini bekerja secara terpadu untuk mendukung keberhasilan siswa dalam menjalani kehidupan secara mandiri dan optimal.

KESIMPULAN

Program Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah merupakan bagian esensial dari sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara menyeluruh. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga mencakup pengembangan emosional, sosial, serta perencanaan karier siswa. Dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks, keberadaan layanan BK menjadi sangat penting karena mampu memberikan dukungan langsung kepada siswa dalam memahami diri, mengatasi permasalahan, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.

Penyusunan program BK dilakukan secara terencana dan sistematis, melalui tahapan manajemen yang meliputi

asesmen kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Guru BK atau konselor sekolah bertanggung jawab dalam menyusun program ini agar sesuai dengan kebutuhan nyata siswa serta selaras dengan visi dan misi sekolah. Program BK bukanlah kumpulan kegiatan yang bersifat insidental, melainkan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pemanfaatan data asesmen, serta kolaborasi antar pihak yang terlibat.

Program BK yang efektif mencerminkan struktur organisasi layanan konseling yang kuat di sekolah. Dalam pelaksanaannya, program ini harus memuat unsur-unsur seperti rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan topik, evaluasi, hingga anggaran. Semua unsur tersebut memastikan bahwa layanan BK berjalan sesuai arah dan sasaran yang tepat. Keempat komponen utama layanan dalam program BK yaitu layanan dasar, layanan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan layanan yang komprehensif.

Berbagai jenis layanan BK seperti layanan orientasi, informasi, penempatan, pembelajaran, bimbingan kelompok, konseling individual dan kelompok, konsultasi, mediasi, hingga advokasi disediakan guna memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Strategi pelaksanaan program BK juga harus mencakup identifikasi kebutuhan secara akurat, penyusunan rencana kerja yang sistematis, pelibatan stakeholder seperti orang tua, guru mata pelajaran, dan siswa, pelaksanaan

kegiatan secara efektif, serta evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar berdampak pada perkembangan siswa secara nyata.

Evaluasi terhadap program BK menjadi langkah penting dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan layanan. Melalui evaluasi, guru BK dapat menilai efektivitas dan efisiensi program, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun perbaikan yang diperlukan. Evaluasi juga menjadi bukti akuntabilitas profesional guru BK terhadap keberhasilan siswa dan sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program BK di sekolah merupakan perangkat strategis yang tidak hanya mendukung keberhasilan pendidikan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk siswa menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan hidup secara positif. Program ini harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual siswa dan sekolah, serta dilaksanakan dengan pendekatan yang profesional dan kolaboratif agar mampu mencapai tujuan layanan bimbingan dan konseling secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D., Firman, & Neviyerni. (2022). Penyusunan Program BK di Tingkat SMA. *Education & Learning*, 2(2), 92-97.
- Bakhrudin, A. H., Syahputra, M. R. A., Amalda, M. N. P. A., Az-Zahra, T. A., Damayanti, D., & Choirunisa, L. (2024). Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, 4(2), 595–600.
- Fратиwi, R., Syukur, Y., & Sukma, D. (2025). Penerapan Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 2(4), 1262–1267.
- Hidayat, A. (2020). Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling. *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 137–150.
- Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 4(2), 39–42.
- Putri, A. E. (2019). Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka. *Sosial*, 2(4), 288–302.
- Ulviani, T., Syukur, Y., & Ahmad, R. (2023). Strategi Penyusunan Program BK di Madrasah.

BAB VII

IMPLIKASI PROFESIONALISASI BK DI SEKOLAH

1. Pengertian Profesionalisasi BK

A. Definisi Profesionalisasi dalam Konteks BK

Profesionalisasi BK adalah suatu proses peningkatan mutu dan pengakuan terhadap profesi bimbingan dan konseling agar diakui sebagai profesi yang memiliki standar kompetensi, etika kerja, dan tanggung jawab profesional yang tinggi.

Dalam konteks pendidikan di sekolah, profesionalisasi BK berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling:

- ✚ Dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi sebagai konselor.
- ✚ Berbasis pada pendekatan ilmiah, etik, dan sistematis.
- ✚ Diakui secara hukum dan organisasi profesi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.

B. Ciri-Ciri Profesionalisme Konselor di Sekolah

1). Kompeten secara Akademik dan Praktis

Memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) dan profesi konseling serta memahami teori dan praktik konseling.

2). Menjunjung Kode Etik Profesi

Mentaati aturan moral dan etik konselor seperti menjaga kerahasiaan, netralitas, dan penghargaan terhadap klien.

3). Berorientasi pada Layanan Siswa

Fokus pada pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik secara menyeluruh (akademik, sosial, pribadi, karier).

- 4). Melaksanakan Tugas Berdasarkan Standar Operasional
Memberikan layanan BK yang terstruktur: layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem.
- 5). Berkomitmen terhadap Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Aktif dalam mengikuti pelatihan, seminar, sertifikasi, dan pengembangan diri.
- 6). Mampu Bekerja Sama dengan Stakeholder Sekolah
Membangun sinergi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan lembaga eksternal.

C. Standar Kompetensi Konselor (berdasarkan ABKIN & Permendiknas No. 27/2008)

Standar kompetensi konselor profesional di sekolah sebagaimana dirumuskan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan Permendiknas No. 27 Tahun 2008 menetapkan empat domain kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor sekolah. Kompetensi ini tidak hanya menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling, tetapi juga menjadi standar dalam penilaian profesionalisme dan efektivitas kinerja konselor di institusi pendidikan.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merujuk pada kemampuan konselor dalam memahami dan mendukung proses belajar serta perkembangan peserta didik secara holistik. Konselor harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik secara individual, baik dari aspek perkembangan usia, latar belakang sosial-budaya, maupun potensi serta kebutuhan unik masing-masing siswa. Konselor juga dituntut mampu merancang program layanan BK yang terstruktur dan sesuai kebutuhan siswa, termasuk menetapkan tujuan layanan, menyusun kegiatan, serta membuat instrumen evaluasi. Selain itu, pelaksanaan dan evaluasi program BK juga merupakan bagian integral dari kompetensi ini, di mana konselor harus memastikan program yang dijalankan efektif dan relevan dengan dinamika perkembangan siswa.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian mencerminkan kualitas pribadi dan integritas moral yang harus dimiliki seorang konselor. Dalam menjalankan tugasnya, konselor diharapkan memiliki integritas yang tinggi, yakni konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Sikap seperti jujur, empatik, sabar, rendah hati, serta bertanggung jawab menjadi nilai dasar dalam membangun kepercayaan dari siswa dan pihak lain di lingkungan sekolah. Konselor juga harus mampu menjaga stabilitas emosi, menjadi teladan dalam bertindak, dan tidak memanfaatkan profesinya untuk kepentingan pribadi. Tanpa fondasi kepribadian yang kuat, seorang konselor akan sulit menjalankan peran sebagai pendamping yang dapat dipercaya dan dihormati.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan konselor untuk menjalin komunikasi dan interaksi yang efektif dengan berbagai pihak. Konselor harus mampu berkomunikasi dengan siswa secara empatik dan terbuka, serta menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan guru, wali kelas, kepala sekolah, staf administrasi, dan orang tua siswa. Lebih dari itu, konselor juga perlu membangun jaringan kerja sama yang produktif, baik di dalam maupun di luar sekolah, misalnya dengan lembaga psikologi, pusat layanan kesehatan mental, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kompetensi sosial sangat penting dalam memperluas jangkauan dan efektivitas layanan BK serta dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan pilar utama yang menunjukkan tingkat keahlian teknis konselor dalam bidang Bimbingan dan Konseling. Konselor wajib menguasai berbagai teori-teori konseling, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, serta pendekatan intervensi yang relevan seperti CBT, pendekatan humanistik, sistemik, atau behavioristik. Tidak hanya menguasai secara teoritik, konselor juga harus mampu mengaplikasikan teknik konseling secara tepat sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan latar belakang siswa. Selain itu, kompetensi ini mencakup pemahaman dan penerapan kode etik profesi, yang menjadi panduan moral dan profesional dalam seluruh kegiatan konseling, mulai dari membangun hubungan konseling hingga menjaga kerahasiaan dan hak-hak konseli. Profesionalisme juga mengharuskan konselor untuk terus belajar, mengikuti

perkembangan ilmu, dan melakukan refleksi atas praktik yang dijalankan.

2. Peran Konselor Sekolah dalam Konteks Profesional

A. Peran Konselor sebagai Pendidik, Fasilitator, Advokat, dan Konsultan

1. Sebagai Pendidik (Educator)

- ❖ Konselor berperan dalam mendidik siswa tentang keterampilan hidup (life skills), pengambilan keputusan, pengelolaan emosi, hubungan sosial, dan perencanaan karier.
- ❖ Mengajar melalui layanan bimbingan klasikal (di kelas) tentang topik-topik seperti bullying, kecemasan, disiplin, dan pilihan karier.
- ❖ Membantu siswa membangun nilai, sikap positif, dan karakter yang sehat.

2. Sebagai Fasilitator

- ❖ Konselor memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan siswa sesuai tugas perkembangannya (pribadi, sosial, akademik, dan karier).
- ❖ Menyediakan ruang yang aman dan suportif bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan mengeksplorasi solusinya sendiri.
- ❖ Menghubungkan siswa dengan sumber daya yang tersedia di sekolah maupun luar sekolah.

3. Sebagai Advokat Siswa

- ❖ Konselor memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan siswa, terutama yang mengalami hambatan belajar, sosial, atau emosional.
- ❖ Menjadi suara siswa dalam forum sekolah, termasuk dalam kasus diskriminasi, kekerasan, atau ketidakadilan.
- ❖ Mempromosikan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman bagi semua siswa.

4. Sebagai Konsultan

- ❖ Konselor memberikan masukan profesional kepada guru, kepala sekolah, dan orang tua mengenai pendekatan terbaik untuk mendukung siswa.
- ❖ Membantu guru memahami dinamika perilaku siswa dan strategi yang dapat digunakan di kelas.
- ❖ Konselor juga memberikan rekomendasi intervensi terhadap masalah siswa berdasarkan hasil asesmen atau observasi.

B. Perbedaan antara Peran Guru dan Konselor Profesional

Aspek Guru Konselor Profesional

Fokus utama Menyampaikan materi pelajaran, membimbing akademik Memberikan layanan bimbingan dan konseling (pribadi, sosial, akademik, karir)

Hubungan dengan siswa Guru bersifat instruksional dan penilaian Konselor bersifat suportif dan non-penilaian Waktu interaksi Terjadwal dalam jam pelajaran Fleksibel sesuai

kebutuhan siswa Evaluasi siswa Berdasarkan hasil belajar
Berdasarkan kebutuhan perkembangan siswa Latar belakang
pendidikan S1 Pendidikan bidang mata pelajaran S1 + Profesi
BK (Konseling) Kegiatan utama Mengajar dan menilai
Konseling, asesmen, perencanaan layanan BK

C. Penguatan Peran Konselor dalam Tim Manajemen Sekolah

Agar peran konselor benar-benar maksimal dan profesional, penting dilakukan penguatan dalam beberapa aspek berikut:

1. Pengakuan Struktural

Konselor harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan sekolah, terutama dalam hal kebijakan siswa, kurikulum bimbingan, dan iklim sekolah.

Diakui sebagai bagian penting dari tim manajemen sekolah sejajar dengan wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru BK lainnya.

2. Kolaborasi Strategis

Bekerja sama dengan guru, wali kelas, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan untuk menyusun program layanan bimbingan yang relevan dan integratif.

Ikut merancang program pembinaan karakter, pencegahan kekerasan, pengembangan budaya sekolah, dan penguatan kesehatan mental siswa.

3. Dukungan Fasilitas dan Kebijakan

Sekolah menyediakan ruang konseling yang memadai, privasi, dan sarana penunjang layanan.

Kepala sekolah mendukung konselor untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan pengembangan keprofesian.

4. Evaluasi Kinerja yang Sesuai

Evaluasi kinerja konselor dilakukan berdasarkan indikator profesional BK, bukan indikator guru mata pelajaran.

Penilaian mencakup aspek layanan konseling, perencanaan program, evaluasi program BK, dan pelaksanaan etika profesi.

3. Kualifikasi dan Sertifikasi Konselor Profesional

A. Pendidikan dan Pelatihan yang Dibutuhkan

Untuk menjadi konselor profesional di sekolah, seseorang harus melalui jalur pendidikan formal dan pelatihan khusus, sesuai dengan regulasi pemerintah dan standar organisasi profesi.

1. Kualifikasi Pendidikan

Minimal lulusan S1 Bimbingan dan Konseling atau Psikologi (dengan konversi ke BK).

Lanjut dengan pendidikan Program Profesi Konselor (PPK) atau Pendidikan Profesi Guru BK (PPG BK) di beberapa universitas yang ditunjuk.

2. Kompetensi yang Dikembangkan dalam Pendidikan BK

Penguasaan teori-teori konseling: humanistik, behavioristik, kognitif, dll.

Pengembangan keterampilan praktik konseling: wawancara, observasi, asesmen, dan intervensi.

Etika profesi konseling dan dinamika hubungan konselor-konseli.

Kemampuan merancang dan mengevaluasi program layanan BK.

3. Pelatihan Tambahan

Workshop, seminar, pelatihan khusus (misalnya konseling trauma, karier, anak-anak).

Pelatihan penggunaan alat tes psikologis dan instrumen asesmen.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

B. Sertifikasi Profesi dan Lisensi Konselor

Sertifikasi dan lisensi menjadi bukti legalitas dan profesionalitas seseorang dalam menjalankan praktik sebagai konselor di sekolah.

1. Sertifikasi Profesi

- a) Sertifikat diberikan setelah menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Konselor/ PPG BK.
- b) Diterbitkan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
- c) Merupakan syarat untuk mengikuti sertifikasi pendidik, khususnya guru BK yang bekerja di sekolah.

2. Lisensi Konselor Profesional

- a) Dikeluarkan oleh organisasi profesi seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia).

b) Menunjukkan bahwa seorang konselor:

- Telah mengikuti pelatihan tertentu.
- Memahami dan menaati kode etik profesi.
- Layak menjalankan layanan konseling secara profesional.

3. Registrasi dan Akreditasi

Konselor juga dapat terdaftar di lembaga seperti LSP-P1 (Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan) untuk memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional (misalnya melalui skema SKKNI – Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

C. Implikasi terhadap Mutu Layanan BK di Sekolah

Konselor yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesional akan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap mutu layanan BK, antara lain:

1. Layanan BK yang Ilmiah dan Terstruktur

- Konselor mampu menyusun program layanan berdasarkan data dan asesmen kebutuhan siswa.
- Intervensi dan pendekatan dilakukan secara tepat, berbasis teori dan hasil kajian.

2. Konseling yang Efektif dan Aman

- Konselor memahami etika profesi, menjaga kerahasiaan dan membangun hubungan yang sehat dengan siswa.
- Siswa merasa aman dan percaya untuk membuka diri dalam proses konseling.

3. Dukungan yang Lebih Luas Terhadap Siswa
 - Konselor bersertifikat dapat menangani kasus-kasus kompleks seperti perundungan, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dll, dengan tepat dan profesional.
 - Mereka juga mampu merujuk ke profesional lain jika dibutuhkan (psikolog, psikiater, dll).
4. Peningkatan Citra Profesi BK
 - Keberadaan konselor yang profesional mendorong penghargaan lebih tinggi terhadap peran layanan BK di sekolah.
 - Stakeholder sekolah (guru, kepala sekolah, orang tua) lebih percaya terhadap kontribusi konselor.
5. Meningkatkan Prestasi dan Kesejahteraan Siswa
 - Layanan BK yang profesional terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar, keterampilan sosial, dan keseimbangan emosional siswa, yang berdampak pada prestasi akademik dan kualitas hidup siswa secara umum.
4. Etika dan Kode Etik Profesi Konselor

A. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Konseling

Kode etik profesi konselor disusun sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan layanan konseling. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar etika konseling yang harus dijunjung oleh setiap konselor:

1. Kerahasiaan (Confidentiality)

Konselor wajib menjaga semua informasi pribadi dan data siswa yang diperoleh selama proses konseling.

Informasi hanya dapat dibuka dengan izin tertulis dari konseli atau dalam kondisi tertentu (misalnya: jika konseli dalam bahaya).

2. Otonomi (Autonomy)

Menghormati hak siswa untuk membuat keputusan sendiri.

Konselor tidak boleh memaksakan pilihan atau solusi kepada konseli.

3. Nonmaleficence (Tidak Merugikan)

Konselor harus menghindari tindakan yang dapat merugikan fisik, mental, atau emosional konseli.

Hindari penggunaan teknik yang tidak teruji atau tidak sesuai etika.

4. Beneficence (Kebaikan dan Kepedulian)

Konselor harus berupaya untuk melakukan hal-hal yang memberikan manfaat bagi konseli.

Layanan BK bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan kesejahteraan siswa.

5. Keadilan (Justice)

Konselor wajib memberikan layanan yang adil dan setara kepada semua siswa, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, budaya, agama, gender, atau kemampuan.

6. Integritas Profesional

Konselor harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan profesionalnya.

Tidak boleh menjalin hubungan yang melanggar batas profesional (misalnya hubungan romantis dengan konseli).

B. Studi Kasus Pelanggaran Etika dan Dampaknya

Berikut adalah contoh pelanggaran etika dalam praktik konseling di sekolah beserta dampaknya:

Kasus 1: Melanggar Kerahasiaan Konseli

Situasi: Seorang konselor menceritakan masalah pribadi siswa kepada guru lain tanpa izin.

Dampak:

- Siswa merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan.
- Reputasi konselor rusak.
- Konseli enggan membuka diri atau melanjutkan konseling.
- Bisa terjadi sanksi dari pihak sekolah atau organisasi profesi.

Kasus 2: Memberi Nasihat Agama Secara Dogmatis

Situasi: Konselor memberikan tekanan religius dalam sesi konseling meskipun siswa berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

Dampak:

- Pelanggaran prinsip otonomi dan keadilan.
- Siswa merasa tidak dihargai dan terdiskriminasi.

- Konselor dianggap tidak profesional dan bisa dikenai teguran.

Kasus 3: Terlibat dalam Hubungan Tidak Profesional

Situasi: Konselor menjalin hubungan pribadi/intim dengan konseli.

Dampak:

- Merusak batas etika profesional.
- Mengganggu perkembangan psikologis siswa.
- Berpotensi terkena sanksi berat seperti pencabutan lisensi profesi.

C. Peran Kode Etik dalam Menjaga Profesionalisme

Kode etik berfungsi sebagai pilar moral dan profesional bagi konselor dalam memberikan layanan yang aman, bertanggung jawab, dan bermartabat.

Fungsi dan Peran Utama Kode Etik:

1. Memberikan Panduan Tindakan

Kode etik menjelaskan mana tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam praktik konseling.

2. Melindungi Konseli

Konseli (siswa) terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran profesional oleh konselor.

3. Menjaga Kepercayaan Publik

Dengan mematuhi kode etik, konselor akan dipercaya oleh siswa, orang tua, dan rekan kerja di sekolah.

4. Menjaga Martabat Profesi

Kode etik membedakan konselor profesional dari praktisi yang tidak berkompeten atau tidak etis.

5. Dasar Evaluasi Kinerja dan Disiplin Profesi

Organisasi profesi seperti ABKIN menggunakan kode etik sebagai dasar untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

6. Meningkatkan Kualitas Layanan

Etika yang ditegakkan mendorong konselor untuk terus meningkatkan kapasitas profesional dan empati terhadap konseli.

D. Organisasi yang Mengatur Kode Etik Konselor:

- ✓ ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia)
- ✓ IPKIN (Ikatan Psikolog Klinis Indonesia) – dalam konteks konselor psikologi.
- ✓ Kode etik biasanya diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan dunia pendidikan.

6. Implikasi Profesionalisasi Terhadap Layanan BK di Sekolah

Profesionalisasi konselor di sekolah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara kerja, kualitas, serta dampak layanan Bimbingan dan Konseling (BK) terhadap perkembangan peserta didik. Layanan BK tidak lagi sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan, tetapi menjadi bagian integral yang strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dengan konselor yang profesional, layanan BK dirancang secara terencana dan terstruktur,

artinya program disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa, data empirik, serta selaras dengan kurikulum dan visi sekolah. Konselor menyusun kalender layanan, program tahunan, silabus bimbingan, hingga instrumen evaluasi, sehingga layanan tidak berjalan secara acak atau reaktif, tetapi sistematis dan terukur.

Selain itu, layanan BK yang profesional menggunakan teknik dan pendekatan ilmiah yang telah teruji efektivitasnya, seperti Cognitive Behavior Therapy (CBT), Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), konseling naratif, dan lain-lain. Konselor juga menguasai pendekatan konseling yang sesuai dengan kondisi siswa, baik pendekatan perkembangan (developmental), pencegahan (preventif), maupun penanganan masalah (kuratif). Ini menunjukkan bahwa profesionalisme konselor menuntut penguasaan teori dan kemampuan menerapkannya dalam praktik nyata di sekolah.

Layanan BK yang profesional juga berorientasi pada perkembangan siswa secara holistik. Konselor tidak hanya fokus pada peningkatan prestasi akademik siswa, tetapi juga mendampingi siswa dalam pengembangan aspek pribadi, sosial, serta persiapan karier. Dengan pendampingan ini, siswa dibantu untuk memahami dan menerima diri mereka, mengelola tekanan sosial, mengambil keputusan yang tepat, serta merencanakan masa depan secara realistis. Ini menjadikan layanan BK sebagai salah satu fondasi pembentukan karakter dan kemandirian siswa.

Salah satu pilar penting profesionalisme adalah aspek etika dan tanggung jawab profesional. Konselor yang profesional menjalankan layanan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi, seperti menjaga kerahasiaan informasi konseli, menghormati hak siswa, serta membangun hubungan

yang sehat dan profesional. Etika menjadi rambu agar layanan tidak menyalahi batasan moral dan hukum, sekaligus membangun kepercayaan antara siswa dan konselor.

Akhirnya, profesionalisasi juga menuntut konselor untuk responsif terhadap isu-isu mutakhir yang dihadapi peserta didik. Dalam era digital dan masyarakat yang terus berubah, konselor harus peka dan siap menangani permasalahan baru seperti bullying, kekerasan seksual, kecanduan gawai, krisis identitas gender, masalah kesehatan mental, dan tekanan akademik. Layanan BK yang adaptif terhadap konteks ini akan sangat relevan dan dibutuhkan siswa sebagai dukungan emosional dan sosial yang nyata. Dengan demikian, profesionalisasi konselor tidak hanya meningkatkan kualitas layanan BK, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan layanan yang bermakna, kontekstual, dan berdampak positif bagi kehidupannya.

B. Layanan BK Berbasis Data dan Kebutuhan Siswa

Salah satu indikator profesionalisme konselor adalah kemampuan menggunakan data untuk merancang dan mengevaluasi layanan BK.

1. Identifikasi Kebutuhan

Melalui survei, observasi, wawancara, dan instrumen asesmen (psikotes, inventori minat, dll). Misalnya: jika banyak siswa mengalami kecemasan ujian, maka disusun program manajemen stres.

2. Perencanaan Layanan Berdasarkan Data

Program BK dirancang tidak berdasarkan asumsi, tetapi dari data nyata. Contoh: tingkat kenakalan meningkat → diadakan konseling kelompok perilaku adaptif.

3. Evaluasi dan Monitoring Layanan

Setiap kegiatan layanan BK memiliki indikator keberhasilan, rubrik evaluasi, dan pelaporan. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program berikutnya.

4. Dokumentasi Profesional

Konselor membuat dokumentasi lengkap dan rapi: catatan konseling, laporan kegiatan, grafik perkembangan siswa, dll.

C. Implementasi Layanan Individual, Kelompok, dan Klasikal secara Profesional

Profesionalisasi mendorong pelaksanaan tiga bentuk utama layanan konseling secara benar, efektif, dan bermutu:

1. Layanan Konseling Individual

Ciri: Tatap muka 1:1 antara konselor dan siswa.

Tujuan: Mengatasi masalah pribadi secara mendalam (misal: krisis keluarga, gangguan emosional, masalah harga diri).

Profesionalisasi:

- Gunakan teknik wawancara konseling yang etis dan empatik.
- Menyusun kontrak konseling, menjaga kerahasiaan, dan membuat catatan proses.
- Menggunakan pendekatan psikologis yang tepat berdasarkan masalah siswa.

2. Layanan Konseling Kelompok

Ciri: Konselor membimbing 5–10 siswa dalam sesi kelompok dengan tema tertentu.

Tujuan: Mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, penyelesaian masalah, dll.

Profesionalisasi:

- Fasilitasi diskusi, latihan, dan refleksi dengan struktur yang jelas.
- Merancang tema sesuai kebutuhan (contoh: “membangun percaya diri”, “anti bullying”).
- Menciptakan iklim saling menghargai dan aman dalam kelompok.

3. Layanan Bimbingan Klasikal

Ciri: Disampaikan kepada seluruh siswa dalam kelas (biasanya 30–40 orang).

Tujuan: Pendidikan pencegahan dan pengembangan (life skills, karier, belajar efektif).

Profesionalisasi:

- Menggunakan media presentasi, metode partisipatif (diskusi, simulasi).
- Mengintegrasikan materi dengan kurikulum sekolah.
- Dapat diukur efektivitasnya melalui pre-post test atau umpan balik siswa.

Kolaborasi Konselor dengan Pihak Sekolah dan Orang Tua

Kolaborasi antara konselor sekolah dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah dan orang tua merupakan pilar penting dalam menunjang keberhasilan layanan Bimbingan dan Konseling (BK). Konselor tidak dapat bekerja secara terpisah; keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu membangun komunikasi dan kerja sama

yang efektif dengan guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, tenaga kependidikan, serta orang tua atau wali siswa. Dalam konteks kerja sama antar guru dan wali kelas, konselor berperan sebagai mitra strategis dalam mengidentifikasi permasalahan siswa, baik yang berkaitan dengan prestasi belajar, perilaku, maupun aspek psikososial. Konselor dapat memberikan masukan dan strategi penanganan berdasarkan asesmen psikologis dan observasi perilaku siswa, sementara guru dan wali kelas memberikan data akademik dan kedisiplinan yang terjadi di kelas. Kolaborasi ini mempercepat intervensi dan menghasilkan pendekatan yang menyeluruh terhadap kebutuhan siswa.

Sementara itu, dalam menjalin hubungan dengan orang tua, konselor berperan sebagai jembatan antara dunia sekolah dan kehidupan keluarga. Konselor memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai perkembangan anak, tantangan yang dihadapi di sekolah, serta peran penting keluarga dalam mendukung pertumbuhan anak. Melalui pertemuan orang tua, konsultasi pribadi, atau edukasi parenting, konselor dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak, terutama pada masa-masa kritis seperti masa pubertas, peralihan jenjang pendidikan, atau ketika siswa menghadapi kesulitan belajar. Kolaborasi yang solid antara konselor dan orang tua menciptakan lingkungan dukungan ganda—di rumah dan di sekolah—yang sangat penting bagi kesejahteraan dan keberhasilan siswa.

Lebih jauh lagi, peran konselor dalam menciptakan budaya sekolah yang suportif sangat signifikan. Konselor bukan hanya penyedia layanan individual, tetapi juga agen perubahan yang mendorong terciptanya iklim sekolah yang inklusif, sehat secara emosional, dan responsif terhadap

kebutuhan siswa. Melalui program-program pengembangan karakter, pembinaan perilaku positif, serta advokasi terhadap siswa yang rentan, konselor membantu membangun sistem sekolah yang ramah anak, bebas dari diskriminasi, dan mendukung setiap individu untuk berkembang secara optimal. Konselor juga dapat berperan aktif dalam tim manajemen sekolah untuk merancang kebijakan yang memperhatikan aspek kesejahteraan psikologis siswa dan menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sekolah. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat dan peran aktif konselor akan memperkuat ekosistem pendidikan yang mendukung keberhasilan akademik dan perkembangan karakter siswa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & Kurniawati, M. (2021). Pelaksanaan kode etik konselor dalam hubungan ganda di sekolah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(1), 21–30.
- Apriliani, V., Nadhirah, N. A., & Budiman, N. (2025). Etika konselor dalam proses konseling lintas budaya dan keterampilan multikultural konselor. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(2), 187–197.
- Athalia A. Aptanta Tumanggor, J., & Jamaris. (2022). Etika konselor profesional dalam Bimbingan dan Konseling. *Efektor*, Universitas PGRI Kediri, 9(1a), 54–60.
- Awalya, A., Indriyanti, D. R., Arinata, F. S., Khiyarusoleh, U., & Istiqomah, M. (2021). Peningkatan kompetensi kolaborasi konselor sekolah melalui program pelatihan di Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Kabupaten Semarang. *Jurnal Center for Collaborative Education, (JCE UNNES)*.
- Maulida Fitri, F., Firman, & Neviyarni, S. (2024). Kolaborasi personil sekolah dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di era Kurikulum Merdeka. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12), 369–378.
- Menyoroti perlunya komitmen kepribadian dan etika konselor dalam melindungi kepercayaan konseli .
- Nugraha, A., & Rahman, F. A. (2017). Strategi kolaborasi orangtua dengan konselor dalam mengembangkan sukses studi siswa. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 3(1), 128–136.
- Ramdani, R., Nasution, A. P., Ramanda, P., Sagita, D. D., & Yanizon, A. (2020). Strategi kolaborasi dalam manajemen pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. *Journal Innovation in Education*, 2(4), 87–92.

BAB VIII

KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konselor atau guru BK merupakan bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan membantu individu mencapai perkembangan optimal dalam aspek pribadi, sosial, akademik, dan karier. Konselor sebagai pelaksana layanan BK dituntut tidak hanya memiliki kompetensi profesional, tetapi juga tanggung jawab etis dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu, praktik layanan konseling harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang tertuang dalam kode etik profesi.

Pemahaman terhadap kode etik menjadi sangat penting karena merupakan salah satu indikator profesionalitas seorang konselor. Kode etik berperan sebagai panduan bagi konselor agar dalam memberi saran kepada konseli tetap sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, baik di masyarakat maupun dalam dunia konseling (Nuzliah & Siswanto, 2019). Tanpa adanya kode etik, layanan konseling berpotensi menyimpang dari tujuan dasarnya dan bahkan bisa merugikan konseli. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga merupakan landasan moral dalam membangun hubungan profesional yang sehat dan aman antara konselor dan konseli.

Organisasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) telah menyusun dan menetapkan Kode Etik Konselor Indonesia yang wajib dipahami dan dipatuhi oleh seluruh praktisi BK. Kode Etik ABKIN merupakan

aturan etika yang digunakan oleh banyak konselor di Indonesia. Aturan ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, kemampuan profesional, menjaga rahasia, serta sikap aktif dan positif dalam menjalankan proses konseling (Marjo et al., 2024). Implementasi kode etik secara konsisten akan memperkuat integritas profesi konselor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BK. Namun, jika kode etik dilanggar, maka reputasi konselor atau guru bimbingan dan konseling akan rusak. Akibatnya, siswa yang dilayani atau bahkan yang tidak dilayani tidak akan lagi mempercayai mereka (Harahap et al., 2023).

PEMBAHASAN

Pengertian Kode Etik Bimbingan dan Konseling

Kode etik bimbingan dan konseling pertama kali dibuat oleh American Counseling Association (ACA) melalui tokoh bernama Donald Super dan disetujui pada tahun 1961. Kode etik ini dibuat berdasarkan kode etik asli dari American Psychological Association. Di Indonesia, kode etik pertama kali diterapkan pada konvensi di Malang tahun 1975 oleh para ahli bimbingan yang tergabung dalam Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), yang sekarang dikenal sebagai Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Kode etik ini menjadi pedoman bagi anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari organisasi profesi (Harahap et al., 2022). Menurut ACA (Marjo et al., 2024), nilai-nilai profesional sangat penting untuk menjalankan komitmen etis dalam profesi konseling. Nilai-nilai inti dalam profesi ini meliputi:

- Mendukung perkembangan manusia sepanjang hidupnya.

- Menghormati keberagaman dan menggunakan pendekatan yang menghargai budaya serta keunikan setiap individu dalam masyarakat.
- Mengupayakan keadilan sosial bagi semua orang.
- Menjaga hubungan yang jujur dan terpercaya antara konselor dan konseli.
- Melakukan pekerjaan secara kompeten dan sesuai dengan aturan etika.

Nilai-nilai profesional ini menjadi dasar bagi prinsip-prinsip etika yang penting dalam perilaku dan pengambilan keputusan profesional. Prinsip-prinsip dasar perilaku etis menurut Jeffrey E. Barnett dalam (Marjo et al., 2024) adalah:

- Otonomi: menghargai hak setiap orang untuk mengendalikan hidupnya sendiri.
- Nonmaleficence: menghindari tindakan yang bisa membahayakan atau merugikan orang lain.
- Kemurahan hati: bekerja demi kebaikan individu dan masyarakat dengan meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- Keadilan: memperlakukan semua orang dengan adil dan mendukung kesetaraan.
- Kesetiaan: menghormati komitmen dan menepati janji, termasuk menjaga kepercayaan dalam hubungan profesional.
- Kejujuran: selalu bersikap jujur kepada semua orang yang berhubungan dengan konselor.

Kode etik adalah kumpulan aturan tertulis yang disusun secara teratur berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku, baik di masyarakat maupun dalam lingkungan profesi, yang berfungsi sebagai panduan perilaku bagi para anggotanya

(Safitri et al., 2025). Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur bagaimana para anggota profesi harus bertindak, mengambil keputusan, dan menjalankan tugasnya secara konsisten dan bertanggung jawab. Kode etik tidak hanya menjadi standar yang mengarahkan tindakan individu agar sesuai dengan nilai kebaikan dan keadilan, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan konseli, masyarakat, dan profesi itu sendiri dari praktik yang menyimpang atau merugikan. Dengan demikian, penerapan kode etik sangat penting dalam menjaga integritas, kredibilitas, serta reputasi profesi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam konteks profesi konselor, kode etik menurut ABKIN, 2018 dalam (Daniati et al., 2025) berfungsi untuk melindungi profesi konselor dari masalah hukum akibat konflik internal serta mencegah tindakan yang tidak sesuai etika. Penerapan etika yang baik juga dapat membantu meningkatkan pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling.

Kode etik bimbingan dan konseling adalah aturan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para konselor. Aturan ini membantu mereka bertindak dengan benar saat bekerja dan juga dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan nilai dan budaya yang ada di Indonesia berdasarkan ABKIN, 2018 dalam (Megarizky Hotmauli, 2021). Fungsi utama kode etik ini adalah untuk memberikan pedoman bagi konselor agar dapat bertindak secara benar, bertanggung jawab, dan profesional baik dalam proses pelayanan konseling maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kode etik bertujuan untuk menjaga kualitas layanan bimbingan dan konseling agar berjalan dengan

efektif, beretika, dan terus berkembang sesuai standar profesi. Kode etik di bidang bimbingan dan konseling juga bertujuan agar layanan tersebut selalu berjalan dengan baik dan terus berkembang. Di dalam kode etik ini ada aturan-aturan yang wajib dipatuhi, dan jika dilanggar, akan ada akibat yang harus ditanggung (Nuzliah & Siswanto, 2019).

Tujuan dan Fungsi Kode Etik BK

Menurut Aniswita dkk dalam (Megarizky Hotmauli, 2021) kode etik konselor disusun untuk menjadi pedoman dalam bersikap, membantu meningkatkan kualitas layanan, mendukung tujuan organisasi profesi, menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi konselor, serta melindungi konselor dari kemungkinan masalah dengan konseli. Sejalan dengan itu, menurut Istiadah dalam (Daniati et al., 2025) secara umum kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- ✚ Memberikan panduan perilaku yang profesional dan berkarakter bagi konselor, sehingga mereka dapat memberikan layanan kepada konseli dengan cara yang benar dan tidak sembarangan.
- ✚ Menjaga kualitas dan standar profesional layanan, agar konselor bisa bekerja dengan lebih baik dan sesuai dengan aturan.
- ✚ Mendukung tujuan ABKIN sebagai organisasi profesi yang menaungi bidang bimbingan dan konseling.
- ✚ Membantu konselor dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli.

- ✚ Melindungi konselor dan konseli, agar keduanya merasa aman dan terlindungi selama proses bimbingan berlangsung.

Dalam hal ini, kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi konselor untuk menentukan sikap dan tindakan yang tepat, serta batasan yang harus dijaga, supaya proses bimbingan dan konseling berjalan dengan baik, profesional, dan bertanggung jawab (Safitri et al., 2025). Lebih dari sekadar kumpulan aturan, kode etik juga berfungsi untuk mengatur bagaimana seorang profesional seharusnya bertindak dalam pekerjaannya, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga nama baik, kehormatan, dan nilai-nilai luhur dari profesi itu sendiri. Dengan mematuhi kode etik, para anggota profesi menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab, kejujuran, dan integritas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut dapat terus terjaga (Safitri et al., 2025). Selain itu, menurut (Nuzliah & Siswanto, 2019) secara umum, kode etik profesi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

❖ **Sebagai pedoman bagi anggota profesi**

Kode etik menjadi acuan bagi setiap anggota dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Artinya, setiap anggota profesi harus bekerja sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh organisasi profesinya.

❖ **Sebagai alat kontrol sosial dari masyarakat**

Kode etik juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pekerjaan para profesional. Jadi, para anggota profesi tidak hanya diawasi oleh organisasi,

tetapi juga oleh masyarakat luas dalam hal tanggung jawab dan etika kerja mereka.

❖ **Mencegah campur tangan dari pihak luar**

Fungsi ini bertujuan untuk menjaga agar tidak ada pihak luar yang tidak berkepentingan ikut mencampuri urusan internal organisasi profesi. Campur tangan seperti itu bisa mengganggu atau merusak aturan dan sistem yang sudah tertata dengan baik di dalam organisasi.

❖ **Prinsip-Prinsip Kode Etik Konselor**

Menurut Purnamasari dalam (Safitri et al., 2025) dasar dari kode etik profesi konseling di Indonesia bertumpu pada dua hal utama. Pertama, Pancasila sebagai panduan moral dan etika bangsa yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktik konseling, Pancasila menjadi pedoman agar konselor menjalankan tugasnya dengan hati nurani, menghargai martabat manusia, dan berkomitmen untuk membantu klien menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Kedua, tuntutan profesi konseling itu sendiri, yaitu bahwa seorang konselor memiliki tanggung jawab profesional untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan klien. Konseling harus dilakukan secara tepat, berdasarkan norma-norma yang berlaku, dan dengan mengutamakan kebahagiaan serta perkembangan positif klien. Dengan demikian, kode etik konseling di Indonesia mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai luhur bangsa dan standar profesional yang menjaga kualitas serta etika pelayanan konselor terhadap kliennya.

Syahril dan Riska Ahmad menyatakan dalam (Safitri et al., 2025) prinsip-prinsip kode etik bimbingan dan konseling yaitu, seorang konselor harus menghargai martabat, kejujuran, dan keyakinan konseli. Ini berarti konselor tidak boleh meremehkan, menghakimi, atau memaksakan pandangannya terhadap konseli, melainkan harus bersikap empatik dan menerima konseli apa adanya. Konselor juga harus mengutamakan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi, memperlakukan semua konseli secara adil tanpa membedakan suku, ras, agama, atau status sosial. Selain itu, konselor harus mampu mengendalikan diri dengan menyadari dan mengatasi kekurangan atau prasangka pribadi yang bisa menurunkan kualitas layanan atau merugikan konseli.

Oleh karena itu, konselor diharapkan untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip dalam kode etik agar dapat menghindari pelanggaran atau tindakan yang menyimpang (Harahap et al., 2023). Jika konselor sudah memahami prinsip-prinsip dan kode etik dalam bimbingan dan konseling, maka kita akan lebih mudah dalam menjalankannya dengan baik. Untuk mempermudah dan memaksimalkan pelaksanaannya, para konselor menjadikan prinsip dan asas-asas bimbingan konseling sebagai pedoman utama dalam tugas mereka (Harahap et al., 2023). Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan integritas pribadi konselor, tetapi juga menentukan kualitas dan keberlangsungan profesi bimbingan dan konseling secara keseluruhan.

Isi Pokok Kode Etik Konselor (mengacu ABKIN)

Menurut ABKIN (2006) dalam (Daniati et al., 2025), kode etik dibuat untuk melindungi para konselor dari campur tangan pihak luar, termasuk pemerintah, mencegah

pelanggaran aturan internasional dalam pekerjaan mereka, serta memberikan rasa aman dan perlindungan saat mereka menjalankan tugas profesionalnya. Berdasarkan (Nuzliah & Siswanto, 2019) keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PBABKIN) Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka beberapa poin penting dari kode etik tersebut adalah sebagai berikut:

- Kualifikasi konselor dalam hal nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan
- Konselor harus terus belajar dan mengembangkan diri. Mereka juga harus menyadari kelemahan dan prasangka pribadi yang bisa mempengaruhi hubungan dengan orang lain, supaya pelayanan yang diberikan tetap berkualitas dan tidak merugikan konseli.
- Konselor harus menunjukkan sikap sederhana, rendah hati, sabar, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan menghormati orang lain.
- Konselor wajib bertanggung jawab terhadap saran atau kritik dari rekan sesama konselor, terutama yang berkaitan dengan aturan perilaku profesional yang ada di kode etik.
- Konselor harus selalu mengutamakan kualitas kerja terbaik dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi, seperti uang, keuntungan, atau popularitas.
- Konselor harus memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang didasarkan pada pengetahuan luas dan aturan ilmiah.

Penyimpanan dan Peggunann Informasi

Semua catatan tentang konseli, seperti hasil wawancara, tes, surat, rekaman, dan data lainnya, adalah rahasia dan hanya boleh dipakai untuk kepentingan konseli. Data tersebut boleh digunakan untuk penelitian atau pelatihan konselor baru, asalkan identitas konseli disembunyikan.

Memberikan informasi konseli kepada keluarga atau profesional lain harus mendapat izin dari konseli terlebih dahulu.

Informasi tentang konseli boleh dibagikan dengan sesama konselor atau profesional lain hanya jika memang untuk kepentingan konseli dan tidak merugikan mereka.

Informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berhak dan paham cara menggunakannya dengan benar.

Hubungan dengan Pemberian pada Pelayanan

Konselor wajib membantu konseli selama hubungan antara keduanya masih berjalan dan ada kesempatan untuk melakukannya. Artinya, selama konseli masih ingin atau butuh bantuan, konselor harus berusaha memberikan layanan yang terbaik.

Konseli memiliki hak penuh untuk menghentikan proses konseling kapan saja, bahkan jika masalah yang sedang dibahas belum selesai atau belum ditemukan solusi yang jelas. Di sisi lain, konselor juga boleh menghentikan hubungan konseling jika ternyata konseli tidak mendapatkan manfaat atau kemajuan dari sesi yang dilakukan, supaya waktu dan tenaga bisa difokuskan untuk yang lebih tepat.

Hubungan dengan Konseli

Konselor harus selalu menghargai dan menghormati harga diri, kehormatan, kejujuran, serta keyakinan yang dimiliki oleh konselinya.

Konselor wajib mengutamakan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi mereka sendiri saat memberikan layanan.

Dalam menjalankan tugasnya, konselor tidak boleh membeda-bedakan konseli berdasarkan suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial ekonomi.

Konselor tidak boleh memaksa seseorang untuk menerima bantuan jika orang tersebut tidak mengizinkannya.

Konselor harus siap membantu siapa saja, terutama dalam keadaan darurat atau ketika banyak orang membutuhkan bantuan.

Konselor wajib memberikan layanan secara penuh sampai konseli merasa masalahnya sudah tertangani atau sampai konseli tidak ingin melanjutkan lagi.

Konselor harus menjelaskan kepada konseli tentang sifat hubungan profesional antara mereka dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam proses konseling.

Jika ada masalah dalam hubungan konseling, konselor harus memberikan perhatian dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang konselor.

Konselor tidak boleh memberikan layanan kepada anggota keluarga, teman dekat, atau orang yang memiliki hubungan pribadi dengan mereka, supaya tetap menjaga profesionalisme.

Konsultasi dengan Rekan Sejawat

Kalau seorang konselor sedang membantu seseorang (konseli) dan merasa bingung atau ragu tentang bagaimana cara terbaik membantu konseli tersebut, konselor tidak harus memutuskan sendiri. Konselor boleh bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman sesama konselor atau ahli lain yang juga paham tentang bimbingan dan konseling. Ini supaya konselor mendapatkan saran atau ide yang lebih baik agar bisa membantu konseli dengan tepat. Namun, karena masalah konseli itu bersifat pribadi dan rahasia, konselor harus meminta izin dulu kepada konseli sebelum membicarakan masalah konseli itu dengan orang lain. Dengan cara ini, konselor bisa memberikan layanan yang lebih baik dan profesional, sekaligus menjaga hak-hak konseli agar tetap aman dan dihormati.

Alih Tangan Kasus

Kode etik ini mengingatkan bahwa jika seorang konselor menghadapi masalah atau kesulitan dalam membantu peserta didik (konseli) dengan baik dan lengkap, dia tidak boleh memaksakan diri terus melanjutkan tanpa hasil. Sebaliknya, konselor harus menyerahkan atau mengalihkan kasus tersebut kepada orang lain yang lebih ahli dan berpengalaman di bidang itu. Tujuannya supaya peserta didik (konseli) mendapatkan bantuan yang benar-benar tepat dan berkualitas. Dengan begitu, masalah konseli bisa diselesaikan dengan lebih baik dan konseli merasa terbantu secara maksimal.

Dengan mengikuti isi pokok kode etik ini, konselor akan selalu menjalankan tugasnya dengan cara yang benar, jujur, dan penuh tanggung jawab. Hal ini penting agar konselor

dapat memberikan bantuan dan dukungan yang berkualitas kepada setiap orang yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling. Ketika konselor bekerja sesuai dengan aturan dan nilai-nilai etika, mereka tidak hanya melindungi diri sendiri dari masalah hukum atau konflik, tetapi juga memastikan bahwa klien atau konseli merasa dihargai, aman, dan mendapatkan pelayanan yang adil. Dengan begitu, masyarakat akan semakin percaya dan menghargai profesi konselor.

Implementasi Kode Etik dalam Layanan Konseling

Dalam mengimplementasikan kode etik dalam layanan konseling, guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau konselor harus siap berkolaborasi dengan seluruh perangkat sekolah, mulai dari wali kelas, guru mata pelajaran, hingga kepala sekolah. Kolaborasi ini sangat penting karena dengan bekerja sama, konselor dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi peserta didik, baik dari aspek akademik, sosial, maupun emosional. Dengan demikian, pendekatan konseling yang diberikan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, komunikasi yang baik antarpendidik juga berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika, seperti pembocoran informasi yang tidak semestinya atau penanganan masalah yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, implementasi kode etik yang didukung oleh seluruh pihak di lingkungan sekolah akan sangat menunjang terciptanya layanan konseling yang tidak hanya efektif dan bermutu, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika yang kuat.

Sebagai contoh, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah, guru BK dan wali kelas harus bekerja

sama secara intensif untuk mencari tahu penyebab dan situasi sebenarnya. Dalam proses ini, guru BK tidak dapat bekerja sendiri; mereka memerlukan dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru-guru lain, staf sekolah, dan bahkan orang tua siswa. Kerja sama yang sinergis seperti ini sangat penting agar upaya pembinaan dan perbaikan sikap siswa dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Lingkungan sekolah yang kondusif dan suportif akan sangat membantu keberhasilan program konseling. Dengan kolaborasi yang baik dan koordinasi yang matang, layanan konseling dapat berjalan lancar dan benar-benar memberikan manfaat untuk membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Sejalan dengan hal ini, menurut Muslihati dalam (Harahap et al., 2023), peran guru BK terfokus pada tiga fungsi utama, yaitu mencegah siswa melakukan kesalahan (fungsi pencegahan), membantu siswa mengembangkan sikap dan perilaku positif (fungsi pengembangan), serta membantu siswa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (fungsi penyembuhan).

Dalam praktik sehari-hari di sekolah, implementasi kode etik ini diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata. Misalnya, konselor selalu meminta izin kepada siswa sebelum membagikan informasi kepada orang tua atau guru lain, menjaga kerahasiaan catatan konseling dengan aman, serta mengadakan sesi konseling secara rutin dan rahasia. Konselor juga aktif berkoordinasi dengan wali kelas untuk memantau perkembangan siswa yang sedang menerima layanan konseling, tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan dan penghormatan terhadap privasi siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, konselor sering menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman atau dukungan dari

sebagian warga sekolah mengenai pentingnya kode etik BK, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta kesulitan menjaga kerahasiaan di lingkungan sekolah yang terbuka dan dinamis. Oleh karena itu, konselor harus mampu menjaga integritas profesional, bersikap fleksibel, dan terus meningkatkan keterampilan komunikasi serta manajemen konflik agar implementasi kode etik tetap berjalan dengan baik. Dengan begitu, layanan konseling dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi perkembangan dan kesejahteraan peserta didik di sekolah.

Pelanggaran Etik dan Sanksinya

Dalam mengimplementasikan kode etik, sering kali terjadi kesalahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK di sekolah (Harahap et al., 2022). Menurut Sujadi dalam (Harahap et al., 2022), banyak kesalahpahaman mengenai hakikat dan tujuan bimbingan serta konseling. Salah satu dampak dari kesalahpahaman ini adalah bahwa bagian bimbingan dan konseling sering kali dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus di bidang bimbingan dan konseling. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran etika dalam praktik layanan konseling. Selain itu, berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran etika profesi bimbingan dan konseling yang dikemukakan oleh (Nuzliah & Siswanto, 2019):

Terhadap Konseling

- ❖ Membocorkan rahasia konseli kepada orang yang tidak berkepentingan.

- ❖ Melakukan tindakan tidak sopan atau tidak pantas, seperti pelecehan seksual, penghinaan terhadap agama, atau sikap rasis.
- ❖ Melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap konseli.
- ❖ Melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaan profesional, seperti dalam prosedur, teknik, evaluasi, atau tindak lanjut.

Terhadap Organisasi Profesi

- Tidak mematuhi aturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi.
- Mencemarkan nama baik profesi dengan menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Terhadap Rekan Sejawat dan Profesi Lain yang Terkait

- ✓ Bertindak tidak profesional terhadap rekan, seperti menghina, menolak bekerja sama, atau bersikap arogan.
- ✓ Memberikan rujukan kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan permasalahan konseli.

Berdasarkan (Daniati et al., 2025) sanksi atas pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling dibagi ke dalam beberapa tingkatan, tergantung pada seberapa berat kesalahan yang dilakukan, yaitu:

- Teguran Lisan: Jika pelanggarannya tergolong ringan, konselor biasanya hanya diberi peringatan secara langsung atau lisan sebagai langkah awal.

- Peringatan Tertulis: Jika pelanggaran cukup serius atau konselor tidak mengindahkan teguran pertama, maka akan diberikan surat peringatan resmi.
- Pencabutan Keanggotaan ABKIN: Bila pelanggaran melanggar prinsip etika secara serius, organisasi profesi seperti ABKIN bisa mengeluarkan konselor dari keanggotaan.
- Pencabutan Izin Praktik: Bagi konselor yang memiliki izin praktik mandiri, izinnya bisa dicabut jika terbukti melanggar kode etik profesi.
- Proses Hukum: Jika pelanggaran menyangkut tindakan pidana, seperti pelecehan atau kekerasan, maka masalah akan diteruskan kepada pihak kepolisian atau lembaga hukum terkait.

Namun perlu dipahami bahwa pemberian sanksi ini bukanlah untuk menghukum semata, melainkan bertujuan menjaga kehormatan profesi konselor. Sanksi-sanksi tersebut dirancang agar para konselor tetap bekerja secara profesional dan mematuhi aturan etika yang telah ditetapkan (Daniati et al., 2025). Selain itu, sanksi ini juga bertujuan melindungi hak dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan bimbingan dan konseling, sehingga konseling tetap menjadi bidang yang dipercaya dan dihormati oleh banyak orang.

Jika terjadi pelanggaran seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka proses pemberian sanksi dilakukan melalui beberapa tahapan berikut (Nuzliah & Siswanto, 2019):

Pertama, ada laporan atau pengaduan dari konseli (klien) atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan konselor.

Pengaduan tersebut disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah, yaitu pihak yang berwenang menangani masalah etik di wilayah tersebut.

Jika pelanggaran yang dilakukan oleh konselor tergolong ringan, maka penyelesaiannya akan ditangani langsung oleh Dewan Kode Etik tingkat daerah.

Konselor yang diduga melakukan pelanggaran akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan dilakukan verifikasi terhadap informasi atau bukti yang diberikan oleh pihak pengadu.

Bila setelah proses pemeriksaan terbukti bahwa pelanggaran memang terjadi, maka Dewan Kode Etik akan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan (Daniati et al., 2025) beberapa faktor utama yang sering menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik dalam profesi konseling antara lain:

Tidak Adanya Sistem Pelaporan Yang Jelas

Banyak pelanggaran terjadi karena tidak tersedia prosedur atau mekanisme yang mudah dan transparan untuk melaporkan keluhan. Akibatnya, masyarakat tidak bisa mengawasi atau menindak pelanggaran dengan efektif.

Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kode Etik

Masyarakat umum sering kali tidak mengetahui apa saja yang menjadi standar etika bagi seorang konselor, sehingga tidak bisa membedakan mana perilaku yang melanggar dan mana yang tidak.

Kurangnya Kesadaran Moral Dari Konselor Sendiri

Ada konselor yang tidak memiliki komitmen atau kesadaran moral yang cukup untuk menjaga nama baik dan integritas profesinya, sehingga lebih mudah tergoda untuk bertindak tidak etis.

Pencegahan Pelanggaran Kode Etik dalam Praktik Bimbingan dan Konseling

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konseling, seperti konselor, supervisor, dan asosiasi profesional, memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik (Daniati et al., 2025). Menurut Syarqawi dalam (Daniati et al., 2025), ada beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani pelanggaran etika dalam praktik konseling:

Pelatihan dan Pendidikan

Konselor harus mendapatkan pelatihan menyeluruh tentang etika konseling, termasuk kerahasiaan, kompetensi, integritas, keadilan, dan otonomi klien.

Pelatihan ini harus berkelanjutan agar konselor selalu update dengan perkembangan terbaru dalam etika profesi.

Memahami Kode Etik

Konselor wajib mempelajari dan mematuhi kode etik profesional yang berlaku, seperti pedoman dari Asosiasi Konselor Indonesia (AKI) dan Persatuan Guru Bimbingan dan Konseling (PGBK).

Kode etik ini menjadi pedoman moral dan aturan praktis dalam pelaksanaan layanan konseling.

✚ Supervisi dan Mentoring

Supervisor yang berpengalaman harus memantau dan membimbing konselor untuk mengenali serta mengatasi masalah etika.

Supervisi membantu peningkatan keterampilan dan pengembangan profesional konselor.

✚ Penciptaan Budaya Etika

Membangun lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai etika melalui program pelatihan dan penyusunan kode etik profesi.

Memberikan bantuan dan sumber daya agar konselor dapat menjalankan tugas dengan standar etika yang tinggi.

✚ Evaluasi Diri

Konselor melakukan evaluasi rutin terhadap praktik etis mereka.

Evaluasi ini penting untuk meninjau dan memperbaiki keputusan dan tindakan selama proses konseling.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, pelaksanaan kode etik dalam layanan konseling dapat berjalan efektif dan profesional. Pencegahan pelanggaran etika bukan hanya tanggung jawab individu konselor, tetapi juga memerlukan dukungan dari supervisor, rekan sejawat, dan organisasi profesi. Budaya etika yang kuat dan evaluasi diri yang rutin akan menjaga integritas profesi, meningkatkan kualitas layanan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran konselor. Dengan demikian, kode etik tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga menjadi panduan hidup yang melekat dalam setiap tindakan konselor dalam membantu klien secara bertanggung jawab dan bermartabat.

Contoh Kasus Kode Etik Konseling

Berikut ini merupakan dua contoh kasus yang berkaitan dengan implementasi kode etik dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada kasus pertama, seorang siswa yang bernama Andi, berkonsultasi dengan konselor sekolah mengenai masalah keluarga yang sangat pribadi hingga membuatnya stres. Dalam sesi konseling, Andi menceritakan bahwa orang tuanya sedang bercerai dan ia merasa sangat tertekan. Namun, tanpa izin Andi, konselor tersebut menceritakan masalah ini kepada guru wali kelas dan beberapa staf sekolah lainnya dengan tujuan “membantu mencari solusi.” Akibatnya, rahasia Andi tersebar luas, membuatnya merasa tidak nyaman dan kehilangan kepercayaan pada layanan konseling di sekolah. Kasus ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, terutama pada prinsip kerahasiaan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam praktik bimbingan dan konseling.

Sebaliknya, berikut ini adalah contoh kasus yang benar dan yang seharusnya dilakukan oleh konselor atau guru BK. Andi adalah seorang siswa SMA yang mulai mengalami penurunan prestasi belajar. Ia sering terlihat murung dan tidak bersemangat di sekolah. Setelah diajak berbicara oleh gurunya, Andi akhirnya mau menemui konselor sekolah. Dalam sesi konseling, Andi bercerita bahwa ia merasa sangat tertekan karena orang tuanya terus-menerus menuntutnya untuk selalu mendapatkan nilai tinggi. Ia merasa tidak pernah cukup baik, meskipun sudah berusaha keras. Setelah beberapa sesi, konselor menyadari bahwa tekanan yang dirasakan Andi cukup berat dan mulai berdampak pada kesehatan mentalnya. Karena merasa bahwa masalah ini memerlukan penanganan yang lebih mendalam, konselor dengan baik-baik

menyarankan agar Andi menemui psikolog profesional. Konselor tetap mendampingi proses tersebut dan memberi dukungan secara emosional. Dalam kasus ini, konselor sudah menerapkan kode etik profesi dengan baik, yaitu menjaga kerahasiaan informasi siswa, menghargai hak dan keputusan siswa, menunjukkan empati, serta bertanggung jawab dalam memberikan rujukan ke ahli lain jika diperlukan. Sikap konselor ini menunjukkan profesionalisme dan kepedulian terhadap kondisi siswa secara menyeluruh.

Dari kedua contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik dalam praktik konseling bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan profesional konselor terhadap peserta didik. Konselor harus memiliki kepekaan etis, kemampuan komunikasi yang baik, serta komitmen untuk menjaga martabat dan kesejahteraan konseli. Dalam situasi apa pun, keputusan yang diambil oleh konselor harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, penting bagi setiap konselor untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan integritas pribadi agar dapat memberikan layanan konseling yang aman, bermakna, dan berdampak positif bagi perkembangan peserta didik. Selain itu, dukungan dari pihak sekolah dan pemahaman yang kuat terhadap kode etik akan membantu menciptakan lingkungan konseling yang sehat dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 6(2), 101–110. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v6n2.p101-110>
- Harahap, A. P., Ningsih, E. C., Saragi, E. P. S., Anshari, M., & Ardiansyah, T. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Karakter Siswa di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan 1. *Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)*, 8(1), 61–72.
- Marjo, H. K., Nashrullah, S. Z., & Salamah, N. S. (2024). Kode Etik Dalam Profesi Konselor Berdasarkan Organisasi Profesi Bimbingan Dan Konseling (Abkin) Dan Organisasi Konselor Lainnya. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(1), 249. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v10i1.13502>
- Megarizky Hotmauli. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non Bk. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 2(12), 605–611. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol2iss12pp605-611>
- Nur Daniati. Yarmis Syukur, D. S. (2025). PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PRAKTIK BIMBINGAN. 6(Januari), 226–237.

- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64. <https://doi.org/10.22373/je.v5i1.8172>
- Safitri, A. H., Islam, U., Sumatera, N., Putri, C. R., Islam, U., Sumatera, N., Ningsih, K. P., Islam, U., Sumatera, N., Edith, I. R., Islam, U., Sumatera, N., Lestari, W., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Kode etik profesi bimbingan dan konseling. 9(1), 41–53.

“KODE ETIK BK”

PENDAHULUAN

Pendidikan bukan hanya soal menyampaikan materi pelajaran di kelas. Lebih dari itu, pendidikan juga berperan membentuk kepribadian, nilai, sikap, dan kemampuan sosial peserta didik agar mereka siap menghadapi kehidupan yang semakin kompleks. Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak jarang mengalami hambatan baik secara pribadi, sosial, akademik, maupun emosional. Mereka bisa merasa tertekan, bingung, atau bahkan kehilangan arah. Dalam situasi seperti ini, mereka membutuhkan pendampingan yang tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi juga membantu mereka memahami diri sendiri dan tumbuh secara sehat. Itulah sebabnya layanan bimbingan dan konseling sangat penting di lingkungan sekolah.

Bimbingan dan konseling (BK) hadir sebagai bentuk bantuan profesional yang berfokus pada pengembangan diri peserta didik dan penyelesaian masalah yang mereka alami. Layanan ini diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah, yang perannya tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping tumbuh kembang siswa. Namun, untuk dapat menjalankan peran ini secara efektif, seorang konselor tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Dalam hal ini, kode etik profesi menjadi panduan penting yang harus dimiliki dan dipatuhi oleh setiap konselor.

Kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah seperangkat prinsip, nilai, dan aturan yang bertujuan mengatur sikap dan perilaku konselor dalam menjalankan tugasnya.

Seperti disampaikan oleh Basuki, Farozin, dan Setiani (2021), pemahaman tentang kode etik seharusnya tidak hanya menjadi bahan hafalan, tetapi perlu diinternalisasi sejak masa pendidikan calon konselor. Artinya, mahasiswa jurusan BK harus mulai dilatih berpikir dan bertindak secara etis dalam setiap kegiatan, baik di kampus maupun saat praktik di lapangan. Jika nilai-nilai etika ini dibiasakan sejak awal, maka ketika mereka menjadi konselor profesional, mereka akan lebih siap menghadapi dilema dan tantangan dengan bijaksana.

Lebih lanjut, Bunyamin (2022) menegaskan bahwa kode etik tidak boleh dianggap sepele atau hanya sebagai formalitas belaka. Ia menyatakan bahwa kode etik adalah alat penting yang menjaga konselor tetap berada dalam jalur profesional, melindungi konseli, dan menjaga nama baik profesi. Sayangnya, masih ada konselor yang kurang memahami makna kode etik secara mendalam, sehingga sering mengambil keputusan berdasarkan intuisi pribadi atau tekanan lingkungan.

Faktor lain yang turut memengaruhi pelanggaran kode etik adalah masih banyaknya sekolah yang menugaskan guru non-BK sebagai guru bimbingan dan konseling. Dalam studi yang dilakukan oleh Hotmauli (2021) ditemukan bahwa guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan BK cenderung belum memahami prinsip-prinsip dasar konseling dan etika profesi. Akibatnya, mereka menjalankan layanan konseling tanpa arah yang jelas, dan sering kali bertindak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap siswa.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yuni Afsari (2021) dalam (Nurhayati, 2024), yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian guru BK tidak menyadari

bahwa tindakan mereka sudah termasuk pelanggaran kode etik, seperti mengejek siswa karena masalah pribadi yang diceritakan dalam sesi konseling. Ketidaktahuan dan minimnya pelatihan menjadi faktor utama yang menyebabkan hal ini terus berulang.

Pentingnya pencegahan pelanggaran kode etik juga ditekankan oleh Nur Hisna Daniati, Yarmis Syukur, dan Dina Sukma (2025). Mereka menyebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi dalam praktik konseling tidak hanya merugikan konseli secara psikologis, tetapi juga dapat mencoreng reputasi lembaga pendidikan dan menjatuhkan martabat profesi konselor. Untuk itu, mereka merekomendasikan beberapa langkah pencegahan, seperti pelatihan etika secara berkelanjutan, pengawasan dan supervisi dari pihak sekolah atau 2kolega, mentoring oleh senior, serta evaluasi diri secara rutin oleh konselor itu sendiri.

Tidak cukup hanya memiliki kode etik di atas kertas. Kode etik harus benar-benar menjadi bagian dari kebiasaan kerja dan budaya profesional setiap konselor. Seperti disampaikan dalam jurnal Daniati dkk. (2025), kode etik membantu konselor dalam mengambil keputusan, melindungi konseli, dan menjaga hubungan profesional. Jika tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kode etik hanya akan menjadi simbol tanpa makna. Padahal, pelanggaran kode etik bisa berdampak sangat serius, bahkan menimbulkan trauma bagi siswa dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab pelanggaran kode etik bukan hanya karena niat buruk, tetapi juga karena ketidaktahuan, tekanan situasional, dan kurangnya sistem penegakan aturan di sekolah.

Sebagaimana disampaikan oleh Ramadhani & Pakpahan (2024) serta Rimayati (2023), pelanggaran yang tidak ditangani secara serius akan berulang dan dapat merusak citra profesi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama dari semua pihak. Mulai dari kampus yang mendidik calon konselor, sekolah tempat mereka bekerja, organisasi profesi seperti ABKIN, hingga pemerintah. Untuk terus menegakkan dan mensosialisasikan kode etik profesi. Dengan cara ini, layanan bimbingan dan konseling dapat benar-benar menjadi tempat yang aman, terpercaya, dan efektif bagi siswa dalam menghadapi masalah dan meraih tujuan hidup mereka.

PEMBAHASAN

Pengertian Kode Etik BK

Kode etik bimbingan dan konseling sebenarnya bisa dibilang sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh seorang konselor supaya mereka bisa memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Jadi, jika seperti profesi lain punya seragam dan SOP, maka konselor punya kode etik ini sebagai panduannya. Menurut (Saondi 2010 dalam Yuni Afsari, 2021), Kode etik merupakan pedoman yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan seseorang dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sejak lama, upaya telah dilakukan untuk menyusun aturan tertulis yang bertujuan membimbing perilaku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Aturan ini diharapkan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Dalam konteks profesional, kode etik profesi adalah bagian dari etika profesi. Kode etik ini merupakan kelanjutan dari norma-norma umum yang telah dibahas dalam etika profesi, dengan tujuan

memperjelas, menegaskan, dan merinci norma-norma tersebut menjadi pedoman yang lebih konkret dan terstruktur, meskipun pada dasarnya nilainilai tersebut sudah tersirat sebelumnya.

(ABKIN 2018 dalam Daniati et al., 2025) juga menegaskan bahwa kode etik punya fungsi besar dalam menjaga nama baik profesi konselor. Bayangkan kalau tidak ada aturan, mungkin saja ada konselor yang sembarangan menyebarkan rahasia pribadi konseli, atau bahkan bertindak seenaknya tanpa rasa tanggung jawab. Disini kode etik berperan: mencegah hal-hal semacam itu terjadi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat supaya tetap yakin bahwa layanan konseling itu aman dan terpercaya.

Selain soal menjaga kepercayaan, kode etik juga berfungsi sebagai pedoman moral. (Basuki et al., 2021) menyebut bahwa kode etik ini penuh dengan nilai-nilai dan norma yang harus dipegang teguh oleh konselor. Artinya, bukan cuma sekadar aturan teknis, tapi juga mengandung ajaran tentang bagaimana menjadi pribadi yang etis dalam berprofesi—mulai dari cara menghargai konseli, menjaga kerahasiaan, sampai bersikap netral dan tidak menghakimi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dalimunthe dkk. (2024), yang bilang bahwa semua tindakan konselor mulai dari berbicara, mendengar, sampai memberi saran—itu harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Jadi, bukan cuma butuh pengetahuan dan teknik konseling yang baik, tapi juga butuh hati nurani yang peka terhadap nilai-nilai moral.

Sementara itu, Bunyamin (2022) mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa asal-asalan menjadi konselor. Kalau memang mau terjun ke dunia BK, maka wajib hukumnya

mematuhi kode etik ini. Karena tanpa itu, konseling bisa kehilangan makna dan justru merugikan klien.

Sama halnya dengan Hotmauli (2021) yang melihat bahwa kode etik bukan hanya aturan tertulis, tapi benar-benar harus diterapkan dalam praktik sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa kode etik mengatur batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh konselor, agar tetap profesional dan tidak menyalahgunakan kepercayaan konseli (ABKIN 2018 dalam Hotmauli 2021).

Jadi, kode etik dalam dunia BK itu bukan hanya sebuah aturan tapi sebagai landasan moral yang membentuk karakter konselor agar profesional, manusiawi, dan dapat dipercaya. Kode etik hadir bukan hanya untuk membatasi, tapi justru membimbing agar layanan yang diberikan benar-benar membawa manfaat, menjaga martabat profesi, dan melindungi hak-hak konseli.

Dasar Hukum dan Landasan Kode Etik

Kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling tidak lahir begitu saja, melainkan disusun berdasarkan berbagai peraturan dan keputusan resmi yang menjadi dasar hukum sekaligus landasan moral dalam pelaksanaan tugas konselor. Salah satu landasan yang secara eksplisit disebutkan dalam berbagai jurnal adalah Keputusan Pengurus Besar ABKIN Nomor 010 Tahun 2006. Keputusan ini menetapkan dan merumuskan secara formal tentang Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling di Indonesia, yang hingga saat ini masih digunakan sebagai acuan oleh para konselor dalam menjalankan tugas-tugas profesional mereka (Mardhatillah 2018 dalam Pristanti 2023 dalam Daniati dkk. 2025).

Selain keputusan organisasi profesi, kode etik konselor juga memiliki dasar hukum dari regulasi pemerintah. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yuni Afsari (2021) disebutkan bahwa Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi salah satu peraturan penting yang memperkuat pelaksanaan kode etik di sekolah. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, disebutkan prinsip dasar layanan BK, yaitu prinsip kerahasiaan, yang sejalan dengan nilai utama dalam kode etik profesi konselor. Prinsip ini mengharuskan konselor menjaga informasi pribadi siswa secara tertutup dan hanya digunakan untuk kepentingan konseling.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjadi latar belakang perlunya perlindungan hukum terhadap profesi konseling. Dalam jurnal karya Bunyamin (2022), undang-undang ini disebut sebagai awal mula tumbuhnya kesadaran bahwa profesi konselor perlu memiliki landasan hukum dan etika yang jelas, untuk melindungi konselor dari intervensi eksternal serta mencegah kesalahpahaman fungsi mereka dalam sistem pendidikan.

Lebih lanjut, Daniati, Syukur, dan Sukma (2025) menyebut bahwa penyusunan kode etik juga dipengaruhi oleh pandangan tokoh pendidikan seperti Sunaryo Kartadinata (2011) dan referensi dari ABKIN tahun 2006 dan 2018. Menurut mereka, kode etik tidak hanya bertujuan mengatur perilaku konselor secara internal, tetapi juga berfungsi menjaga kemerdekaan profesi dari campur tangan eksternal, sekaligus membentuk standar etik yang harus dijalankan konselor sebagai bagian dari identitas profesional.

Dalam konteks global, (Gladding dalam Yuni Afsari 2021) juga disebut sebagai rujukan penting. Ia menyatakan bahwa kode etik diperlukan agar profesi konseling dapat mengatur dirinya secara independen dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kebijakan pemerintah. Kode etik juga menjadi jembatan antara nilai-nilai moral dalam praktik dan sistem hukum yang berlaku, sehingga posisi konselor diakui sebagai profesi yang sah dan diatur secara etis.

Tujuan Kode Etik

Kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling dibuat untuk menjadi pedoman dalam menjaga agar layanan yang diberikan konselor tetap sesuai aturan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan profesional. Tujuan utama dari keberadaan kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa konselor memberikan bantuan kepada siswa secara benar, aman, dan bertanggung jawab. Seperti dijelaskan oleh (ABKIN 2006 dalam Daniati dkk. 2025), kode etik juga berfungsi melindungi konselor dari kemungkinan campur tangan pihak luar dan membantu menjaga martabat profesinya di mata masyarakat.

Menurut (Istiadah 2023 dalam daniati, 2025) kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. **Sebagai Pedoman Perilaku Profesional**

Kode etik berfungsi sebagai panduan bagi para konselor agar bertindak secara profesional dan berkarakter saat memberikan layanan. Dengan adanya pedoman ini, konselor memiliki arahan yang jelas dan tidak bertindak semena-mena terhadap klien.

2. Menjaga Standar Profesionalisme

Kode etik membantu para konselor dalam mempertahankan kualitas dan standar layanan yang diberikan, sehingga mereka dapat tampil lebih profesional dalam menjalankan tugas.

3. Mendukung Peran ABKIN

Kode etik juga berperan dalam menunjang visi dan misi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) sebagai organisasi profesi yang menaungi layanan bimbingan dan konseling.

4. Membantu dalam Penyelesaian Masalah Klien

Kode etik dapat menjadi acuan bagi konselor dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien secara etis dan tepat.

5. Memberikan Perlindungan

Kode etik melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, baik konselor sebagai pemberi layanan maupun konseli sebagai penerima layanan.

Berdasarkan keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB ABKIN) Nomor 010 Tahun 2006 (Wahidah 2024 dalam Daniati dkk. 2025), berikut adalah hal-hal pokok dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling:

1. Kualifikasi Konselor

Seorang konselor dituntut memiliki moralitas, sikap, kemampuan, pengetahuan, serta wawasan yang memadai. Ia juga perlu menyadari kelemahan diri, karena hal ini bisa berdampak pada kualitas interaksi dengan orang lain dan berpotensi merugikan klien jika tidak dikelola dengan baik.

2. Kerahasiaan Informasi Klien

Segala informasi pribadi yang diperoleh dari klien termasuk surat, rekaman, hasil wawancara, dan tes harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien itu sendiri.

3. Tanggung Jawab dalam Layanan

Konselor berkewajiban mendampingi dan membantu klien selama hubungan profesional masih memungkinkan dan berlangsung secara aktif.

4. Sikap terhadap Klien

Konselor harus menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap klien tanpa membedakan latar belakang ras, etnis, agama, warna kulit, atau status sosial ekonomi.

5. Konsultasi dengan Rekan Sejawat

Apabila konselor merasa ragu dalam menangani suatu kasus, ia wajib berkonsultasi dengan kolega di lingkungan kerjanya. Namun, hal ini harus dilakukan dengan seizin klien yang bersangkutan.

6. Alih Tangan Kasus

Jika konselor merasa tidak mampu memberikan layanan yang tepat dan menyeluruh, maka ia harus merujuk atau menyerahkan kasus tersebut kepada tenaga profesional lain yang lebih kompeten (Nuzliah & Siswanto, 2019).

Kode etik juga penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, konselor bisa saja dihadapkan pada situasi yang rumit atau dilema, dan di sinilah kode etik menjadi pedoman untuk menentukan tindakan terbaik. Dengan begitu, konselor tidak asal bertindak, tetapi mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku secara profesional (Kartini 2021 dalam Daniati dkk. 2025).

Tak kalah penting, kode etik bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling. Ketika kode etik dijalankan dengan baik, siswa merasa aman untuk berkonsultasi, dan masyarakat melihat konselor sebagai figur yang layak dipercaya. Kode etik juga memberi ruang bagi konselor untuk terus belajar dan memperbaiki diri, seperti melalui supervisi dan diskusi dengan sesama profesional (Pristanti 2023 dalam Daniati dkk. 2025). Dengan semua tujuan ini, kode etik menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang etis, manusiawi, dan bermanfaat bagi siswa.

Kode Etik dan Profesionalisme Konselor

Profesi konselor dalam dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya dalam membantu siswa menyelesaikan masalah, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan, memberikan rasa aman, dan membimbing mereka dalam proses tumbuh kembang secara emosional dan sosial. Karena tanggung jawab ini sangat berkaitan dengan aspek pribadi dan psikologis siswa, maka setiap konselor wajib bekerja dengan pedoman yang jelas. Di sinilah pentingnya kode etik dan profesionalisme sebagai fondasi utama dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling.

Kode etik dalam profesi konseling adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang dirancang untuk mengarahkan perilaku konselor agar tetap sesuai dengan nilai-nilai moral, norma sosial, dan standar profesional. Menurut Daniati, Syukur, dan Sukma (2025), kode etik bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap perilaku konselor, tetapi juga menjadi pelindung bagi konseli agar hak-haknya tetap dihormati dan dijaga. Kode etik ini mencakup kewajiban

untuk menjaga kerahasiaan, memperlakukan konseli secara adil, bertanggung jawab atas semua tindakan, serta bekerja dalam batas kompetensi yang dimiliki.

Lebih dari sekadar aturan, kode etik juga menjadi identitas profesi yang menunjukkan bahwa konselor adalah tenaga profesional yang memiliki integritas. Hal ini ditegaskan oleh (Wahidah 2024 dalam Daniati dkk. 2025) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kode etik merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial konselor. Ia juga menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik berpotensi menimbulkan kerusakan relasi, melemahkan kepercayaan siswa, dan menurunkan kredibilitas profesi konselor di mata publik.

Namun, pemahaman tentang kode etik tidak selalu dimiliki secara utuh oleh semua guru BK. Dalam penelitiannya, Yuni Afsari (2021) menunjukkan bahwa masih banyak guru bimbingan dan konseling yang belum memahami isi dan fungsi kode etik secara mendalam. Bahkan, beberapa di antaranya tidak menyadari bahwa tindakan seperti menyebarkan cerita pribadi siswa atau mempermalukan konseli merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kode etik belum sepenuhnya diinternalisasi, terutama di lingkungan sekolah yang tidak memiliki pembinaan etika secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, konsep profesionalisme dalam diri konselor juga menjadi aspek yang tak kalah penting. Profesionalisme mencerminkan sejauh mana seorang konselor memiliki komitmen terhadap tugasnya, tidak hanya dari segi kemampuan teknis, tetapi juga dalam hal sikap, tanggung jawab, dan kepekaan terhadap situasi yang dihadapi oleh konseli.

Basuki, Farozin, dan Setiani (2021) menyatakan bahwa konselor yang profesional akan selalu mengedepankan prinsip kejujuran, menghargai martabat konseli, dan mampu menjaga batas hubungan secara etis. Mereka juga aktif mengembangkan diri melalui pelatihan dan supervisi.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua yang menjalankan fungsi konseling memiliki kompetensi tersebut. Hotmauli (2021) mengungkapkan bahwa banyak sekolah masih mempercayakan layanan BK kepada guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Hal ini menyebabkan proses konseling dijalankan tanpa dasar etika dan profesionalisme yang kuat, yang pada akhirnya justru berpotensi merugikan siswa.

Lebih lanjut, Dalimunthe, Lubis, dan Nurfatimah (2024) menunjukkan bahwa konselor yang menjalankan tugasnya dengan memegang kode etik dan bersikap profesional akan menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Konseling tidak hanya menjadi tempat menyelesaikan masalah, tetapi juga menjadi ruang aman bagi siswa untuk berkembang dan merasa dihargai. Artinya, keberhasilan konseling tidak semata ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh karakter dan integritas konselornya.

Maka dari itu, sebagaimana disampaikan oleh (Istiadah 2023 dalam Daniati dkk. 2025), nilai-nilai kode etik dan profesionalisme tidak boleh hanya dipahami sebagai teori, melainkan harus menjadi kebiasaan dalam praktik. Pendidikan calon konselor harus menanamkan nilai-nilai ini sejak dini agar menjadi bagian dari identitas profesional mereka. Evaluasi diri, pengawasan sejawat, serta pelatihan

berkelanjutan menjadi kunci agar konselor tidak hanya tahu aturan, tetapi juga terbiasa bersikap sesuai dengan etika.

Dengan demikian, kode etik dan profesionalisme bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya saling melengkapi dan membentuk dasar layanan konseling yang berkualitas. Kode etik memberikan arah, sementara profesionalisme menjadi cara menjalankan aturan tersebut secara nyata. Ketika konselor memahami dan menerapkan keduanya, maka kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan dan konseling akan tumbuh dan terjaga dengan baik.

Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Konselor

Dalam menjalankan praktik bimbingan dan konseling, seorang konselor dituntut untuk bekerja tidak hanya berdasarkan keahlian teknis, tetapi juga dengan landasan etika yang kuat. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku konselor agar tetap berada dalam jalur profesional dan bertanggung jawab. Kode etik ini menyatukan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap bentuk layanan kepada konseli, baik dalam konteks pendidikan, sosial, maupun pribadi. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya berfungsi untuk melindungi hak konseli, menjaga kualitas layanan, dan mempertahankan citra serta integritas profesi di mata masyarakat.

Prinsip-prinsip utama dalam kode etik profesi konselor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerahasiaan (Confidentiality)

Konselor memiliki kewajiban penuh untuk menjaga semua informasi yang diperoleh selama proses

konseling. Informasi pribadi konseli seperti hasil tes, catatan sesi, atau cerita pribadi harus disimpan dengan aman dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain tanpa izin konseli. Menjaga kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak privasi konseli, sekaligus fondasi kepercayaan dalam hubungan konseling (Wahidah 2024 dalam Daniati dkk. 2025).

2. Tanggung Jawab Profesional (Professional Responsibility)

Konselor harus menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan bidang keahliannya. Bila konselor merasa tidak mampu menangani suatu kasus, maka ia wajib merujuk konseli kepada tenaga profesional lain yang lebih tepat. Tindakan ini menunjukkan kesadaran akan batas kemampuan serta komitmen untuk memberikan layanan terbaik (Nuzliah & Siswanto 2019 dalam Daniati dkk. 2025).

3. Keadilan dan Non-diskriminasi (Justice and Non-discrimination)

Konselor harus memperlakukan semua konseli secara adil tanpa memandang latar belakang mereka, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status ekonomi. Dengan prinsip ini, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan konseling yang berkualitas dan manusiawi (Wahidah 2024 dalam Daniati dkk. 2025).

4. Penghormatan terhadap Martabat Individu (Respect for Human Dignity)

Konselor harus menjaga sikap dan ucapan agar tidak merendahkan martabat konseli. Dalam proses

konseling, penting untuk menunjukkan empati dan respek agar konseli merasa aman dan dihargai. Penggunaan informasi pribadi untuk tujuan tidak etis, atau mempermalukan konseli, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini (Pristanti et al. 2023 dalam Daniati dkk. 2025).

5. Kompetensi

Konselor wajib bekerja dalam batas kompetensinya dan harus terus mengembangkan kemampuan profesional melalui pelatihan, pendidikan, atau supervisi. Ini penting agar layanan yang diberikan tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan konseli secara efektif (Daniati dkk. 2025).

6. Integritas Profesional (Professional Integrity)

Seorang konselor harus memegang nilai kejujuran, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan jabatannya. Hubungan antara konselor dan konseli harus dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi. Segala bentuk penyimpangan dianggap sebagai pelanggaran etika (Istiadah 2023 dalam Daniati dkk. 2025).

7. Otonomi Konseli (Client Autonomy)

Konselor tidak boleh memaksakan pendapat atau mengambil keputusan atas nama konseli. Sebaliknya, mereka harus memberikan ruang bagi konseli untuk berpikir, mempertimbangkan, dan memutuskan sendiri langkah yang ingin diambil. Konselor bertugas membimbing, bukan mengarahkan secara mutlak (Syarqawi 2024 dalam Daniati dkk. 2025).

Tantangan dalam Penerapan Kode Etik

Meskipun kode etik telah dirancang sebagai pedoman penting dalam menjalankan tugas konselor, pada kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antara harapan ideal yang diatur dalam kode etik dengan realitas di sekolah atau lembaga tempat konselor bekerja, masih terdapat jarak yang cukup lebar.

Yuni Afsari (2021) mengungkapkan bahwa masih banyak guru BK yang belum memahami secara utuh isi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Bahkan, dalam kasus tertentu, terdapat guru BK yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan kode etik tersebut.

Hal ini mengakibatkan berbagai kekeliruan dalam pelaksanaan layanan, seperti membuka rahasia siswa kepada orang lain, mengejek konseli secara terbuka, hingga mencampuradukkan peran profesional dengan sikap personal yang tidak tepat

Sementara itu, Hotmauli (2021) menambahkan bahwa tantangan lain muncul dari adanya guru BK yang berlatar belakang pendidikan non-BK. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan pelatihan mendalam mengenai etika konseling, sehingga pendekatan layanan yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dijunjung oleh seorang konselor

Masalah lainnya adalah minimnya kesadaran moral dan refleksi etis dari konselor itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Dalimunthe, Lubis, dan Nurfatihmah (2024). Mereka menyebut bahwa pelanggaran terhadap kode etik seringkali bukan hanya karena ketidaktahuan, tetapi karena tidak adanya komitmen untuk menjaga integritas profesi. Padahal,

kesadaran pribadi adalah pintu masuk utama untuk membentuk budaya etis dalam layanan bimbingan dan konseling

Di sisi lain, menurut Riswan (2025), tantangan dalam penerapan kode etik juga berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan sanksi. Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk melaporkan pelanggaran, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kode etik profesi konselor, serta tidak konsistennya penerapan aturan oleh pihak sekolah, membuat pelanggaran sulit dikendalikan. Bahkan, ketika pelanggaran terjadi, sering kali tidak ada konsekuensi tegas bagi pelakunya.

Daniati, Syukur, dan Sukma (2025) menambahkan bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara standar kode etik yang bersifat ideal dan fakta pelaksanaan di lapangan. Banyak konselor yang merasa terjebak dalam tekanan administrasi sekolah, kurangnya dukungan dari pimpinan, hingga keterbatasan pelatihan berkelanjutan, yang akhirnya membuat kode etik tidak terimplementasi secara optimal dalam praktik sehari-hari.

Berbagai tantangan dalam penerapan kode etik konselor tidak hanya bersumber dari lemahnya pemahaman individu, tetapi juga dari sistem dan lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti pelatihan rutin, evaluasi kode etik yang aplikatif, serta sistem pengawasan yang tegas dan adil. Penanaman nilai etis sejak masa pendidikan konselor juga menjadi kunci penting untuk memperkuat budaya profesionalisme dan tanggung jawab dalam dunia bimbingan dan konseling.

Dampak Pelanggaran Kode Etik

Dalam praktik bimbingan dan konseling, penerapan kode etik merupakan bagian yang sangat krusial. Kode etik tidak hanya menjadi sekumpulan aturan normatif, tetapi juga menjadi landasan moral dan profesional dalam menjaga kualitas layanan serta kepercayaan antara konselor dan konseli. Ketika kode etik dijalankan secara konsisten, layanan konseling dapat berlangsung dalam suasana yang aman, saling menghargai, dan penuh tanggung jawab. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap kode etik masih sering ditemukan dalam praktik sehari-hari. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan layanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan relasi antar individu, mencoreng citra lembaga, dan melemahkan posisi profesi di mata masyarakat.

Salah satu dampak paling nyata dari pelanggaran kode etik adalah hilangnya kepercayaan konseli terhadap konselor. Yuni Afsari (2021) menegaskan bahwa ketika konselor tidak mampu menjaga kerahasiaan informasi, mempermalukan siswa secara langsung, atau menggunakan data pribadi siswa tanpa izin, maka hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan menjadi rusak. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa siswa yang pernah mengalami perlakuan tidak etis dari konselornya cenderung menutup diri, menghindari layanan konseling, bahkan mengalami tekanan emosional yang lebih berat. Kondisi ini sangat merugikan, sebab pada akhirnya layanan konseling tidak bisa dijalankan secara optimal dan siswa tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya ia butuhkan.

Selain merugikan konseli, pelanggaran etika juga berdampak serius terhadap konselor secara pribadi. (Riswan

2024 dalam Daniati dkk,2025) menjelaskan bahwa konselor yang melakukan pelanggaran kode etik, apalagi dalam bentuk yang berat seperti pelecehan, kekerasan verbal, atau pembocoran informasi sensitif, dapat dikenai sanksi etik dari organisasi profesi seperti ABKIN. Sanksi ini tidak hanya berupa teguran, tetapi juga bisa berupa pencabutan keanggotaan, pelarangan praktik, hingga pelaporan ke pihak hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana. Bahkan untuk pelanggaran yang tampaknya ringan, seperti komentar yang tidak pantas atau ketidakmampuan menjaga netralitas, bisa berdampak pada reputasi dan kredibilitas konselor di mata peserta didik dan rekan sejawat. Ketika kepercayaan terhadap konselor telah hilang, akan sangat sulit baginya untuk menjalankan fungsinya sebagai pendamping yang dipercaya.

Lebih lanjut, Dalimunthe, Lubis, dan Nurfatimah (2024) menyebut bahwa pelanggaran kode etik juga memberikan pengaruh negatif terhadap pandangan masyarakat terhadap layanan konseling secara umum. Masyarakat yang mengetahui adanya kasus pelanggaran, apalagi jika melibatkan isu serius dan menjadi sorotan publik, akan mulai meragukan kualitas serta keamanan layanan konseling di sekolah. Siswa pun menjadi enggan untuk datang ke ruang konseling karena takut mengalami perlakuan yang sama. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak tujuan mulia dari layanan bimbingan dan konseling, yakni membentuk pribadi siswa yang sehat secara emosional, sosial, dan akademik.

Dampak lainnya adalah terhambatnya perkembangan pribadi konseli. Seperti dijelaskan oleh (Pristanti 2023 dalam Daniati dkk. 2025), siswa yang mengalami pengalaman buruk

dalam proses konseling—baik karena diekspos secara tidak pantas, dinasihati dengan kasar, atau dibuat merasa tidak dihargai—akan mengalami hambatan dalam perkembangan kepribadian. Rasa malu, trauma, atau rasa tidak percaya diri dapat tumbuh sebagai akibat langsung dari perlakuan tidak etis. Bukannya membantu siswa berkembang, konselor justru dapat menjadi sumber luka psikologis baru apabila etika tidak ditegakkan.

Selain itu, pelanggaran kode etik juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam internalisasi nilai profesionalisme. (Wahidah (2024 dalam Daniati dkk. 2025) menyatakan bahwa kode etik seharusnya tidak hanya menjadi dokumen yang dibaca dan dihafalkan, tetapi benar-benar dipraktikkan dan dijadikan pedoman dalam menjalankan peran. Ketika konselor melanggar kode etik, hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme belum tumbuh secara utuh dalam diri mereka. Padahal, salah satu ciri konselor yang baik adalah kesadaran etis yang kuat dalam setiap tindakan yang diambil

Bahkan dalam konteks hukum, pelanggaran kode etik bisa menjerumuskan konselor ke ranah pidana. Jika pelanggaran yang dilakukan melibatkan pelecehan seksual, tindakan kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia, maka konselor dapat diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menandakan bahwa pelanggaran etika bukan hanya sekadar masalah internal organisasi profesi, tetapi juga berpotensi menjadi masalah hukum dan sosial yang lebih luas.

Kesimpulan

kode etik merupakan bagian penting dari profesi konselor yang harus benar-benar dipahami dan diterapkan

dalam setiap praktik layanan. Kode etik bukan sekadar dokumen aturan, tetapi merupakan pedoman sikap dan perilaku profesional yang mencerminkan integritas, tanggung jawab, serta kepedulian seorang konselor terhadap konselinya.

Kode etik mengatur berbagai hal penting seperti kewajiban menjaga rahasia konseli, bertindak adil tanpa diskriminasi, menunjukkan sikap profesional, dan tidak menyalahgunakan peran sebagai konselor. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka hubungan antara konselor dan konseli akan dibangun di atas rasa saling percaya dan saling menghargai. Layanan konseling pun akan lebih efektif dan bermakna.

Namun, tantangan dalam penerapan kode etik masih cukup besar. Banyak konselor yang belum memahami atau bahkan tidak menyadari pentingnya kode etik. Beberapa di antaranya berasal dari latar belakang non-BK dan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai. Pelanggaran pun masih sering terjadi, baik yang ringan seperti membocorkan cerita siswa, hingga pelanggaran serius seperti pelecehan atau penyalahgunaan wewenang. Dampak dari pelanggaran ini bisa sangat merugikan: siswa menjadi trauma, konselor kehilangan kepercayaan, dan nama baik sekolah pun ikut tercoreng.

Oleh karena itu, pemahaman dan komitmen terhadap kode etik harus terus dibangun, baik sejak masa pendidikan calon konselor maupun saat mereka sudah aktif bekerja. Pelatihan, supervisi, dan pembinaan etika harus menjadi bagian dari sistem pendidikan dan praktik profesional. Dengan begitu, profesi konseling akan tetap dihargai dan benar-benar bisa memberikan manfaat bagi siswa dan lingkungan pendidikan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsari, Y. (2021). Implementasi Kode Etik Guru BK dalam Melaksanakan Bimbingan Dan Konseling Di SMA Negeri 4 Tanah Putih (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera).
- Basuki, A., Farozin, M., & Setiani, I. B. (2021). Internalisasi Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 6(1).
- Bunyamin, B. (2022). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Sains Riset*, 12(1), 186-192.
- Dalimunthe, A. Q., Cahayati, A. S., Sihombing, F. S., & Saragih, M. S. (2024). Implementasi Pelaksanaan Kode Etik Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengembangkan Kemampuan Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 124-131.
- Daniati, N. H., Syukur, Y., & Sukma, D. (2025). PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Pendidikan Inovatif*,
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan kode etik konseling oleh guru bimbingan dan konseling non BK. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543*, 2(12), 605611.

PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Perubahan paradigma pendidikan dari teacher-centered menjadi student-centered menuntut adanya layanan pendukung yang mampu membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Dalam konteks ini, program bimbingan dan konseling (BK) di sekolah memiliki peran yang sangat strategis sebagai layanan bantuan psiko-pedagogis yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Peserta didik dalam masa perkembangannya menghadapi berbagai tugas perkembangan yang harus diselesaikan dengan baik. Menurut Havighurst dalam Hurlock (2018), tugas perkembangan merupakan tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu yang jika berhasil diselesaikan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Kegagalan dalam menyelesaikan tugas perkembangan akan menyebabkan ketidakhahagiaan, penolakan masyarakat, dan kesulitan dalam menghadapi tugas perkembangan selanjutnya.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) menunjukkan bahwa permasalahan peserta didik semakin beragam, mulai dari kesulitan belajar,

masalah penyesuaian sosial, konflik interpersonal, hingga krisis identitas dan kebingungan dalam perencanaan karir. Kondisi ini mengindikasikan perlunya layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan di sekolah.

Program bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya berfokus pada penanganan masalah (kuratif), tetapi lebih menekankan pada upaya preventif dan developmental. Pendekatan komprehensif dalam bimbingan dan konseling mengintegrasikan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem untuk membantu seluruh peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana konsep dasar dan landasan teoretis program bimbingan dan konseling di sekolah?
- Apa saja komponen-komponen dalam program bimbingan dan konseling komprehensif?
- Bagaimana implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah?
- Apa saja tantangan dan strategi optimalisasi program bimbingan dan konseling di sekolah?

Manfaat Praktis: Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah, makalah ini dapat menjadi panduan dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Bagi kepala sekolah dan stakeholder pendidikan, makalah ini dapat

memberikan pemahaman tentang pentingnya dukungan terhadap program bimbingan dan konseling. Bagi peserta didik, implementasi program yang baik akan memberikan layanan optimal untuk pengembangan potensi diri.

LANDASAN TEORETIS BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah "guidance and counseling" yang memiliki makna sebagai proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk membantu mereka memahami diri sendiri, lingkungannya, dan membuat keputusan yang tepat. Menurut Prayitno dan Amti (2019), bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Konseling sebagai bagian integral dari bimbingan didefinisikan sebagai proses interaksi antara konselor dan konseli dalam hubungan yang bersifat pribadi, dimana konselor menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu konseli mengatasi masalah-masalahnya. Gibson dan Mitchell (2018) menekankan bahwa konseling merupakan hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli, dimana konselor menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu konseli dalam mengatasi masalah-masalahnya.

Dalam konteks pendidikan di sekolah, bimbingan dan konseling memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan layanan bimbingan dan konseling di setting lain. Sukardi (2019) menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah merupakan layanan bantuan psiko-pedagogis yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Paradigma bimbingan dan konseling telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari pendekatan tradisional yang bersifat direktif dan problem-centered menuju pendekatan komprehensif yang bersifat developmental dan prevention-oriented. Pendekatan komprehensif menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara holistik dan berkelanjutan.

B. Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling

Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah diarahkan pada pencapaian perkembangan optimal peserta didik. Menurut Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Secara lebih spesifik, tujuan bimbingan dan konseling mencakup aspek-aspek berikut. Dalam aspek pribadi, bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mengembangkan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Dalam aspek sosial, layanan ini

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan komunikasi, hubungan interpersonal, dan penyesuaian sosial yang sehat. Dalam aspek belajar, bimbingan dan konseling membantu peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, mengatasi kesulitan belajar, dan mengoptimalkan prestasi akademik. Dalam aspek karir, layanan ini membantu peserta didik memahami potensi diri, mengenal dunia kerja, dan merencanakan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

Fungsi bimbingan dan konseling dalam pendidikan meliputi fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Fungsi pemahaman bertujuan membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Fungsi pencegahan berupaya mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Fungsi pengentasan berupaya mengatasi masalah yang dialami peserta didik. Fungsi pemeliharaan berupaya memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri peserta didik. Fungsi pengembangan berupaya mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik.

C. Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling

Implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang jelas dan konsisten. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang efektif dan bermakna bagi peserta didik.

Prinsip pertama adalah prinsip keunikan individu, yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang unik. Layanan bimbingan dan

konseling harus mampu mengakomodasi keberagaman ini melalui pendekatan yang fleksibel dan individual. Prinsip kedua adalah prinsip perkembangan, yang memandang bahwa setiap individu berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan. Layanan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik dan diarahkan untuk membantu mereka mencapai tugas perkembangan yang optimal.

Prinsip ketiga adalah prinsip perbedaan individual, yang mengakui adanya perbedaan kemampuan, minat, bakat, dan gaya belajar antar peserta didik. Program bimbingan dan konseling harus mampu mengakomodasi perbedaan ini melalui variasi layanan dan pendekatan. Prinsip keempat adalah prinsip kemandirian, yang menekankan bahwa tujuan akhir dari layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik menjadi mandiri dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalahnya sendiri.

Prinsip kelima adalah prinsip keterpaduan, yang menekankan bahwa program bimbingan dan konseling harus terintegrasi dengan seluruh program pendidikan di sekolah. Layanan tidak boleh berdiri sendiri tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Prinsip keenam adalah prinsip kerahasiaan, yang menjamin bahwa informasi pribadi peserta didik akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling.

KOMPONEN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Layanan Dasar

Layanan dasar merupakan komponen program bimbingan dan konseling yang memberikan layanan kepada

seluruh peserta didik melalui kegiatan-kegiatan kelas atau kelompok yang dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tugas perkembangan yang optimal. Myrick (2019) menjelaskan bahwa layanan dasar berfokus pada penyampaian informasi dan pengembangan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh seluruh peserta didik.

Ruang lingkup layanan dasar mencakup pengembangan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dalam aspek pribadi, layanan dasar membantu peserta didik mengembangkan pemahaman tentang potensi diri, konsep diri positif, kemampuan mengambil keputusan, dan keterampilan mengatasi stres. Dalam aspek sosial, layanan ini mengembangkan kemampuan komunikasi efektif, keterampilan interpersonal, empati, dan toleransi. Dalam aspek belajar, layanan dasar membantu peserta didik mengembangkan motivasi belajar, strategi belajar efektif, manajemen waktu, dan kemampuan pemecahan masalah akademik. Dalam aspek karir, layanan ini membantu peserta didik memahami berbagai jenis pekerjaan, mengembangkan kesadaran karir, dan merencanakan masa depan.

Strategi implementasi layanan dasar dapat dilakukan melalui berbagai metode. Bimbingan klasikal merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam setting kelas dengan jumlah peserta 25-40 orang. Layanan ini biasanya berupa penyampaian informasi atau diskusi tentang topik-topik yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Bimbingan kelompok dilakukan dengan jumlah peserta 8-15 orang yang memiliki kesamaan karakteristik atau kebutuhan. Kegiatan orientasi dan informasi memberikan pemahaman

kepada peserta didik tentang lingkungan baru dan informasi yang diperlukan untuk penyesuaian diri.

Materi layanan dasar dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik dan disesuaikan dengan karakteristik perkembangan mereka. Untuk peserta didik tingkat sekolah dasar, materi difokuskan pada pengembangan konsep diri, keterampilan bersosialisasi, dan pengenalan berbagai profesi. Untuk tingkat sekolah menengah pertama, materi mencakup pemahaman perubahan fisik dan psikologis, pengembangan identitas diri, dan penguatan motivasi belajar. Untuk tingkat sekolah menengah atas, materi diarahkan pada pemahaman potensi diri, perencanaan karir, dan persiapan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

B. Layanan Responsif

Layanan responsif merupakan komponen program bimbingan dan konseling yang memberikan bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan segera. Layanan ini bersifat kuratif dan krisis intervention yang bertujuan membantu peserta didik mengatasi masalah yang sedang dialaminya agar dapat kembali melanjutkan proses perkembangannya secara normal.

Karakteristik layanan responsif meliputi sifat segera, artinya layanan diberikan sesegera mungkin setelah masalah teridentifikasi. Layanan ini juga bersifat individual, disesuaikan dengan keunikan masalah yang dihadapi peserta didik. Pendekatan yang digunakan cenderung direktif dan solution- focused untuk membantu peserta didik menemukan solusi yang tepat dalam waktu relatif singkat.

Jenis-jenis masalah yang ditangani melalui layanan responsif sangat beragam. Masalah pribadi meliputi

rendahnya konsep diri, kecemasan, depresi, dan gangguan emosional lainnya. Masalah sosial mencakup konflik dengan teman sebaya, kesulitan penyesuaian sosial, dan masalah dalam hubungan interpersonal. Masalah belajar meliputi kesulitan memahami materi pelajaran, rendahnya motivasi belajar, prokrastinasi, dan masalah konsentrasi. Masalah karir mencakup kebingungan dalam memilih jurusan atau pekerjaan dan ketidaksesuaian antara minat dengan kemampuan.

Strategi implementasi layanan responsif dilakukan melalui konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, dan rujukan. Konseling individual merupakan layanan tatap muka antara konselor dengan satu orang peserta didik untuk membantu menyelesaikan masalah pribadi yang dihadapinya. Konseling kelompok dilakukan untuk menangani masalah yang dialami beberapa peserta didik yang memiliki kesamaan karakteristik masalah. Konsultasi dilakukan dengan melibatkan pihak lain seperti guru mata pelajaran, orang tua, atau ahli lainnya untuk mendapatkan informasi dan dukungan dalam penanganan masalah. Rujukan dilakukan ketika masalah yang dihadapi peserta didik memerlukan penanganan dari ahli lain yang lebih kompeten.

C. Perencanaan Individual

Perencanaan individual merupakan komponen program bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pendidikan, karir, dan personal- sosial berdasarkan pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Komponen ini menekankan pada pengembangan kemampuan

peserta didik dalam merencanakan, memonitor, dan mengelola pembelajaran serta perkembangan karirnya sendiri.

Tujuan perencanaan individual adalah membantu peserta didik memahami dan memonitor pertumbuhan serta perkembangannya, mengintegrasikan pengalaman belajar dengan perencanaan masa depan, dan mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang efektif. Melalui proses ini, peserta didik diharapkan mampu menetapkan tujuan yang realistis dan mengembangkan strategi untuk mencapainya.

Komponen utama perencanaan individual meliputi asesmen individual, portfolio perkembangan, perencanaan akademik, dan perencanaan karir. Asesmen individual dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, minat, bakat, dan karakteristik kepribadian peserta didik melalui berbagai instrumen tes dan non-tes. Portfolio perkembangan merupakan kumpulan dokumen yang menggambarkan perkembangan dan pencapaian peserta didik dari waktu ke waktu. Perencanaan akademik membantu peserta didik dalam memilih mata pelajaran, program studi, dan aktivitas ekstrakurikuler yang sesuai dengan tujuan pendidikannya. Perencanaan karir membantu peserta didik mengembangkan kesadaran karir dan menyusun rencana karir jangka pendek dan jangka panjang.

Implementasi perencanaan individual melibatkan kolaborasi antara konselor, peserta didik, guru, dan orang tua. Proses dimulai dengan pengumpulan informasi tentang peserta didik melalui observasi, wawancara, dan asesmen. Selanjutnya, konselor bersama peserta didik menganalisis informasi tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Berdasarkan analisis ini,

disusun rencana pengembangan yang spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound (SMART). Implementasi rencana dilakukan dengan dukungan dan monitoring yang berkelanjutan, serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas rencana yang telah disusun.

D. Dukungan Sistem

Dukungan sistem merupakan komponen program bimbingan dan konseling yang memberikan dukungan tidak langsung kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan manajemen, konsultasi, dan kolaborasi yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Komponen ini memastikan bahwa program bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Ruang lingkup dukungan sistem mencakup pengembangan profesional konselor, manajemen program, konsultasi dengan stakeholder, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pengembangan profesional konselor meliputi kegiatan pelatihan, workshop, seminar, dan studi lanjut untuk meningkatkan kompetensi konselor. Manajemen program mencakup perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program bimbingan dan konseling. Konsultasi dengan stakeholder dilakukan untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap program bimbingan dan konseling. Kolaborasi dengan berbagai pihak bertujuan mengoptimalkan sumber daya dan dukungan untuk kesuksesan program.

Kegiatan dalam dukungan sistem meliputi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, penelitian dan evaluasi program, advokasi program, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Sistem informasi dikembangkan

untuk mendokumentasikan layanan, melacak perkembangan peserta didik, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Advokasi program dilakukan untuk membangun kesadaran dan dukungan terhadap pentingnya layanan bimbingan dan konseling. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan untuk memastikan integrasi program dengan sistem pendidikan yang lebih luas.

Stakeholder yang terlibat dalam dukungan sistem meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Kepala sekolah berperan sebagai leader yang memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya. Guru mata pelajaran berkolaborasi dalam mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan layanan dan mengintegrasikan layanan dengan pembelajaran. Orang tua terlibat dalam mendukung implementasi rencana pengembangan peserta didik di rumah. Masyarakat dan lembaga terkait memberikan dukungan sumber daya dan kesempatan untuk pengembangan peserta didik.

IMPLEMENTASI PROGRAM BK DI SEKOLAH

A. Perencanaan Program

Perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah merupakan langkah fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi layanan. Perencanaan yang sistematis dan komprehensif akan menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut Gysbers dan Henderson (2019), perencanaan program harus didasarkan pada data dan evidensi empiris tentang kebutuhan peserta didik dan karakteristik sekolah.

Tahap pertama dalam perencanaan program adalah analisis kebutuhan (need assessment). Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan riil peserta didik, guru, orang tua, dan stakeholder lainnya terhadap layanan bimbingan dan konseling. Analisis kebutuhan dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, focus group discussion, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan yang akan menjadi dasar pengembangan program.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, disusun tujuan program yang spesifik dan terukur. Tujuan program harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah serta mengacu pada standar kompetensi kemandirian peserta didik. Tujuan umum kemudian dijabarkan menjadi tujuan khusus yang lebih operasional dan dapat diukur pencapaiannya. Setiap tujuan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diobservasi.

Komponen selanjutnya adalah penyusunan struktur program yang mencakup alokasi waktu untuk setiap komponen layanan. Berdasarkan standar nasional, alokasi

waktu untuk layanan dasar adalah 25-35%, layanan responsif 25-35%, perencanaan individual 25-35%, dan dukungan sistem 10- 15%. Namun, proporsi ini dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik sekolah.

Perencanaan program juga mencakup pengembangan kurikulum bimbingan dan konseling yang sistematis dan berkesinambungan. Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi kemandirian peserta didik yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Setiap kompetensi dijabarkan menjadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang spesifik untuk setiap tingkat kelas.

B. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah memerlukan strategi yang terencana dan sistematis. Implementasi harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kultur sekolah. Keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh stakeholder sekolah.

Layanan dasar dilaksanakan melalui berbagai strategi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi yang disampaikan. Bimbingan klasikal dapat dilakukan melalui jam khusus bimbingan konseling atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Metode yang digunakan bervariasi mulai dari ceramah interaktif, diskusi kelompok, role playing, simulasi, hingga penggunaan media audio visual dan teknologi informasi.

Layanan responsif dilaksanakan berdasarkan identifikasi masalah yang dialami peserta didik. Proses identifikasi dapat dilakukan melalui referral dari guru mata pelajaran, laporan dari orang tua, self-referral dari peserta

didik, atau hasil observasi konselor. Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan asesmen untuk memahami dinamika masalah dan menentukan strategi intervensi yang tepat. Konseling individual menjadi strategi utama dalam layanan responsif, namun dapat dikombinasikan dengan konseling kelompok, konsultasi, atau rujukan sesuai kebutuhan.

Perencanaan individual dilaksanakan melalui proses yang melibatkan peserta didik secara aktif. Konselor memfasilitasi peserta didik untuk melakukan self-assessment, mengeksplorasi berbagai pilihan, dan menyusun rencana pengembangan diri. Portfolio perkembangan menjadi alat utama dalam mendokumentasikan proses dan hasil perencanaan individual. Implementasi rencana individual memerlukan monitoring dan dukungan berkelanjutan dari konselor, guru, dan orang tua.

Dukungan sistem dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang mendukung efektivitas program secara keseluruhan. Konselor mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang memadai, melakukan konsultasi dengan guru dan orang tua, berkolaborasi dengan lembaga eksternal, dan mengembangkan jejaring profesional. Kegiatan advokasi program juga dilakukan untuk membangun pemahaman dan dukungan stakeholder terhadap pentingnya layanan bimbingan dan konseling.

Implementasi program memerlukan manajemen yang efektif dalam aspek waktu, sumber daya, dan koordinasi. Konselor harus mampu mengelola waktu secara efisien untuk memberikan layanan yang optimal kepada seluruh peserta didik. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan integrasi program dengan seluruh aktivitas pendidikan di sekolah.

C. Evaluasi Program

Evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi tentang efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir program, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang terintegrasi dengan implementasi program. Menurut Stufflebeam dalam Gysbers dan Henderson (2019), evaluasi program harus mencakup evaluasi konteks, input, proses, dan produk (CIPP model).

Evaluasi konteks bertujuan menganalisis lingkungan program, mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan mendiagnosis masalah yang mendasari kebutuhan tersebut. Dalam konteks program bimbingan dan konseling, evaluasi ini mengkaji kesesuaian program dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik sekolah, dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Evaluasi input menganalisis kemampuan sistem untuk menggunakan sumber daya guna mencapai tujuan program. Komponen yang dievaluasi meliputi kualifikasi dan kompetensi konselor, fasilitas dan sarana prasarana, anggaran program, dan dukungan stakeholder.

Evaluasi proses mengkaji implementasi program secara berkelanjutan untuk memberikan feedback kepada pengelola program tentang sejauh mana program telah dilaksanakan sesuai rencana. Aspek yang dievaluasi meliputi kualitas layanan, ketepatan strategi implementasi, partisipasi peserta didik, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan. Evaluasi produk mengukur pencapaian tujuan program baik selama implementasi maupun setelah program selesai. Fokus evaluasi ini adalah mengukur perubahan yang terjadi pada peserta didik sebagai hasil dari layanan yang diberikan.

Metode evaluasi program bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen terstandar untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, kepuasan terhadap layanan, dan indikator keberhasilan lainnya. Pendekatan kualitatif menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan focus group discussion untuk memahami pengalaman dan persepsi stakeholder terhadap program. Mixed method menggabungkan kedua pendekatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas program.

Hasil evaluasi program harus didokumentasikan dalam laporan yang sistematis dan komprehensif. Laporan evaluasi mencakup deskripsi program, metodologi evaluasi, temuan utama, analisis dan interpretasi data, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan program. Laporan ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan tentang pengembangan program ke depan, alokasi sumber daya, dan strategi peningkatan kualitas layanan.

Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan program merupakan aspek yang sangat penting dalam siklus pengembangan program. Hasil evaluasi digunakan untuk merevisi tujuan program, memperbaiki strategi implementasi, mengembangkan kompetensi konselor, dan meningkatkan sistem dukungan. Proses ini menciptakan siklus continuous improvement yang memastikan program bimbingan dan konseling terus berkembang dan meningkat kualitasnya.

Kesimpulan

Program BK di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara

menyeluruh. Program BK tidak hanya berfungsi untuk membantu siswa yang mengalami masalah, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan potensi, membentuk karakter, dan membimbing peserta didik agar mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik. Pemahaman ini membuat penulis menyadari bahwa profesi konselor sekolah bukanlah peran yang sederhana, melainkan tugas yang kompleks dan menuntut tanggung jawab besar.

Penulis juga semakin memahami bahwa program bimbingan dan konseling dibangun di atas dasar teori dan prinsip humanistik yang menekankan pada pentingnya menghargai keunikan setiap individu. Hal ini memberikan panduan bahwa dalam memberikan layanan, seorang konselor harus melihat peserta didik sebagai pribadi yang berharga dan memiliki potensi untuk berkembang. Selain itu, dengan mempelajari empat komponen utama dalam program BK komprehensif, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem, penulis memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana layanan bimbingan harus dirancang secara menyeluruh agar dapat menjangkau seluruh kebutuhan peserta didik.

Melalui analisis terhadap implementasi program BK di sekolah, penulis menyadari bahwa di lapangan, seorang konselor akan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman stakeholder terhadap peran konselor, maupun keterbatasan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan guru, kepala sekolah, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Penulis menyadari bahwa selain kompetensi teknis, seorang konselor juga perlu memiliki

keterampilan komunikasi, empati, serta kemampuan untuk mengadvokasi kebutuhan peserta didik di lingkungan sekolah.

Pemahaman mengenai pentingnya evaluasi program juga menjadi bagian penting dari pembelajaran penulis. Evaluasi bukan hanya untuk mengetahui keberhasilan program, tetapi juga sebagai alat untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan siswa.

Seorang konselor harus mampu melakukan evaluasi secara berkala agar program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi perkembangan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Minneapolis: Educational Media Corporation.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2019). *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program* (6th ed.). Alexandria: American Counseling Association.
- Myrick, R. D. (2019). *Developmental Guidance and Counseling: A Practical Approach*
- Prayitno & Amti, E. (2019). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi, D. K. (2019). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriatna, M. (2019). *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2019). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

A. Defenisi Profesi Bimbingan dan Konseling

PENDIDIKAN DAN PERAN KONSELOR

- Pendidikan merupakan Proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik.
- konselor pendidik membantu peserta didik mengembangkan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan

Contoh Implementasi:

Guru BK mengadakan kelas motivasi belajar bagi siswa kelas XII menjelang ujian nasional

KARAKTERISTIK PROFESIONAL

- Keahlian khusus (bukan pekerjaan sampingan).
- Pendidikan dan pelatihan formal.
- Etika kerja dan tanggung jawab.

Contoh Implementasi:

Guru BK mengikuti pelatihan asesmen psikologis untuk memperbaharui kompetensinya.

PERAN GURU BK DI SEKOLAH

- Keberagaman siswa (minat, motivasi, masalah pribadi).
- Tantangan belajar, tekanan sosial, masalah emosional.

Contoh Implementasi:

Konselor sekolah memfasilitasi sesi konseling kelo. untuk siswa dengan masalah pertemanan.

KOMPETENSI KONSELOR

1. Pedagogik
2. Kepribadian
3. Sosial
4. Profesional

Contoh Implementasi:

Konselor memahami perkembangan psikologi remaja untuk merancang program pencegahan bullying.

TAHAPAN PERKEMBANGAN BK DI INDONESIA:

- Dari BP (Bimbingan dan Penyuluhan) → BK modern
- Didirikannya Program Profesi Konselor (PPK)
- Dibentuknya IKI (Ikatan Konselor Indonesia)

Contoh Implementasi:

Lulusan PPK ditugaskan menjadi koordinator layanan konseling di SMA negeri

TANTANGAN DAN KESALAHPAHAMAN

- BK = polisi sekolah
- BK hanya untuk siswa bermasalah
- BK = pemberi nasihat

Contoh Implementasi:

Konselor mengadakan sosialisasi peran BK kepada seluruh siswa dan orang tua saat awal tahun ajaran.



KONSELOR SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

- Kolaborasi dengan guru, kepala sekolah, orang tua.
- Pemberdayaan siswa melalui pendekatan humanistik.

Contoh Implementasi:

Guru BK memimpin program “Teman Sebaya” untuk mengatasi perundungan di sekolah.

ASPEK PROFESIONAL BK

- Asesmen kebutuhan siswa
- Rancang & evaluasi program BK
- Etika profesi
- Penelitian & pengembangan layanan

Contoh Implementasi:

Guru BK membuat instrumen survei minat karier dan menggunakan hasilnya untuk bimbingan jurusan.



PROFESI

PENGERTIAN

Secara etimologis, istilah "profesi" berasal dari kata profession dalam bahasa Inggris, yang berakar dari bahasa Latin profesus, yang berarti "mampu" atau "ahli" dalam suatu bidang pekerjaan. Profesi dapat diartikan sebagai suatu jenis pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan tertentu. Selain itu, profesi juga mensyaratkan kualifikasi tertentu, serta mengandung tanggung jawab dan berpegang pada kode etik yang berlaku.

4 ISTILAH DALAM KONSEP PROFESI

- Profesional** Merujuk pada keahlian atau kemampuan seseorang dalam bidang yang dipilihnya.
- Profesionalisme** Menggambarkan sikap seseorang yang memiliki profesi dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kemampuannya serta mengembangkan strategi-strategi yang diterapkan dalam profesinya.
- Profesionalitas** Menunjukkan sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan profesi atau bidang pekerjaan yang dipilih.
- Profesionalisasi** Mengacu pada proses pengembangan keprofesionalan seseorang, yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan lainnya.

Ciri-ciri Profesi

- Fungsi Sosial**
Profesi dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan memerlukan penguatan dari masyarakat itu sendiri.
- Keahlian Khusus**
Profesi menuntut keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan intensif, serta melibatkan pemecahan masalah dan penilaian mandiri.
- Landasan Ilmiah**
Profesi didukung oleh disiplin ilmu yang sistematis, bukan hanya berdasarkan pengalaman atau akal sehat.
- Kode Etik**
Setiap profesi memiliki pedoman perilaku (kode etik) lengkap dengan sanksi, yang diawasi oleh organisasi profesi.
- Imbalan Profesional**
Profesional berhak menerima imbalan finansial atau materil sebagai bentuk apresiasi atas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

PENGERTIAN

PROFESI KEGURUAN

Profesi keguruan adalah profesi yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keguruan serta memiliki keahlian dalam proses pengajaran. Seorang guru juga mengabdikan diri kepada masyarakat dengan menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan.



TUGAS

PARA GURU

○ Korektor

Membantu membedakan dan memperkuat nilai positif serta menghapuskan nilai negatif yang dimiliki siswa.

○ Inspirator

Menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi siswa, menghubungkan teori dengan praktik untuk pembelajaran yang bermakna.

○ Informan

Menyampaikan informasi akurat tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan materi pelajaran sesuai kurikulum.

○ Organisator

Mengelola seluruh proses pembelajaran, termasuk perencanaan, penjadwalan, dan pengorganisasian kegiatan akademik.

○ Motivator

Mendorong semangat belajar siswa dan merancang strategi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar.

○ Inisiator

Menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru guna mendorong kemajuan pembelajaran dan menciptakan iklim belajar yang positif.

SYARAT-SYARAT PROFESI GURU

- Pedagogik** Kemampuan mengelola proses pembelajaran, memahami karakteristik siswa, merancang & melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, dan mengembangkan potensi peserta didik.
- Kepribadian** Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa; menjadi teladan dan menjunjung akhlak mulia.
- Profesional** Menguasai materi pembelajaran secara luas & mendalam, serta mampu membimbing siswa mencapai standar kompetensi pendidikan nasional.
- Sosial** Mampu berkomunikasi & berinteraksi secara efektif dengan siswa, rekan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

PROFESI

BIMBINGAN DAN KONSELING

Profesi Bimbingan dan Konseling merupakan suatu bentuk keahlian dalam memberikan layanan yang bertokus pada pengembangan pribadi dan pemecahan masalah, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan para pengguna layanan.

Layanan ini disesuaikan dengan martabat, nilai-nilai, potensi, serta keunikan individu, yang dilakukan berdasarkan kajian ilmiah serta penerapan teknologi dalam bidang pendidikan dan psikologi.

Proses penerapan tersebut dikemas dalam praktik konseling yang memperhatikan latar belakang budaya dari pihak-pihak yang terlibat.

4

PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

3

BIMBINGAN DAN KONSELING

BK

PENGERTIAN

Bimbingan dan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional kepada individu agar mereka dapat memahami diri sendiri, mengembangkan potensi, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan untuk memberdayakan individu agar mampu mengembangkan potensi diri dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Konseling adalah hubungan profesional antara konselor dan klien yang bertujuan membantu klien memahami diri, mengatasi masalah, dan mencapai perkembangan pribadi yang optimal.

B. Kompetensi Kepribadian Konselor dan Kompetensi Kepribadian Guru BK

- 

PENGERTIAN KOMPETENSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah suatu gabungan atau kumpulan dari pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang wajib dimiliki, dipahami secara mendalam, dan dikuasai secara menyeluruh oleh seorang guru maupun dosen dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya secara profesional.


- 

PENGERTIAN KEPERIBADIAN

Secara umum, menurut Karim (2020), kepribadian dapat dipahami sebagai suatu susunan yang bersifat dinamis antara aspek psikologis dan fisik dalam diri setiap individu, yang secara keseluruhan membentuk cara unik seseorang dalam beradaptasi dan merespons berbagai situasi atau kondisi di lingkungannya.


- 

PENGERTIAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN

Kompetensi kepribadian adalah salah satu dari empat kompetensi utama guru menurut UU No. 14 Tahun 2005. Kompetensi ini mencerminkan karakter yang stabil, bijaksana, dan profesional, serta berpengaruh besar terhadap kualitas kinerja dan efektivitas pembelajaran.



4

PENTINGNYA KOMPETENSI KEPRIBADIAN

Kompetensi kepribadian guru berperan penting dalam membentuk karakter, etika, dan profesionalisme. Kepribadian yang kuat dan positif berdampak langsung pada kualitas interaksi, keberhasilan pembelajaran, dan pencapaian hasil belajar siswa.



5

DEFINISI KONSELOR DALAM KONTEKS PENDIDIKAN

Konselor pendidikan adalah tenaga profesional dengan keahlian khusus dalam bimbingan dan konseling. Mereka memberikan layanan secara sistematis dan ilmiah untuk membantu individu atau kelompok mengatasi masalah pribadi, sosial, emosional, dan akademik. Konselor wajib memiliki sertifikasi, lisensi resmi, dan pendidikan formal (S1-S3 serta profesi). Perannya sangat penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara utuh dan berkualitas.



6

CIRI-CIRI KEPRIBADIAN KONSELOR YANG EFEKTIF MENURUT CARL ROGERS

- 01 Cogruence (genuineness, authenticity)
- 02 Unconditional positive regard (acceptance)
- 03 Empathy



CIRI-CIRI KEPRIBADIAN KONSELOR YANG EFEKTIF MENURUT EISENBERG DAN DELANCY

- 1 Menciptakan Suasana Aman
- 2 Menumbuhkan Kepercayaan Diri
- 3 Berwawasan Luas dan Terbuka
- 4 Komunikatif dan Penuh Hormat
- 5 Menjaga Etika dan Integritas
- 6 Memiliki Keahlian Khusus

7



CIRI-CIRI KEPRIBADIAN KONSELOR YANG EFEKTIF MENURUT EISENBERG DAN DELANCY

- 7 Tidak Menghakimi
- 8 Berpikir Sistematis
- 9 Berwawasan Luas dan Aktual
- 10 Mampu Mengenali Perilaku Negatif
- 11 Membantu Konseli Mengenal Diri

8



TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KONSELOR

Konselor di era modern menghadapi tantangan kompleks akibat kemajuan teknologi, dinamika sosial, dan masalah psikologis yang meningkat. Mereka dituntut memiliki kompetensi akademik, emosional, sosial, dan profesional. Layanan konseling harus inovatif dan berbasis digital. Pengembangan diri melalui pelatihan dan pengalaman lapangan sangat penting agar konselor tetap adaptif dan efektif dalam mendampingi peserta didik.

9





PERAN DAN TANGGUNG JAWAB GURU BK

- 1 Pendekatan yang menyeluruh, terpadu, profesional, dan berbasis etika untuk merancang program yang efektif dan bermanfaat bagi peserta didik.
- 2 Kerja sama erat antara sekolah, orang tua, guru, dan lembaga luar untuk mendukung layanan konseling secara optimal dan berkelanjutan.
- 3 Pemimpin setara kepala sekolah dalam pengembangan dan implementasi program, termasuk strategi, prosedur, dan target hasil yang terencana dan terukur.

10

STANDAR KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU BK

- 1 Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2 Menghargai dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kemanusiaan
- 3 Menunjukkan Integritas dan Stabilitas Kepribadian yang Kuat
- 4 Menampilkan Kinerja yang Berkualitas Tinggi

11

Pengertian Kode Etik BK

Kode etik Bimbingan dan Konseling adalah pedoman moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh konselor dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan menjaga kualitas layanan, menghormati hak klien, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Dalam konteks pelayanan yang menyentuh ranah pribadi dan rentan bagi individu, keberadaan kode etik bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah keharusan moral dan profesional. Oleh karena itu, memahami, menghayati, dan mengimplementasikan setiap butir kode etik adalah inti dari profesionalisme seorang konselor.



Tujuan Kode Etik BK

- ➔ Menjaga integritas profesi konselor.
- ➔ Melindungi hak dan kepentingan klien.
- ➔ Menjadi pedoman dalam bertindak secara etis dan profesional.
- ➔ Meningkatkan mutu layanan BK.



Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik BK

- Konselor wajib menjaga rahasia informasi pribadi klien, kecuali dalam kondisi yang membahayakan klien atau orang lain.
- Konselor menghargai hak klien untuk membuat keputusan sendiri dalam proses konseling.
- Konselor tidak boleh membedakan klien berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, latar belakang sosial, dll.



- Konselor wajib terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat memberikan layanan yang bermutu.
- Konselor bertanggung jawab atas setiap tindakan profesional yang diambil selama proses konseling.
- Hubungan konselor dan klien bersifat profesional, tidak boleh melibatkan hubungan pribadi atau emosional yang menyimpang.



Contoh Kode Etik Konselor

1. Konselor menghormati harkat dan martabat individu.
2. Konselor menjaga kerahasiaan klien secara ketat.
3. Konselor tidak menggunakan informasi klien untuk kepentingan pribadi.
4. Konselor harus memiliki lisensi atau izin praktik sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Konselor menjauhi konflik kepentingan dalam praktik profesinya.



Tanggung Jawab Konselor

Konselor memiliki tanggung jawab terhadap:

1. Klien: Menjamin hak-hak klien terpenuhi.
2. Profesi: Menjaga citra profesi Bimbingan dan Konseling.
3. Lembaga: Mematuhi kebijakan tempat bekerja.
4. Diri sendiri: Terus belajar dan menjaga kesehatan mental dan etika pribadi.



Pelanggaran Kode Etik BK

Jika seorang konselor melanggar kode etik, maka ia bisa dikenai:

1. Teguran
2. Peringatan
3. Sanksi organisasi profesi
4. Pencabutan izin praktik (dalam kasus berat)



Peran Organisasi Profesi

Organisasi seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) bertugas untuk:

- Menyusun dan menyempurnakan kode etik.
- Mengawasi pelaksanaan kode etik.
- Memberikan pelatihan dan sanksi kepada anggotanya jika terjadi pelanggaran.



C. Sikap Personal Keguruan

LATAR BELAKANG

Guru bukan sekadar pekerjaan, tetapi profesi yang menuntut teladan. Murid akan memerhatikan bagaimana sikap dan perilaku guru dalam keseharian, bukan hanya saat mengajar. Karena itu, guru dituntut memiliki kepribadian yang bisa digugu dan ditiru.

Artinya, seorang guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu membentuk karakter peserta didik melalui sikap dan perilaku yang ia tampilkan. Dalam kondisi dunia yang cepat berubah, siswa juga semakin kritis. Maka, konsistensi antara kata dan tindakan guru menjadi sangat penting agar tetap dihargai dan diikuti oleh siswa.

APA ITU SIKAP PERSONAL

Sikap personal adalah ekspresi kepribadian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan situasi sekitarnya.

Sikap personal dapat terbentuk dari kebiasaan, nilai-nilai yang dianut, serta pengalaman hidup. Seorang guru harus mampu menunjukkan sikap personal yang positif karena murid tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari bagaimana guru bersikap di dalam maupun di luar kelas.

SIKAP PERSONAL DALAM KEGURUAN

Dalam konteks keguruan, sikap personal merujuk pada pola sikap, pikiran, perasaan, dan tindakan yang mencerminkan kematangan pribadi dan profesional seorang guru. Sikap ini meliputi tanggung jawab, empati, kejujuran, integritas, kesabaran, dan kemampuan menjaga hubungan yang sehat dengan peserta didik maupun rekan kerja.

Guru yang memiliki sikap personal yang baik akan lebih mudah menjalin kedekatan emosional dengan murid, membangun kepercayaan, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman.

KOMPONEN UTAMA SIKAP PERSONAL GURU

- Empati: kemampuan memahami perasaan siswa.
- Tanggung jawab moral dan sosial: menjalankan tugas dengan kesadaran etis.
- Kejujuran dan integritas: berkata dan bertindak sesuai hati nurani.
- Kesabaran: menghadapi siswa dan situasi sulit dengan tenang.
- Kedisiplinan: konsisten dalam peraturan dan waktu.
- Keterbukaan terhadap kritik: mau belajar dari pengalaman dan masukan.

CIRI-CIRI GURU YANG BAIK SIKAP PERSONALNYA

Tangguh dan sabar dalam menghadapi tantangan mengajar.

Jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Disiplin dan konsisten dalam bertindak.

Sadar akan pentingnya introspeksi dan mau menerima kritik.

LANDASAN FILOSOFIS: NILAI PANCASILA

Ketuhanan: membentuk moral guru yang ikhlas dan adil.

Kemanusiaan: menghargai hak dan martabat setiap siswa.

Persatuan: menciptakan kelas yang inklusif dan rukun.

Kerakyatan: terbuka untuk diskusi dan demokratis dalam mengajar.

Keadilan sosial: memberikan perlakuan yang setara kepada semua siswa.

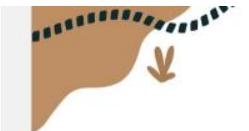


PERAN SIKAP PERSONAL TERHADAP PESERTA DIDIK



Sikap personal guru berpengaruh langsung terhadap motivasi belajar siswa. Guru yang bersikap positif akan memunculkan semangat dan rasa percaya diri pada siswa.

Hubungan yang baik antara guru dan siswa akan memperlancar komunikasi, membuat siswa merasa nyaman, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna.



PERAN SIKAP PERSONAL DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH



Sikap personal guru juga berpengaruh pada dinamika sosial di sekolah. Guru yang mampu bekerja sama, menghargai sesama, dan menjaga komunikasi yang sehat akan menciptakan suasana kerja yang harmonis.



Hal ini berdampak pada terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan proses pendidikan secara menyeluruh.





SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN

Sikap profesional dalam konteks keguruan mencerminkan komitmen, integritas, dan kompetensi seorang guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Guru bukan sekedar penyampai materi pelajaran, melainkan figur yang diteladani dalam hal nilai, perilaku, dan moral. Guru adalah pemimpin, penginspirasi, sekaligus fasilitator yang mampu membentuk pribadi peserta didik yang utuh.

Di era pendidikan modern, guru dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks. Mereka tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menyampaikan komunikasi yang efektif, menyusun perencanaan pembelajaran yang adaptif, serta mengembangkan strategi evaluasi yang objektif dan membangun. Guru juga ditantang untuk melek teknologi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi generasi digital yang memiliki karakteristik belajar yang berbeda

KARAKTERISTIK PROFESI KEGURUAN



Keguruan sebagai profesi memiliki beberapa ciri, antara lain:

1. Membutuhkan Pendidikan Formal - Seorang guru harus menempuh pendidikan tinggi, minimal strata satu (S1), dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikasi pendidik.
2. Memunyai Kompetensi Khusus - Guru dituntut memiliki empat kompetensi dasar: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
3. Mengabdikan kepada Kepentingan Publik - Tugas guru adalah membentuk generasi masa depan. Oleh karena itu, profesi ini menuntut dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi.
4. Memiliki Kode Etik - Guru terikat pada kode etik profesi yang mengatur hubungan dengan peserta didik, rekan sejawat, institusi, dan masyarakat



GURU BK DALAM BINGKAI PROFESI KEGURUAN



Dalam lingkup bimbingan dan konseling, guru BK memiliki peran yang sangat spesifik namun tidak kalah pentingnya. Mereka berperan sebagai konselor yang membantu peserta didik mengenali potensi diri, mengatasi hambatan pribadi, serta merencanakan masa depan pendidikan dan kariernya. Sikap profesional guru BK harus tercermin dalam kemampuannya menjaga kerahasiaan konseling, tidak memihak, dan mampu membangun hubungan empatik dengan siswa.

Guru BK juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip dasar konseling, termasuk dalam menangani kasus-kasus khusus seperti bullying, kekerasan dalam rumah tangga, krisis identitas, serta gangguan kecemasan atau depresi pada peserta didik. Di sinilah letak hakikat profesi keguruan dalam bidang BK: tidak hanya bekerja pada aspek akademik, tetapi juga dalam aspek sosial-emosional dan pengembangan karakter siswa.



KARAKTERISTIK UMUM GURU PROFESIONAL

1. Memiliki Komitmen Terhadap Tugas Pendidikan
2. Menunjukkan Tanggung Jawab Sosial dan Etik
3. Menguasai Kompetensi Dasar Guru
4. Mampu Menjadi Teladan
5. Mampu Menyesuaikan Diri dengan Perkembangan Zaman
6. Memelihara Hubungan Baik dengan Lingkungan



KOMPETENSI INTI GURU

- Pedagogik: memahami karakter dan kebutuhan siswa.
- Kepribadian: stabil, dewasa, dan berintegritas.
- Sosial: komunikatif dan kolaboratif.
- Profesional: penguasaan materi dan strategi pembelajaran.



KOMPETENSI INTI GURU PROFESIONAL

Guru yang profesional tidak hanya ditandai dengan keahliannya di ruang kelas atau interaksinya dengan peserta didik, tetapi juga oleh kompetensi yang melekat pada dirinya dalam menjalankan tugas pendidikannya. Kompetensi ini menjadi fondasi utama yang membentuk integritas dan efektivitas seorang guru dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembelajaran dan pembentuk karakter peserta didik



6-8/13





DAMPAK PROFESIONALISME

- Meningkatkan motivasi dan rasa aman siswa.
- Membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat.
- Mewujudkan pendidikan yang berkualitas.



GURU SEBAGAI PEMIMPIN & INSPIRATOR

- Memimpin kelas dengan keteladanan.
- Menumbuhkan harapan dan semangat hidup siswa.
- Menjadi pendamping yang membimbing dengan hati.

TANTANGAN ERA DIGITAL

- Adaptasi dengan pembelajaran berani dan teknologi.
- Menghadapi dampak digital: cyberbullying, kecanduan media.
- Tetap menjunjung etika dalam dunia maya.



PENINGKATAN PROFESIONALISME

- Pelatihan dan refleksi berkelanjutan.
- Partisipasi dalam komunitas profesi.
- Pengembangan karakter, etika, dan kompetensi digital.



PRAKTIK SIKAP PROFESIONAL

- Berperilaku santun, adil, dan bertanggung jawab.
- Mengelola kelas secara positif dan inklusif.
- Menjadi teladan dalam tindakan dan ucapan



PROFESIONALISME GURU BK

- Menjadi pendamping pribadi siswa.
- melibatkan masalah emosional, sosial, dan akademik siswa.
- Menyusun program bimbingan sesuai kebutuhan perkembangan.



D. Layanan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah



PENGERTIAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Layanan merupakan perihal atau cara melayani atau meladeni. Adapun bimbingan dan konseling berasal dari dua kata yaitu "bimbingan dan konseling" bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang didalamnya terkandung beberapa makna.

Mutia, S (2021) Mengemukakan bahwa guidance berasal dari kata guide yang mempunyai arti to direct, pilot, manager, or steer, artinya menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan. Tujuan utama layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Pelaksanaan layanan BK bukan seperti pelaksanaan mata pelajaran pada umumnya yang terikat jam pelajaran tetap. Mutia, S (2021) menegaskan bahwa layanan BK dapat dilakukan di luar jam sekolah dan tidak boleh mengganggu proses belajar siswa. SK Menpan No. 84/1993 serta SKB Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 menyebutkan bahwa tugas guru BK meliputi penyusunan program, pelaksanaan layanan, dan evaluasi terhadap siswa, dengan rasio satu guru BK untuk 150 siswa. Oleh karena itu, beban kerja guru BK ditetapkan sebanyak 36 jam per minggu, Mutia, S (2021).

Keberhasilan layanan BK memerlukan kerja sama dengan siswa, guru, wali kelas, orang tua, kepala sekolah, dan bahkan instansi eksternal seperti psikiater atau dinas sosial untuk menangani kasus-kasus khusus.

Jam khusus untuk pelaksanaan BK di luar pelajaran umum harus tetap diperjuangkan, dan program harus disusun berdasarkan kebutuhan sekolah.

Evaluasi serta pengawasan yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah menjadi kunci keberhasilan program, dan semua itu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan.



PROBLEMATIKA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan karena tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual siswa, tetapi juga pada perkembangan emosional, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia menuju generasi emas 2045, keberadaan layanan Bimbingan dan Konseling sangat strategis untuk membentuk siswa yang berkarakter, mandiri, serta mampu mengatasi tantangan zaman.



Fitriani et al. (2022) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama layanan BK adalah kurangnya pemahaman dari siswa, guru mata pelajaran, dan masyarakat mengenai fungsi BK. Banyak siswa menganggap guru BK sebagai "polisi sekolah", yaitu sosok yang hanya berurusan dengan siswa yang bermasalah.

Padahal, menurut Aqib (2020), fungsi layanan BK mencakup upaya preventif (pencegahan), preservatif (pemeliharaan kondisi positif siswa), dan kuratif (penyelesaian masalah). Jika pemahaman ini tidak dimiliki secara luas, maka kolaborasi antarguru akan terganggu dan keberhasilan program BK tidak maksimal.



PERAN GURU SEBAGAI PELAKSANA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan siswa secara optimal. Menurut Pangestu, Umari, dan Yakub (2022), pendidikan di sekolah tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membantu siswa memecahkan masalah, mengembangkan potensi diri, dan membentuk karakter.



FAKTA DI LAPANGAN MENUNJUKKAN BAHWA BELUM SEMUA SEKOLAH MEMILIKI GURU BK PROFESIONAL. SEBAGAI GANTINYA, PERAN INI DIJALANKAN OLEH WALI KELAS.

Pangestu et al. (2022) menyatakan bahwa wali kelas memegang tanggung jawab dalam menjalankan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Peran wali kelas dalam layanan BK mencakup beberapa fungsi strategis, yaitu:

- Fasilitator: Membantu siswa dalam mengenali dan mengembangkan potensinya.
- Motivator: Mendorong siswa untuk bersemangat dalam belajar dan berperilaku positif.
- Informator dan Mediator: Menyampaikan informasi dan menjadi jembatan antara siswa, orang tua, dan sekolah.
- Evaluator: Menilai dan mengembangkan program layanan berdasarkan kebutuhan siswa.



Mengapa Kompetensi Kepribadian Penting?

1

1. Kompetensi kepribadian adalah fondasi utama dan jiwa dari praktik konseling yang efektif.
2. Ini krusial untuk membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan konseli atau siswa.
3. Tujuannya adalah memfasilitasi perubahan positif yang signifikan pada diri mereka.

“Konseling bukan sekadar profesi, melainkan perjalanan hati yang membimbing jiwa”



Dimensi Utama Kompetensi Kepribadian Konselor

2

Kesehatan Mental:

Stabilitas emosional dan kesejahteraan psikologis.

Kematangan Moral & Etika

Integritas, nilai-nilai luhur, dan perilaku profesional.



Self-Efficacy

Keyakinan pada kemampuan diri sebagai konselor.

Kesehatan Mental: Pilar Utama Guru BK

Empati, keadilan, dan penerimaan tanpa syarat.

Kesehatan Mental: Pilar Utama Guru BK

3

1. Guru BK memerlukan kondisi psikologis yang stabil dan positif untuk menjalankan tugasnya.
2. Kesehatan mental yang baik memungkinkan empati, pengelolaan stres, dan ketahanan diri dalam bInspirasi dari Kearifan Lokal:
 - Sosok Puntadewa Tokoh pewayangan Puntadewa melambangkan kebijaksanaan, keadilan, dan ketenangan.
 - Karakteristik relevan bagi konselor: Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
 - Pengendalian diri dari amarah kejujuran dalam berinteraksi.
 - Ketenangan batin menghadapi masalah sulit, erinteraksi.
 - Tanpa fondasi ini, efektivitas bimbingan dan kualitas layanan dapat sangat terganggu.



Self-Efficacy Terapis: Penggerak Efektivitas

1. Lebih dari sekadar keahlian teknis, konselor harus memiliki integritas tinggi.
2. Kematangan moral: Memegang teguh etika profesi, mengutamakan kepentingan konseli.
3. Kematangan spiritual: Kedalaman batin, pemahaman makna hidup, dan empati mendalam terhadap penderitaan orang lain.
4. Membantu konselor menjadi panutan etis dan membangun kepercayaan tulus.



4

Inspirasi dari Kearifan Lokal: Sosok Puntadewa

Tokoh pewayangan Puntadewa melambangkan kebijaksanaan, keadilan, dan ketenangan
Karakteristik relevan bagi konselor:



- Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
- Pengendalian diri dari amarah.



- Kejujuran dalam berinteraksi.
- Ketenangan batin menghadapi masalah sulit.

5

Kematangan Moral dan Spiritual Konselor

- Lebih dari sekadar keahlian teknis, konselor harus memiliki integritas tinggi.
- Kematangan moral: Memegang teguh etika profesi, mengutamakan kepentingan konseli.
- Kematangan spiritual: Kedalaman batin, pemahaman makna hidup, dan empati mendalam terhadap penderitaan orang lain.
- Membantu konselor menjadi panutan etis dan membangun kepercayaan tulus.

Contohnya adalah
Kematangan moral
Prioritaskan
kepentingan konseli.



6

Self-Efficacy Terapis: Penggerak Efektivitas 7



Definisi

Keyakinan konselor terhadap kemampuannya untuk membantu konseli mencapai tujuan.



Pengaruhnya

Pengaruh pada Aliansi Kerja Self-efficacy tinggi meningkatkan kemampuan membangun hubungan yang selaras (kongruen) dengan klien.



Keyakinan

Ini adalah bukti bahwa keyakinan diri profesional langsung memengaruhi dinamika dan keberhasilan proses konseling.

Aliansi Kerja: Kolaborasi Penting 8

Aliansi kerja adalah hubungan kolaborasi antara konselor dan konseli. Ini sangat penting karena menjadi salah satu penentu terbesar keberhasilan konseling. Aliansi yang baik berarti konselor dan konseli memiliki pemahaman yang selaras tentang tujuan, tugas, dan ikatan dalam proses terapi. Keselarasan ini memastikan keduanya berada di "jalur yang sama" agar intervensi bisa berjalan efektif.



E. Tantangan dan Peluang Konselor Abad-21

LATAR BELAKANG

Abad ke-21 adalah era globalisasi dan revolusi teknologi yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Konselor harus siap menghadapi dampak psikologis, sosial, dan emosional yang muncul akibat perkembangan ini.

konselor menghadapi tantangan dan juga peluang yang signifikan sebagai fasilitator perkembangan pribadi, sosial, akademik dan karier. Pada abad 21 konselor akan menghadapi masalah terkait kesehatan mental, krisis identitas, tekanan akademik karier dan juga masalah internal dan eksternal lainnya.



TANTANGAN GLOBAL ABAD-21



Pembangunan

Ilmu Pengetahuan

Kerusakan Alam

meningkatnya pencarian stabilitas politik

Pertumbuhan penduduk yang semakin besar

Telekomunikasi & Transportasi

Tantangan Konselor di Era 4.0



Masyarakat yang sulit berubah

Rendahnya Literasi Digital

Kurangnya Keterampilan Masyarakat

Hilangnya Banyak Pekerjaan

Masalah Keamanan Teknologi

Konselor masa depan merupakan konselor yang harus mempunyai karakteristik antara lain:



- Konselor masa depan adalah konselor yang harus meningkatkan literasi global



- Konselor masa depan tidak bisa lepas dari peran teknologi dalam praktik konseling
- Konselor abad 21 dalam menjalankan profesi konseling harus didasarkan bukti sebagai akuntabilitas

- Konselor abad 21 adalah sebagai Pemimpin Kolaborasi.
- Konselor masa depan Harus Mampu Melakukan Koordinasi, Kolaborasi, dan Manajemen Sumber Daya.

KUALITAS KONSELOR YANG BAIK AKAN MENCIPTAKAN

- Menciptakan lingkungan sekolah yang aman secara psikologis.
- Meningkatkan kepercayaan konseli terhadap layanan konseling.
- Mendorong peserta didik berkembang secara emosional, sosial, & akademik.
- Menjadi teladan dalam pembentukan karakter siswa, karena konselor juga berperan dalam pendidikan nilai dan moral.

TANTANGAN KONSELOR ABAD-21

- Keinginan konselor untuk berubah dan kurangnya ketrampilan yang memadai dalam menghadapi abad-21.
- Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan, software dan hardware komputer,
- Para konselor perlu meningkatkan kemampuan literasi yang meliputi, literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia.

- Munculnya berbagai perubahan perilaku dan gaya hidup
- Konselor dituntut untuk menjadi life long learner, kreatif dan inovatif
- Lembaga pendidikan konselor harus mampu membentuk calon konselor yang memiliki kecakapan diantaranya, flexibility dan adaptability, productivity and accountability, social and cross-cultural skill.

TIGA LITERASI PENTING YANG PERLU DIKUASAI



Literasi Data



Literasi Teknologi



Literasi Manusia



Literasi Data

Kemampuan untuk mengumpulkan, memahami, menganalisis, dan menggunakan data secara bijak untuk mendukung pengambilan keputusan dalam layanan konseling



Literasi Teknologi

Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dalam mendukung proses konseling. Bermanfaat bagi konselor dalam melaksanakan konseling daring



Literasi Manusia

kemampuan dalam berempati, berkomunikasi, dan memahami manusia secara utuh, termasuk aspek emosional, sosial, dan budaya. dan penting bagi konselor untuk: meningkatkan kualitas hubungan konselor-konseli.

PELUANG KONSELOR ABAD-21

- Mengembangkan potensi dan keterampilan pribadi, serta segera menyesuaikan diri dengan era digital dan kemajuan teknologi informasi guna mendorong peningkatan dan profesionalisme dalam bidang bimbingan dan konseling.
- Membuka ruang baru bagi konselor untuk memperluas peran dan pengaruhnya di luar praktik konvensional

- membuka peluang besar bagi layanan bimbingan dan konseling untuk lebih efektif dan efisien melalui media online.
- Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan membuka peluang munculnya konselor buatan yang dapat mendukung pekerjaan konselor manusia
- konselor menyesuaikan metode dan media layanan bimbingan dan konseling agar lebih efektif

Fenomena Perilaku Baru yang Perlu Diantisipasi pada Abad-21

Phubbing (Phone Snubbing)

Altruism Digital

FOMO (Fear of Missing Out)

Cyber Romance

Kecanduan Game Online

Cyber Bullying

Kecanduan Pujian dan Pengakuan (Likes, Share, Love)

Turunnya Moral dan Akhlak

F. Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah

DEFINISI DAN TUJUAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

DEFINISI

Program Bimbingan dan Konseling merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dan terorganisir untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengatasi berbagai masalah dan mengembangkan potensi diri. Program ini bertujuan membantu peserta didik mengenal diri mereka secara optimal serta menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah.

TUJUAN UTAMA

- Membantu peserta didik memahami diri sendiri dengan baik
- Membekali peserta didik dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab
- Memberikan dukungan untuk menghadapi tekanan dan masalah yang muncul dalam proses perkembangan akademik, sosial, dan emosional
- Membantu peserta didik merencanakan masa depan akademik dan karir mereka

PENTINGNYA PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Program Bimbingan dan Konseling sangat penting dalam mendukung kesuksesan peserta didik secara menyeluruh. Berikut alasannya:

- 1 Pengembangan Pribadi dan Sosial**
Program ini membantu peserta didik dalam mengenali diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan memahami hubungan interpersonal yang sehat.
- 2 Penguatan Fungsi Sekolah**
Membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar.
- 3 Pencegahan Masalah**
Melalui pendekatan preventif, program ini membantu mengurangi risiko permasalahan siswa seperti pergaulan bebas, bullying, dan penurunan motivasi belajar.
- 4 Mendukung Pencapaian Akademik**
Bimbingan membantu peserta didik mengembangkan strategi belajar efektif supaya prestasi akademik meningkat.

RUANG LINGKUP PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

Program bimbingan dan konseling di sekolah mencakup empat bidang layanan utama, yang saling terkait dalam mendukung perkembangan peserta didik secara holistik, diantaranya:

- 1 Layanan Pribadi:** Fokus pada pengembangan identitas diri, pemahaman potensi dan kelemahan serta pengambilan keputusan yang tepat.
- 2 Layanan Sosial:** Membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berinteraksi, menghargai perbedaan, dan mengatasi konflik sosial.
- 3 Layanan Belajar:** Membantu siswa mengenali hambatan belajar, membangun kebiasaan belajar positif, dan meningkatkan motivasi belajar sepanjang hayat.
- 4 Layanan Karir:** Pendampingan dalam mengenal minat, bakat, serta merencanakan jalur karir yang realistis dan sesuai dengan kemampuan.

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

Program ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penting agar menghasilkan layanan yang efektif dan bermutu:

- Sistematis dan Terorganisir: Perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan.
- Inklusif dan Tidak Diskriminatif: Layanan harus tersedia bagi seluruh peserta didik tanpa kecuali.
- Berorientasi pada Kebutuhan Individu: Program disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik.
- Profesionalisme Konselor: Tenaga pembimbing harus memiliki kompetensi serta keterampilan yang memadai agar dapat memberikan layanan berkualitas.
- Evaluasi dan Pengembangan Berkala: Dilakukan pengawasan dan penilaian rutin untuk meningkatkan mutu layanan.



PROSES DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM

1

Analisis Kebutuhan dan Permasalahan Peserta Didik:

Mengidentifikasi kebutuhan riil siswa melalui pengumpulan data dan asesmen.

2

Penetapan Tujuan dan Sasaran Program:

Menentukan hasil yang ingin dicapai secara jelas dan spesifik agar terukur.

3

Penyusunan Jenis Kegiatan: Memilih strategi, metode, dan jenis layanan yang paling efektif untuk kebutuhan peserta didik.

4

Pengorganisasian Sumber Daya:

Menetapkan personel, fasilitas, waktu, dan anggaran yang diperlukan.

5

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan:

Menyesuaikan kegiatan dengan kalender pendidikan agar tidak mengganggu proses belajar utama.



IMPLEMENTASI LAYANAN INTI DAN PENDUKUNG

1

Layanan Inti: Kegiatan yang langsung berinteraksi dengan peserta didik, seperti konseling individu, kelompok, bimbingan klasikal, dan pelatihan keterampilan.

2

Layanan Pendukung: Kegiatan administrasi, pengumpulan data, monitoring, dan koordinasi dengan guru, orang tua serta stakeholder lain.

3

Pelayanan Berbasis Teknologi: Pemanfaatan e-counseling, media sosial, dan platform daring untuk menjangkau siswa secara lebih luas dan efektif.

4

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan: Workshop, seminar, serta program pengembangan karakter yang memperkuat aspek personal dan sosial siswa.



EVALUASI DAN SUPERVISI PROGRAM

Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program:

1 Evaluasi Proses: Memeriksa kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah disusun, termasuk kepatuhan jadwal dan pelaksanaan metode.	2 Evaluasi Hasil: Mengukur dampak program terhadap perubahan perilaku, prestasi akademik, serta perkembangan pribadi dan sosial peserta didik.	3 Supervisi: Pengawasan oleh kepala sekolah atau pengelola bimbingan guna memastikan program berjalan optimal dengan mutu tinggi.	4 Feedback Stakeholder: Mengumpulkan pendapat siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk perbaikan program selanjutnya.
--	--	---	---

TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN

Pelaksanaan program tidak lepas dari hambatan, di antaranya:

- **Keterbatasan Sumber Daya:** Anggaran terbatas, kurangnya tenaga profesional, dan fasilitas yang kurang memadai.
- **Kurangnya Pemahaman dan Dukungan:** Minimnya kesadaran dari guru, siswa, atau orang tua akan pentingnya layanan bimbingan.
- **Stigma Negatif:** Anggapan bahwa bimbingan dan konseling hanya untuk siswa bermasalah.
- **Variasi Kebutuhan Individu:** Kesulitan dalam merumuskan program yang efektif menyentuh beragam kebutuhan siswa.
- **Dampak Pandemi:** Harus beradaptasi dengan layanan daring dan kendala interaksi tatap muka.

STRATEGI DAN INOVASI UNTUK MENGATASI HAMBATAN

Beberapa strategi kunci untuk mengoptimalkan program:

- **Peningkatan Kompetensi Konselor:** Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar konselor lebih profesional dan responsif.
- **Kolaborasi dan Sosialisasi:** Melibatkan seluruh stakeholder, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- **Pemanfaatan Teknologi Digital:** Mengembangkan layanan daring, seperti e-counseling dan platform pembelajaran online untuk memperluas akses.
- **Pendekatan Personalisasi:** Menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik setiap tingkatan dan karakteristik peserta didik.
- **Pengelolaan Program yang Fleksibel:** Mengadaptasi perubahan situasi dengan cepat untuk menjaga kontinuitas layanan.

PENDAHULUAN

- BK membantu perkembangan siswa secara menyeluruh: akademik, emosional, sosial, dan karier.
- Tantangan kehidupan yang kompleks menuntut layanan BK yang lebih kuat dan strategis.
- Program BK dirancang sistematis berbasis asesmen.

TUJUAN PROGRAM BK

Tujuan utama program BK adalah membantu siswa:

- Mengembangkan potensi diri secara maksimal,
- Menyelesaikan masalah pribadi, sosial, akademik, dan karier,
- Menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan.

KOMPONEN PROGRAM BK (PERMENDIKBUD NO. 111 TAHUN 2014)

- Rasional program
- Visi dan misi
- Deskripsi kebutuhan siswa
- Tujuan dan sasaran
- Komponen layanan dan bidang layanan
- Rencana kerja (action plan)
- Evaluasi dan tindak lanjut
- Pengembangan topik layanan
- Anggaran pelaksanaan



JENIS LAYANAN BK DI SEKOLAH



- **Layanan Orientasi**

Membantu siswa baru dan orang tua mengenal lingkungan sekolah agar lebih mudah beradaptasi.

- **Layanan Informasi**

Memberikan informasi penting (pendidikan, karier, dll.) yang membantu siswa dalam mengambil keputusan.

- **Layanan Penempatan dan Penyaluran**

Menempatkan siswa di kelas, jurusan, atau program yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.



JENIS LAYANAN BK DI SEKOLAH



- **Layanan Pembelajaran**

Membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan mengatasi kesulitan belajar.

- **Layanan Bimbingan Kelompok**

Memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi bersama dalam kelompok guna pengembangan diri.

- **Layanan Konseling Kelompok**

Proses konseling dalam kelompok yang memungkinkan siswa saling berbagi dan mencari solusi bersama.



JENIS LAYANAN BK DI SEKOLAH



- **Layanan Konseling Perorangan**

Sesi tatap muka individu antara siswa dan konselor untuk membahas masalah pribadi secara mendalam.

- **Layanan Konsultasi**

Konselor membantu klien (guru/orang tua) menangani masalah siswa yang melibatkan pihak ketiga.

- **Layanan Mediasi**

Fasilitasi penyelesaian konflik antara dua pihak agar hubungan tetap harmonis dan tidak bermusuhan.

- **Layanan Advokasi**

Melindungi dan memperjuangkan hak siswa agar tidak diabaikan atau dilanggar.





PENYUSUNAN PROGRAM BK



- Analisis Kebutuhan

Tahap awal untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan siswa berdasarkan data seperti angket, observasi, dan wawancara. Hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan program BK yang tepat sasaran.

- Perencanaan

Menyusun rencana program tahunan atau semesteran yang mencakup tujuan, sasaran, jenis layanan, jadwal, dan metode pelaksanaan. Disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

- Pelaksanaan

Menjalankan program sesuai jadwal dalam kalender akademik. Layanan dilaksanakan melalui kegiatan seperti bimbingan kelompok, konseling individu, dan penyuluhan.



PENYUSUNAN PROGRAM BK



- Evaluasi

Menilai apakah program berjalan efektif dan efisien. Dilakukan untuk melihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta dampaknya terhadap siswa.

- Pelaporan

Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan hasil program. Laporan digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada kepala sekolah dan bahan evaluasi ke depan.

- Tindak Lanjut

Melakukan perbaikan atau pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi. Tujuannya agar program BK terus meningkat dan sesuai dengan kebutuhan siswa.



G. Implikasi Profesionalisasi BK di Sekolah

1. Pengertian Profesionalisasi BK]

A. Definisi Profesionalisasi dalam Konteks BK

Profesionalisasi BK adalah suatu proses peningkatan mutu dan pengakuan terhadap profesi bimbingan dan konseling agar diakui sebagai profesi yang memiliki standar kompetensi, etika kerja, dan tanggung jawab profesional yang tinggi.

| 01

B. Ciri-ciri Profesionalisasi konselor di Sekolah

01. Kompeten secara Akademik dan Praktis

Memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) dan profesi konseling serta memahami teori dan praktik konseling.

02. Menjunjung Kode Etik Profesi

Mentaati aturan moral dan etik konselor seperti menjaga kerahasiaan, netralitas, dan penghargaan terhadap klien.

03. Berorientasi pada Layanan Siswa

Fokus pada pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik secara menyeluruh (akademik, sosial, pribadi, karier).

| 02

B. Ciri-ciri Profesionalisa konselor di Sekolah

04. Melaksanakan Tugas Berdasarkan Standar

Operasional

Memberikan layanan BK yang terstruktur: layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem

05. Berkomitmen terhadap Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan

Aktif dalam mengikuti pelatihan, seminar, sertifikasi, dan pengembangan diri.

06. Mampu Bekerja Sama dengan Stakeholder

Sekolah

Membangun sinergi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan lembaga eksternal.

03

C. STANDAR KOMPETENSI KONSELOR (BERDASARKAN ABKIN & PERMENDIKNAS NO. 27/2008)

Standar kompetensi konselor profesional di sekolah sebagaimana dirumuskan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan Permendiknas No. 27 Tahun 2008 menetapkan empat domain kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor sekolah. Kompetensi ini tidak hanya menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling, tetapi juga menjadi standar dalam penilaian profesionalisme dan efektivitas kinerja konselor di institusi pendidikan.



04

2. Peran Konselor Sekolah dalam Konteks Profesional

1. Pendidik: Ajar life skills, nilai, karakter.
2. Fasilitator: Fasilitasi pertumbuhan siswa.
3. Advokat: Perjuangkan hak dan kebutuhan siswa.
4. Konsultan: Bantu guru & orang tua pahami siswa.

05

Perbedaan antara Peran Guru dan Konselor

Profesional

ASPEK	GURU	KONSELOR PROFESIONAL
Fokus utama	Menyampaikan materi pelajaran, membimbing akademik	Memberikan layanan bimbingan dan konseling (pribadi, sosial, akademik, karir)
hubungan dengan siswa	Guru bersifat instruksional dan penilaian	Konselor bersifat suportif dan non-penilaian
Waktu interaksi	Terjadwal dalam jam pelajaran	Flexibel sesuai kebutuhan siswa
Evaluasi siswa	Berdasarkan hasil belajar	Berdasarkan kebutuhan perkembangan siswa
Latar belakang pendidikan	S1 Pendidikan bidang mata pelajaran	S1 + Profesi BK (Konseling)
Kegiatan utama	Mengajar dan menilai	Konseling, asesmen, perencanaan layanan BK



06

3. Implikasi Profesionalisasi Terhadap Layanan BK di Sekolah

Profesionalisasi konselor membawa dampak besar terhadap peningkatan kualitas layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Layanan BK menjadi lebih sistematis dan berbasis data, dirancang berdasarkan analisis kebutuhan siswa serta disesuaikan dengan visi dan kurikulum sekolah. Konselor profesional menerapkan pendekatan ilmiah seperti CBT, REBT, atau konseling naratif, serta mampu menyesuaikan pendekatan sesuai kondisi siswa. Fokus layanan pun bersifat holistik, tidak hanya pada akademik, tetapi juga perkembangan pribadi, sosial, dan karier siswa. Etika dan tanggung jawab profesional menjadi landasan utama dalam pelaksanaan layanan, menciptakan hubungan yang sehat dan aman antara konselor dan siswa.

07

3. Implikasi Profesionalisasi Terhadap Layanan BK di Sekolah

Sebagai indikator profesionalisme, layanan BK juga harus berbasis data. Konselor melakukan identifikasi kebutuhan melalui asesmen, observasi, dan wawancara, lalu menyusun program berdasarkan temuan tersebut. Setiap program dilengkapi dengan evaluasi dan dokumentasi yang rapi guna perbaikan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, layanan konseling terbagi menjadi tiga bentuk utama: konseling individual, kelompok, dan klasikal. Konseling individual fokus pada masalah pribadi siswa secara mendalam, konseling kelompok bertujuan mengembangkan keterampilan sosial dalam suasana suportif, sementara bimbingan klasikal menyangkut seluruh siswa dalam kelas untuk memberikan pendidikan pencegahan dan pengembangan diri. Ketiganya dijalankan secara profesional menggunakan teknik, media, dan pendekatan yang sesuai serta terukur efektivitasnya.



08

Contoh konkret implikasi profesionalisasi BK di sekolah:



1. Program BK Terstruktur dan Tepat Sasaran. Seorang konselor melakukan survei dan asesmen terhadap siswa kelas XII dan menemukan bahwa banyak dari mereka mengalami kecemasan menghadapi ujian akhir.
2. Penanganan Kasus Secara Profesional dan Etis. Seorang siswa mengalami perundungan di sekolah. Konselor yang profesional menangani kasus ini secara rahasia, menyusun kontrak konseling dengan siswa, dan memberikan intervensi psikologis sesuai kebutuhan.
3. Responsif terhadap Isu Mutakhir. Konselor menyadari adanya tren kecanduan gadget di

09

4. Kolaborasi Konselor dengan Pihak Sekolah dan Orang Tua

Kolaborasi antara konselor sekolah dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah dan orang tua merupakan pilar penting dalam menunjang keberhasilan layanan Bimbingan dan Konseling (BK). Konselor tidak dapat bekerja secara terpisah; keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu membangun komunikasi dan kerja sama yang efektif dengan guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, tenaga kependidikan, serta orang tua atau wali siswa. Dalam konteks kerja sama antar guru dan wali kelas, konselor berperan sebagai mitra strategis dalam mengidentifikasi permasalahan siswa, baik yang berkaitan dengan prestasi belajar, perilaku, maupun aspek psikososial. Konselor dapat memberikan masukan dan strategi penanganan berdasarkan asesmen psikologis dan observasi perilaku siswa, sementara guru dan wali kelas memberikan data akademik dan kedisiplinan yang terjadi di kelas. Kolaborasi ini mempercepat intervensi dan menghasilkan pendekatan yang menyeluruh terhadap kebutuhan siswa.

10



Istilah Profesionalisasi



Profesionalisasi adalah proses meningkatkan kualifikasi dan kemampuan seseorang agar sesuai dengan standar dalam profesinya. Hal ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan, baik sebelum bekerja (pra-jabatan) maupun selama bekerja (dalam jabatan).

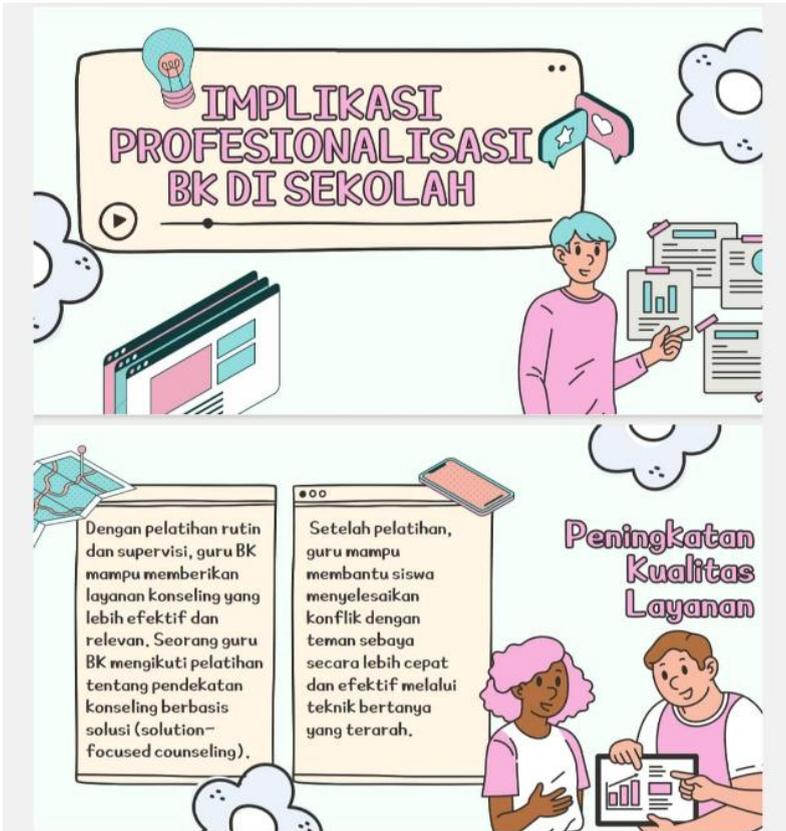
Profesionalisasi bertujuan untuk memperbaiki kualitas kerja, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap profesi tersebut.

Kompetensi Profesional Guru BK dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling



Kompetensi profesional guru BK mencakup kemampuan asesmen, perancangan program bimbingan, serta penguasaan teori dan etika profesi. Profesionalisasi dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, supervisi, dan pengalaman langsung, yang mendukung pengembangan aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dengan kompetensi ini, guru BK dapat memberikan layanan yang efektif, relevan, dan berbasis kebutuhan siswa, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai pendidik profesional yang berkontribusi dalam mencapai tujuan pendidikan.





Pengelolaan Berbasis Teknologi

Guru BK dapat menggunakan teknologi untuk mengelola data siswa, menyusun program, dan mengevaluasi layanan dengan lebih efisien. Guru BK menggunakan aplikasi berbasis web untuk mencatat data konseling siswa.

Aplikasi ini membantu guru memantau perkembangan siswa secara real-time, mengelompokkan masalah mereka, dan mengirim laporan hasil konseling langsung kepada kepala sekolah.



Workshop dan pelatihan membantu guru BK memahami tanggung jawab dan meningkatkan transparansi layanan. Guru BK mengikuti workshop tentang akuntabilitas program BK, di mana mereka belajar membuat laporan tahunan yang transparan.

Laporan ini berisi data layanan konseling, tingkat keberhasilan program, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Akuntabilitas dan Evaluasi



H. Kode Etik Bimbingan dan Konseling

PENGERTIAN KODE ETIK

Kode etik adalah kumpulan aturan tertulis yang disusun secara teratur berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku, baik di masyarakat maupun dalam lingkungan profesi, yang berfungsi sebagai panduan perilaku bagi para anggotanya (Safitri et al., 2025). Kode etik bimbingan dan konseling adalah aturan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para konselor. Aturan ini membantu mereka bertindak dengan benar saat bekerja dan juga dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan nilai dan budaya yang ada di Indonesia berdasarkan ABKIN, 2018 dalam (Megarizky Hotmauli, 2021).

TUJUAN & FUNGSI KODE ETIK BK



Kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi konselor untuk menentukan sikap dan tindakan yang tepat, serta batasan yang harus dijaga, supaya proses bimbingan dan konseling berjalan dengan baik, profesional, dan bertanggung jawab (Safitri et al., 2025).

TUJUAN & FUNGSI KODE ETIK BK



**MEMBANTU MENYELESAIKAN
MASALAH KONSELI**



**MELINDUNGI KONSELOR
DAN KONSELI**

Lebih dari sekadar kumpulan aturan, kode etik juga berfungsi untuk mengatur bagaimana seorang profesional seharusnya bertindak dalam pekerjaannya, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga nama baik, kehormatan, dan nilai-nilai luhur dari profesi itu sendiri.

PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK KONSELOR

honest

seorang konselor harus menghargai martabat, kejujuran, dan keyakinan konseli.



Konselor juga harus mengutamakan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi, memperlakukan semua konseli secara adil tanpa membedakan suku, ras, agama, atau status sosial.

Selain itu, konselor harus mampu mengendalikan diri dengan menyadari dan mengatasi kekurangan atau prasangka pribadi yang bisa menurunkan kualitas layanan atau merugikan konseli.

ISI POKOK KODE ETIK KONSELOR (ABKIN)



Menurut ABKIN (2006) dalam (Daniati et al., 2025), kode etik dibuat untuk melindungi para konselor dari campur tangan pihak luar, termasuk pemerintah, mencegah pelanggaran aturan internasional dalam pekerjaan mereka, serta memberikan rasa aman dan perlindungan saat mereka menjalankan tugas profesionalnya.

ISI PBABKIN NO. 10 TAHUN 2006:

1 Kualifikasi konselor dalam hal nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan

- Konselor harus selalu mengutamakan kualitas kerja terbaik dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi, seperti uang, keuntungan, atau popularitas.

3 Hubungan dengan Pemberian pada Pelayanan

- Konselor wajib membantu konseli selama hubungan antara keduanya masih berjalan dan ada kesempatan untuk melakukannya. Artinya, selama konseli masih ingin atau butuh bantuan, konselor harus berusaha memberikan layanan yang terbaik.

5 Konsultasi dengan Rekan Sejawat

- Konselor boleh bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman sesama konselor atau ahli lain yang juga paham tentang bimbingan dan konseling.

2 Penyimpanan dan Penggunaan Informasi

- Semua catatan tentang konseli, seperti hasil wawancara, tes, surat, rekaman, dan data lainnya, adalah rahasia dan hanya boleh dipakai untuk kepentingan konseli.

4 Hubungan dengan Konseli

- Konselor harus menjelaskan kepada konseli tentang sifat hubungan profesional antara mereka dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam proses konseling.

6 Alih Tangan Kasus

- memindahkan penanganan suatu kasus atau masalah konseli dari satu konselor ke konselor lain, atau dari guru BK ke pihak yang lebih berwenang atau lebih kompeten sesuai kebutuhan kasus tersebut.

CONTOH PELANGGARAN KODE ETIK

a. Terhadap Konseling

 Membocorkan rahasia konseli kepada orang yang tidak berkepentingan.

 Melakukan tindakan tidak sopan atau tidak pantas, seperti pelecehan seksual, penghinaan terhadap agama, atau sikap rasis.

 Melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaan profesional, seperti dalam prosedur, teknik, evaluasi, atau tindak lanjut.

CONTOH PELANGGARAN KODE ETIK

b. Terhadap Organisasi Profesi

 Tidak mematuhi aturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi.

 Mencemarkan nama baik profesi dengan menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

CONTOH PELANGGARAN KODE ETIK

c. Terhadap Rekan Sejawat dan Profesi Lain Yang Terkait

 Bertindak tidak profesional terhadap rekan, seperti menghina, menolak bekerja sama, atau bersikap arogan.

 Memberikan rujukan kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan permasalahan konseli.

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

1. **Teguran Lisan:** Jika pelanggarannya tergolong ringan, konselor biasanya hanya diberi peringatan secara langsung atau lisan sebagai langkah awal.
2. **Peringatan Tertulis:** Jika pelanggaran cukup serius atau konselor tidak mengindahkan teguran pertama, maka akan diberikan surat peringatan resmi.
3. **Pencabutan Keanggotaan ABKIN:** Bila pelanggaran melanggar prinsip etika secara serius, organisasi profesi seperti ABKIN bisa mengeluarkan konselor dari keanggotaan.
4. **Pencabutan Izin Praktik:** Bagi konselor yang memiliki izin praktik mandiri, izinnya bisa dicabut jika terbukti melanggar kode etik profesi.
5. **Proses Hukum:** Jika pelanggaran menyangkut tindakan pidana, seperti pelecehan atau kekerasan, maka masalah akan diteruskan kepada pihak kepolisian atau lembaga hukum terkait.

CARA MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK



Pelatihan & Pendidikan

Konselor harus mendapatkan pelatihan menyeluruh tentang etika konseling, termasuk kerahasiaan, kompetensi, integritas, keadilan, dan otonomi konseli.



Memahami Kode Etik

Konselor wajib mempelajari dan mematuhi kode etik profesional yang berlaku, seperti pedoman dari Asosiasi Konselor Indonesia (AKI) dan Persatuan Guru Bimbingan dan Konseling (PGBK).



Supervisi & Mentoring

Supervisor yang berpengalaman harus memantau dan membimbing konselor untuk mengenali serta mengatasi masalah etika. Supervisi membantu peningkatan keterampilan dan pengembangan profesional konselor.

LATAR BELAKANG

Bimbingan dan Konseling adalah layanan penting dalam pendidikan untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Dalam pelaksanaannya, peran konselor sangat penting sebagai pendamping yang memahami kondisi siswa secara menyeluruh. Untuk menjamin profesionalitas dan integritas layanan, diperlukan pedoman berupa kode etik.

APA ITU KODE ETIK BK?



Kode etik BK merupakan seperangkat prinsip dan aturan moral yang membimbing konselor dalam menjalankan tugasnya. Kode etik tidak hanya berisi larangan dan kewajiban, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan profesionalisme. Seorang konselor yang berpegang pada kode etik akan lebih mampu menjaga hubungan yang sehat dan aman dengan konselinya.

TUJUAN KODE ETIK

Tujuan utama dari kode etik adalah menjadi pedoman bagi konselor dalam menjaga kualitas layanan. Kode etik juga melindungi konselor dari intervensi yang tidak perlu, dan membantu menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap profesi ini. Tanpa kode etik, hubungan konseling bisa kehilangan arah dan berisiko menimbulkan kerugian pada pihak konseli.

FUNGSI KODE ETIK

Kode etik BK memiliki fungsi penting sebagai panduan moral dan profesional dalam praktik konseling. Ia membantu konselor bertindak sesuai etika, menjaga kualitas layanan, dan melindungi semua pihak yang terlibat. Fungsi kode etik antara lain:

- Memberikan pedoman dalam bersikap dan bertindak profesional
- Menjaga martabat serta kepercayaan terhadap profesi konselor
- Melindungi hak konseli dan konselor dari penyimpangan perilaku
- Menjadi dasar dalam menghadapi dilema etis atau konflik nilai
- Alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan konseling

KODE ETIK DAN PROFESIONALISME

Kode etik dan profesionalisme adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang konselor yang profesional harus menjunjung tinggi integritas, bersikap jujur, menghormati konseli, dan menjaga kerahasiaan. Ia juga wajib terus belajar dan memperbarui kemampuan agar bisa memberikan layanan terbaik. Kode etik menjadi dasar dari semua sikap tersebut.



DASAR HUKUM DAN LANDASAN KODE ETIK

- Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005
- Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang BK
- Kode Etik ABKIN
- Prinsip etika universal (moral, sosial, budaya)



PRINSIP-PRINSIP DASAR KODE ETIK

Beberapa prinsip penting dalam kode etik konselor antara lain: menjaga kerahasiaan konseli, bertanggung jawab sesuai kompetensi, bersikap adil tanpa diskriminasi, menghargai martabat manusia, serta tidak memaksakan kehendak pada konseli. Semua prinsip ini bertujuan melindungi hak konseli dan menjaga kualitas hubungan konseling.

TANTANGAN DI LAPANGAN

tidak semua konselor memahami dan menerapkan kode etik secara maksimal. Masih banyak sekolah yang menugaskan guru non-BK sebagai konselor tanpa pelatihan khusus. Ditambah lagi, lemahnya sistem supervisi dan kurangnya pelatihan etika menyebabkan pelanggaran terjadi tanpa disadari, seperti membuka rahasia konseli atau mempermalukan siswa.

BIMBINGAN DAN KONSELING

PROFESIONALISASI BK

UNTUK MAHASISWA

Penulis : Renatha Ernawati



ukipressdigital.uki.ac.id



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-6737-62-8



9

786238

737628